

2
0
2
4

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Unit Kerja Wakil Menteri BUMN



| bumn.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 khususnya pada Wakil Menteri BUMN Kementerian BUMN.

Penyusunan LKIP ini juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur berkenaan dengan pelaporan kinerja instansi pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja di lingkungan Wakil Menteri BUMN. Semoga hasil capaian atas target selama tahun 2024 ini dapat menjadi faktor pemacu untuk melakukan perbaikan kinerja di unit kerja Wakil Menteri BUMN.

LKIP Wakil Menteri BUMN tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perbaikan pengelolaan BUMN sehingga BUMN mampu berkontribusi maksimal dalam pembangunan nasional.

Jakarta, 31 Januari 2025

Wakil Menteri BUMN



Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Menteri BUMN



Dony Oskaria

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Menteri BUMN	2
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Mandat dan Peran Strategis	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	30
2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024	30
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (PK 2024).....	33
2.3 Tantangan yang Dihadapi.....	35
BAB III EVALUASI CAPAIAN KINERJA.....	37
3.1 Evaluasi Kinerja 2024	37
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Output	41
3.3 Pemanfaatan Anggaran.....	110
3.4 Tugas Khusus.....	112
3.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya	112
BAB IV PROGRAM STRATEGIS NASIONAL.....	114
4.1 Program Strategis.....	114
4.2 Proyek Strategis Lainnya	220
BAB V PENUTUP.....	230
5.1 Kesimpulan.....	230
5.2 Saran dan Perbaikan	231
LAMPIRAN.....	232

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi nasional lain yaitu swasta dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk: (i) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (ii) mengejar keuntungan; (iii) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (iv) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (v) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dalam rangka mendukung penguatan fokus bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan, pembangunan ekosistem nasional melalui peningkatan sinergi dengan BUMN, swasta dan asing, serta integrasi BUMN yang didasarkan pada inisiatif penciptaan nilai (*value creation*). Kementerian BUMN melalui Wakil Menteri BUMN memiliki peran penting untuk memastikan seluruh tujuan tersebut dapat tercapai.

Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan untuk periode Tahun 2024, yang terdiri dari 15 (lima belas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian kinerja Wakil Menteri BUMN. Program Pembinaan BUMN secara intensif dijalankan oleh segenap unsur di lingkup Keasdepan untuk memastikan keseluruhan target tercapai sesuai dengan rencana waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi seperti yang telah diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015, Kementerian BUMN menyusun program-program strategis yang

akan menjadi target pengukuran akuntabilitas kinerja yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kementerian BUMN.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan masing-masing instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing instansi pemerintah. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai salah satu komponen SAKIP, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat dijelaskan sebagai dokumen yang berisi perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dokumen tersebut disusun dan disampaikan secara sistematis. Wakil Menteri BUMN pada akhir periode tahunan melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), kemudian berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi tersebut kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi guna perbaikan kinerja Pembinaan BUMN kedepan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Menteri BUMN

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Wakil Menteri BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara. Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian BUMN.

a. Tugas Pokok Wakil Menteri BUMN

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, disebutkan bahwa tugas pokok Wakil Menteri membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian BUMN dengan ruang lingkup bidang tugas meliputi:

- a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian BUMN; dan
- b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan Kementerian BUMN.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Menteri juga melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN yaitu melaksanakan tugas perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Industri dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri.

b. Fungsi

Wakil Menteri BUMN bertanggung jawab untuk sektor industri yang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor industri;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategi, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor industri;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor industri; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Wakil Menteri BUMN bertanggung jawab untuk sektor jasa yang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi,

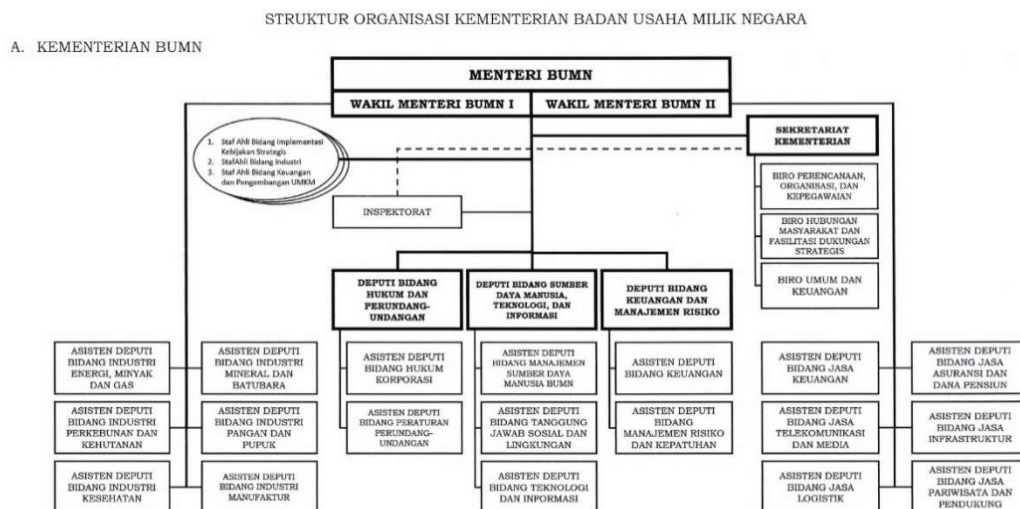
- penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, struktur organisasi Wakil Menteri BUMN sebagai berikut:

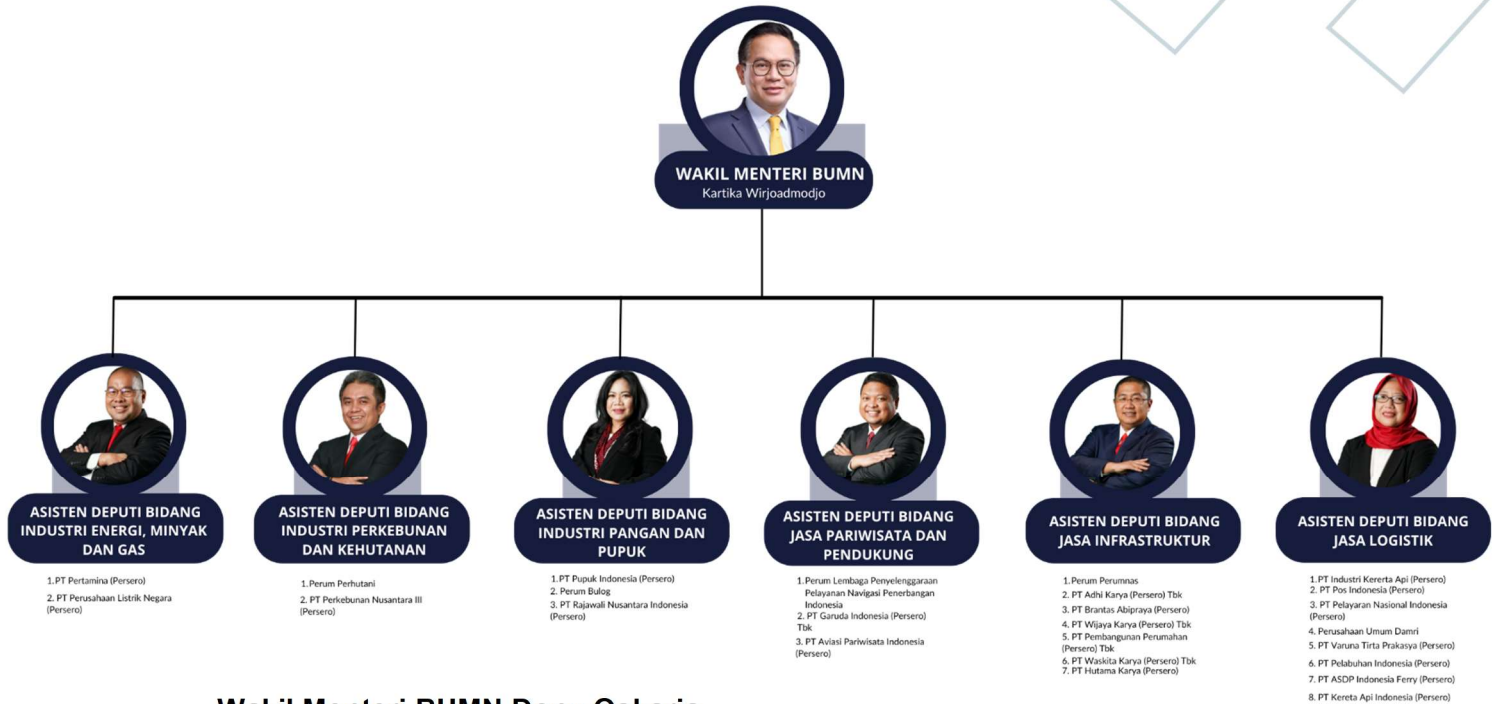
a. Struktur Organisasi Wakil Menteri BUMN

Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN tentang Pelaksanaan Tugas Wakil Menteri dalam Rangka Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, struktur organisasi Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

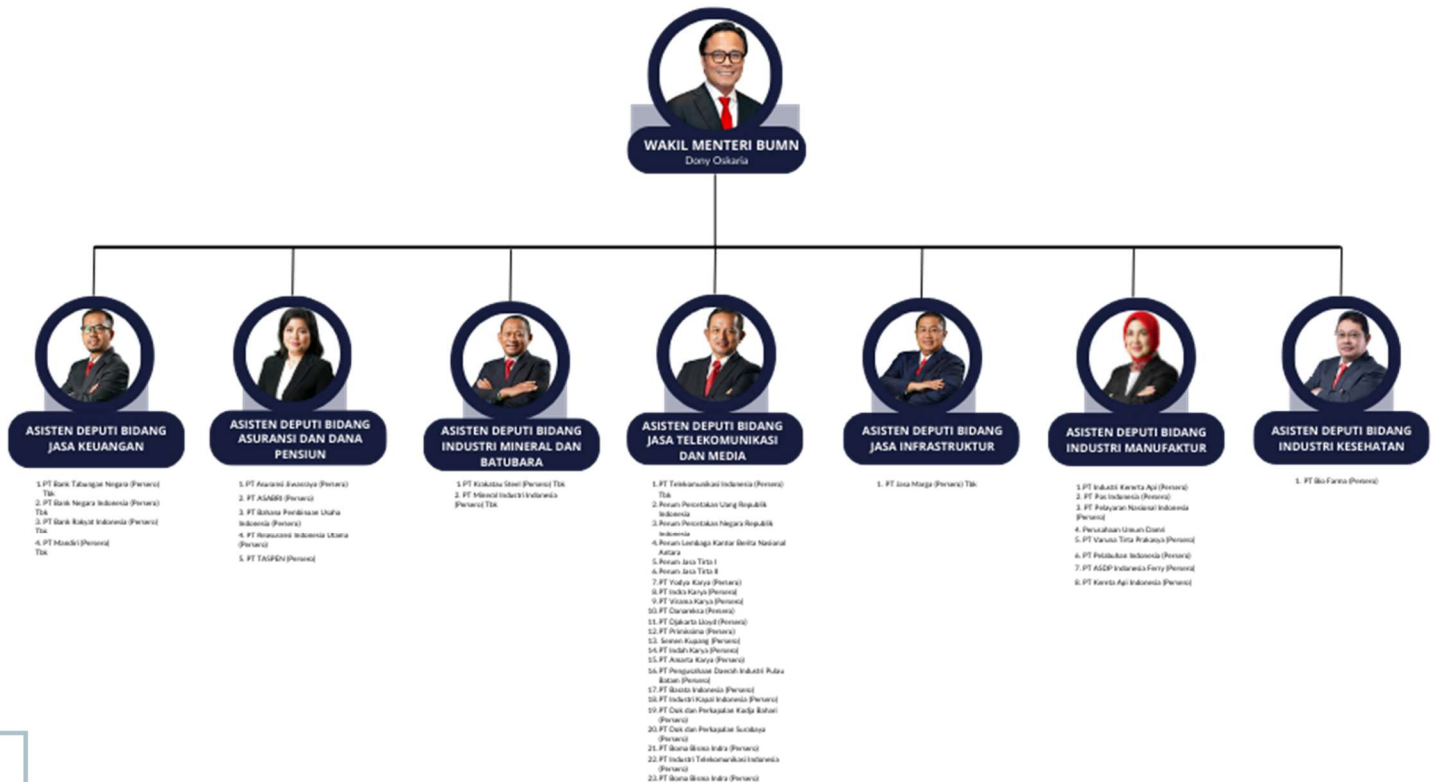


Adapun sesuai Instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor INS-1/MBU/08/2022 tentang Pelaksanaan Tugas Wakil Menteri Dalam Rangka Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, struktur organisasi dan pembagian BUMN yang menjadi tugas Unit Kerja Eselon II di bawah Wakil Menteri BUMN hingga Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

Wakil Menteri Kartika Wirjoatmodjo



Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria



Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pembinaan BUMN tersebut di atas, BUMN dan eks BUMN binaan Wakil menteri BUMN terdiri atas:

Tabel 1. 1 BUMN dan Anak Perusahaan Eks BUMN Binaan Keasdepan Industri Emigas

Bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas	
PT Pertamina (Persero)	Deskripsi Singkat
	PT Pertamina (Persero) menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Bisnis sektor hulu Pertamina yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia dan luar negeri meliputi kegiatan di bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut, Pertamina juga menekuni bisnis jasa teknologi dan pengeboran, serta aktivitas lainnya dalam rangka mengembangkan sumber energi yang berkelanjutan atau <i>sustainable energy</i>. Dalam pengusahaan migas baik di dalam dan luar negeri, Pertamina beroperasi baik secara independen maupun melalui beberapa pola kerja sama dengan mitra kerja.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Deskripsi Singkat
	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Namun, sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.
PT Energy Management Indonesia	Deskripsi Singkat
	Per 12 Oktober 2006 berdasarkan rencana pengembangan bisnis perusahaan menuju usaha efisiensi energi, konservasi energi, energi baru terbarukan serta konservasi sumber daya alam, PT. Koneba (Persero) berubah menjadi PT. Energy Management Indonesia (Persero).
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Deskripsi Singkat

	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) adalah induk perusahaan dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang pengelolaan, distribusi, dan niaga gas bumi di Indonesia. Didirikan pada tahun 1965, PGN telah berkembang menjadi perusahaan infrastruktur dan layanan gas terintegrasi yang mendukung ketahanan energi nasional. Sejak tahun 2003, PGN tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PGAS. Sebagai Subholding Gas, PGN bertugas mengelola portofolio bisnis gas bumi Pertamina Group, termasuk transmisi, distribusi, pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga, serta niaga gas industri dan komersial, baik melalui jaringan pipa maupun moda non-pipa (CNG, LNG).
---	--

Tabel 1. 2 BUMN dan Anak Perusahaan Eks BUMN Binaan Keasdepan Industri Minerba

Bidang Industri Mineral dan Batubara	
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	Deskripsi Singkat
	PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID merupakan Holding Industri Pertambangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan, dan merupakan entitas yang berdiri sendiri pasca split off dari PT Indonesia Asahan Aluminium pada 21 Maret 2023. Pembentukan MIND ID diharapkan akan menghasilkan perusahaan BUMN di bidang pertambangan yang besar, kuat, dan lincah. Guna mencapai tujuan tersebut, sebagai Strategic Holding perlu melakukan Good Corporate Governance antara lain dengan menyusun kebijakan-kebijakan strategis di bidang Bisnis, Keuangan, Investasi, Proyek Strategis, Risk Management, Portofolio Management, dan SDM yang jelas dan teratur sehingga dapat diimplementasikan secara tertib, disiplin, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Bidang Industri Mineral dan Batubara	
PT Indonesia Asahan Aluminium	Deskripsi Singkat
	PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha peleburan dan pengolahan aluminium yang berkedudukan di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara dan didirikan pada tanggal 6 Januari 1976 sebagai perusahaan patungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang. Pada awalnya kepemilikan saham Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang adalah sebesar 10% dan 90%. Pada 19 Desember 2013, Pemerintah Republik Indonesia resmi mengakuisisi 100% saham INALUM dari Pemerintah Jepang dan INALUM secara resmi menjadi BUMN ke-141 pada 21 April 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014. Pada November 2017, Holding Industri Pertambangan resmi dibentuk dengan menggunakan entitas PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai induk perusahaan yang memiliki mayoritas saham pada 3 perusahaan industri tambang terbesar di Indonesia, yaitu PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk. Sejak tahun 2019, Holding Industri Pertambangan bertransformasi menjadi MIND ID (Mining Industry Indonesia) untuk membedakan fungsi INALUM sebagai Operasional pabrik peleburan aluminium dan fungsi Holding PT Indonesia Asahan Aluminium. Pada 21 Maret 2023, PT Indonesia Asahan Aluminium melakukan aksi korporasi split off untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan sehingga dibentuk PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebagai Holding Pertambangan dan PT Indonesia Asahan Aluminium kembali hanya menjalankan usaha peleburan aluminium.
PT Timah Tbk	Deskripsi Singkat
	PT TIMAH merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan / pemurnian, hilirisasi produk timah, hingga pemasaran. Kegiatan utama perusahaan adalah melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang penambangan non-timah, pengadaan barang, pemasaran timah, galangan kapal, jasa kesehatan, properti, agrobisnis, dan hilirisasi produk timah.
PT Antam Tbk	Deskripsi Singkat

Bidang Industri Mineral dan Batubara	
	Pada tahun 2017, PT ANTAM (Persero) Tbk berganti nama menjadi PT ANTAM Tbk sejalan dengan terbentuknya Holding Industri Pertambangan dan beralihnya saham negara pada PT ANTAM Tbk kepada PT Inalum (Persero). Kegiatan usaha PT ANTAM Tbk adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, dan menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian.
PT Bukit Asam Tbk	Deskripsi Singkat
	PT Bukit Asam Tbk (PTBA) didirikan pada tanggal 2 Maret 1981, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1980 dengan Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 yang telah diubah dengan Akta Notaris No.5 tanggal 6 Maret 1984 dan No.51 tanggal 29 Mei 1985 dari Notaris yang sama. PTBA resmi mencatatkan diri sebagai perusahaan public di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2002. Selanjutnya pada tahun 2017, PTBA resmi menjadi anggota Holding Industri Pertambangan dibawah PT Inalum (Persero). PTBA berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kegiatan usaha PT Bukit Asam Tbk adalah dalam bidang pengembangan bahan-bahan galian, terutama pertambangan batubara.
PT Freeport Indonesia	Deskripsi Singkat
	PT Freeport Indonesia bergerak di bidang eksplorasi, tambang dan pengolahan bijih tembaga, emas dan perak di Papua. Tambang PT Freeport Indonesia di kawasan mineral Grasberg, Papua, menjadi salah satu wilayah cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia. MIND ID memiliki 51,23% kepemilikan saham atas PT Freeport Indonesia.
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Deskripsi Singkat
	Pada awalnya nama dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yaitu Trikora Iron Steel Project yang dinamai oleh Presiden Soekarno tahun 1962 dan berdiri sebagai Perseroan Terbatas di tahun 1970. Selama 10 tahun berjalan perusahaan menambah fasilitas produksi yaitu Sponge Iron, Steel Billet, Wire Rod dan infrastruktur pendukung seperti power plant, water treatment plant, ports and sistem telekomunikasi. Pada tahun 1989, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ditetapkan sebagai salah satu perusahaan industri strategis di Indonesia.

Tabel 1. 3 BUMN dan Anak Perusahaan Eks BUMN Binaan Keasdepan Industri Kesehatan

Bidang Industri Kesehatan	
PT Biofarma (Persero)	Deskripsi Singkat
	PT Bio Farma (Persero), selanjutnya disebut Bio Farma, merupakan BUMN yang bergerak di bidang usaha produksi vaksin dan telah berdiri sejak tanggal 6 Agustus 1890. Pada awalnya Bio Farma berdiri dengan nama “Parc Vaccinogene” di RS Militer Weltevreden, Batavia, yang kemudian berubah menjadi RSPAD Gatot Subroto. Pada awal kemerdekaan, Bio Farma merupakan salah satu jawatan di Kementerian Kesehatan, selanjutnya menjadi Perusahaan dengan nama PN Pasteur di periode 1950-1960 hingga menjadi PT Bio Farma (Persero) pada 1997. Kepemilikan saham Bio Farma 100% dimiliki oleh Pemerintah RI. Bio Farma resmi menjadi Induk Holding Farmasi berdasarkan PP Nomor 76 Tahun 2019 dengan anggota 2 Eks BUMN yakni: PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Selanjutnya, pada tahun 2022 berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2022, PT Industri Nuklir Indonesia juga bergabung dalam Holding Farmasi.
PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Deskripsi Singkat
	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), selanjutnya disebut INUKI yang sebelumnya bernama PT Batan Teknologi (Persero), merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam industri berbasis teknologi nuklir. Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Pemerintah dalam Persero, dengan nama PT Batan Teknologi (Persero). Tahun 2014, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No AHU-11565.AH.01.02 Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014, perusahaan yang sebelumnya bernama PT Batan Teknologi (Persero) berganti nama menjadi PT Industri Nuklir Indonesia (Persero). Tujuan perubahan nama tersebut adalah untuk meningkatkan daya saing dengan mempertegas <i>branding</i> perusahaan sebagai industri nuklir.
PT Indofarma Tbk	Deskripsi Singkat

Bidang Industri Kesehatan	
	PT Indofarma Tbk, selanjutnya disebut Indofarma, berdiri pada tahun 1918 dan pada awalnya merupakan sebuah unit produksi pada Rumah Sakit milik Pemerintah Hindia Belanda yang memproduksi salep dan kasa pembalut. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Indofarma diambil alih oleh Pemerintah RI dibawah pengelolaan Departemen Kesehatan. Pada tahun 1981 berubah nama menjadi Perum Indofarma. Dalam rangka memperluas bisnis Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, pada tahun 2001, Indofarma resmi menjadi perusahaan terbuka dengan <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia. Indofarma merupakan Perseroan yang bergerak di bidang usaha industri farmasi. Berdasarkan PP Nomor 76 Tahun 2019, Indofarma resmi menjadi anggota Holding Farmasi dibawah Bio Farma.
PT Kimia Farma Tbk	Deskripsi Singkat
	PT Kimia Farma Tbk, selanjutnya disebut Kimia Farma, adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero). Mencatatkan saham perdana untuk publik (IPO) pada tanggal 4 Juli 2001 dengan kode emiten KAEF dan komposisi saham 90,025% milik pemerintah dan 9,975% milik publik. Melalui proses inbreng yang dilaksanakan Pemerintah Republik Indonesia pada 28 Februari 2020, kepemilikan saham 4.999.999.999 saham seri B dialihkan kepada Bio Farma.

Tabel 1. 4 BUMN dan Anak Perusahaan Eks BUMN Binaan Keasdepan Industri Pupuk dan Pangan

Bidang Industri Pupuk dan Pangan	
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Deskripsi Singkat
	PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu Menyelenggarakan kegiatan distribusi dan perdagangan pada umumnya termasuk ekspor, impor, lokal dan interinsulair, bahan baku, bahan penolong/pembantu, peralatan produksi di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya, Jasa Pengelolaan Perusahaan dan Jasa Konsultasi Manajemen, dan Melaksanakan studi penelitian, pendidikan, pengembangan, desain engineering, pengantongan (bagging station), konstruksi manajemen, pengoperasian pabrik, perbaikan, reparasi, pemeliharaan, konsultasi (kecuali konsultasi bidang hukum) dan jasa teknis lainnya dalam sektor industri pupuk, petrokimia, industri kimia lainnya serta jasa dalam bidang pertanian dan perkebunan.
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Deskripsi Singkat
	PT RNI (Persero) sebagai sebuah induk perusahaan investasi dan Jaringan usaha tersebar di seluruh nusantara melalui 13 Anak Perusahaan dan tujuh afiliasi, mengoperasikan 51 Kantor Cabang dan 18 Unit produksi terdiri dari 10 Pabrik Gula, 3 Pabrik Kelapa Sawit, 2 Pabrik Teh, 1 Pabrik Farmasi, 1 Pabrik Alat kesehatan, 1 Pabrik Kulit, 2 Pabrik Karung Plastik, 2 Pabrik Alkohol, yang didukung oleh lebih dari 11 ribu Karyawan. ID FOOD sebagai <i>corporate brand name</i> dari Induk Holding BUMN Pangan dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2021 yang secara resmi ditandai dengan penandatanganan Akta Inbreng Saham Pemerintah antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan kelima BUMN pangan pada 7 Januari 2022.
Perum BULOG	Deskripsi Singkat
	Perum BULOG merupakan sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras. BULOG dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967. Sejak tahun 2003, status BULOG menjadi BUMN.

Tabel 1. 5 BUMN dan Anak Perusahaan Eks BUMN Binaan Keasdepan Jasa Pariwisata

Bidang Jasa Pariwisata	
Perum LPPNPI	Deskripsi Singkat
	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), dikenal dengan nama AirNav Indonesia, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan secara terpadu di seluruh wilayah Indonesia. Berdiri dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan efisiensi penerbangan, AirNav Indonesia mengelola ruang udara nasional dengan mengintegrasikan layanan navigasi yang sebelumnya dikelola oleh berbagai entitas. Perusahaan ini berkomitmen untuk menghadirkan layanan navigasi penerbangan yang berstandar internasional guna mendukung perkembangan industri aviasi dan pariwisata di Indonesia.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	Deskripsi Singkat
	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai salah satu maskapai penerbangan terbaik di kawasan, Garuda Indonesia mengoperasikan layanan penerbangan domestik dan internasional dengan mengedepankan kualitas pelayanan berstandar tinggi, mencerminkan keramah-tamahan khas Indonesia. Maskapai ini juga menjadi anggota aliansi global SkyTeam, yang memperluas jangkauan layanan ke berbagai destinasi dunia. Dengan komitmen terhadap keselamatan, kenyamanan, dan inovasi, Garuda Indonesia berperan strategis dalam mendukung konektivitas, pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi nasional.
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Deskripsi Singkat
	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), atau dikenal sebagai InJourney, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang berfokus pada pengelolaan, pengembangan, dan integrasi ekosistem pariwisata serta aviasi nasional. Didirikan sebagai bagian dari transformasi sektor pariwisata, InJourney bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global melalui pengelolaan destinasi wisata unggulan, pengoptimalan infrastruktur aviasi, dan sinergi antar-entitas dalam ekosistemnya. Perusahaan ini berperan strategis dalam mendukung percepatan pemulihan pariwisata dan ekonomi nasional melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) disahkan dengan PP Nomor 104 Tahun 2021.

Bidang Jasa Pariwisata	
PT Angkasa Pura Indonesia	Deskripsi Singkat
	PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airport adalah bagian dari holding PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, yang bertugas mengelola, mengembangkan, dan mengintegrasikan operasional bandara dalam ekosistem pariwisata nasional. Sebagai entitas strategis, InJourney Airport berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan bandara untuk mendukung pertumbuhan konektivitas udara yang efisien serta pengalaman perjalanan yang optimal bagi para pengguna. Dengan mengedepankan standar internasional, InJourney Airport berkomitmen untuk memperkuat daya saing sektor transportasi udara sekaligus berkontribusi pada pengembangan destinasi wisata unggulan Indonesia. InJourney Airport merupakan hasil merger dua BUMN pengelola bandara (PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II). Setelah disahkan dengan Surat Persetujuan Menteri BUMN Nomor: S-431/MBU/09/2024 tanggal 5 September 2024 InJourney Airport menjadi pengelola bandar udara no 5 terbesar di dunia.
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	Deskripsi Singkat
	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, atau dikenal sebagai InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), adalah member holding BUMN Aviassi dan Pariwisata yang mengelola, mengembangkan, dan mempromosikan kawasan pariwisata di Indonesia. ITDC berperan strategis dalam pengembangan destinasi wisata unggulan, saat ini tengah mengelola Kawasan Nusa Dua, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dan Kawasan Golo Mori untuk menjadi pusat pariwisata kelas dunia. Dengan fokus pada keberlanjutan, inovasi, dan peningkatan daya tarik wisata, ITDC berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kawasan pariwisata yang terintegrasi dan berstandar internasional.
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko	Deskripsi Singkat
	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (TWC), bagian dari holding BUMN Pariwisata InJourney, merupakan pengelola destinasi wisata berbasis <i>heritage</i> dan budaya. Perusahaan memiliki visi untuk menjadi perusahaan pengelola dan pengembang cagar budaya dan budaya yang berstandar Internasional, serta membawa misi untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan warisan cagar budaya agar selaras dengan upaya pelestarian secara berkelanjutan, melakukan usaha yang berdaya saing, kreatif, inovatif, ramah lingkungan yang ekselen dan memberikan pengalaman yang

Bidang Jasa Pariwisata	
	mengesankan, serta untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Adapun kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko terdiri dari <i>heritage park</i> (candi), <i>cultural park</i> (TMII), <i>amenities</i> , dan <i>attraction</i> .
PT SARINAH	Deskripsi Singkat
	PT Sarinah, anggota holding BUMN Pariwisata InJourney yang berperan sebagai pionir ritel modern di Indonesia sekaligus etalase produk lokal unggulan. Dengan fokus pada pemberdayaan UMKM, Sarinah menghubungkan keunikan budaya dan karya kreatif Indonesia kepada pasar domestik dan internasional. Melalui layanan ritel, perdagangan, dan kemitraan strategis, PT Sarinah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat identitas
PT Hotel Indonesia Natour	Deskripsi Singkat
	PT Hotel Indonesia Natour (HIN), yang kini dikenal dengan <i>InJourney Hospitality</i> , adalah bagian dari holding BUMN Pariwisata InJourney. Perusahaan ini berawal dari penggabungan dua entitas, yakni Hotel Indonesia International dan Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour). HIN memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan hotel ikonik di Indonesia, mulai dari hotel-hotel yang dibangun dengan dana pampasan perang hingga hotel hasil nasionalisasi perusahaan Belanda. HIN mengelola sejumlah hotel bersejarah dengan merek "Inna" dan, melalui anak usahanya, PT Hotel Indonesia Group (HIG), kini mengoperasikan tiga merek hotel modern, yaitu "Meru," "Truntum," dan "KHAS." Sebagai operator hotel BUMN, HIN berkomitmen mendukung pengembangan pariwisata nasional melalui layanan perhotelan berkualitas tinggi yang berstandar internasional dan berfokus pada pelestarian warisan budaya Indonesia.

Tabel 1. 6 BUMN dan Anak Perusahaan Eks BUMN Binaan Keasdepan Industri Perkebunan dan Kehutanan

Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan	
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Deskripsi Singkat
	PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang agrobisnis dan agroindustry kelapa sawit, karet, teh, tebu, tembakau, kako, kopi dan lainnya. Kepemilikan saham adalah 100% Pemerintah Republik Indonesia.

Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan	
PT Perkebunan Nusantara I	Deskripsi Singkat
	PT Perkebunan Nusantara I (SupportingCo) merupakan anak perusahaan PTPN III (Persero) yang bergerak di bidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan, seperti teh, kopi, dan lainnya. Selain itu, SupportingCo akan berfokus pada pengembangan bisnis non-komoditas melalui optimalisasi aset perusahaan.
PT Perkebunan Nusantara IV	Deskripsi Singkat
	PT Perkebunan Nusantara IV (PalmCo) merupakan anak perusahaan PTPN III (Persero) yang bergerak di bidang komoditas kelapa sawit dan karet. Perusahaan ini memproyeksikan estimasi luas areal mencapai 451 hektar melalui pemindahan lahan yang dimiliki oleh HoldCo dan Kerja Sama Operasi dengan SupportingCo. Hal ini diharapkan akan menjadikan PalmCo sebagai perusahaan kelapa sawit dengan luas areal terbesar di dunia.
Perum Perhutani	Deskripsi Singkat
	Perum Perhutani merupakan BUMN yang bergerak di bidang Kehutanan, mencakup Kayu, Industri Kayu, Industri Non Kayu (Gondorukem, Terpentin dan Derivat, minyak kayu putih). Komposisi sahamnya terdiri dari 100% Pemerintah RI.

Dapat kami sampaikan, dengan adanya pengalihan saham milik Negara pada PT EMI (Persero) kepada PT PLN (Persero), maka terhitung sejak akhir tahun 2021, jumlah BUMN di lingkup Keasdepan Energi, Minyak, dan Gas terdiri dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Adapun berdasarkan pelaksanaan *split off* antara PT Indonesia Asahan Aluminium dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID) pada 21 Maret 2023 lalu, maka PT Indonesia Asahan Aluminium bukan lagi merupakan *holding* BUMN Pertambangan, melainkan PT Mineral Industri Indonesia (Persero).

Selain itu, dengan adanya pelaksanaan merger/penggabungan 6 BUMN Klaster Pangan pada 2 Desember 2021 yang menjadi salah satu *tahapan* dalam Pembentukan Holding BUMN Pangan, BUMN yang dibina Keasdepan Pupuk dan Pangan dari sebelumnya 11 BUMN menjadi sebanyak 8 BUMN (PT Pupuk Indonesia, Perum BULOG, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Sang Hyang Sari, PT Perikanan Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Garam, dan PT Berdikari).

Bidang Industri Manufaktur	
PT Len Industri (Persero)	Deskripsi Singkat
	PT Len Industri (Persero), merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang teknologi dan industri pertahanan. Didirikan pada tahun 1965, perusahaan ini awalnya berfokus pada elektronik dan telekomunikasi, namun kini berkembang ke sektor elektronika & pertahanan, transportasi & perkotaan, energi terbarukan, dan ICT sistem navigasi. Kepemilikan saham Len 100% dimiliki oleh Pemerintah RI. PT Len resmi menjadi Induk Holding Industri Pertahanan "Defend ID" berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2022 dengan anggota 4 Eks BUMN yakni: PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Pindad.
PT Dahana	Deskripsi Singkat
	PT Dahana adalah perusahaan BUMN yang bergerak di industri bahan peledak untuk sektor pertambangan, konstruksi, migas, dan pertahanan. Didirikan pada tahun 1966, perusahaan ini menyediakan berbagai layanan industri bahan peledak seperti produksi berbagai jenis bahan peledak, jasa pengeboran & peledakan, jasa terkait bahan peledak, dan jasa pendukung alutsista pertanian. Sebagai bagian dari Holding Industri Pertahanan Defend ID, PT Dahana berperan dalam mendukung industri strategis nasional dengan inovasi di bidang bahan peledak.
PT Dirgantara Indonesia	Deskripsi Singkat
	PT Dirgantara Indonesia (PTDI) adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri kedirgantaraan. Didirikan pada tahun 1976, perusahaan ini memberikan berbagai layanan antara lain pembuatan struktur pesawat, produksi pesawat, desain dan pengembangan pesawat, dan layanan pesawat ringan dan menengah sipil & militer. Sebagai bagian dari Holding Industri Pertahanan Defend ID, PTDI berperan penting dalam mendukung kemandirian industri kedirgantaraan Indonesia.
PT PAL Indonesia	Deskripsi Singkat
	PT PAL Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak di industri galangan kapal dan pertahanan maritim. Didirikan pada tahun 1980, perusahaan ini memberikan berbagai layanan antara lain industri perkapalan dan alat apung, peralatan pembangkit tenaga listrik, peralatan industri minyak dan gas, turbin, dan pembangkit tenaga lainnya, serta perbaikan dan pemeliharaan kapal. Sebagai bagian dari Holding Industri Pertahanan Defend ID, PT PAL berperan dalam memperkuat kemandirian alutsista maritim Indonesia serta mendukung kebutuhan angkatan laut dan industri maritim nasional.
PT Pindad	Deskripsi Singkat

Bidang Industri Manufaktur	
 PT Pindad (Persero)	PT Pindad adalah perusahaan BUMN yang bergerak di industri pertahanan dan manufaktur. Didirikan pada tahun 1983 perusahaan ini memberikan berbagai layanan antara lain produksi senjata, munisi, produk kendaraan khusus, mesin industrial, alat berat, infrastruktur perhubungan, dan bahan peledak komersial. Sebagai bagian dari Holding Industri Pertahanan Defend ID, PT Pindad berperan penting dalam mendukung kemandirian alutsista nasional dan memperkuat industri pertahanan Indonesia.
 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI) adalah BUMN yang bergerak di bidang klasifikasi, inspeksi, sertifikasi, dan konsultasi maritim. Didirikan pada tahun 1964, BKI bertanggung jawab atas klasifikasi kapal berbendera Indonesia dan menyediakan layanan penilaian kelayakan kapal. Selain sektor maritim, BKI juga terlibat dalam sertifikasi industri, migas, dan infrastruktur. Kepemilikan saham BKI 100% dimiliki oleh Pemerintah RI. PT BKI resmi menjadi Induk Holding Jasa Survey "ID Survey" berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2021 dengan anggota 2 Eks BUMN yakni: PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia.
 PT Sucofindo	PT Sucofindo adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, dan konsultasi. Didirikan pada tahun 1956, Sucofindo awalnya berfokus pada jasa inspeksi perdagangan, tetapi kini telah berkembang ke berbagai sektor antara lain sumber daya alam & komoditi, teknologi & informasi, industri & transportasi, pemerintahan & perdagangan, energi & konstruksi, pariwisata & keuangan, dan green generation & kesehatan. Sebagai bagian dari Holding IDSurvey, Sucofindo berperan dalam memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan standar nasional maupun internasional bagi berbagai industri di Indonesia.
 PT Surveyor Indonesia	PT Surveyor Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi. Didirikan pada tahun 1991, perusahaan ini menyediakan layanan di berbagai antara lain migas & energi baru terbarukan, mineral & lingkungan, infrastruktur, pemerintahan, dan sustainability. Sebagai bagian dari Holding IDSurvey, PT Surveyor Indonesia berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional berbagai industri di Indonesia.

Bidang Jasa Keuangan	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Deskripsi Singkat

Bidang Jasa Keuangan	
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan perbankan untuk segmen mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Didirikan pada tahun 1895, BRI dikenal sebagai pionir dalam pembiayaan mikro dengan produk andalannya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Deskripsi Singkat
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai hasil peleburan 4 bank pemerintah, Bank Mandiri memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Bank Mandiri dikenal dengan inovasi digitalnya, seperti Livin' by Mandiri untuk layanan perbankan digital.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Deskripsi Singkat
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946, merupakan bank milik pemerintah pertama yang menjadi perusahaan publik pada 1996. Sebagai bank komersial, BNI melayani berbagai segmen, termasuk korporasi, usaha kecil dan menengah (UKM), serta perorangan dengan produk dan layanan keuangan yang beragam. BNI juga memiliki jaringan internasional di beberapa negara untuk mendukung transaksi global.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Deskripsi Singkat
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1897, pada masa pemerintah Belanda. Pemerintah melalui surat menteri BUMN memutuskan Bank BTN sebagai Bank umum yang berfokus pada pembiayaan perumahan, terutama melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan mendukung program kepemilikan rumah bagi masyarakat, khususnya segmen menengah ke bawah. Selain layanan perbankan konvensional dan digital, BTN juga berperan dalam pembiayaan infrastruktur dan sektor properti.

Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Deskripsi Singkat

Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	
	PT ASABRI (Persero) berdiri pada 1 Agustus 1971 dengan nama Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Perum ASABRI), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971. Pendiriannya bertujuan untuk menyediakan solusi asuransi yang lebih sesuai bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, menggantikan program Taspen yang sebelumnya berlaku.
	PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau disingkat PT TASPEN (Persero) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah abdi Negara di Indonesia atas peran yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun.
	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) didirikan pada tahun 1973 yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap para pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui pemberian pendampingan dan modal kerja. Pada tahun 2020, Pemerintah melalui PP No. 20 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 menetapkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Asuransi, Penjaminan dan Investasi sehingga terdapat empat anggota baru yang terdiri dari PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Pada tahun 2020 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagai BUMN Holding Asuransi, Penjaminan dan Investasi melakukan transformasi <i>brand</i> menjadi Indonesia Financial Group (IFG). Di bulan Desember 2020, pemerintah bersama Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke IFG untuk mendirikan IFG Life. Pendirian IFG Life sebagai bagian dari induk IFG menjadi peta bisnis IFG untuk portofolio bisnis di sektor asuransi jiwa dan kesehatan.
	PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Perusahaan ini telah eksis sejak tahun 1859, sehingga menjadikan perusahaan ini sebagai perusahaan jasa keuangan tertua di Indonesia. Saat ini, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam proses likuidasi perusahaan setelah melaksanakan restrukturisasi polis.
	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau biasa disebut sebagai Indonesia Re adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang reasuransi. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga berbisnis di bidang reasuransi syariah, asuransi perdagangan,

Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

	asuransi umum, asuransi syariah, serta asuransi kredit & penjaminan. Di tengah penguatan bisnis yang dilakukan Perusahaan, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, serta OJK, menyusun suatu kebijakan dan strategi dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri dengan membentuk Perusahaan Reasuransi Nasional (PRN) melalui penggabungan Perusahaan Reasuransi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan Perusahaan kepada kebutuhan retrosesi/impor kapasitas reasuransi dari luar negeri. Sebagai tindak lanjut pembentukan PRN, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Umum Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama.
--	--

Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media

PT xx	Deskripsi Singkat
 Telkom Indonesia the world in your hand	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau biasa disebut dengan nama Telkom adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi serta telekomunikasi digital di Indonesia, dengan kepemilikan saham pemerintah Republik Indonesia pada Telkom yaitu sebesar 52,09%, sementara sisa kepemilikan saham sebesar 47,91 % dipegang oleh publik. Pendirian PN Telekomunikasi, sesuai PP No. 30 tanggal 6 Juli 1965, yang kemudian tumbuh dan bertransformasi hingga saat ini Telkom memiliki 12 anak perusahaan atau <i>subsidiary</i> yang bergerak di berbagai sektor dan memberikan dampak positif baik untuk investor maupun rakyat Indonesia.
 PERURI	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia / "Perum Peruri" didirikan pada tahun 1971 melalui PP Nomor 60 Tahun 1971, hasil peleburan (merger) antara PN Arta Yasa dengan PN Pertjetakan Kebajoran. Di dalam perjalanannya, pemerintah telah mengubah Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Peruri dengan beberapa kali perubahan hingga yang paling terakhir yaitu PP 06 Tahun 2019. Di dalam PP 6/2019 disebutkan bahwa kegiatan usaha Peruri mencakup antara lain yaitu Mencetak Mata Uang Rupiah, Membuat dokumen negara, Membuat Pita Cukai dan Dokumen Pertanahan, Membuat barang cetakan logam non uang, Mencetak mata uang dan membuat dokumen negara lain atas permintaan negara yang bersangkutan, Menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan, melaksanakan Fabrikasi kertas uang, kertas sekuriti, tinta sekuriti dan Jasa digital sekuriti.

Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	
	PT Danareksa (Persero) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang investasi dan transformasi. Danareksa didirikan pada tahun 1976. Pada tahun 2022, pemerintah menunjuk Danareksa sebagai induk holding BUMN lintas sektor sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2022. Saat ini PT Danareksa (Persero) mengelola berbagai Perusahaan dari beragam industri yang dibagi menjadi 4 subklaster, yakni Jasa Keuangan, Kawasan Industri, Jasa & Konsultasi Konstruksi, serta Media & Teknologi.
	Perusahaan Umum Jasa Tirta I merupakan BUMN yang bergerak di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana di atur dalam PP Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta I. Saat ini, PJT I melakukan kegiatan dan pengelolaan atas 5 (lima) wilayah Sungai (WS) di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, yakni WS Brantas, WS Bengawan Solo, WS Jragung Seluna, WS Serayu Bogowonto dan WS Toba Asahan.
	Perum Jasa Tirta II (PJT II) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana di atur dalam PP Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perum Jasa Tirta II. Saat ini PJT II mengelola sumber daya air (SDA) di wilayah sungai Citarum, Sungai Ciliwung-Cisadane, Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Cidanau-Ciujung-Cidurian, dan Sungai Seputih-Sekampung.
	Perum LKBN Antara adalah BUMN yang bergerak di bidang kantor berita nasional Indonesia yang didirikan pada 13 Desember 1937. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007, akhirnya Antara resmi bergabung menjadi keluarga besar Kementerian BUMN dan berubah menjadi Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Antara memiliki biro di setiap provinsi serta perwakilan di beberapa kotamadya/kabupaten. Agar dapat menyajikan berita luar negeri dengan persepsi nasional, Antara mengendalikan biro/perwakilan di Kuala Lumpur (Malaysia), Beijing (China) dan London (Inggris). Selain melayani berita dan foto, Antara juga menawarkan produk dan jasa lainnya seperti layanan data dan informasi pasar uang dan saham, penyebarluasan rilis pers (PRWire) dan pendidikan jurnalistik (Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara).
	Percetakan Negara berdiri sejak zaman pemerintahan Belanda pada tahun 1809 dengan nama "Lands Drukkerij", sebelum namanya menjadi Percetakan Negara Republik Indonesia Tahun 1950. Dengan berbekal pengalaman dari generasi ke generasi, saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2012, Perum PNRI telah dipercaya untuk berperan serta dalam usaha di bidang percetakan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara, jasa grafika lainnya, penerbitan, multimedia, dan pengembangan usaha.

Bidang Jasa Infrastruktur	
Perum Perumnas	Deskripsi Singkat
	Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah

Bidang Jasa Infrastruktur	
	Republik Indonesia yang tidak terbagi atas saham. Inti bisnis perusahaan yaitu penyediaan perumahan, <i>estate product</i> , serta pelayanan untuk kepentingan publik dan profit berdasarkan prinsip manajemen perusahaan. Perumnas mengemban misi khusus dari Pemerintah yaitu menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Deskripsi Singkat
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi. PT Adhi Karya (Persero) Tbk berdiri sejak tanggal 11 Maret 1960. Saat ini sebagai BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, PT Adhi Karya (Persero) Tbk menjalankan tugas dan fungsi pokok pada 4 (empat) lini bisnis yaitu <i>engineering</i> dan konstruksi, properti dan <i>hospitality</i> , manufaktur, serta investasi dan konsesi. Kepemilikan saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah Pemerintah sebesar 64% dan Publik sebesar 36%.
PT Brantas Abipraya (Persero)	Deskripsi Singkat
	PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan pada tanggal 12 November 1980 dengan kepemilikan Pemerintah Republik Indonesia sebesar 100%. PT Brantas Abipraya (Persero) menjalankan 6 (enam) kegiatan usaha utama di bidang konstruksi, yang meliputi konstruksi pengairan, infrastruktur jalan dan jembatan, gedung, kelistrikan, dan prasarana perhubungan, serta kegiatan lainnya, yakni energi, produk beton, dan alat berat.
PT Hutama Karya (Persero)	Deskripsi Singkat
	PT Hutama Karya (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan Pemerintah Republik Indonesia sebesar 100% yang bergerak di bidang industri konstruksi, pengusahaan jalan tol, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, pengembangan properti, real estate, penyewaan ruangan dan hotel, dan manufaktur.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Deskripsi Singkat
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Pengusahaan Jalan Tol. PT Jasa Marga (Persero) Tbk merupakan pengembang dan operator jalan tol pertama serta terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 45% untuk panjang jalan tol komersial yang telah beroperasi ($\pm$ 1.286 km). Dengan pengalaman selama lebih dari 46 tahun, Jasa Marga saat ini mengelola 36 konsesi jalan tol dengan total panjang jalan 1.736 km. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, 70% saham Jasa Marga dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Sejak 2007, Jasa Marga menjadi perusahaan publik melalui Penawaran Umum Perdana Saham (<i>Initial Public Offering/IPO</i>) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Deskripsi Singkat

Bidang Jasa Infrastruktur	
 CONSTRUCTION & INVESTMENT	PT PP (Persero) Tbk adalah BUMN yang didirikan pada tanggal 26 Agustus 1953 yang bergerak di bidang Konstruksi (gedung, sipil/ infrastruktur, EPC, spesialis, plant dan peralatan) dan Investasi (infrastruktur, properti, dan energi). Pemilik mayoritas saham PT PP adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 51%, sedangkan kepemilikan saham sebesar 49% dipegang oleh publik.
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Deskripsi Singkat
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("SIG") merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang industri semen. Didirikan pada bulan Agustus 1957, kemudian melakukan IPO pada tahun 1991. Sebagai perusahaan induk, perusahaan ini mendukung anak perusahaannya di bidang industri semen dan non-semen, serta penyediaan jasa di seluruh Indonesia. Produk SIG dipasarkan di pasar domestik dan ASEAN. Selain menguasai kurang lebih 50% pangsa pasar semen domestik, kini SIG memiliki variasi produk turunan semen yang memiliki fleksibilitas rentang spesifikasi lengkap, beserta solusi layanan pendukung, untuk memenuhi persyaratan kondisi bangunan sesuai kebutuhan pelanggan, dimanapun berada. Sebagai perusahaan milik negara, 51,20% saham SIG dimiliki oleh pemerintah Negara Republik Indonesia ("Negara RI") dan 48,8% dimiliki oleh publik.
PT Semen Baturaja Tbk	Deskripsi Singkat
	PT Semen Baturaja Tbk merupakan Anak Perusahaan dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pada akhir tahun 2022 menjadi <i>milestone</i> bersejarah bagi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, di mana proses integrasi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ke PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berhasil diselesaikan dan telah melengkapi seluruh tahapan pembentukan <i>holding</i> BUMN Sub klaster semen, di mana sebanyak 7.499.999.999 Saham Seri B milik Negara RI di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk beralih kepemilikannya kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, sehingga status saat ini SMBR berubah menjadi Non-Persero menjadi PT Semen Baturaja Tbk. Saat ini Pemerintah RI memiliki 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna di PT Semen Baturaja Tbk.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Deskripsi Singkat
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang industri Konstruksi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (<i>Engineering, Procurement, and Construction/EPC</i>), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, dan kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapat/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah berdiri sejak 1 Januari 1961. Saat ini kepemilikan saham PT Waskita

Bidang Jasa Infrastruktur	
	Karya (Persero) Tbk adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 75,35% dan Publik sebesar 24,65%.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Deskripsi Singkat
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang konstruksi. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah berdiri sejak 11 Maret 1960. Saat ini Kegiatan usaha WIKA difokuskan pada optimalisasi 5 (lima) lini usaha, yaitu 1) Investasi yang meliputi, Energi (Energi Terbarukan), Infrastruktur, dan Prasarana Air; 2) Realiti & Properti, Pengembangan Real Estat & Properti dan Manajemen Properti; 3) Prasarana dan Bangunan, yang terdiri dari konstruksi sipil, konstruksi bangunan, dan konstruksi baja; 4) Proyek Energi & Industri, termasuk EPCC dan Energi Listrik, serta Proyek Energi Terbarukan; dan 5) Industri, sektor industri WIKA memproduksi Beton Pracetak, Industri Konstruksi, Kendaraan Bermotor Listrik, dan Produksi Aspal. Saat ini kepemilikan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk adalah Pemerintah sebesar 91,018% dan Publik sebesar 8,982%

Bidang Jasa Logistik	
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Deskripsi Singkat
	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah perusahaan BUMN Non-Listed yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham mewakili Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2021, secara legal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bertindak sebagai surviving entity (perusahaan yang bertahan). Kemudian berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berganti nama menjadi "PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo"
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Deskripsi Singkat
	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP adalah BUMN yang bergerak dalam bisnis jasa penyeberangan dan pelabuhan terintegrasi dan tujuan wisata waterfront. ASDP menjalankan armada ferry sebanyak lebih dari 226 unit kapal yang melayani 307 lintasan dan 36 pelabuhan di seluruh Indonesia dan mengembangkan bisnis lainnya terkait dengan pengembangan kawasan pelabuhan, seperti Bakauheni Harbour City di Provinsi Lampung dan Kawasan Marina Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Deskripsi Singkat

Bidang Jasa Logistik	
	PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) adalah perusahaan pelayaran milik negara yang didirikan pada tanggal 28 April 1952 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. M2/1/2 tanggal 28 April 1952. Perusahaan ini bergerak dibidang jasa transportasi kapal laut yang handal dan profesional dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PT PELNI mengoperasikan armada kapal penumpang, kapal ferry cepat dan armada kapal barang. PT PELNI melayani rute perjalanan domestik dan menyinggahi lebih dari 94 pelabuhan di seluruh pelosok Nusantara. Fasilitas dan layanan yang disediakan pada armada kapal dirancang untuk menjamin standar keselamatan dan kenyamanan bagi pelanggan dan kru laut, didukung oleh SDM yang profesional dan mengutamakan kepuasan pelanggan.
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Deskripsi Singkat
	Pada tanggal 25 Mei DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi Perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 1998. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tujuh anak perusahaan/grup usaha yakni KAI Services (2003), KAI Bandara (2006), KAI Commuter (2008), KAI Wisata (2009), KAI Logistik (2009), KAI Properti (2009), PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2015).
PT Industri Kereta Api (Persero)	Deskripsi Singkat
	PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) manufaktur kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 1981, PT INKA (Persero) berkomitmen untuk menyediakan solusi transportasi darat yang berkualitas tinggi, inovatif, dan berkelanjutan. Fokus dari PT INKA adalah menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi bagi pelanggan. PT INKA menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan serta <i>after sales</i> untuk memastikan bahwa pelanggan menerima produk dengan kualitas terbaik. Produk INKA telah diekspor ke berbagai negara, seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Australia.
PT Pos Indonesia (Persero)	Deskripsi Singkat

Bidang Jasa Logistik	
	Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).
Perum Damri	Deskripsi Singkat
	Perum DAMRI adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang transportasi jalan. Berkantor pusat di Jakarta, DAMRI saat ini memiliki 4 Divisi Regional, serta 44 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdiri sejak 25 November 1946, DAMRI mempunyai visi menjadi Perusahaan transportasi jalan kelas dunia yang berkinerja unggul dan berkelanjutan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pelanggan untuk mendukung konektivitas nasional. Perum DAMRI dan Perum PPD resmi bergabung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI tanggal 6 Juni 2023. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa Perum PPD dinyatakan bubar tanpa likuidasi dengan ketentuan segala hak dan kewajiban serta kekayaan Perum PPD beralih karena hukum kepada PERUM DAMRI.

1.4 Mandat dan Peran Strategis

a. Kontribusi kepada APBN

Sebagai wujud dari investasi Pemerintah, BUMN di bawah binaan Wakil Menteri BUMN II berupaya memberikan kontribusi terhadap APBN melalui pajak dan dividen yang menyokong penerimaan bukan pajak (PNBP). Ke depannya, Kementerian BUMN dan BUMN mempunyai komitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada APBN sekaligus di sisi lain meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses produksi dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan pada APBN.

b. Pelaksana Penugasan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha mllik Negara menyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMN yaitu mengejar keuntungan. Oleh karena itu, BUMN di bawah binaan Wakil Menteri sebagai salah satu pelaksana penugasan Pemerintah berupaya menjalankan perannya dengan baik dalam rangka mendukung

percepatan pembangunan sekaligus tetap menjaga sustainabilitas BUMN yang mendapatkan penugasan Pemerintah.

c. Lima Prioritas Kementerian BUMN dalam pembinaan BUMN

1. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia

Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatann

2. Inovasi Model Bisnis

Restrukturisasi dan inovasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, pertimbangan kebutuhan stakeholders dan fokus pada core business masing-masing BUMN.

3. Kepemimpinan Teknologi

Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti *data management*, *advanced analytics*, *big data*, *artificial intelligence*, dan lain-lain.

4. Peningkatan Investasi

Mengoptimalkan nilai aset BUMN dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat.

5. Pengembangan Talenta

Pengembangan dan pelatihan tenaga kerja, mengembangkan SDM yang berkualitas, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Wakil Menteri BUMN sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam membantu Menteri BUMN untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Wakil Menteri BUMN mendukung Kementerian BUMN menjadi institusi yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Serta dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Wakil Menteri BUMN mendukung pelaksanaan Misi Kementerian BUMN yang sejalan dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Kementerian BUMN dalam bidang pembinaan dan pengawasan BUMN
2. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian BUMN
3. Mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian Nasional dan memberikan nilai tambah untuk pemegang saham
4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Wakil Menteri BUMN menyusun target kinerja dengan memperhatikan kriteria-kriteria yaitu target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran dan penetapan target harus relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

Berikut ini adalah target dari Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator Wakil Menteri BUMN Tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra Kementerian BUMN:

Wamen BUMN I - Industri

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan daya saing BUMN	a. Peningkatan jumlah negara tujuan ekspor BUMN	30 Negara	36 Negara	42 Negara	48 Negara	54 Negara
2. BUMN unggul di kancah global	a. BUMN yang masuk Peringkat Global	5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	7 BUMN
3. Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	a. Realisasi Belanja Modal (<i>Capex</i>) BUMN	Rp 490 Triliun	Rp 532 Triliun	Rp 577 Triliun	Rp 627 Triliun	Rp 680 Triliun
	b. Kontribusi pengembangan energi baru terbarukan oleh BUMN Binaan	13%	15%	16%	17%	18%
	c. Program Strategis Nasional yang diselesaikan (<i>Annual</i>)	90%	90%	95%	100%	100%
4. Kontribusi BUMN dalam meningkatkan <i>value</i> BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	a. <i>Net Profit</i>	Rp 177,00 Triliun	Rp 201,27 Triliun	Rp 224,53 Triliun	Rp 250,83 Triliun	Rp 328,71 Triliun
	b. <i>Sustainable Growth</i>	5%	5%	5%	6%	6%
	c. Kapitalisasi pasar saham BUMN Tbk	Rp 1.980 Triliun	Rp 2.198 Triliun	Rp 2.429 Triliun	Rp 2.684 Triliun	Rp 2.966 Triliun

Wamen BUMN II - Jasa

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan daya saing BUMN	a. Peningkatan jumlah negara tujuan ekspor BUMN	15 Negara	18 Negara	21 Negara	24 Negara	27 Negara
2. BUMN unggul di kancah global	a. BUMN yang masuk Peringkat Global	3 BUMN	3 BUMN	3 BUMN	3 BUMN	4 BUMN
3. Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	a. Realisasi Belanja Modal (<i>Capex</i>) BUMN	Rp136 Triliun	Rp148 Triliun	Rp160 Triliun	Rp174 Triliun	Rp189 Triliun
	b. Kontribusi pengembangan energi baru terbarukan oleh BUMN Binaan	-	-	-	-	-
	c. Program Strategis Nasional yang diselesaikan (<i>Annual</i>)	90%	91%	93%	96%	100%

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4. Kontribusi BUMN dalam meningkatkan <i>value</i> BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	a. <i>Net Profit</i>	Rp58,23 Triliun	Rp67,98 Triliun	Rp79,36 Triliun	Rp92,64 Triliun	Rp108,15 Triliun
	b. <i>Sustainable Growth</i>	1,31%	1,37%	1,44%	1,50%	1,57%
	c. Kapitalisasi pasar saham BUMN Tbk	Rp900 Triliun	Rp1.005 Triliun	Rp1.110 Triliun	Rp1.215 Triliun	Rp1.320 Triliun

Berdasarkan arahan dari Wamen BUMN, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan diharuskan *inline* dengan 5 (lima) *shield* Kementerian BUMN berupa:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia;
2. Inovasi Modal Bisnis;
3. Kepemimpinan Teknologi;
4. Peningkatan Investasi; dan
5. Pengembangan Talenta.

Sebagaimana penyesuaian terhadap 5 (lima) *shield* Kementerian BUMN di atas, berikut Indikator Kinerja Tahun 2024 bagi Wakil Menteri BUMN:

No	Prioritas/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia		
1	Kontribusi BUMN Sektor Industri dalam Meningkatkan <i>value</i> BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	<i>Net Profit</i>
		<i>EBITDA Margin</i>
		<i>Return on Equity</i>
2	Meningkatnya Peran BUMN dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar
3	Meningkatnya Daya Saing BUMN	Jumlah Negara Tujuan Ekspor
4	Penguatan Struktur Modal BUMN	Penyelesaian Target IPO/Tambahan Nilai Penawaran BUMN/Anak Usaha di Pasar Modal
5	Terwujudnya Peran BUMN Sektor Industri yang Optimal dalam Penurunan Emisi Karbon	Pelaksanaan Inisiatif Program Transisi Energi Menuju <i>Net Zero Emission</i>
Prioritas II Inovasi Model Bisnis		
6	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN	Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi oleh BUMN
7	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Wakil Menteri BUMN	Persentase Realisasi ANggaran
		Nilai <i>Self-Assesment</i> SAKIP

No	Prioritas/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
8	Terwujudnya Restrukturisasi BUMN Sektor Industri yang Resilien	Jumlah Program Restrukturisasi Klaster BUMN
9	Terwujudnya BUMN yang unggul di tingkat domestik	Penyusunan Roadmap Integrasi BUMN Karya
10	Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	Penguatan Manajemen Risiko BUMN
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi		
11	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN	Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN
Prioritas IV Meningkatkan Investasi		
12	Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi Capex
		Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional
13	Meningkatnya Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN	Rata-Rata Penggunaan TKDN
14	Meningkatkan Kontribusi BUMN dalam Program Hilirisasi	Jumlah Program Hilirisasi yang Berhasil Dijalankan
Prioritas V Meningkatkan Pengembangan Talenta BUMN		
15	Terciptanya Inklusivitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN Sektor Industri	% Top Talent muda (<42 Tahun) dalam <i>Nominated Talent</i>
		% Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i>

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (PK 2024)

Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pencapaian sasaran strategis Wakil Menteri BUMN diukur dengan indikator kinerja utama. Adapun target perjanjian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Prioritas/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia				
1	Kontribusi BUMN Sektor Industri dalam Meningkatkan <i>value</i> BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	<i>Net Profit</i>	Rp Triliun	240,90
		<i>EBITDA Margin</i>	Persen	22,36
		<i>Return on Equity</i>	Persen	7,00

No	Prioritas/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
2	Meningkatnya Peran BUMN dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Nasabah Aktif Mekar	Jumlah (Juta)	15,34
3	Meningkatnya Daya Saing BUMN	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Jumlah	23
4	Penguatan Struktur Modal BUMN	Penyelesaian Target IPO/Tambahan Nilai Penawaran BUMN/Anak Usaha di Pasar Modal	Jumlah	1
5	Terwujudnya Peran BUMN Sektor Industri yang Optimal dalam Penurunan Emisi Karbon	Pelaksanaan Inisiatif Program Transisi Energi Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Persen	100
Prioritas II Inovasi Model Bisnis				
6	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN	Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi oleh BUMN	Persen	100
7	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Wakil Menteri BUMN	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	97
		Nilai <i>Self-Assesment</i> SAKIP	Persen	82,14
8	Terwujudnya Restrukturisasi BUMN Sektor Industri yang Resilien	Jumlah Program Restrukturisasi Klaster BUMN	Jumlah	8
9	Terwujudnya BUMN yang unggul di tingkat domestik	Penyusunan Roadmap Integrasi BUMN Karya	Persen	60
10	Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	Penguatan manajemen risiko BUMN	Persen	100
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi				
11	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN	Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN	Persen	100
Prioritas IV Meningkatkan Investasi				
12	Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi Capex	Persen	61
		Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional	Persen	100
13	Meningkatnya Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN	Rata-Rata Penggunaan TKDN	Persen	52
14	Meningkatkan Kontribusi BUMN dalam Program Hilirisasi	Jumlah Program Hilirisasi yang Berhasil Dijalankan	Jumlah	7
Prioritas V Meningkatkan Pengembangan Talenta BUMN				
15	Terciptanya Inklusivitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN Sektor Industri	% Top Talent muda (<42 Tahun) dalam <i>Nominated Talent</i>	Persen	19
		% Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i>	Persen	16

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tahun anggaran 2024 Wakil Menteri BUMN menjalankan pagu anggaran sebesar Rp18.811.307.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Pagu
1	Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak Dan Gas	1.595.063.000
2	Asisten Deputi Bidang Industri Mineral Dan Batubara	2.045.969.000
3	Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan	1.426.475.000
4	Asisten Deputi Bidang Industri Pangan Dan Pupuk	1.471.572.000
5	Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan	1.371.229.000
6	Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung	1.498.822.000
7	Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur	1.316.229.000
8	Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur	2.586.191.000
9	Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan	1.221.721.000
10	Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	1.083.636.000
11	Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	1.271.229.000
12	Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik	1.923.171.000
Total		18.811.307.000

2.3 Tantangan yang Dihadapi

Dalam menjalankan proses bisnisnya, cukup banyak pengambilan kebijakan BUMN pada lingkup Wakil Menteri BUMN yang juga memerlukan dukungan dan koordinasi dengan unit kerja lain maupun instansi lainnya. Dalam kaitannya dengan unit lain, maka hal ini adalah bagian dari proses bisnis di lingkungan Kementerian BUMN di mana setiap aksi korporasi memerlukan masukan, pendapat, dan evaluasi dari unit-unit yang bertanggungjawab untuk menghindari maladministrasi. Di sisi lain, Kementerian BUMN juga memerlukan dukungan dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam hal pengambilan kebijakan pada suatu sektor. Hal ini tidak terlepas dari posisi BUMN yang bergerak di berbagai sektor dan harus mengikuti kebijakan sektoral tersebut.

Selanjutnya, dalam upaya mencapai target rencana kerja tahun 2024, terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Wakil Menteri BUMN, yaitu:

a. Regulasi

Terdapat banyak Peraturan Perundang-Undangan yang harus dipatuhi oleh BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan badan usaha swasta. Selain patuh pada Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, BUMN juga harus patuh pada serangkaian Undang-Undang bidang

Keuangan Negara, Undang-Undang Sektoral, dan Undang-Undang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara.

b. Pengawasan

Dalam proses pengawasan BUMN, terdapat banyak institusi yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengawasan tersebut, mulai dari BPK, BPKP, KAP, Kementerian/Lembaga Teknis, Auditor Internal, Dewan Komisaris/Pengawas, bahkan DPR/DPRD. Hal ini di satu sisi merupakan hal yang positif untuk menegakkan *good corporate governance* (GCG), namun di sisi lain akan memerlukan sumber daya dan waktu yang cukup yang harus disediakan oleh Manajemen BUMN.

c. Koordinasi Lintas Kementerian/ Lembaga

Berbagai rencana strategis dan aksi korporasi BUMN memerlukan *view* dan persetujuan dari berbagai K/L, sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan *concern* dari setiap K/L. Di lain sisi, setiap K/L memiliki kewenangan dan kebijakan yang berbeda sesuai arah dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan waktu yang cukup untuk melakukan koordinasi lintas K/L.

d. Birokrasi

Kementerian BUMN sebagai lembaga Pemerintah terdiri dari berbagai unit kerja, sehingga dalam proses pembinaan BUMN tidak terlepas dari sistem birokrasi. Di sisi lain, pembinaan BUMN memerlukan percepatan dalam mendukung aksi korporasi BUMN. Sepanjang tahun 2024, administrasi dan proses bisnis di Kementerian BUMN menjadi tantangan tersendiri, di mana diperlukan percepatan proses bisnis dengan tetap menjaga kualitas layanan.

e. Kondisi Perekonomian Global

Pada tahun 2024, banyak terjadi dinamika ekonomi dan sosial yang menimbulkan ketidakpastian perekonomian global, di antaranya pelemahan ekonomi negara maju, tensi geopolitik, perubahan nilai tukar rupiah, dan fluktuasi harga komoditas.

BAB III

EVALUASI CAPAIAN KINERJA

3.1 Evaluasi Kinerja 2024

Pengukuran kinerja Wakil Menteri BUMN dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, Pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

Dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta hasil pengukuran kinerja Wakil Menteri BUMN tahun 2024 menunjukkan capaian yang sangat memuaskan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 106,55 (Kriteria: Sangat Memuaskan). Dari 15 (lima belas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 14 (empat belas) IKU yang mencapai target dan 6 (enam) IKU yang tidak mencapai target.

Adapun IKU yang tidak mencapai target yaitu, Jumlah Nasabah Aktif Mekaar, Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi oleh BUMN, Nilai *Self-Assessment* SAKIP, Jumlah Program Restrukturisasi Klaster BUMN, Penguatan Manajemen Risiko BUMN, dan Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional. Penyebab tidak tercapainya ketiga Indikator Kinerja Utama ini utamanya akibat dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, kendala operasional, kendala finansial, dan kendala lainnya.

Secara lengkap, evaluasi dan analisis capaian kinerja Wakil Menteri BUMN Tahun 2024 dapat dijelaskan dalam bagian Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja. Rincian pencapaian kinerja Wakil Menteri BUMN Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Nilai Kinerja Organisasi
Wakil Menteri BUMN Tahun 2024**

No	Prioritas/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Bobot	2024		Capaian Tahun 2024*	Indeks Capaian Indikator	Nilai Kinerja Organisasi
					Target	Realisasi			
Prioritas I Meningkatkan Kontribusi Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia									106,55
1	Kontribusi BUMN Sektor Industri dalam Meningkatkan <i>value</i> BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	Net Profit	Rp Triliun	5	240,90	295,00	122,46%	120%	
		EBITDA Margin	%	5	22,36	24,50	109,59%	109,59%	
		Return on Equity	%	5	7	7,95	113,53%	113,53%	
2	Meningkatkan Peran BUMN dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	Jumlah (juta)	5	15,34	14,40	93,83%	93,83%	
3	Meningkatkan Daya Saing BUMN	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Jumlah	5	28	30	107,14%	107,14%	
4	Penguatan Struktur Modal BUMN	Penyelesaian Target IPO/Penawaran BUMN/Anak Usaha di Pasar Modal	Jumlah	5	1	1	100%	100%	
5	Terwujudnya Peran BUMN Sektor Industri yang Optimal dalam Penurunan Emisi Karbon	Pelaksanaan Inisiatif Program Transisi Energi Menuju <i>Net Zero Emission</i>	%	5	100	146,89	146,89%	120%	
Prioritas II Meningkatkan Inovasi Model Bisnis BUMN									
6	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN Sektor Industri	Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi oleh BUMN	%	5	100	97,03	97,03%	97,03%	
7	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi di Wakil Menteri Kartika	% Realisasi Penyerapan Anggaran Unit Eselon II di bawah Wakil Menteri Kartika	%	5	97	99,41	102,49%	102,49%	

No	Prioritas/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Bobot	2024		Capaian Tahun 2024*	Indeks Capaian Indikator	Nilai Kinerja Organisasi	
					Target	Realisasi				
		Nilai <i>Self Assessment</i> SAKIP	%	5	82,14	81,22	98,88%	98,88%		
8	Terwujudnya Restrukturisasi BUMN yang Resilien	Jumlah Program Restrukturisasi Klaster BUMN	Jumlah	5	8	7	87,50%	87,50%		
9	Terwujudnya BUMN yang unggul di tingkat domestik	Penyusunan Roadmap Integrasi BUMN Karya	%	5	60	60	100%	100%		
10	Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	Penguatan Manajemen Risiko BUMN	%	5	100	95,28	95,28%	95,28%		
Prioritas III Meningkatkan Kepemimpinan Teknologi BUMN										
11	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN	Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN	%	5	100	127,54	127,54%	120%		
Prioritas IV Meningkatkan Investasi BUMN Sektor Industri										
12	Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi Capex	%	5	61	78,85	129,76%	120%		
		Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional	%	5	100	71,09	71,09%	71,09%		
13	Meningkatkan Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN	Rata-Rata Penggunaan TKDN	%	5	52	74,26	141,19%	120%		
14	Meningkatkan Kontribusi BUMN Sektor Industri dalam Program Hilirisasi	Jumlah Program Hilirisasi yang Berhasil Dijalankan	Jumlah Program	5	7	7	100%	100%		
Prioritas V Meningkatkan Pengembangan Talenta BUMN										
15	Terciptanya Inklusivitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN	% <i>Top Talent</i> muda (<42 tahun) dalam <i>Nominated Talent</i>	%	5	19	28,63	120,15%	120%		
		% Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i>	%	5	16	25,04	164,32%	120%		
Total Nilai Akhir									106,55%	

No	Prioritas/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Bobot	2024		Capaian Tahun 2024*	Indeks Capaian Indikator	Nilai Kinerja Organisasi
					Target	Realisasi			
Kriteria Pencapaian NKO									Sangat Memuaskan

*) Maksimal capaian sebesar 120%

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja *Output*

Pengukuran kinerja Wakil Menteri BUMN dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, Pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1.	:	Kontribusi BUMN Sektor Industri dalam Peningkatan <i>Value</i> BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)
-----------------------------	---	--

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

a. *Net Profit*

Target Renstra	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	% 2024	Growth
Rp436,86 triliun	Rp240,90 triliun	310,46 triliun	Rp295,10 triliun	120,00%	-4,95%

Capaian indikator kinerja *Net Profit* merupakan realisasi jumlah laba bersih BUMN dalam pembinaan Wakil Menteri BUMN. Realisasi *Net Profit* tahun 2024 sebesar Rp295,10 triliun atau tercapai maksimum 120,00% melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp240,90 triliun didukung oleh perbaikan kinerja BUMN dengan upaya optimalisasi pendapatan dan efisiensi biaya. Selain itu, capaian *Net Profit* Tahun 2024 lebih rendah dari realisasi Net Profit Tahun 2023 secara gabungan sebesar Rp310,46 Triliun dengan pertumbuhan sebesar -4,95% yang disebabkan oleh kondisi global yang berpengaruh terhadap capaian *Net Profit* seperti ICP, harga komoditas dan nilai tukar. Jika dilakukan perbandingan dengan target renstra gabungan tahun 2024, realisasi Net Profit 2024 masih di bawah target disebabkan oleh terdapat perbedaan asumsi penyusun renstra 2020 – 2024 dan *timeline* penyusunan target.

Jika dilihat dari masing-masing klaster BUMN bahwa capaian *Net Profit* Tahun 2024 kontribusi terbesar oleh Klaster Jasa Keuangan dengan Realisasi *Net Profit* sebesar Rp137,52 Triliun, Klaster Industri Energi, Minyak dan Gas sebesar Rp61,34 Triliun dan Klaster Industri Mineral dan Batubara sebesar Rp35,55 Triliun. Namun, terdapat beberapa klaster yang di bawah target seperti Klaster Asuransi dan Dana Pensiun, Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media, serta Klaster Industri Kesehatan.

Berikut ini merupakan rincian kontribusi masing-masing klaster terhadap pencapaian *Net Profit* Wakil Menteri BUMN:

1) Klaster Industri Energi Minyak dan Gas

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
60,35	88,59	61,34	-30,76	101,66%

Pada tahun 2024, realisasi *Net Profit* pada Klaster Energi, Minyak dan Gas sebesar Rp61,34 Triliun atau setara 101,66% dari target 2024 sebesar Rp60,35 Triliun dan dibawah Realisasi tahun 2023 sebesar 68,12% dari realisasi 2023 sebesar Rp88,59 Triliun. Adapun Realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 karena bukan menjadi Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.

Pada tahun 2024, realisasi *Net Profit* Klaster Industri Energi, Minyak dan Gas di atas target, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kinerja operasional dan efisiensi biaya pada BUMN klaster energi, minyak dan gas namun masih di bawah Realisasi tahun 2023 disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja BUMN Sektor Industri Energi, Minyak dan Gas seperti nilai tukar dan penurunan *crack spread* kilang. Selain itu, jika dilihat dari tahun 2020 – 2023 bahwa menunjukkan tren positif sehingga capaian kinerja *Net Profit* dari tahun 2020 – 2024 menunjukkan performa positif dan capaian yang konsisten. Pada tahun 2020 merupakan capaian terendah selama empat tahun diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 2021, perekonomian perlahan kembali pulih, dan terus meningkat hingga tahun 2024.

Jika dilakukan penjabaran tiap BUMN di bawah Klaster Emigas, PT PLN berhasil mencatatkan realisasi laba bersih (prognosa) tahun 2024 sebesar Rp15,84 triliun atau setara 100,19% dari target tahun 2024 sebesar Rp15,81 Triliun dan di bawah realisasi tahun 2023 sebesar 29,54%. Pada tahun 2024, PT PLN menghadapi tantangan berat seperti kondisi geopolitik yang tidak stabil, penguatan nilai dollar, dan cuaca ekstrim namun berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar penjualan listrik sebesar 17,79 TWh, penambahan pelanggan sebesar 3,74 Juta Pelanggan, dan penambahan daya sebesar 10.102 MVA sehingga PT PLN mampu mencatatkan pertumbuhan *revenue* lebih tinggi dibandingkan dengan beban operasionalnya.

Di sisi lain, PT Pertamina berhasil merealisasikan laba bersih (prognosa) pada tahun 2024 sebesar Rp45,50 triliun atau 102,18% dari target sebesar Rp44,53 Triliun dan di bawah dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp66,11 triliun.

Pencapaian laba bersih tersebut utamanya didukung oleh peningkatan realisasi penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, dan produk minyak sebesar Rp861,71 triliun atau 105,79% dari target 2024 sebesar Rp814,52 triliun, serta adanya penurunan beban operasi lainnya sebesar Rp72,18 triliun atau 47,14% dari target 2024 sebesar Rp153,12 triliun.

Capaian *Net Profit* tak lepas dari peran Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas dalam melakukan pembinaan dengan *monitoring* BUMN di bawah binaan yaitu PT PLN dan PT Pertamina untuk terus melakukan *product diversification, optimization & cost efficiency, system digitalization*, serta berperan aktif menjadi *market leader* dalam mencari peluang bisnis ke depan.

2) Klaster Industri Mineral dan Batubara

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
Rp17.80 Triliun	Rp25.49 Triliun	Rp35.55 Triliun	39,5%	120%

Capaian realisasi *Net Profit* pada BUMN di lingkup Keasdepan Bidang Industri Mineral dan Batubara Tahun 2024 yaitu sebesar Rp35,55 Triliun atau 200% dari target sebesar Rp17,80 Triliun. Capaian ini dikontribusi oleh realisasi *net profit* MIND ID secara konsolidasi yang didorong oleh realisasi serap laba yang berasal dari PT Freeport Indonesia yang mencapai Rp37,95 Triliun.

Adapun pada PT Krakatau Steel Tbk, Setelah memperhitungkan pajak final dan pajak penghasilan, Perusahaan memperoleh rugi periode berjalan sebesar USD148,47 juta atau *equivalent* dengan rugi sebesar Rp2,40 Triliun (Kurs BI Jisdor per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157,00), dibandingkan dengan target RKAP sebesar USD 25,71 juta. ketidaktercapaian target *net profit* PTKS di tahun 2024 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat Laba Selisih Kurs sebesar USD30,06 juta yang disebabkan oleh menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) dari kurs per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.439,00 menjadi sebesar Rp16.157,00 per 31 Desember 2024;
- PTKS memperoleh bagian rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD53,23 juta; dan
- Dengan pendapatan keuangan sebesar USD3,01 juta, PTKS juga memiliki beban keuangan sebesar USD157,07 juta sehingga Perseroan mengalami rugi sebelum pajak final dan beban/(manfaat) pajak penghasilan sebesar USD135,51 juta.

Kedepannya akan terus dilakukan monitoring secara berkala atas kinerja BUMN Klaster Mineral dan Batubara untuk memastikan ketercapaian target di tahun selanjutnya.

3) Klaster Industri Pangan dan Pupuk

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
Rp4.646 miliar	Rp7.308 miliar	Rp8.771 miliar	20%	189%

Net Profit BUMN Industri Pangan dan Pupuk mencapai Rp8.771 miliar atau 189% dari target. Net Profit BUMN Industri Pangan dan Pupuk pada tahun 2024 lebih tinggi daripada pencapaian pada tahun 2023 sebesar Rp7.308 miliar. Walaupun demikian, masih lebih rendah dibandingkan pencapaian pada tahun 2022 sebesar Rp18.546 miliar dampak terjadinya lonjakan windfall harga urea dan amoniak global.

Pencapaian Laba Bersih ini merupakan Konsolidasi tanpa Eliminasi atas Capaian Laba BUMN Sektor Industri Pangan dan Pupuk.

PT Pupuk Indonesia (Persero) membukukan laba bersih sebesar Rp8.616 miliar atau 212% dari target. Hal ini utamanya didorong oleh peningkatan pendapatan lainnya yang diperoleh dari upaya restrukturisasi pinjaman jangka panjang perbankan dan utang usaha PT Rekayasa Industri sehingga diperoleh gain sebesar Rp2.927 miliar. Selain itu, keberhasilan negosiasi terhindar dari Liquidated Damages dengan dilakukan jurnal pembalikan atas provisi Liquidated Damages sebesar Rp1.134 miliar dari yang sebelumnya telah dicatat PT Rekayasa Industri sebagai beban.

Perum BULOG membukukan laba bersih sebesar Rp62 miliar atau 14% dari target yang disebabkan oleh tingginya beban keuangan sebesar Rp2.537 miliar dan rendahnya pencapaian Gross Profit Margin sebesar 10,2% dari target 13,7%.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) membukukan laba bersih sebesar Rp92 miliar atau 73% dari target yang disebabkan oleh rendahnya pencapaian Gross Profit Margin sebesar 10,7% dari target 13,8%. Meskipun demikian, Perusahaan telah mampu melakukan efisiensi pada Beban SGA yang ditunjukkan dari rasio SGA-to-Sales sebesar 8,5% dari target 8,9%, namun tingginya Beban Bunga masih menjadi handicap utama atas rendahnya capaian laba bersih Perusahaan.

4) Klaster Industri Perkebunan dan Kehutanan

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
Rp3,35 triliun	Rp2,36 triliun	Rp3,56 triliun	50,8%	106

Pada Klaster Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, net profit sudah dapat melampaui target 2024 yaitu 106% dengan realisasi sebesar Rp3,56 Triliun dan 150% terhadap realisasi tahun 2023 sebesar Rp2,36 Triliun. Adapun untuk masing-masing BUMN Perkebunan dan Kehutanan, net profit PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tercatat sebesar Rp3,26 Triliun melampaui target RKAP 2024 dan realisasi tahun 2023 salah satunya disebabkan oleh efisiensi pada beban pokok, beban pemasaran dan beban administrasi umum.

Perum Perhutani mencatat net profit sebesar Rp 0,3 Triliun atau 71% dari target RKAP Tahun 2024. Penurunan laba tersebut disebabkan varians pendapatan perusahaan yang masih belum lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya baik secara volume yang di jual maupun harga rata-rata produknya akibat volatilitas pasar global dan berdampak pada pasar dalam negeri, serta menurunnya serapan ekspor atas produk-produk industri hasil hutan.

5) Klaster Industri Kesehatan

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
Rp0,06 T	-Rp2,04 T	-Rp1,15 T	43,62%	0,00

Capaian *Net Profit* BUMN Klaster Industri Kesehatan tahun 2024 sebesar negatif Rp1,15 triliun dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar Rp0,06 triliun. Ketidaktercapaian tersebut utamanya disebabkan oleh ketidaktercapaian *top line* dari beberapa entitas anak Kimia Farma (dimana mayoritas penjualan masih pada produk bermargin rendah dan belum adanya produk *champion*), adanya *impairment one-time* atas beberapa pos (piutang, persediaan, dan klaim diskon), tingginya beban bunga di entitas Kimia Farma, efisiensi beban penjualan dan administrasi yang masih belum optimal, serta adanya pencadangan piutang di IGM dan INAF.

Langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Industri Kesehatan untuk mencapai target *Net Profit* tahun 2025 yaitu melakukan upaya penyehatan kondisi dan peningkatan kinerja perusahaan melalui pelaksanaan proses restrukturisasi keuangan dan reorientasi bisnis.

6) Klaster Industri Manufaktur

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
Rp1,55 T	Rp1,47 T	Rp1,65 T	12,0%	105,5%

Capaian *Net Profit* BUMN Klaster Industri Manufaktur tahun 2024 sebesar Rp1,65 triliun atau 105,5% dari target Perjanjian Kinerja 2024.

Ketercapaian Target Net Profit ini sejalan dengan pembinaan yang telah dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur yang selalu menitikberatkan pada pertumbuhan bisnis BUMN melalui monitoring dan evaluasi kinerja keuangan (periodik) dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:

- Percepatan efektif kontrak dan pemastian peningkatan perolehan pendapatan utamanya untuk proyek Refurbishment KRI, Radar GCI, dan modernisasi pesawat.
- Mendorong penyelesaian proyek-proyek strategis sesuai dengan target dan timeline.
- Melakukan percepatan penyehatan keuangan PTDI dan PT PAL melalui restrukturisasi utang dengan para kreditur.
- Merencanakan secara terstruktur dan upaya konkret untuk menurunkan beban utang berbunga PT Pindad yang saat ini sudah sangat besar dan dalam kondisi yang tidak aman.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan intensif pada ketiga parameter keuangan dan upaya-upaya pengendalian biaya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas peluang perolehan proyek dari kontrak pekerjaan atau produk yang potensial dan memiliki margin tinggi.
- Melakukan evaluasi atas beberapa tender yang mengalami kekalahan agar dapat dilakukan mitigasi risiko untuk proses tender lainnya sehingga dapat meningkatkan capaian pendapatan.

Kedepannya Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur akan terus melakukan monitoring kinerja BUMN secara berkala untuk memastikan ketercapaian target di tahun mendatang.

7) Klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
2,66	5,36	3,12	-44,68%	17,29

Capaian *Net Profit* BUMN Klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung tahun 2024 sebesar Rp3,12 triliun atau 17,31% dari target Perjanjian Kinerja 2024. Ketercapaian ini utamanya disebabkan oleh pelaksanaan strategi yang berfokus pada optimalisasi pendapatan dari berbagai lini bisnis, termasuk pariwisata, penerbangan, dan pengelolaan destinasi unggulan.

Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung untuk mencapai target *Net Profit* tahun 2025 beberapa diantaranya yaitu mendorong efisiensi biaya dan sinergi antar-BUMN guna meningkatkan daya saing dan profitabilitas, mendorong penerapan transformasi digital dalam operasional ketiga BUMN untuk menekan biaya, memperbaiki produktivitas dan meningkatkan customer experience. Sinergi antar-BUMN di Klaster Pariwisata juga terus diperkuat guna menciptakan ekosistem layanan pariwisata dan penerbangan yang lebih terintegrasi. Dengan langkah-langkah ini untuk memastikan BUMN Klaster pariwisata dan pendukung memiliki strategi yang solid dalam menghadapi tantangan industri dan mencapai target profit yang telah ditetapkan.

8) Klaster Jasa Keuangan

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
115.044	140.092	137.515	-1,84%	120%

Capaian *Net Profit* BUMN Klaster Jasa Keuangan tahun 2024 sebesar Rp137,515 triliun atau 120% dari target Perjanjian Kinerja 2024. Ketercapaian ini utamanya disebabkan oleh pelaksanaan strategi ekspansi kredit, efisiensi operasional, serta penguatan layanan digital yang semakin meningkatkan daya saing perbankan nasional dengan kontributor terbesar *net profit* pada BRI sebesar Rp61,267 Triliun.

Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Keuangan untuk mencapai target *Net Profit* tahun 2025 yaitu senantiasa mendorong Himbara mengupayakan perbaikan kinerja, menjaga pertumbuhan laba, meningkatkan daya saing, serta memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

9) Klaster Jasa Infrastruktur

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
-Rp0,725 triliun	-Rp0,231 triliun	3,33 triliun	-1541,4%	120%

Capaian *Net Profit* BUMN Klaster Jasa Infrastruktur tahun 2024 sebesar -Rp0,725 triliun atau 120% dari target Perjanjian Kinerja 2024. ketidaktercapaian ini utamanya disebabkan oleh terdapat BUMN dengan realisasi *Net Profit* yang lebih tinggi dari target secara signifikan antara lain PT Utama Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Perum Perumnas. Namun, masih terdapat 2 BUMN dalam pengelolaan portofolio Keasdepan Bidang Jasa Infrastruktur yang masih mengalami kerugian pada tahun 2024 antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Infrastruktur untuk mencapai target *Net Profit* tahun 2025 yaitu memastikan proses restrukturisasi keuangan Perusahaan berjalan sesuai dengan target dan ketentuan serta aturan yang berlaku, sehingga dapat memperbaiki kondisi finansial dan meningkatkan efisiensi operasional, serta dapat beroperasi dengan struktur keuangan yang lebih sehat.

10) Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
Rp3,75 triliun	Rp4,44 triliun	Rp2,94 triliun	-33,75%	78,39%

Capaian *Net Profit* BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun tahun 2024 sebesar Rp2,94 triliun atau 78,39% dari target Perjanjian Kinerja 2024. Ketidaktercapaian ini utamanya disebabkan oleh *Net Profit* PT BPUI (Persero) yang jauh di bawah target Perjanjian Kinerja 2024, yaitu sebesar Rp1.014,55 miliar atau 30,60% dari yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp3.315,28 miliar pada Perjanjian Kinerja 2024. Hal ini disebabkan oleh beban *underwriting* yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan *underwriting* pada hampir seluruh Anggota Holding Asuransi dan Penjaminan, utamanya dari beban klaim KUR PT Askrindo dan PT Jamkrindo.

Langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun untuk mencapai target *Net Profit* tahun 2025 yaitu melakukan

monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja operasional dan keuangan BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun.

11) Klaster Jasa Logistik

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
4,6 Triliun	7,5 Triliun	7,1 Triliun	-5,3%	154%

Capaian *Net Profit* BUMN Klaster Jasa Logistik tahun 2024 sebesar Rp7,1 triliun atau 154% dari target Perjanjian Kinerja 2024. Capaian *Net Profit* BUMN Klaster Jasa Logistik di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, terdapat 3 (tiga) BUMN yang Laba Bersihnya tidak tercapai yaitu PT ASDP, PT INKA dan Perum DAMRI dengan faktor sebagai berikut:

- PT ASDP tidak tercapai karena realisasi pengadaan kapal yang tidak terlaksana di tahun 2024 sehingga berdampak pada laba perusahaan
- PT INKA tidak tercapai karena realisasi kontrak di tahun 2024 yang bergeser ke tahun berikutnya sehingga mempengaruhi laba perusahaan
- Perum DAMRI tidak tercapai karena peningkatan beban penyusutan, beban non usaha serta adanya kerugian atas penghapusbukuan dan pemindahtanganan armada bus

Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Logistik untuk mencapai target *Net Profit* tahun 2025 yaitu membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan (*customer relationship*) dengan meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan perbaikan tata kelola penugasan, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terutama dengan BUMN Lingkup Klaster Logistik melalui program Sinergi dan Integrasi Logistik Ekosistem di Lingkup BUMN, sehingga mencapai skala ekonomi dan lebih efisien, melakukan pengendalian dan efisiensi biaya, serta melakukan peremajaan dan perbaikan sarana dan prasarana secara berkala.

12) Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
Rp27,24 T	Rp28,69 T	Rp24,97 T	(12,97%)	91,66%

*Untuk Realisasi Tahun 2023 berdasarkan angka audited yaitu sebesar Rp26,48 Miliar

Capaian *Net Profit* BUMN Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media tahun 2024 sebesar Rp24,97 triliun atau 91,66% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar Rp27,24 triliun, ketidaktercapaian ini utamanya disebabkan karena rendahnya realisasi pendapatan pengelolaan SDA pada Perum Jasa Tirta I, pembukuan

net loss pada Perum PNRI, penurunan realisasi *net profit* pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk disebabkan oleh meningkatnya persaingan di segmen *mobile broadband* dan *fixed broadband* sehingga berdampak pada penurunan pendapatan dari layanan *voice* dan SMS, serta penurunan pendapatan dari Perum Peruri akibat terganggunya *supply chain* kertas dampak dari krisis energi dan perang eropa. Untuk mendukung ketercapaian target *Net Profit* kedepan, Keasdepan Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media akan terus melaksanakan upaya perbaikan dengan pelaksanaan diversifikasi produk (Pembangunan *Data Center* untuk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, pembangunan *platform* aplikasi digital SPBE untuk Perum Peruri, perbaikan kinerja keuangan melalui *refocusing* bisnis BUMN agar berfokus pada usaha yang memiliki tingkat *margin/keuntungan* tinggi, dan penambahan wilayah kerja untuk Perum Jasa Tirta sehingga akan meningkatkan pendapatan perusahaan.

Sebagian besar klaster di bawah naungan Wakil Menteri BUMN, mampu mencatatkan Realisasi *Net Profit* yang melebihi target perjanjian kinerja sebagai bentuk perbaikan kinerja BUMN dan kontribusi lebih bagi negara dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk klaster yang terealisasi masih di bawah target, Wakil Menteri BUMN akan terus mendorong BUMN untuk melakukan menerapkan strategis bisnis dan perbaikan kinerja untuk mencapai target-target yang ditentukan.

b. **EBITDA Margin**

Target Renstra	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	% 2024	Growth
N/A	22,36%	25,65%	24,50%	109,59%	-4,49%

Pada Tahun 2024, ketercapaian EBITDA Margin tercapai 24,50% atau 109,59% di atas target sebesar 22,36% didukung oleh capaian EBITDA di atas target. Namun, capaian EBITDA Margin pada tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 25,65% yang disebabkan oleh lebih rendahnya capaian EBITDA akibat adanya perubahan kondisi global yang berpengaruh terhadap harga komoditas, ICP, suku bunga dan kurs.

Capaian EBITDA Margin Klaster tahun 2024 dengan capaian tiga tertinggi yaitu Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media dengan capaian sebesar 46,99%, Klaster Jasa Keuangan dengan capaian sebesar 45,37%, dan Klaster Industri Mineral dan Batubara sebesar 31,30%.

Selain itu, terdapat enam klaster yang mampu mencapai target EBITDA Margin yaitu Klaster Industri Manufaktur, Klaster Industri Energi, Minyak dan Gas, Klaster Industri

Mineral dan Batubara, Klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung, Klaster Jasa Logistik dan Klaster Industri Perkebunan dan Kehutanan. Enam klaster lain, Realisasi EBITDA Margin tahun 2024 di bawah target. Untuk mendorong capaian EBITDA Margin, ke depannya Wakil Menteri BUMN mengupayakan agar BUMN melakukan perencanaan dengan pendekatan *forward looking* untuk mengantisipasi faktor-faktor eksternal seperti kondisi geopolitik global dan perubahan kebijakan yang berpengaruh terhadap capaian EBITDA Margin.

Adapun penjelasan capaian EBITDA Margin masing-masing klaster BUMN sebagai berikut.

1) Klaster Industri Energi Minyak dan Gas

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
15,60%	19,15%	17,85%	-6,79%	114,44%

Capaian EBITDA Margin BUMN Klaster Industri Energi Minyak dan Gas tahun 2024 sebesar 17,85% atau 114,44% dari target sebesar 15,60% yang didukung oleh capain prognosa EBITDA tahun 2024 di atas target yang didukung oleh perbaikan kinerja oleh BUMN Sektor Industri Energi, Minyak dan Gas. Namun, Realisasi EBITDA Margin Tahun 2024 Klaster Emigas di bawah Realisasi tahun 2023 sebesar 19,15% dan target Renstra 2024 sebesar 21,97% disebabkan oleh karena kondisi ketidakstabilan geopolitik utamanya berpengaruh terhadap ICP dan nilai tukar, serta penurunan *creak spread*.

Dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024, Capaian EBITDA Margin memiliki tren cenderung menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2020 dan terus mengalami perbaikan dikontribusikan oleh perbaikan bisnis sehingga mampu memaksimalkan pendapatan dan efisiensi biaya. Fluktuasi EBITDA Margin dalam realisasinya dikarenakan realisasi EBITDA dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga minyak mentah dan harga batu bara. Atas kondisi tersebut Asdep Emigas mendorong BUMN di bawah Klaster Emigas untuk terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan langkah-langkah antisipatif atas kondisi global yang tidak pasti (*uncertainty*).

Jika dilakukan *breakdown* per masing-masing BUMN, pada tahun 2024 realisasi prognosa EBITDA Margin PT PLN sebesar 28, 50% atau setara 167% dari target 2024 sebesar 17,08% dan lebih baik dari realisasi tahun 2023 sebesar 21,42%. Capain EBITDA Margin oleh PT PLN utamanya dipengaruhi oleh keberhasilan PT PLN dalam mencapai pertumbuhan penjualan Listrik mencapai 17,79 TWh sehingga capaian *Net Profit* melebihi target. Di sisi lain, realisasi prognosa EBITDA Margin PT Pertamina tahun 2024 sebesar 14,78% atau 99,04% dari

target tahun 2024 sebesar 14,92% dan di bawah realisasi tahun 2023 sebesar 18,19%. Ketidaktercapaian EBITDA *Margin* sejalan dengan persentase kenaikan Pendapatan yang lebih besar daripada kenaikan EBITDA.

2) Klaster Industri Mineral dan Batubara

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
21,24%	31,11%	31,30%	0,6%	120%

Capaian realisasi EBITDA Margin Keasdepan Bidang Industri Mineral dan Batubara yaitu sebesar 31,30% atau 147% dari target sebesar 21,24%. Capaian tersebut dikontribusi oleh Capaian EBITDA BUMN Binaan sebesar Rp50,52 Triliun, atau 164% dari target PK sebesar Rp30,87 Triliun. Ketercapaian target tersebut dikontribusi oleh kinerja positif MIND ID yang melampaui target. Adapun pada PTKS, meskipun terdapat perolehan laba atas selisih kurs yang disebabkan atas melemahnya Rupiah atas Dolar Amerika Serikat (USD), target EBITDA tetap tidak tercapai dikarenakan PTKS memperoleh bagian rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama dengan nilai yang cukup signifikan.

Kedepannya akan terus dilakukan monitoring secara berkala atas kinerja BUMN Klaster Mineral dan Batubara untuk memastikan ketercapaian target di tahun selanjutnya.

3) Klaster Industri Pangan dan Pupuk

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
8,80%	14,23	9,33%	-34%	106%

EBITDA Margin BUMN Industri Pangan dan Pupuk mencapai 9,33% dari target sebesar 8,80%. EBITDA Margin BUMN Industri Pangan dan Pupuk pada tahun 2024 lebih rendah daripada pencapaian pada tahun 2023 sebesar 14,23% dan tahun 2022 sebesar 30,08%. Lebih detail, capaian untuk EBITDA Margin pada masing-masing Perusahaan adalah sebagai berikut.

EBITDA Margin PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai 16,62% dari target sebesar 13,42%, utamanya didorong oleh pengakuan pendapatan jasa EPC akibat pembalikan atas provisi Liquidated Damages. Namun demikian, EBITDA Margin PT Pupuk Indonesia (Persero) pada tahun 2024 lebih rendah daripada pencapaian pada tahun 2023 sebesar 24,55% dan tahun 2022 sebesar 46,55%. EBITDA Margin Perum BULOG mencapai 0,92% dari target sebesar 3,05%, utamanya disebabkan rendahnya pencapaian Gross Profit Margin sebesar

10,2% dari target 13,7%. Capaiannya lebih rendah daripada pencapaian pada tahun 2023 sebesar 4,54% dan tahun 2022 sebesar 5,35%.

EBITDA Margin PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mencapai 0,92% dari target sebesar 3,05%. Capaiannya menurun apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2023 sebesar 4,54% dan tahun 2022 sebesar 5,35%.

4) Klaster Industri Perkebunan dan Kehutanan

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
16,11%	20,11%	21,77%	8,25%	135%

Capaian EBITDA *Margin* Klaster Perkebunan dan Kehutanan tercatat sebesar 21,77% atau 135% terhadap target 2024 dan 148% terhadap realisasi tahun 2023 sebesar 20,11%. Bagi PTPN III (Persero), capaian EBITDA *Margin* sebesar 22,71% yang lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya disebabkan oleh harga pokok produksi yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan laba bersih yang mengalami kenaikan.

Perum Perhutani mencatat realisasi EBITDA *Margin* sebesar 9.1% atau 76.5% dari target RKAP Tahun 2024 atau sebesar 66% dibandingkan capaian di tahun 2023. Profitabilitas Perhutani pada Tahun 2024 (*Unaudited*) mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan sebelumnya. Volatilitas *margin* dipengaruhi oleh kerentanan produk komoditas Perhutani (*product vulnerable*) terhadap fluktuasi harga komoditas utama yaitu kayu dan non kayu (gum rosin, turpentine oil dan derivate) di pasaran dunia akibat situasi geopolitik yang berpengaruh terhadap perdagangan dunia, namun fluktuasi harga komoditas perusahaan ini dimoderasi oleh tingkat hutang yang terkontrol dan rekam jejak pemeliharaan saldo kas yang cukup.

5) Klaster Industri Kesehatan

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
11,40	-3,14	-1,21	61,46%	0,00

Capaian EBITDA *Margin* BUMN Klaster Industri Kesehatan tahun 2024 sebesar -1,21% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 11,40%. Ketidaktercapaian ini utamanya disebabkan oleh masih tingginya HPP dan SGA pada Biofarma Group. Langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Industri Kesehatan untuk mencapai target EBITDA *Margin* tahun 2025 yaitu melakukan upaya

penyehatan kondisi dan peningkatan kinerja perusahaan melalui pelaksanaan proses restrukturisasi keuangan dan reorientasi bisnis.

6) Klaster Industri Manufaktur

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
12,56%	12,73%	11,95%	-0,79p.p	92,5%

Capaian EBITDA *Margin* BUMN Klaster Industri Manufaktur tahun 2024 sebesar 11,95% atau 92,5% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 12,56%. Ketidaktercapaian indikator EBITDA *Margin* ini disebabkan karena capaian Pendapatan sebesar Rp34,30 Triliun atau 106,1% dari target PK 2024, lebih tinggi dibandingkan capaian EBITDA sebesar Rp4,10 Triliun atau 98,0% dari target PK 2024. Selain itu, EBITDA pada Defend ID yang tidak mencapai target turut berkontribusi atas ketidaktercapaian target EBITDA *Margin* hal ini dikarenakan tingginya BPP pada Anggota Holding Defend ID. Kedepannya Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur akan terus melakukan monitoring kinerja BUMN secara berkala untuk memastikan ketercapaian target di tahun mendatang.

7) Klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
30,65	28,63	30,94	8,07%	0,95

Capaian EBITDA *Margin* BUMN Klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung tahun 2024 sebesar 30,94% atau 0,95% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 30,65%. Ketercapaian ini utamanya disebabkan oleh

Peningkatan EBITDA *Margin* ini merupakan hasil dari upaya strategis BUMN Klaster Pariwisata dan Pendukung dalam meningkatkan efisiensi operasional serta pengendalian biaya yang ketat. PT Aviastar Pariwisata Indonesia (InJourney) berfokus pada optimalisasi sumber pendapatan melalui diversifikasi lini bisnis dan sinergi operasional antarunit. Sementara itu, PT Garuda Indonesia berhasil memanfaatkan momentum pemulihan trafik penumpang pasca pandemi, yang didukung oleh langkah restrukturisasi keuangan. Adapun Perum LPPNPI menunjukkan kemampuan pengelolaan operasional yang baik, terutama dalam memaksimalkan pendapatan dari penerbangan internasional dan jasa navigasi.

8) Klaster Jasa Keuangan

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
46,40%	48,13%	45,37%	-5,74%	98%

Capaian PPOP *Margin* BUMN Klaster Jasa Keuangan tahun 2024 sebesar 45,37% atau 98% dari target Perjanjian Kinerja 2024. Ketidaktercapaian ini utamanya disebabkan oleh PPOP Margin yang tidak mencapai target pada BRI 43,01%, BNI 38,47%, dan BTN 17,38% yang utamanya karena terjadi ketidakpastian ekonomi saat ini, peningkatan suku bunga, dan kualitas kredit yang masih terus diperbaiki. Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Keuangan untuk mencapai target PPOP *Margin* tahun 2025 yaitu mendorong Himbara untuk selalu berupaya meningkatkan profitabilitas dalam meningkatkan *shareholder's return* melalui efisiensi biaya, utamanya yaitu biaya CKPN.

9) Klaster Jasa Infrastruktur

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
17,56%	18,25%	18,51%	1,4%	105,41%

Capaian EBITDA *Margin* BUMN Klaster Jasa Infrastruktur tahun 2024 sebesar 18,51% atau 105,41% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 17,56%. Ketercapaian ini utamanya disebabkan oleh adanya peningkatan revenue pada BUMN Klaster Jasa Infrastruktur.

Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Infrastruktur untuk mencapai target EBITDA *Margin* tahun 2025 yaitu meningkatkan likuiditas kas dan memperkuat rasio kesehatan keuangan perusahaan salah satunya melalui restrukturisasi keuangan dan percepatan penagihan piutang.

10) Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
15,07%	12,88%	10,71%	-32,52%	71,07%

Capaian EBITDA *Margin* BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun tahun 2024 sebesar 10,71% atau 71,07% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 15,07%. Ketidaktercapaian ini utamanya disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi EBITDA yang utamanya disebabkan oleh nilai EBITDA PT BPUI yang berada di bawah target PK 2024, yaitu sebesar Rp1.525,82 miliar atau 29,54%

dari target PK tahun 2024 sebesar Rp5.166,06 miliar. Hal ini disebabkan oleh beban underwriting yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan underwriting pada hampir seluruh Anggota Holding Asuransi dan Penjaminan, utamanya dari beban klaim KUR PT Askrindo dan PT Jamkrindo.

Langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun untuk mencapai target EBITDA *Margin* tahun 2025 yaitu melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja operasional dan keuangan BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun.

11) Klaster Jasa Logistik

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
19,9%	24,8%	24,4%	-1,61	122

*Realisasi 2024 menggunakan angka *Prognosa* 2024

Capaian EBITDA *Margin* BUMN Klaster Jasa Logistik tahun 2024 sebesar 24,4% atau 122% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 19,9%. Capaian EBITDA *Margin* BUMN Klaster Jasa Logistik di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, terdapat 3 (tiga) BUMN yang tidak mencapai target yaitu PT PELNI, PT INKA dan Perum DAMRI karena laba yang tidak tercapai serta sebagian besar usahanya merupakan penugasan.

Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Logistik untuk mencapai target EBITDA *Margin* tahun 2025 yaitu perbaikan tata kelola penugasan sehingga tidak merugikan perusahaan, meningkatkan kinerja *core business* dengan menangkap peluang bisnis yang tidak bergantung penugasan pemerintah (komersialisasi), serta melanjutkan program digitalisasi proses bisnis sehingga dapat lebih efisien.

12) Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
49,00%	46,75%	46,99%	0,51%	95,91%

*Untuk Realisasi Tahun 2023 berdasarkan angka audited yaitu sebesar 48,94%

Capaian EBITDA *Margin* BUMN Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media tahun 2024 sebesar 46,99% atau 95,91% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 49,00%. Ketidaktercapaian EBITDA *Margin* disebabkan karena :

- Penurunan EBITDA *Margin* pada Perum Jasa Tirta II disebabkan salah satunya disebabkan atas ketidaktercapaian pendapatan listrik karena 2 unit turbin tidak dapat beroperasi, penurunan pendapatan air baku, penurunan

pendapatan air bersih, penurunan pendapatan pariwisata, penurunan pendapatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), dan penurunan pendapatan jasa konstruksi yang belum tercapai di anak perusahaan. Selain itu, pada tahun 2024 PJT II melakukan pembubaran Dana Pensiun, sehingga ada penurunan total EBITDA akibat biaya likuidasi/ pembubaran dana pensiun.

- b) Penurunan EBITDA *Margin* Perum PNRI dibandingkan dengan targetnya akibat pelaksanaan penjualan aset Kantor Pusat Jakarta dan Kantor Cabang Surabaya tidak dapat terlaksana sehingga nilai EBITDA mengalami koreksi yang cukup signifikan.
- c) Penurunan EBITDA *Margin* Perum LKBN Antara dibandingkan dengan targetnya disebabkan karena penurunan pada beban administrasi umum dibandingkan dengan target disebabkan adanya pembayaran defisit solvabilitas Dapen serta disebabkan karena kenaikan kurs dollar yang berakibat pada peningkatan beban pokok penjualan sehingga menurunkan EBITDA.
- d) Penurunan EBITDA *Margin* Perum Peruri dibandingkan dengan targetnya disebabkan oleh penurunan Pendapatan Uang Kertas karena Bank Indonesia mengalami kendala pengadaan kertas uang akibat terganggunya *supply chain* kertas dampak dari krisis energi dan perang eropa, sehingga pendapatan uang pecahan besar akan dialokasikan pada tahun 2025.
- e) Penurunan EBITDA *Margin* PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dibandingkan dengan targetnya disebabkan dampak penurunan pendapatan akibat meningkatnya persaingan di segmen *mobile broadband* dan *fixed broadband*. Selain itu, pada tahun 2024 terdapat kenaikan pada beban *mandatory* seperti Biaya Hak Penggunaan Frekuensi termasuk Program Pensiun Dini yang dilaksanakan di Q2 2024 yang berdampak pada peningkatan beban sehingga EBITDA mengalami penurunan.

Untuk mendukung ketercapaian target *EBITDA Margin* ke depan, Keasdepan Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media akan terus melaksanakan upaya perbaikan dengan pelaksanaan diversifikasi produk (Pembangunan *Data Center* untuk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, perbaikan kinerja keuangan melalui *refocusing* bisnis BUMN agar berfokus pada usaha yang memiliki tingkat *margin/keuntungan* tinggi, dan penambahan wilayah kerja pada Perum Jasa Tirta.

c. *Return on Equity*

Target Renstra	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	% 2024	Growth
N/A	7,00%	9,03%	7,95%	113,53%	-11,93%

Realisasi Indikator *Return On Equity* (ROE) pada Tahun 2024 sebesar 7,95% mencapai 113,53% di atas target sebesar 7,00%. Capaian ROE tersebut didukung oleh capaian *Net Profit* terealisasi di atas target yang didukung oleh Klaster Industri Mineral dan Batubara. Selain itu, Realisasi ROE tahun 2024 tercapai di bawah tahun 2023 sebesar 9,03% disebabkan oleh capaian *Net Profit* lebih rendah.

Terdapat 5 (lima) Klaster yang tidak mencapai targetnya yaitu Klaster Industri Manufaktur, Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun, Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media, Klaster Industri Energi, Minyak dan Gas serta Klaster Industri Kesehatan, disebabkan oleh salah satunya realisasi *Net Profit* di bawah target.

Adapun penjelasan capaian ROE untuk masing-masing kluster sebagai berikut:

1) **Klaster Industri Energi Minyak dan Gas**

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
3,69%	5,38%	3,57%	-33,64%	96,72%

Capaian ROE BUMN Klaster Industri Energi Minyak dan Gas tahun 2024 sebesar 3,57% atau lebih rendah dari target sebesar 3,69% dan lebih rendah dari realisasi tahun 2023 sebesar 5,38%. Selain itu, Capaian ROE Tahun 2024 juga di bawah target Renstra 2024 disebabkan oleh perbedaan *timeline* penyusunan target sehingga banyak parameter yang sudah berubah sesuai kondisi bisnis dan kondisi eksternal salah satunya asumsi pertumbuhan ekonomi, dan asumsi lain yang relevan dalam penentuan target kinerja. Ketidaktercapaian realisasi ROE Klaster Emigas disebabkan oleh persentase realisasi *equity* yang lebih besar dari persentase realisasi laba bersih.

Sementara itu, jika dilakukan penjabaran kontribusi BUMN Klaster Emigas, pada Tahun 2024 realisasi *Return On Equity* PT PLN sebesar 28,50% atau lebih baik dari target 2024 sebesar 17,08% dan meningkat dari realisasi 2023 sebesar 21,42%. Capaian tersebut pencapaian *Net Profit* Tahun 2024 di atas target. Di sisi lain, realisasi *Return On Equity* PT Pertamina sebesar 6,52% atau lebih rendah dari target sebesar 7,15% dan menurun dari realisasi 2023 sebesar 10,39%. Ketidaktercapaian ini karena ketercapaian *equity* lebih besar dibandingkan ketercapaian laba bersih pada tahun 2024.

Atas kondisi tersebut Asdep Emigas mendorong BUMN di bawah Klaster Emigas untuk terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan langkah-langkah antisipatif atas kondisi global yang tidak pasti (*uncertainty*) agar mewujudkan BUMN yang mampu *sustainable* dan berdaya saing.

2) Klaster Industri Mineral dan Batubara

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
12,07%	18,57%	21,57%	16%	120%

Capaian realisasi *Return on Equity* (ROE) Keasdepan Bidang Industri Mineral dan Batubara sebesar 21,57% yang mana lebih besar 179% target sebesar 12,07%. Capaian ini utamanya dikontribusi oleh capaian Ekuitas dan Net Profit MIND ID yang melampaui target. Hal tersebut sejalan dengan realisasi *net profit* yang berdampak terhadap meningkatnya ekuitas konsolidasi MIND ID. Pada PTKS, ketidaktercapaian Target ROE dipengaruhi oleh terbakarnya HSM#1 yang mempengaruhi kinerja keuangan PTKS, sehingga PTKS membukukan rugi periode berjalan yang mempengaruhi ketidaktercapaian target ROE pada tahun 2024.

Kedepannya akan terus dilakukan monitoring secara berkala atas kinerja BUMN Klaster Mineral dan Batubara untuk memastikan ketercapaian target di tahun selanjutnya.

3) Klaster Industri Pangan dan Pupuk

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
3,88%	6,22%	7,00%	12,54%	120%

Return on Equity BUMN Industri Pangan dan Pupuk mencapai 7,00% dari target sebesar 3,88%. Capaian tersebut lebih tinggi daripada pencapaian pada tahun 2023 sebesar 6,22% tetapi lebih rendah daripada tahun 2022 sebesar 16,39%. Return on Equity PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai 8,70% dari target sebesar 4,33%, utamanya didorong oleh tercapainya target laba bersih. Return on Equity PT Pupuk Indonesia (Persero) pada tahun 2024 lebih tinggi daripada pencapaian pada tahun 2023 sebesar 6,80% tetapi lebih rendah daripada pencapaian tahun 2022 sebesar 20,31%.

Return on Equity Perum BULOG mencapai 0,65% dari target sebesar 4,61%, disebabkan oleh tingginya beban keuangan dan rendahnya pencapaian gross profit margin. Return on Equity Perum BULOG pada tahun 2024 lebih rendah

daripada pencapaian pada tahun 2023 sebesar 8,47% dan tahun 2022 sebesar 3,75%.

Return on Equity PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mencapai 0,56% dari target sebesar 0,79%. Return on Equity PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) pada tahun 2024 lebih rendah daripada pencapaian pada tahun 2023 sebesar 1,47% dan tahun 2022 sebesar -2,27%.

4) Klaster Industri Perkebunan dan Kehutanan

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
3,90%	2,78%	4,14%	48,92%	106%

Realisasi di tahun 2024, ketercapaian *Return on Equity* (ROE) Klaster Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan tercatat sebesar 4,14% atau 106% dibandingkan dengan target tahun 2024 dan 148% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 2,78%. Adapun ROE PTPN III (Persero) tercatat sebesar 4,42% dimana hal ini disebabkan oleh peningkatan laba bersih, kenaikan harga komoditas CPO, serta efisiensi harga pokok produksi.

Perum Perhutani mencatat ROE *unaudited* 2024 sebesar 2,43% lebih rendah dari capaian tahun 2023 sebesar 4,31%. Hal ini disebabkan oleh laba tahun berjalan yang belum mencapai target serta lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Penurunan laba tersebut disebabkan varians pendapatan perusahaan yang masih belum lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya baik secara volume yang dijual maupun harga rata-rata produknya akibat volatilitas pasar global dan berdampak pada pasar dalam negeri, serta menurunnya serapan ekspor atas produk-produk industri hasil hutan.

Klaster Industri Kesehatan

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
0,30%	-12,45%	-7,83%	62,89%	0,00

Capaian ROE BUMN Klaster Industri Kesehatan tahun 2024 sebesar -7,83% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 0,30%. Ketidaktercapaian ini utamanya disebabkan oleh realisasi *net profit* tahun 2024 yang berada dibawah target yang telah ditetapkan. Langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Industri Kesehatan untuk mencapai target ROE tahun 2025 yaitu melakukan upaya penyehatan kondisi dan peningkatan kinerja perusahaan melalui pelaksanaan proses restrukturisasi keuangan dan reorientasi bisnis.

5) Klaster Industri Manufaktur

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
7,43%	6,87%	6,97%	0,1p.p	93,8%

Capaian ROE BUMN Klaster Industri Manufaktur tahun 2024 sebesar 6,97% atau 93,8% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 7,43%. Ketidaktercapaian ini utamanya disebabkan oleh capaian Equity sebesar Rp23,63 Triliun atau 113,3% dari target PK 2024, lebih tinggi dibandingkan capaian Net Profit sebesar Rp1,65 Triliun atau 105,5% dari target PK 2024. Tingginya capaian Equity tersebut dikontribusi oleh capaian Equity PT Len Industri (Persero)/ Defend ID sebesar Rp16,12 Triliun atau 114,9% dari targetnya sebesar Rp14,04 Triliun. Kedepannya Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur akan terus melakukan monitoring kinerja BUMN secara berkala untuk memastikan ketercapaian target di tahun mendatang.

6) Klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
6,36	21,21	8,76	-58,70%	137,73

Capaian ROE BUMN Klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung tahun 2024 sebesar 8,76% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 137,73%.

Capaian ROE tersebut diperoleh melalui pengelolaan equity dan net profit yang optimal pada masing-masing entitas. Perum LPPNPI mengelola equity sebesar Rp6,71 triliun untuk menghasilkan net profit sebesar Rp0,54 triliun. PT Aviassi Pariwisata Indonesia berhasil memanfaatkan equity sebesar Rp35,74 triliun untuk mencatatkan net profit sebesar Rp2,29 triliun. Sementara itu, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan equity negatif Rp(6,87) triliun, meskipun mencatatkan net profit Rp0,29 triliun, belum mampu mencapai kinerja yang lebih baik karena beban restrukturisasi dan kondisi keuangan perusahaan.

Secara keseluruhan, realisasi ROE pada Asdep JPP menunjukkan efektivitas strategi keuangan dan sinergi operasional pada sebagian besar entitas. Tingginya pencapaian ROE Perum LPPNPI dan PT Aviassi Pariwisata Indonesia mencerminkan kemampuan kedua perusahaan dalam mengelola modal dan menghasilkan laba secara efisien. Namun, langkah perbaikan yang lebih strategis masih diperlukan untuk meningkatkan performa PT Garuda Indonesia, khususnya dalam pengelolaan modal dan aset, guna mencapai target yang lebih baik di tahun mendatang.

7) Klaster Jasa Keuangan

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
17,47%	17,87%	17,60%	98,50%	101%

Capaian ROE BUMN Klaster Jasa Keuangan tahun 2024 sebesar 17,60% atau 101% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 17,47%. Ketercapaian ini utamanya disebabkan oleh ekuitas pada Himbara yang melampaui target dengan total Rp781,235 T serta adanya peningkatan efisiensi operasional, pertumbuhan kredit yang terjaga, serta diversifikasi sumber pendapatan menjadi faktor utama yang memengaruhi capaian ROE pada Himbara. Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Keuangan untuk mencapai target ROE tahun 2025 yaitu Himbara perlu menyusun strategi optimalisasi portofolio kredit, digitalisasi layanan perbankan, serta peningkatan efisiensi operasional yang menjadi faktor utama dalam menjaga dan meningkatkan ROE.

8) Klaster Jasa Infrastruktur

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
-0,27%	-0,09%	1,13%	1355,6%	120%

Capaian ROE BUMN Klaster Jasa Infrastruktur tahun 2024 sebesar 1,13% atau 120% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar -0,27%. Ketercapaian ini utamanya disebabkan oleh adanya kenaikan nilai *Net Profit* pada sebagian BUMN Klaster Jasa Infrastruktur.

Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Infrastruktur untuk mencapai target ROE tahun 2025 yaitu melakukan perbaikan kinerja dengan melakukan restrukturisasi keuangan Perusahaan pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

9) Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
5,37%	6,89%	4,24%	-38,50%	78,85%

Capaian ROE BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun tahun 2024 sebesar 4,24% atau 78,85% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 5,37%. Ketidaktercapaian ini utamanya disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi *Net Profit* utamanya disebabkan oleh *Net Profit* PT BPUI yang jauh di bawah target

PK 2024, yaitu sebesar Rp1.014,55 miliar atau 30,60% dari yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp3.315,28 miliar pada PK tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beban underwriting yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan underwriting pada hampir seluruh Anggota Holding Asuransi dan Penjaminan, utamanya dari beban klaim KUR PT Askrindo dan PT Jamkrindo.

Langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun untuk mencapai target *Return on Equity* tahun 2025 yaitu melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja operasional dan keuangan BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun.

10) Klaster Jasa Logistik

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
4,3%	7,3%	6,2%	-15,06%	144

Capaian ROE BUMN Klaster Jasa Logistik tahun 2024 sebesar 6,2% atau 144% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 4,3%. Capaian ROE BUMN Klaster Jasa Logistik di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, terdapat 3 (tiga) BUMN yang tidak mencapai target yaitu PT PELNI, PT INKA dan Perum DAMRI karena target laba bersih yang tidak tercapai. Sedangkan untuk PT PELNI meskipun labanya tercapai tetapi hal ini tidak sebanding dengan ekuitasnya, dikarenakan sebagian besar usahanya didominasi oleh penugasan. Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Logistik untuk mencapai target ROE tahun 2025 yaitu meningkatkan branding guna menjaga *demand* dan *market share passenger* logistik nasional, perbaikan tata kelola penugasan pemerintah, serta pengusulan tambahan PMN untuk kebutuhan pendanaan perusahaan utamanya PT KAI, PT INKA dan PT PELNI.

11) Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth (R2024/R2023)-1	% Capaian 2024
13,00%	13,96%	11,80%	(15,47%)	90,76%

Capaian ROE BUMN Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media tahun 2024 sebesar 11,80% atau 90,76% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 13,00%. Ketidaktercapaian ini utamanya disebabkan karena rendahnya realisasi pendapatan pengelolaan SDA pada Perum Jasa Tirta I, pembukukan *net loss* pada Perum PNRI, penurunan realisasi *net profit* pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk disebabkan oleh meningkatnya persaingan di segmen *mobile*

broadband dan *fixed broadband* sehingga berdampak pada penurunan pendapatan dari layanan *voice* dan SMS, serta penurunan pendapatan dari Perum Peruri akibat terganggunya *supply chain* kertas dampak dari krisis energi dan perang eropa. Untuk mendukung ketercapaian target *Net Profit* kedepan, Keasdepan Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media akan terus melaksanakan upaya perbaikan dengan pelaksanaan diversifikasi produk (Pembangunan *Data Center* untuk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, pembangunan *platform* aplikasi digital SPBE untuk Perum Peruri, perbaikan kinerja keuangan melalui *refocusing* bisnis BUMN agar berfokus pada usaha yang memiliki tingkat *margin/keuntungan* tinggi, dan penambahan wilayah kerja untuk Perum Jasa Tirta sehingga akan meningkatkan pendapatan Perusahaan.

Sasaran Strategis 2.	:	Meningkatkan Peran BUMN dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
-----------------------------	---	--

Jumlah Nasabah Aktif Mekaar

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024			%		
		Target	Realisasi	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian YoY	Capaian PK	Capain Renstra
		a	b	c	d	e	e/b	e/d	e/c
Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	Jumlah (juta)	15,01	15,07	N/A	15,35	14,40	95,58%	93,83%	N/A

PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. Melalui langkah strategis digitalisasi nasabah PNM, penyediaan wadah pendidikan, serta meningkatkan ikatan secara psikologi dengan nasabah, pada tahun 2024 jumlah nasabah Mekaar mencapai 14.398.997 nasabah, realisasi ini dibawah target sebesar 15.345.896 nasabah atau 93,83% dari target disebabkan oleh penghapusbukuan akibat berakhirnya kebijakan relaksasi kredit pasca COVID-19, adanya nasabah yang naik kelas menjadi nasabah BRI dan Pegadaian, serta penyaluran kredit yang lebih selektif. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi tahun 2024 lebih rendah sebesar 4,42% disebabkan oleh penghapusbukuan akibat berakhirnya kebijakan relaksasi kredit pasca COVID-19, adanya nasabah yang naik kelas menjadi nasabah BRI dan Pegadaian, serta penyaluran kredit yang lebih selektif. Penambahan Jumlah Nasabah Aktif Mekaar merupakan upaya manajemen dalam mencapai target jumlah nasabah Mekaar yang ditargetkan Presiden Jokowi untuk mencapai 20 juta nasabah.

Sasaran Strategis 3. : Meningkatkan Daya Saing BUMN

Jumlah Negara Tujuan Ekspor

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024			%		
		Target	Realisasi	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian YoY	Capaian PK	Capain Renstra
		a	b	c	d	e	e/b	e/d	e/c
Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Jumlah	21	28	N/A	28	30	107,14%	107,14%	N/A

Jumlah negara tujuan ekspor pada tahun 2024 mencapai 35 negara, melampaui target sebanyak 28 negara sehingga pencapaian IKU mencapai 125% atau dengan capaian angka maksimal yaitu 120% atau meningkat 25% dari tahun 2023 dan meningkat 29,63% dari target Renstra Wamen Jasa tahun 2024 sebanyak 27 negara dan di bawah target Renstra Wamen Industri Tahun 2024 sebanyak 54 negara. Beberapa negara tujuan ekspor pada tahun 2024 ini yaitu New Zealand, Australia, Bangladesh, Benin, Taiwan, Fiji, Filipina, Maldives, Timor Lester, Malaysia, Hongkong, Amerika Serikat, Belgium, Brazil, Brunei Darussalam, Kanada, Cina, Korea, Malaysia, Nepal, Singapura, Spanyol, Thailand, Turki, Uni Arab Emirat, Inggris, Srilanka, Meksiko, Amerika Serikat, Mauritania. Untuk selanjutnya, pada tahun 2025 akan dimonitor terkait ekspansi bisnis ke luar negeri secara berkala sehingga ekspansi pasar BUMN ke luar negeri lebih massif dengan jumlah negara ekspor lebih banyak dan BUMN tidak hanya unggul di level regional melainkan di kancah global untuk terus menciptakan inovasi bisnis.

Sasaran Strategis 4. : Penguatan Struktur Modal BUMN

Penyelesaian Target IPO/Tambahan Nilai Penawaran BUMN/Anak Usaha di HMETD/*Right Issue* BUMN)

Pada tahun 2024 Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau *rights issue* pada BUMN yang berada di bawah pembinaan Wakil Menteri BUMN ditargetkan dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) BUMN, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan telah dilaksanakan melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan masa penawaran umum PMHMETD II sejak tanggal 22 s.d. 26 April 2024, sehingga capaian IKU sebesar 100%.

Sasaran Strategis 5.	:	Terwujudnya Peran BUMN yang Optimal dalam Penurunan Emisi Karbon
-----------------------------	---	--

Pelaksanaan Inisiatif Program Transisi Energi Menuju *Net Zero Emission*

BUMN dalam lingkup Wamen BUMN berkontribusi terhadap pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) melalui program-program inisiatif transisi energi dengan capaian Tahun 2024 sebesar 146,89% (Capaian maksimal 120%) dari target 2024 sebesar 100%. Adapun progres pelaksanaan program transisi energi menuju NZE oleh beberapa klaster sebagai berikut:

No	BUMN	Implementasi Program Transisi Energi menuju <i>Net Zero Emission</i>	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Keterangan
Klaster Industri Energi, Minyak dan Gas						
1	PT Pertamina (Persero)	Pengembangan Bioethanol oleh Pertamina	%	100	100	Kajian <i>Roadmap</i> dan Kajian Teknis telah selesai pada September 2024
		Tambahan Kapasitas Terpasang EBT oleh Pertamina	MW	30,11	194,61	Pembangkit EBT yang telah beroperasi sebesar 58,6 MW
2	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Tambahan Kapasitas Terpasang EBT oleh PLN	MW	142,08	333,62	Pembangkit EBT yang telah beroperasi sebesar 474 MW
		Penyelesaian <i>Roadmap Energy Transition</i> (Green RUPTL)	%	100	100	Telah dilaksanakan pembahasan antara PT PLN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM
Klaster Industri Mineral dan Batubara						
2	MIND Group ID	Penurunan Emisi Carbon di Grup MIND ID melalui <i>re-baselining Road Map</i> Dekarbonisasi, <i>Nature Based Solution</i> , serta Implementasi Efisiensi Energi	%	100	100	Ditandai dengan ketercapaian penurunan emisi karbon sebesar 4,53% dari <i>Business as Usual</i> (BAU), atau dari target penurunan emisi karbon tercantum pada KPI MIND ID sebesar 1,65%.
3	PT Krakatau Steel Tbk	Penurunan Emisi Carbon di PTKS melalui Implementasi Efisiensi Energi dengan Penggunaan <i>Solar</i>	%	100	100	Ditandai dengan ketercapaian penurunan emisi karbon sebesar 4,62% dari <i>Business as Usual</i> (BAU), atau sebanyak 10.8 kTon

No	BUMN	Implementasi Program Transisi Energi menuju <i>Net Zero Emission</i>	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Keterangan
		Cell, penggantian Lampu Konvensional ke LED, Pemanfaatan Atap Transparan, serta Penggunaan Kompresor BFC				CO2, yaitu dengan capaian sebesar 308% dari target penurunan emisi karbon PTKS sebesar 1,5%.
Klaster Industri Pangan dan Pupuk						
4	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Inisiatif Penurunan Emisi Karbon PI Group (dengan pelaksanaan REC di PKC dan PKG, serta Efisiensi Energi di seluruh PI Group)	%	100	100	Hal ini ditunjukkan melalui program <i>Renewable Energy Certificate</i> (REC) di PKC dan PKG, serta penurunan emisi CO2 dari program efisiensi energi di seluruh PI Group

Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian target *Net Zero Emission*, BUMN perlu mengedepankan prinsip aspek *sustainability* dan Wakil Menteri BUMN berperan dalam mewujudkan komitmen BUMN dalam pelaksanaan program inisiatif transisi energi sejalan dengan *core bussiness* pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga program tersebut dapat mencapai dan agenda nasional dalam mengurangi emisi karbon dapat terwujud.

Sasaran Strategis 6.	:	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN
-----------------------------	---	---

Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi

Pada Tahun 2024, Implementasi Model Bisnis yang terintegrasi oleh BUMN telah mencapai target dengan total pencapaian 97,03% di bawah target. Model bisnis yang telah berhasil diimplementasikan oleh BUMN yang berada di bawah pembinaan Wakil Menteri BUMN sebagai berikut:

1) Klaster Industri Manufaktur

Dasar perhitungan capaian Indikator kinerja Implementasi Model Bisnis Terintegrasi oleh BUMN Sektor Industri Manufaktur adalah persentase pelaksanaan bisnis terintegrasi pada **PT Len Industri (Persero)/Holding Defend ID**, yaitu **implementasi bid management**, dengan milestone akhir: terimplementasinya bid management terhadap keseluruhan order masuk di Anak Perusahaan sesuai dengan pedoman strategis Holding Defend ID & **penyusunan RPerPres atau produk hukum lain terkait penguatan Industri Pertahanan**, dengan milestone akhir:

Selesainya Rancangan RPerPres atau Produk Hukum Lain mengenai Penguatan Industri Pertahanan, utamanya dalam rangka memberikan dukungan bagi Holding Defend ID untuk keberlanjutan bisnis serta mengatasi kendala dan isu utama yang menjadi hambatan dalam menjalankan bisnisnya dan pada **PT Biro Klasifikasi Indoensia (Persero)/Holding IDSurvey** yaitu **implementasi dashboard GRC terintegrasi antar anggota Holding IDSurvey**, dengan milestone akhir: tersedianya dashboard GRC yang menyediakan visualisasi data kinerja implementasi GRC pada tingkat holding. Pada Tahun 2024, Implementasi model bisnis terintegrasi oleh BUMN Sektor Industri Manufaktur telah terimplementasi sebesar 98,6%.

Defend ID telah mengimplementasikan program optimasi model tata Kelola holding yang terintegrasi melalui Implementasi Bid Management. Pada tahun 2024, Defend ID telah mengesahkan pedoman strategis Bid Management dan telah diimplementasikan pada beberapa anggota holding Defend ID, namun pada PT Len – Induk, terdapat target efisiensi HPP sebesar 1,25% yang baru terealisasi sebesar 0,8% dan pada PT Pindad proses ratifikasi pedoman Bid Management belum selesai dilaksanakan sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 94,4%. Selain itu, Defend ID juga telah melakukan penyusunan usulan RPerPres dengan pembahasan terakhir melibatkan KKIP, Asdep Manufaktur, Asdep PUU, dan Tim Wakil Menteri BUMN membahas terkait penguatan Industri Pertahanan sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 100%.

Sementara itu IDSurvey telah mengimplementasikan program peningkatan tata kelola Perusahaan yang terintegrasi melalui Implementasi Dashboard GRC. Dashboard GRC merupakan system aplikasi yang mengintegrasikan kinerja tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan IDSurvey, dengan modul yang tersedia berupa modul manajemen risiko, modul governance, dan modul compliance. Pada tahun 2024, Dashboard GRC telah selesai dibangun dan telah disosialisasikan kepada seluruh anggota holding IDSurvey pada tanggal 30 Agustus 2024 sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 100%.

2) Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Dasar perhitungan capaian Indikator kinerja Implementasi Model Bisnis Terintegrasi oleh BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun adalah terlaksananya Pengembangan Bisnis Anorganik IFG Life yaitu kepemilikan saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (“Mandiri Inhealth”) oleh PT Asuransi Jiwa IFG (“IFG Life”).

Pada bulan Juni 2022, PT BPUI (Persero) melakukan pembelian 10% saham Mandiri Inhealth milik PT Asuransi Jasa Indonesia sehubungan dengan peran PT BPUI (Persero) sebagai pemegang saham pengendali PT Asuransi Jasa Indonesia untuk

mendukung rencana penyehatan keuangan PT Asuransi Jasa Indonesia yang sejak tahun 2020 hingga pada saat itu memiliki rasio kecukupan modal berada di bawah ketentuan yang diatur oleh Peraturan OJK. Di sisi lain, sebagai tindak lanjut atas pengembangan asuransi kesehatan yang mengacu pada Kajian Pendirian IFG Life, PT BPUI (Persero) melakukan pelepasan 10% saham Mandiri Inhealth miliknya tersebut kepada IFG Life agar pengelolaan dan pengembangan bisnis dapat dilakukan lebih optimal. Pelepasan 10% saham Mandiri Inhealth milik PT BPUI (Persero) kepada IFG Life telah mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT BPUI (Persero) melalui:

- a) Surat Menteri BUMN kepada Direksi PT BPUI Nomor S-209/MBU/04/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Persetujuan Pelepasan Penyertaan Modal Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Milik PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
- b) Surat Menteri BUMN kepada Direksi PT BPUI Nomor S-210/MBU/04/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Jiwa IFG oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

3) Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Integrasi Penerapan *Enterprise Resource Planning* (ERP) Danareksa pada anggota holding mencapai 100% karena pelaksanaan implementasi SAP telah selesai dilakukan untuk 2 (dua) anak perusahaan yaitu pada PT Perusahaan Pengelola Aset dan PT Danareksa Capital. Implementasi ERP bertujuan untuk meningkatkan akurasi, reliabilitas, integrasi dan proses pemantauan transaksi operasional perusahaan sehingga dapat mendukung berjalannya proses bisnis bagi Danareksa sebagai entitas maupun sebagai induk holding secara efektif, efisien dan mendukung percepatan proses pengambilan keputusan bagi manajemen, sedangkan Implementasi e-GRC bertujuan untuk menyelaraskan IT dengan tujuan bisnis perusahaan serta mengelola risiko dan memastikan proses bisnis perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Klaster Industri Mineral dan Batubara

Sasaran Strategis Inovasi Model Bisnis BUMN yang ditetapkan oleh Klaster Industri Mineral dan Batubara yaitu berupa Indikator Evaluasi Penerapan dan Program Penguatan Manajemen Risiko pada MIND ID dan PT Krakatau Steel Tbk. Capaian Evaluasi Penerapan dan Program Penguatan Manajemen Risiko oleh BUMN Binaan

Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara yaitu mencapai targetnya sebesar 95%, dengan penjelasan sebagai berikut.

a) PTKS: Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko (Realisasi YTD Desember 2024 sebesar 90%)

Pelaksanaan program/inisiatif perbaikan Manajemen Risiko dilaksanakan oleh PT Krakatau Steel Tbk berdasarkan rekomendasi *roadmap* dari hasil penilaian indeks kematangan risiko 2022 yang disesuaikan dengan arahan implementasi pada peraturan Menteri BUMN: PER-2/2023. Implementasi *Roadmap* Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko dalam rangka menciptakan dan melindungi nilai serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dengan progres pelaksanaan mencapai 90% yang tercermin dalam *timeline* dan *milestone* sebagai berikut:

- (i) Ketercapaian Penerbitan Kebijakan Manajemen Risiko Induk dan Terintegrasi sebesar 100%;
- (ii) Ketercapaian Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sebesar 100%;
- (iii) Pelaksanaan Asesmen RMI Induk yang telah selesai dengan capaian sebesar 100%; dan
- (iv) Pelaksanaan Pembaruan Sistem MR- yang masih berada pada tahap inisiasi (*blueprint*) dengan capaian sebesar 15%.

Pada tahun 2025 mendatang, atas realisasi Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko YTD Desember 2024, PTKS akan melaksanakan Implementasi Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pada 2024 serta dengan berpedoman pada Arahan Pemegang Saham (APS) yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN untuk Tahun 2025.

b) MIND ID Group: Penyusunan Pedoman dan Prosedur Terkait dengan *Project Risk Management* Terintegrasi (Realisasi YTD Desember 2024 sebesar 100%)

Penyusunan pedoman ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, *development*, pengujian, dan pelaporan. Formula pencapaian untuk KPI ini adalah sebagai berikut:

- a. 25% : Pemetaan aspek integrasi antara *project risk management* dan *project management*
- b. 50% : Penyampaian usulan integrasi proses bisnis

- c. 75% : Penyampaian usulan dokumen acuan kerja untuk Bab terkait dengan *project risk management* yang akan dituangkan dalam dokumen acuan kerja *project management*
- d. 100% : Finalisasi dokumen acuan kerja untuk Bab terkait dengan *project risk management* yang akan dituangkan dalam dokumen acuan kerja *project management*

Untuk *progress* sampai dengan Desember 2024 telah dilakukan finalisasi dokumen acuan kerja untuk bab terkait dengan *project risk management* yang akan dituangkan dalam dokumen acuan kerja *project management* sehingga KPI Penyusunan Pedoman dan Prosedur Terkait dengan *Project Risk Management* Terintegrasi tercapai sesuai target (tercapai 100%).

5) **Klaster Industri Pangan dan Pupuk**

Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi oleh BUMN Industri Pangan dan Pupuk mencapai progres 100%, berupa Perbaikan Kebijakan/ Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Perbaikan Proses Bisnis dalam Penyelenggaraan CPP dengan Usulan Revisi Perpres 125/2022.

Melalui Surat Menteri BUMN Nomor: S-83/MBU/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Rekomendasi Perbaikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Menteri BUMN mengusulkan beberapa rekomendasi perbaikan kebijakan dan mekanisme penyaluran pupuk subsidi kepada Presiden Republik Indonesia.

Selanjutnya, Berdasarkan Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No:Rakortas-3/21.03.2024-14, telah ditetapkan 2 dari 3 usulan rekomendasi perbaikan penyaluran pupuk subsidi dari Kementerian BUMN dan PT Pupuk Indonesia (Persero) yaitu (1) Audit BPKP atas penentuan HPP dilakukan setiap 6 bulan dan (2) Kemasan pupuk subsidi dibuat dalam volume 50kg dan 25kg, serta dilakukan pembulatan alokasi sesuai volume kemasan.

Usulan Perbaikan Proses Bisnis dalam Penyelenggaraan CPP telah disampaikan oleh Badan Pangan Nasional/Bapanas melalui Surat Nomor: 58/TS.03.03/K/2/2023 tanggal 7 Februari 2024. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia telah memberikan Izin Prakarsa sesuai surat Setneg No. B-189/M/D-1/HK.03.02/04/2024 tanggal 30 April 2024.

6) **Klaster Industri Kesehatan**

Capaian IKU Model Bisnis Terintegrasi BUMN Klaster Industri Kesehatan tahun 2024 sebesar 100% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 100%. Ketercapaian tersebut ditunjukkan dengan telah diselesaikannya kajian reorientasi bisnis. Reorientasi bisnis Biofarma Group dilakukan karena kinerja operasional di seluruh

entitas menurun sehubungan dengan dinamika pasar global yang mulai berubah, *research and development* (R&D) yang kurang memadai, portofolio produk yang kurang kompetitif dan *overlapping*, utilitas fasilitas produksi yang rendah, dan permasalahan pada izin operasional. Oleh karena itu, Kementerian BUMN memberikan atensi yang besar pada penyehatan Biofarma Group melalui penataan portofolio produk dan fasilitas produksi. Kementerian BUMN mendorong pencapaian target tersebut melalui adanya PMO Reorientasi Bisnis yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2024. Sampai dengan 31 Desember 2024, kajian reorientasi bisnis tersebut sedang berproses untuk ditetapkan oleh Menteri BUMN.

7) Klaster Industri Perkebunan dan Kehutanan

Pada PTPN III (Persero), implementasi model bisnis yang ditargetkan tahun ini adalah Perluasan Lahan Tebu dalam Rangka Swasembada Gula Nasional sesuai amanat dalam Perpres 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dimana secara keseluruhan Perpres tersebut menargetkan Indonesia untuk dapat mewujudkan swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi paling lambat pada tahun 2028. Untuk mewujudkan hal tersebut, PTPN III mendapatkan penugasan secara spesifik salah satunya perluasan areal lahan perkebunan tebu paling sedikit seluas 179.000 Ha sampai tahun 2028. Sesuai roadmap Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Tahun 2024-2030 yang telah ditetapkan oleh Menko Bidang Perekonomian, target perluasan lahan PTPN III pada 2024 yaitu seluas 181.000 Ha dimana realisasi perluasan lahan tebu s.d. Desember 2024 adalah 185.000 Ha. Untuk Perhutani berhasil merealisasikan 56,84% untuk kinerja finansial anak perusahaan, lebih tinggi dibanding target 2024.

8) Klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung

Dasar perhitungan capaian Indikator kinerja Implementasi Model Bisnis Terintegrasi oleh BUMN Klaster Pariwisata dan Pendukung adalah persentase pelaksanaan oleh PT Hotel Indonesia Natour/PT HIN terhadap 2 (dua) model bisnis terintegrasi pada KEK Sanur. Model terintegrasi tersebut adalah model bisnis terintegrasi antara RS/Klinik dan Hotel di KEK Sanur dimana sistem ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman *seamless* bagi pengunjung dan memberikan kenyamanan bagi pasien yang membutuhkan layanan kesehatan serta akomodasi. Saat ini, sistem platform sudah selesai dan hanya tinggal tahap integrasi dengan hotel, dengan pencapaian sebesar 90%.

Model bisnis terintegrasi yang kedua adalah model bisnis terintegrasi untuk pengembangan bisnis hotel, hal ini dilakukan dengan pembentukan DINFRA (Dana Investasi Infrastruktur) melalui IHF (InJourney Hospitality Fund), yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan untuk pengembangan sektor pariwisata dan perhotelan. Indikator kinerja untuk pencapaian ini adalah terselesaikannya kajian pembentukan InJourney Hospitality Fund, yang telah terselesaikan 100%.

Sasaran Strategis 7.	:	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Wakil Menteri BUMN
-----------------------------	---	--

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Persentase Pencapaian
		Target	Realisasi	
Persentase Realisasi Anggaran	%	97,00	99,41	102,49
Nilai <i>Self-Assesment</i> SAKIP	%	82,14	81,22	98,88

a. Persentase Realisasi Anggaran

Total pagu anggaran tahun 2024 unit kerja di bawah Wakil Menteri BUMN yaitu sebesar Rp18.811.307.000,- yang terdiri dari 12 unit Keasdepan, namun selama tahun berjalan terjadi pemblokiran dan penghematan anggaran sebesar Rp3.356.049.000,- sehingga total anggaran setelah pemblokiran dan penghematan yaitu sebesar Rp13.463.614.000,-. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp13.384.300.889,- atau 99,41% dengan nilai capaian IKU sebesar 102,49% dari total pagu anggaran. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu capaian Tahun 2024 lebih rendah disebabkan oleh adanya refocusing anggaran untuk mendukung prioritas kegiatan sejalan tugas pokok dan fungsi Kementerian BUMN serta adanya kebutuhan gaji pimpinan.

Berikut merupakan tabel pencapaian realisasi dari pagu anggaran pada setiap Keasdepan di bawah Wamen sebagai berikut:

1) Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik

Total pagu anggaran kegiatan tahun 2024 yang berada dalam koordinasi Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik pada Perjanjian Kinerja adalah sebesar

Rp1.923.171.000,-. Terdapat *automatic adjustment* atau pemblokiran anggaran sebesar Rp521.858.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp1.401.313.000,-, kemudian adanya surat Sekretaris Kementerian BUMN perihal Pembukaan Revisi DIPA Triwulan IV 2024, sehingga Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik mendapatkan realokasi penambahan anggaran sebesar Rp99.978.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp1.501.291.000,- namun terdapat realokasi anggaran sebesar Rp66.099.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp1.435.192.000,-. Dari Pagu tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp1.434.916.980,- atau tercapai sebesar 99,98% dari total anggaran. Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan untuk belanja sebagai berikut:

Tabel Detil Realisasi Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Tahun 2024

No	Kode Belanja	Belanja	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Persentase Penyerapan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (d)/(e)*100%
1	521211	Belanja Bahan	81.229.000	80.964.464	99,67
2	522151	Belanja Jasa Profesi	11.200.000	11.200.000	100,00
3	522191	Belanja Jasa Lainnya	215.350.000	215.348.384	100,00
4	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	790.921.000	790.912.632	100,00
5	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.149.000	40.149.000	100,00
6	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	258.085.000	258.085.000	100,00
7	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	38.258.000	38.257.500	100,00
Total			1.435.192.000	1.434.916.980	99,98

2) Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

Total pagu anggaran kegiatan tahun 2024 yang berada dalam koordinasi Keasdepan Bidang Jasa Infrastruktur pada Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp2.586.191.000,00. Pada tahun anggaran 2024 terdapat kebijakan blokir anggaran pada seluruh Kementerian/Lembaga sehingga anggaran Keasdepan Bidang Jasa Infrastruktur dilakukan blokir dan penghematan sebesar Rp996.378.000,00 sehingga total pagu anggaran Keasdepan Bidang Jasa Infrastruktur setelah blokir dan revisi menjadi Rp1.238.580.000,00. Dari pagu tersebut, setelah dilakukan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp1.209.399.401,00 atau tercapai 97,64% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi Tahun Anggaran 2024
--------	-------------	-------------------------------

		Desember 2024	s.d. Desember 2024	%
Pengembangan BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	1.238.580.000	46.463.707	1.209.339.401	97,64%

3) Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur

Total pagu anggaran kegiatan tahun 2024 yang berada dalam koordinasi Keasdepan Bidang Industri Manufaktur pada Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp1.316.229.000,00. Pada tahun anggaran 2024 terdapat kebijakan blokir anggaran pada seluruh Kementerian/Lembaga sehingga anggaran Keasdepan Bidang Industri Manufaktur dilakukan blokir dan penghematan sebesar Rp384.205.000,00 sehingga total pagu anggaran Keasdepan Bidang Industri Manufaktur setelah blokir dan revisi menjadi Rp932.024.000,00. Dari pagu tersebut, setelah dilakukan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp930.837.560,00 atau tercapai 99,87% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Belanja	Belanja	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Persentase Penyerapan
1	521211	Belanja Bahan	115.813.000	115.796.051	100,0%
2	524111	Belanja Perjalanan Biasa	247.634.000	246.878.269	99,7%
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	113.000.000	112.590.000	99,6%
4	522191	Belanja Jasa Lainnya	199.634.000	199.633.500	100,0%
5	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	254.923.000	254.919.740	100,0%
6	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.020.000	1.020.000	100,6%
Total			932.024.000	930.837.560	99,98

4) Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Total pagu anggaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp1.083.636.000. Pada tahun 2024 terdapat kebijakan blokir *automatic adjustment* dan penghematan sebesar Rp264.516.000 sehingga total pagu anggaran sampai dengan akhir tahun menjadi sebesar Rp819.120.000. Dari total pagu tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp804.276.781 atau tercapai 98,19% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

MAK	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
521211	Belanja Bahan	Rp95.180.000	Rp95.007.031	99,82%

522151	Belanja Jasa Profesi	Rp7.400.000	Rp7.400.000	100%
522191	Belanja Jasa Lainnya	Rp170.245.000	Rp170.221.112	99,99%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp444.517.000	Rp429.870.638	96,71%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.280.000	Rp4.280.000	100%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp97.498.000	Rp97.498.000	100%
Total		Rp819.120.000	Rp804.276.781	98,19%

5) Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan

Total pagu anggaran kegiatan tahun 2024 yang berada dalam koordinasi Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan adalah sebesar Rp853.252.000, jumlah anggaran ini merupakan hasil revisi dari anggaran yang ditetapkan pada awal tahun sebesar Rp1.221.721.000 dengan blokir *automatic adjustment* sebesar Rp368.469.000. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp846.928.147,- atau 99,26% dari total pagu anggaran. Berikut terlampir rincian anggaran Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan.

Mata Anggaran	Output	Pagu	Realisasi	% Realisasi
4412.BDA.001	Hasil Pembinaan BUMN sektor Jasa Keuangan	300.283.000	295.528.177	98,42%
4412.ABA.004	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pembiayaan UMKM dan Ultra Mikro	290.767.000	290.767.000	100%
4412.ABA.005	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Integrasi Bisnis Perbankan BUMN	151.076.000	149.507.000	98,96%
4412.ABA.006	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Perbankan di IKN	111.126.000	111.125.970	100%
Total		853.252.000	846.928.147	99,26%

6) Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media

Total pagu anggaran kegiatan tahun 2024 Asisten Deputi Jasa Telekomunikasi dan Media pada Perjanjian Kinerja sebesar **Rp 1.271.229.000**. Namun pada

tahun berjalan terdapat **pemblokiran** sebesar **Rp257.357.000** dan penambahan anggaran pada triwulan IV sebesar Rp4.561.000 sehingga total anggaran Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media menjadi **Rp1.018.433.000**. Dari anggaran tersebut, realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar **Rp1.014.014.518** atau 99,57% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023		2024			
	Realisasi (Rp)	%	Pagu Semula (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengembangan BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	1.083.490.773	99,54	1.271.229.000	1.018.433.000	1.014.014.518	99,57

7) Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas

Pada Tahun 2024 sendiri, Asdep Emigas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.595.063.000,- yang selanjutnya dilakukan revisi dengan pagu akhir sebesar Rp1.255.554.000,-. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp1.247.785.613,- atau terealisasi 99,38% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.768.387,-. Jika dilihat dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 Asdep Emigas mendapatkan alokasi Rp4,36 Milyar dengan persentase Realisasi dalam kisaran melebihi 93% sejalan dengan prioritas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja.

Anggaran yang ada oleh Asdep Emigas dimanfaatkan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja berkala, persetujuan aksi korporasi, persetujuan penugasan, pengesahan RKAP dan RJPP, dan laporan tahunan *audited*, perumusan kebijakan, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta belanja bahan yang menunjang kegiatan pembinaan BUMN. Selain itu, anggaran juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pimpinan terkait gaji Sekretaris Pimpinan.

Tabel Detil Realisasi Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas Tahun 2024

No	Kode Belanja	Jenis Belanja	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Sisa	% Penyerapan
			(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d) = (b)/(a)
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	77.260.000	75.285.000	1.975.000	97,44%
2	521211	Belanja Bahan	126.800.000	121.790.000	5.010.000	96,05%
3	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	885.948.000	885.165.293	782.707	99,91%
4	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.920.000	28.920.000	-	100,00%
5	524114	Belanja Paket Meeting Dalam Kota	130.397.000	130.397.000	-	100,00%

6	524119	Belanja Paket Meeting Luar Kota	6.229.000	6.228.320	680	99,99%
Total			1.255.554.000	1.247.785.613	7.768.387	99,38%

8) Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara

Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara pada Tahun 2024 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1.409.050.000,00, setelah beberapa kali mengalami revisi dan pemotongan anggaran dalam rangka optimalisasi anggaran unit kerja dan Kementerian BUMN. Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai sebesar Rp1.408.870.412,00 atau 99,99% dari anggarannya. Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan untuk belanja sebagai berikut:

Tabel Detil Realisasi Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara Tahun 2024

No	Kode Belanja	Belanja	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Persentase Penyerapan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (d)/(e)*100%
1	521211	Belanja Bahan	99.217.000	99.217.000	100%
2	522191	Belanja Jasa Lainnya	40.000.000	39.993.300	99,98%
3	524111	Belanja Perjadin	475.321.000	475.321.000	100%
4	524113	Belanja Perjadin Dalkot	43.880.000	43.710.000	99,61%
5	524114	Belanja Paket Meeting Dalam Kota	252.742.000	252.742.000	100%
6	524119	Belanja Paket Meeting Luar Kota	497.890.000	497.889.112	100%
Total			1.409.050.000	1.408.870.412	99,99%

Ke depannya, akan senantiasa dilakukan optimalisasi perencanaan anggaran yang akurat dan monitoring realisasi anggaran unit kerja agar dapat mendukung kinerja pegawai dan monitoring BUMN binaan Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara.

9) Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk

Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Tahun 2024 mendapatkan alokasi/pagu anggaran sebesar Rp1.471.572.000,00 dengan blokir automatic adjustment sebesar Rp438.612.000,00, sehingga total anggaran yang dapat dilakukan sebesar Rp1.032.960.000,00. Alokasi anggaran ini mengalami beberapa kali revisi dan pengurangan, sehingga pada akhirnya hanya tersisa sebesar Rp889.222.000,00. Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk terealisasi sebesar Rp885.784.075,00 dari anggaran sebesar Rp889.222.000,00 sehingga persentase penyerapan anggaran mencapai 99,61% dari target sebesar 98,00%.

10) Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan

Total pagu anggaran Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp1.426.475.000,00. Pada tahun anggaran 2024 terdapat kebijakan blokir dan pemotongan anggaran Keasdepan Bidang Industri Kesehatan sebesar Rp356.184.000,00 sehingga pada akhirnya total pagu anggaran Keasdepan Bidang Industri Kesehatan menjadi Rp1.070.291.000,00. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.061.319.006,00 atau tercapai 99,16% dari total anggaran sebagai berikut:

Uraian	2023		2024			
	Realisasi (Rp)	%	Pagu Semula (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengembangan BUMN Sektor Industri Kesehatan	864.642.859	99,62	1.426.475.000	1.070.291.000	1.061.319.006	99,16

11) Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan

Pada awal tahun 2024, anggaran pada Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan (Asdep IPK) dialokasikan sebesar Rp1.371.229.000. Seiring perkembangan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan Automatic Adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024. Hal tersebut berdampak kepada pemotongan anggaran pada Asdep IPK sebesar Rp264.155.000 sehingga anggaran Asdep IPK menjadi sebesar Rp1.107.074.000. Sampai dengan akhir tahun, Asdep IPK dapat memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional sehingga realisasi tercapai sebesar Rp1.106.444.262 atau sebesar 99,94% dari target.

12) Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung

Total pagu alokasi anggaran tahun 2024 unit kerja Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung sebesar Rp1.498.822.000 dan selanjutnya dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp63.000.000 sehingga anggaran tersedia menjadi sebesar Rp1.435.822.000. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp1.433.724.134 atau mencapai Rp99,85% dari total anggaran, dengan rincian per akun belanja sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
521211	Belanja Bahan	119.455.000	119.455.000	100,00%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	740.077.000	737.979.434	99,72%

524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	103.596.000	103.596.000	100,00%
522191	Belanja Jasa Lainnya	198.990.000	198.989.700	100,00%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	261.004.000	261.004.000	100,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.700.000	12.700.000	100,00%
Total		1.435.822.000	1.433.724.134	99,85%

Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan BUMN Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung, anggaran digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan antara Kementerian BUMN dengan manajemen BUMN, Kementerian/Lembaga, maupun stakeholders lainnya seperti rapat kerja, konsinyering, rapat koordinasi, kunjungan kerja, dan monitoring evaluasi kinerja operasional maupun penugasan. Adapun output yang dihasilkan berupa dokumen rekomendasi kebijakan, kajian, tanggapan, arahan taktis, laporan, dan lainnya.

b. Nilai *Self-Assesment* SAKIP

Dasar perhitungan capaian IKU ini adalah berdasarkan hasil *self-assesment* implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada unit Wakil Menteri BUMN yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian BUMN, dengan tujuan untuk mengukur capaian implementasi sistem akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2024, terdapat pergantian pimpinan di tahun berjalan yang mengakibatkan perubahan portofolio Wakil Menteri BUMN sebagaimana Instruksi Menteri BUMN Nomor: INS-1/MBU/11/2024 tanggal 1 November 2024 perihal Pelaksanaan Tugas Wakil Menteri dalam Rangka Pembinaan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Instruksi tersebut, terdapat perpindahan BUMN yang sebelumnya pembinaannya pada Wakil Menteri Kartika Wirjoatmodjo menjadi pembinaan Wakil Menteri Dony Oskaria. Namun, sehubungan dengan IKU Nilai *Self-Assesment* SAKIP ini, *self-assesment* dilakukan sebelum pelaksanaan pergantian pimpinan sebagaimana di atas, sehingga objek penilaian unit kerja portofolio terbagi atas Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN Bidang Jasa. Secara keseluruhan hasil *self-assesment* untuk gabungan Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN Bidang Jasa sebesar 81,22 atau setara 98,88% dari target Tahun 2024 sebesar 82,14.

Berdasarkan laporan hasil *self-assesment* tertanggal 30 Juli 2024, tingkat Akuntabilitas Kinerja Wakil Menteri BUMN I Tahun 2024 berada pada Predikat “A”

atau “Memuaskan” dengan definisi bahwa Akuntabilitas Kinerja pada Unit Kerja Wakil Menteri BUMN I Kementerian BUMN Tahun 2024 telah “Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator” sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
WAKIL MENTERI BUMN I KEMENTERIAN BUMN
TAHUN 2024**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,75	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,95	25,05
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,28	11,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,94	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			81,92	80,65
			A	A

Penurunan Nilai Akuntabilitas Tahun 2024 disebabkan adanya beberapa unit kerja eselon II di bawah Wakil Menteri I masih belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi inspektorat tahun sebelumnya.

Sementara itu, untuk berdasarkan laporan hasil *self-assesment* tertanggal 10 Juli 2024, tingkat Akuntabilitas Kinerja Wakil Menteri BUMN Bidang Jasa Tahun 2024 berada pada Predikat “A” atau “Memuaskan” dengan definisi bahwa Akuntabilitas Kinerja pada Unit Kerja Wakil Menteri BUMN Bidang Jasa Kementerian BUMN Tahun 2024 telah “Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator” sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,30	25,13
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,78	24,70
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,15	11,85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,01	20,11
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,24	81,79
			A	A

Akuntabilitas Kinerja Wakil Menteri BUMN Bidang Jasa meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Beberapa perbaikan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 terutama Revisi Perjanjian Kinerja berdasarkan evaluasi dan temuan

pengawasan internal dan eksternal (BPK dan Men PANRB) dan mandat Peraturan Presiden. Selain itu LKIP telah disusun lebih lengkap dan informatif.

Sasaran Strategis 8	:	Terwujudnya Restrukturisasi BUMN yang Resilien
----------------------------	---	--

Jumlah Program Restrukturisasi Klaster BUMN

Pada Tahun 2024 Jumlah Program Restrukturisasi Klaster BUMN yang berada di bawah pembinaan Wakil Menteri BUMN berhasil dijalankan oleh 7 BUMN dari target 8 BUMN. Dari pelaksanaan Program Restrukturisasi tersebut terdapat 1 Program BUMN yang belum mencapai 100% yaitu Penataan Industri Airline BUMN ke dalam Holding Pariwisata dengan progres sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 90%.

Adapun proses Program Restrukturisasi Klaster BUMN sebagai berikut.

1) Klaster Industri Mineral dan Batubara

Capaian realisasi Program Restrukturisasi Keasdepan Bidang Industri Mineral dan Batubara yaitu sebesar 1 Program Restrukturisasi. Sebagaimana insiden kebakaran pabrik HSM#1 pada Mei 2023 lalu yang mempengaruhi arus kas PTKS hingga akhir tahun 2024, sehingga menyebabkan terhentinya produksi dan terhambatnya divestasi perusahaan. Atas dasar tersebut, PTKS mengajukan adanya pengaturan ulang atas utang PTKS untuk beberapa bulan ke depan (*standstill*), dengan secara paralel Perseroan menyiapkan usulan restrukturisasi lanjutan dengan status *progress* persiapan YTD 31 Desember 2024 mencapai 95%. Ketidaktercapaian program sebesar 100% disebabkan karena belum terpenuhinya kesepakatan, sebagaimana masih terdapat 2 dari 10 bank *lender* yang masih dalam tahap negosiasi sehingga penyelesaian target Penyesuaian kembali jadwal penyelesaian hutang PTKS (revisi/adendum MRA) yang seharusnya selesai 100% pada Juni 2024, menjadi hanya sebesar 95% hingga Desember 2024.

2) Klaster Industri Pangan dan Pupuk

Jumlah Program Restrukturisasi Klaster BUMN Industri Pangan dan Pupuk mencapai 2 jumlah program yaitu Restrukturisasi Keuangan ID FOOD (Persetujuan Rencana Penyehatan Perusahaan pada Q1 2024) dan Restrukturisasi Rekind (Tersusunnya Proposal Perdamaian/ Prodam dalam proses Restrukturisasi pada Q1 2024).

Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / ID FOOD telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN sesuai Surat No. S-135/MBU/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

PT Rekayasa Industri telah membuat perjanjian perdamaian dengan para kreditor berdasarkan Perjanjian Perdamaian PT Rekayasa Industri (Debitor) dan Para Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perkara Nomor: 308/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Januari 2024.

3) Klaster Industri Kesehatan

Capaian IKU Jumlah Program Restrukturisasi BUMN Klaster Industri Kesehatan tahun 2024 sebesar 100% yaitu 1 (satu) program dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 1 (satu) program. Ketercapaian tersebut ditunjukkan dengan telah diselesaikannya kajian restrukturisasi keuangan. Restrukturisasi keuangan dilaksanakan entitas anak perusahaan Biofarma Group menghadapi permasalahan likuiditas serta keterbatasan modal kerja dimana kinerja keuangan anak perusahaan kurang optimal atau mencatatkan kerugian selama 2 (dua) tahun terakhir. Oleh karena itu, Kementerian BUMN memberikan atensi yang besar pada penyehatan Biofarma Group melalui program restrukturisasi keuangan. Kementerian BUMN mendorong pencapaian target tersebut melalui adanya PMO Restrukturisasi Keuangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-20/MBU/01/2024. Sampai dengan 31 Desember 2024, kajian restrukturisasi keuangan tersebut sedang berproses untuk ditetapkan oleh Menteri BUMN.

4) Klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung

Capaian IKU Jumlah Program Restrukturisasi BUMN Sektor Pariwisata dan Pendukung adalah tercapainya program Penataan Industri Airline ke dalam Holding Pariwisata, Penataan Portfolio Bisnis Bidang Usaha Penunjang Bandara (Integrasi PT Integrasi Aviasi Solusi/ PT IAS dan Integrasi Bandara Tahap 2) dan Optimalisasi Layanan Navigasi Penerbangan di Bandara Prioritas.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing dan nilai BUMN di kancah global, penataan industri airline BUMN dalam holding pariwisata merupakan salah satu program restrukturisasi strategis yang sedang dilaksanakan. Hingga saat ini, pencapaian program ini telah mencapai 90%, dengan kajian terkait penggabungan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ke InJourney sudah dibahas secara mendalam. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antara perusahaan-perusahaan BUMN di sektor pariwisata, yang akan berkontribusi pada penguatan posisi Indonesia di pasar global.

Proses penataan subholding bandara dan layanan pendukung lainnya di bawah Holding Pariwisata dan Pendukung dalam hal ini integrasi dan integrasi bandara

tahap II telah mencapai progress 100%. Dengan penataan ini, PT Angkasa Pura Indonesia maupun PT IAS diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan konektivitas domestik dan internasional, meningkatkan *costumer experience* erta mengakselerasi dampak positif terhadap pertumbuhan PDB Indonesia.

Target optimalisasi layanan navigasi penerbangan di bandara prioritas pada tahun 2024 telah terealisasi 100%, hal ini ditunjukkan dengan penyelesaian pembuatan kajian optimalisasi layanan navigasi Bandara Soekarno-Hatta, kajian metroplex di ruang udara Jakarta dan kajian SID/STAR di Bandara Ngurah Rai yang dianggap perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi layanan navigasi penerbangan di bandara prioritas.

5) **Klaster Industri Manufaktur**

Dasar perhitungan capaian Indikator kinerja Jumlah Program Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Manufaktur adalah banyaknya jumlah BUMN di Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur yang menjalankan program restrukturisasi. Pada Tahun 2024 sebanyak 1 BUMN Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur telah menjalankan program restrukturisasi keuangan, yaitu PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding Defend IDtelah berhasil menyelesaikan program restrukturisasi pada Anak Perusahaannya, yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL Indonesia, sehingga tingkat ketercapaian indikator ini adalah 100%.

Restrukturisasi keuangan yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia antara lain disebabkan oleh tingginya utang berbunga masa lalu, plafond fasilitas pinjaman eksisting yang terbatas dan sudah habis, kondisi likuiditas yang minim, serta adanya isu covenant yang menghambat perolehan pinjaman baru. Pada tahun 2024 PT Dirgantara Indonesia telah melaksanakan penandatanganan MRA (*Master Restructuring Agreement*) pada tanggal 2 September 2024 dengan Kreditur BRI dan tanggal 26 September 2024 dengan Kreditur BNI. Jumlah utang unsustained yang dilakukan restrukturisasi sebesar USD132,2 juta (BRI) dan USD44,5 juta (BNI). Dengan disetujuinya restrukturisasi keuangan utang perbankan, diharapkan dapat meringankan beban keuangan Perusahaan dan membantu PT Dirgantara Indonesia untuk meningkatkan kinerja Perusahaan ke depan.

Sementara itu, restrukturisasi keuangan yang dilakukan oleh PT PAL Indonesia dalam rangka perbaikan kondisi keuangan PT PAL Indonesia. Pada tahun 2024 PT PAL Indonesia fokus dalam melakukan perbaikan Status Kolektabilitas Perusahaan dari status kolektabilitas-2 (dalam perhatian khusus) menjadi Kolektabilitas-1 (Lancar). Peningkatan status kolektabilitas ini memberikan dampak positif pada kemudahan akses pembiayaan dengan persyaratan lebih baik, penguatan reputasi di mata mitra

bisnis dan investor, pengurangan risiko kerugian, serta peningkatan efisiensi operasional. Pada Januari 2024, pihak kreditur PT PAL yaitu Bank Mandiri (outstanding sebesar Rp1,27 T), BNI (outstanding Rp1,49 T) dan LPEI (outstanding Rp449,7 miliar) telah menandatangani PK Restrukturisasi kredit sedangkan PPA akan melakukan eksekusi jaminan. Proses perbaikan status kolektabilitas PT PAL menjadi Kol-1 untuk Bank Mandiri selesai pada bulan Juni 2024 dan untuk BNI selesai pada Desember 2024. Namun, untuk status kolektabilitas pada LPEI masih dalam proses review internal.

Sasaran Strategis 9.	:	Terwujudnya Roadmap Integrasi BUMN Karya
-----------------------------	---	--

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Persentase Pencapaian
		Target	Realisasi	
Penyusunan Roadmap Integrasi BUMN Karya	%	60,00	60,00	100%

Penyusunan Roadmap Integrasi BUMN Karya

Dalam rangka memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, BUMN didorong meningkatkan bisnis dan mengembangkan usahanya melalui Penyusunan *Roadmap* Integrasi BUMN Karya dengan Realisasi pada Tahun 2024 sebesar 60% atau setara 100% dari target sebesar 60%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terdapat 3 faktor utama penyebab dilaksanakannya Integrasi PT Utama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk:
 - a) Arahan Presiden RI dalam Rapat Internal tentang Obligasi dan Sukuk PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tanggal 4 Januari 2024;
 - b) Kondisi keuangan Waskita Karya (Persero) Tbk memerlukan penyehatan;
 - c) *Refocusing* bisnis BUMN Karya.
- 2) Kementerian BUMN bersama PT Utama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah menyusun rancangan kajian bersama dan rancangan Peraturan Pemerintah terkait Integrasi PT Utama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan konsorsium konsultan dengan lingkup pekerjaan dengan persentase penyelesaian sebesar 60% sebagai berikut:
 - a) *Financial dan Tax Due Dilligence* : PwC

- b) *Commercial Due Dilligence* : KPMG
 - c) *Legal Due Dilligence* : Ashurst OSP
 - d) *Transaction and Risk* : BNI Sekuritas
- 3) Sampai dengan saat ini, proses yang sedang berjalan yaitu finalisasi kajian integrasi PT Utama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, untuk memastikan pelaksanaan integrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi PT Utama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Sasaran Strategis 10.	:	Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko
------------------------------	---	--------------------------------------

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Persentase Pencapaian
		Target	Realisasi	
Penguatan Manajemen Risiko BUMN	%	100,00	95,28	95,28%

Penguatan Manajemen Risiko BUMN

Dalam rangka memastikan bahwa BUMN memiliki kemampuan untuk pengelolaan bisnis yang efektif dengan implementasi manajemen risiko. Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara bahwa BUMN wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi BUMN. Sebagaimana dalam Aspirasi Pemegang Saham Tahun 2024 sesuai Surat Menteri BUMNN Nomor S-491/MBU/09/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 bahwa sebagai bentuk implementasi manajemen risiko ditetapkan *Key Performance Indicators* yaitu Rasio Pemenuhan Organ Pengelola Risiko dan Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko. Untuk itu, untuk mengukur penguatan manajemen risiko berdasarkan capaian dua indikator tersebut dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 95,28% di bawah target sebesar 100%. Adapun penjabaran realisasi sebagai berikut.

Indikator	Satuan	2024		Persentase Pencapaian
		Target	Realisasi	

Penguatan Manajemen Risiko	%	100	95,28	95,28
a. Rasio Pemenuhan Organ Pengelola Risiko	%	88	93	105,68
b. Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	%	100	97	97%

**Sasaran
Strategis 11.**

: Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN

Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian
100%	103,23%	127,54%	120%

Dasar perhitungan capaian IKU Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN adalah berdasarkan progres program digitalisasi pada BUMN yang telah dijalankan sepanjang tahun 2024. Pada tahun 2024, ditargetkan implementasi program digitalisasi telah dijalankan 100% dapat terealisasi sebesar 127,54% di atas target tahun 2024 sebesar 100%, dengan rincian implementasi program digitalisasi sebagai berikut:

1) Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024	Renstra	Capaian
90,00%	81,66%	100,00%	-	81,66%

Capaian Program Platform Integrasi Logistik (Platform GLID) tahun 2024 adalah sebesar 81,66% dari target Perjanjian Kinerja 2024 adalah sebesar 100%. Dalam menjawab kebutuhan dan tantangan logistik nasional, PMO Sinergi dan Integrasi Logistik Ekosistem BUMN membangun layanan bersama logistik BUMN dengan nama "GLID". GLID merupakan Agregator Layanan Logistik BUMN yang hadir dengan solusi *end to end* terlengkap untuk melayani pengiriman barang dalam jumlah besar yang didukung oleh teknologi terkini dan jangkauan pengiriman yang luas ke seluruh daerah di Indonesia hingga luar negeri. GLID memanfaatkan aset, jaringan serta kapabilitas LSP BUMN yang handal di setiap lini, baik *first mile*, *middle mile*, *last mile* dan *warehouse*. GLID memberikan solusi layanan logistik *end-to-end* yang mengintegrasikan BUMN LSP di Indonesia dan telah diluncurkan pada tanggal 15 Februari 2024.

GLID menggunakan *route optimization engine* yang memudahkan customer karena GLID akan memberikan opsi solusi terbaik sesuai kebutuhan. Sistem GLID memiliki keunggulan dalam hal-hal berikut antara lain: *Mix & Match Rate*, *Mix & Match SLA* dan Standarisasi Kualitas Layanan. GLID kedepannya akan menawarkan berbagai layanan jasa logistik antara lain sebagai berikut:

1. *Courier & Cargo Service*: Layanan logistik dalam jumlah besar yang menggunakan opsi-opsi pengiriman seperti *Land Cargo*, *Sea Cargo* dan *Air Cargo*.
2. *Shipping & Freight Forwarding*: Layanan logistik dalam jumlah besar yang menggunakan opsi-opsi pengiriman seperti *Full Container Load-Less Container Load* (FCL-LCL), *Full Trucking Load- Less Trucking Load* (FTL-LTL) dan *Air Cargo*.

Penetrasi layanan logistik BUMN LSP melalui GLID yang optimal diharapkan dapat menciptakan dampak pada industri logistik, berupa perbaikan dalam sektor logistik nasional dan penurunan disparitas harga yang merupakan dampak dari efisiensi biaya logistik.

GLID memiliki aset dan jaringan untuk mendukung layanan kargo darat, kargo laut maupun kargo udara. GLID dapat mengorkestrasi layanan, menurunkan biaya logistik, memaksimalkan potensi bisnis dengan dukungan fitur-fitur integrasi yang pada akhirnya mampu menekan biaya logistik nasional. GLID memberikan kemudahan bagi customer dalam melakukan pemesanan pengiriman barang dalam jumlah besar melalui dua channel yaitu: www.glid.id dan padiumkm.id.

2) Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Growth	% Capaian
3,16	n.a	3,00	n.a	94,94%

Capaian nilai indikator Minimal INDI 4.0 *Level Maturity* tahun 2024 adalah sebesar 3,00 atau 94,94% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 94,94%. Dasar perhitungan capaian indikator Minimal INDI 4.0 *Level Maturity* adalah berdasarkan jumlah skor Minimal INDI 4.0 *Level Maturity* yang dilakukan oleh BUMN dalam pengelolaan portofolio Keasdepan Bidang Jasa Infrastruktur. Ketidaktercapaian ini utamanya disebabkan oleh masih terdapat BUMN Klaster Jasa Infrastruktur yang capaiannya masih relatif kecil yaitu Perum Perumnas dan PT Brantas Abipraya, yang disebabkan oleh saat ini masih dalam tahap pengembangan aplikasi, infrastruktur dan penguatan tata kelola TI yang terimplementasi dengan efektif serta mengukur

tingkat maturity level-nya menggunakan *framework* COBIT 2019 dan mengukur INDI 4.0 sesuai dengan arahan Kementerian BUMN.

3) Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur

Dasar perhitungan capaian Indikator kinerja Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN Sektor Industri Manufaktur adalah persentase penyelesaian otomatisasi proses produksi dan integrasi ERP tahap 2 sesuai dengan masterplan IT pada PT Len Industri (Persero)/ Defend ID dan Integrated Procurement System (IPS) pada PT Biro Klasifikasi Indoensia (Persero)/ IDSurvey. Pada Tahun 2024, Implementasi model bisnis terintegrasi oleh BUMN Sektor Industri Manufaktur telah terimplementasi sebesar 98,1%.

Holding Defend ID telah mengimplementasikan otomatisasi proses produksi dan integrasi ERP. Pada tahun 2024, PT Len-Induk telah 100% mengimplementasikan integrasi ERP, PT Dahana telah 100% menjalankan Go Live Sistem Informasi Persediaan & Integrasi dengan SAP, PT Dirgantara Indonesia telah 81% menjalankan implementasi CATS untuk process continuity final assembly line N219 dikarenakan proses procurement belum sepenuhnya selesai terpenuhi. PT Pindad telah 100% menjalankan otomatisasi divisi senjata, dan PT PAL telah 100% mengimplementasikan Manufacturing Execution System (MES) sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 96,27%.

Sementara itu Holding IDSurvey telah mengimplementasikan program digitalisasi melalui Pembangunan integrated procurement system (IPS) IDSurvey. IPS IDSurvey dibangun untuk penguatan integrasi pengadaan ketiga entitas IDSurvey agar dapat berkolaborasi dengan lebih baik guna operasionalisasi pengadaan yang lebih efektif dan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar terhadap pertumbuhan perusahaan. Aplikasi IPS IDSurvey telah efektif beroperasi pada 26 Juni 2024, sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 100%.

4) Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Dasar perhitungan capaian Indikator kinerja Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun adalah persentase Monitoring Integrasi *Management Information System* ("MIS") di Holding Asuransi dan Penjaminan yaitu integrasi sistem laporan keuangan antara induk dan anak perusahaan di PT BPUI (Persero). Pada tahun 2024, monitoring dan evaluasi atas integrasi MIS pada PT BPUI (Persero) ini terlaksana sebesar 100% dengan hasil yang dituangkan dalam Surat Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun perihal Pemantauan Capaian Kinerja Berkala.

Integrasi MIS dengan Anak Perusahaan (*Front End dan Back End*) telah dilaksanakan melalui penyelesaian integrasi data finansial yang bersumber dari *Enterprise Resource Planning* (ERP) dengan Holding, integrasi data manajemen risiko terintegrasi, dan implementasi dashboard fungsi enabler. Adapun untuk implementasi *Enterprise Resource Planning* (ERP), sampai dengan akhir 2024, telah tercapai sebagai berikut:

- Persiapan go live modul GL, FAH dan subledger untuk IFG Life, BTIM, BAV, BKI, dan GNTU dimana efektif digunakan untuk operasional pada Januari 2025;
- Persiapan go live untuk GL dan FAH Jasindo;
- Penyelesaian UAT cycle II Askrindo; dan
- Penyelesaian paralel run untuk Jamkrindo.

5) Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media

Indikator Kinerja Utama (IKU) *National Broadband Roll-Out Throughout Indonesia* diukur berdasarkan persentase penyelesaian program *National Broadband Roll-Out Throughout Indonesia*. Tujuan IKU ini adalah untuk meningkatkan penetrasi pengguna internet di Indonesia, meningkatkan *market share* Telkom di *home broadband*, meningkatkan efisiensi capex dan utilisasi asset jaringan Telkom secara maksimal dan memanfaatkan teknologi mutakhir (*Fixed wireless access - FWA*) untuk memenuhi kebutuhan *household broadband* khususnya di area rural. KPI ini sejalan dengan *Shield ke-4* Kementerian BUMN yaitu Kepemimpinan Teknologi sebagai Perusahaan global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti data *management*, *advanced management*, *big data*, *artificial intelligence*, dan lain lain.

Sampai dengan akhir tahun 2024, ketercapaian IKU *National Broadband Roll-Out Throughout Indonesia* sebesar 97,37% dari target dengan detail sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi
1	<i>Home served / Home passed</i>	100%	102,33%
2	Orbit	100%	77,55%
Total (80% x capaian <i>Home served / Home passed</i>) + (20% x capaian Orbit)		100%	97,37%

Ketidaktercapaian IKU *National Broadband Roll-Out Throughout Indonesia* disebabkan produk Orbit yang tidak mencapai target, namun secara YoY tumbuh 0,9%, ketidaktercapaian target disebabkan beberapa hal berikut:

- Ekspektasi market terhadap layanan *home internet* adalah *unlimited*, dan inovasi Orbit *Unlimited* belum dapat bersaing dengan *home internet* berbasis fiber (baik dari kecepatan, kestabilan koneksi, dan harga paket).

- b) Harga modem masih menjadi kendala khususnya bagi *low-segment*.
- c) Paket data mobile yang semakin agresif dan penetrasi fiber yang masif mengurangi *reason to buy* layanan Orbit.

6) Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas

Pada Tahun 2024, BUMN Klaster Emigas telah berhasil melaksanakan program digitalisasi yaitu PT Pertamina dengan progres capaian sebesar 120% dengan nilai maksimal dari target 100%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, Klaster Emigas sama-sama berhasil memperoleh capaian maksimal. Untuk Indikator Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target renstra mengingat bukan salah satu indikator dalam Renstra 2024.

Adapun progres program digitalisasi sebagai berikut:

a) Jumlah SPBU yang terdigitalisasi

Program digitalisasi SPBU oleh Pertamina merupakan inisiatif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan serta penyaluran BBM di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah memantau kondisi stok BBM, penjualan, dan transaksi pembayaran di SPBU secara *real-time*. Jumlah SPBU yang terdigitalisasi di PT Pertamina terealisasi sebesar 8.035 SPBU atau 468,24% dari target sebesar 1.716 SPBU.

b) Implementasi MyPertamina untuk mendukung program subsidi tepat BBM & LPG

Program subsidi tepat MyPertamina untuk produk BBM dilaksanakan bersama dengan fungsi Holding – Retail Fuel Sales, sedangkan produk LPG bersama dengan fungsi Holding – Retail Gas Sales untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan menggunakan *digital platform*. Parameter target implementasi MyPertamina di tahun 2024 melalui jumlah transaksi dan *downloader*. Realisasi jumlah transaksi sebesar 12 juta atau 200% dari target sebesar 6 juta transaksi, dan jumlah *downloader* sebesar 24,7 juta atau 145,29% dari target sebesar 17 juta *downloader*.

Capaian tersebut didukung oleh peran Keasdepan Emigas dalam proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi berkala agar BUMN Klaster Emigas senantiasa mengembangkan digitalisasi bisnis untuk efisiensi dan dapat terus berkontribusi terhadap *value creation* di level global maupun nasional.

7) Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara

Capaian program digitalisasi oleh BUMN di Klaster Minerba mencapai targetnya sebesar 100%. Program yang berhasil diselesaikan sebagai berikut:

a) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk: Implementasi SAP PT Krakatau Baja Industri (Capaian: 100%)

Untuk mendukung kegiatan bisnis utama, PT Krakatau Steel Tbk menyiapkan sistem SAP sebagai pendukung integrasi, otomasi, dan pengelolaan berbagai proses bisnis pada anak perusahaan. Pada tahun 2024, target digitalisasi yang ditetapkan yaitu dalam bentuk Implementasi SAP pada anak perusahaan PTKS yaitu PT Krakatau Baja Industri ("KBI"). Selama proses pelaporan Tahun 2023, telah dilakukan pemisahan secara manual antara PTKS dan PT KBI, sehingga pada tanggal 29 Februari 2024, telah dilakukan migrasi dari sistem SAP Perusahaan ke sistem SAP PT KBI.

Aktivitas tahap *final preparation* antara lain *Preparing Data Conversion, Cut Over & Migration Simulation, Develop RICEF, Test RICEF*, dan *Cut Over & Migration Activity* dapat dipercepat penyelesaiannya sehingga tahap *Go Live* dapat dilakukan lebih awal pada tanggal 11 Maret 2024. Pada April 2024, telah dilaksanakan *go live* sistem SAP secara keseluruhan (100%), dibandingkan dengan target penyelesaian di Juni 2024.

b) MIND ID Group: Sertifikasi ISO 20000-1 Information Technology Service Management (ITSM) Implementation di Anggota Holding MIND ID (Capaian: 100%)

ISO 20000-1 merupakan standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk manajemen layanan TI (Teknologi Informasi). Standar ini membantu MIND ID dalam merancang, mengimplementasikan, dan mempertahankan sistem manajemen layanan TI yang efektif. ISO 20000-1 didasarkan pada kerangka kerja *Information Technology Infrastructure Library* ("ITIL") dan memberikan panduan untuk menyediakan layanan TI yang berkualitas dan telah diterima secara luas di seluruh dunia. Pada tahun 2023, MIND ID telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO 20000-1.

Pada tahun 2024, target ditetapkan yaitu berupa penerapan Sertifikasi ISO 20000-1 ITSM pada Anggota Holding (ANTAM, PTBA, Timah, dan INALUM). Pada ANTAM dan PTBA, telah diperoleh Sertifikasi ISO 20000-1 pada November 2024 lalu, sedangkan pada TIMAH dan INALUM, perolehan Sertifikasi ISO 20000-1 yaitu pada Desember 2024. Untuk itu, realisasi target Sertifikasi ISO 20000-1 *Information Technology Service Management (ITSM) Implementation* di Anggota Holding MIND ID secara keseluruhan telah terpenuhi sebesar 100%.

8) Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk

Implementasi Digitalisasi oleh BUMN Industri Pangan dan Pupuk mencapai progres 100% dengan rincian sebagai berikut:

- a) Implementasi Integrasi Supply Chain untuk Penyaluran Pupuk Subsidi (Visibilitas Produk Stok s.d. Titik Pelepasan ke Konsumen/Lini IV untuk Produk Subsidi) pada PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai progres 100% secara nasional dan telah Go-Live pada 26 September 2024.
- b) Implementasi Pengembangan aplikasi Dashboard Informasi & Monitoring Penyelenggaraan CPP pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mencapai progres 100%; dan
- c) Implementasi Pengembangan aplikasi Dashboard Informasi & Monitoring Penyelenggaraan CPP pada Perum BULOG mencapai progres 100%, dengan rincian progress rollout dan implementasi Dashboard Harga Komoditas dan Distribusi Pangan.

9) Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan

Capaian IKU Implementasi Program Digitalisasi BUMN Klaster Industri Kesehatan tahun 2024 sebesar 80,75% dari target Perjanjian Kinerja sebesar 100%. Program digitalisasi tersebut diimplementasikan melalui beberapa kegiatan antara lain tertuang dalam 2 (dua) sub indikator sebagai berikut (bobot masing-masing 50 persen):

- a) Penyelesaian program *Joint Procurement System* (realisasi 100%); dan
- b) Implementasi modul *manufacturing* pada ERP Bio Farma (realisasi 61,50%).
Go Live Aplikasi *Joint Procurement System* di Biofarma Group telah dilaksanakan pada Maret 2024 dan *workshop* kepada user telah dilakukan. Sementara itu, ERP Bio Farma masih dalam tahapan pengembangan sampai bulan Februari 2025 serta dalam proses persiapan pembuatan dan perubahan atas SOP terdampak. Program digitalisasi Biofarma Group dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing pasar melalui integrasi teknologi digital agar dapat memberikan layanan yang lebih efisien, akurat, responsif, dan menciptakan ekosistem operasional yang adaptif terhadap kebutuhan pasar yang terus berubah.

10) Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan

Program Digitalisasi BUMN Binaan Klaster Industri Perkebunan dan Kehutanan berhasil diimplementasikan 100%, baik dibandingkan dengan target tahun 2024. Adapun untuk implementasi program digitalisasi terdiri dari 2 (dua) program, yaitu Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Kegiatan On Farm di 98 unit kebun (Implementasi AWS) PTPN III (Persero) dan Pemanfaatan Teknologi Citra Satelit di

KPH untuk Perencanaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani. Pemanfaatan digitalisasi dan teknologi untuk kegiatan on farm berupa Automation Weather Station (AWS) dimana sampai dengan Desember 2024, sudah melampaui target 2024 (48%) yaitu terealisasi 64,22%. Dan pemanfaatan teknologi citra satelit di KPH untuk Perencanaan Sumber Daya Hutan sudah terimplementasi di 11 KPH sesuai target.

11) Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung

Pada tahun 2024, BUMN Klaster Pariwisata dan Pendukung menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan di sektor pariwisata dan transportasi. Realisasi program digitalisasi mencapai 100%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 100% pada akhir Desember. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa strategi integrasi layanan teknologi informasi dapat memperkuat daya saing dan mendorong keberlanjutan di berbagai sektor pendukung pariwisata.

a) Pengembangan Aplikasi A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) pada Perum LPPNPI

AirNav Indonesia berhasil menyelesaikan pengembangan dan implementasi penuh Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi operasional penerbangan. Proses ini mencakup uji coba aplikasi hingga integrasi ke dalam IMANS Ecosystem Cloud, yang berjalan tanpa hambatan sepanjang tahun. A-CDM memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan di bandara, seperti maskapai penerbangan, otoritas bandara, dan penyedia layanan navigasi udara, sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Penyusunan dokumentasi sistem yang menjadi tahap akhir pengembangan juga berhasil diselesaikan pada Desember 2024, menjadikan A-CDM siap diimplementasikan secara menyeluruh di lingkungan operasional AirNav.

b) Implementasi Tourism Collaborative Platform tahap 3 pada PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero)

Di sisi lain, Injourney telah sukses melanjutkan pengembangan Tourism Collaborative Platform (TCP) hingga tahap 3, yang menjadi salah satu inisiatif unggulan dalam transformasi digital sektor pariwisata. Fitur Booking System untuk transaksi pembelian melalui platform ini telah selesai dikembangkan dan mulai dioperasikan secara efektif pada tahun 2024. TCP dirancang untuk menghubungkan seluruh ekosistem pariwisata di Indonesia, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, dengan tujuan memberikan pengalaman wisata yang lebih personal, terintegrasi, dan imersif bagi wisatawan. Dengan platform ini,

pelaku pariwisata dapat mengakses data inventori yang terintegrasi, memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang lebih responsif dan relevan bagi kebutuhan wisatawan.

Wakil Menteri BUMN selanjutnya mendorong BUMN untuk terus melakukan digitalisasi setiap lini bisnis untuk efisiensi dan efektivitas proses bisnis guna meningkatkan daya saing dan dapat memberikan nilai tambah bagi BUMN sehingga dapat menjangkau pangsa pasar lebih luas hingga di kancah global.

Sasaran Strategis 12.	:	Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional
------------------------------	---	---

a. % Total Realisasi Capex

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian
61%	67,05%	78,85%	120%

Dasar pencapaian 95realisasi kinerja % Total Realisasi *Capex* merupakan 95realisasi penyelesaian investasi/belanja modal (*Capex*) BUMN dalam pembinaan Wakil Menteri BUMN dibandingkan target yang ditetapkan/dianggarkan dalam RKAP. Realisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar 78,85% atau 129,76% (capaian maksimal 120%) dibandingkan dengan target sebesar 61%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 67,05%, capaian tahun 2024 lebih besar menunjukkan bahwa BUMN terlibat langsung melalui nilai investasi yang dianggarkan mampu mendorong pembangunan nasional yang mendukung program-program prioritas pemerintah untuk mencapai pemerataan pembangunan dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Capaian % Total Realisasi Capex tidak dapat dibandingkan dengan Renstra 2024 karena satuan yang dipergunakan dalam renstra Rp Triliun.

Berikut rincian pencapaian % Total Realisasi *Capex* dari masing-masing klaster:

1) Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik

Indikator kinerja % Total Capex pada BUMN Klaster Jasa Logistik tahun 2024 adalah 73% atau 112% dari target tahun 2024 yaitu sebesar 65%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 meningkat 10%. Terdapat 4 (empat) BUMN yang realisasi investasinya masin dibawah target yaitu PT ASDP, PT INKA, PT PELNI dan Perum DAMRI. Adapun alasan belum tercapainya target Capex pada PT ASDP dan PT PELNI karena tidak terealisasinya investasi alat produksi kapal karena tidak tersedianya kapal sesuai spesifikasi dan kebutuhan di pasar, sedangkan PT INKA karena ada pergeseran pengadaan mesin produksi dan fasilitas pendukung dimana direncanakan dapat terealisasi pada tahun 2024 dengan pendanaan yang bersumber

dari PMN Tunai TA 2024 tapi realisasinya dana PMN Tunai TA 2024 baru diperoleh pada akhir tahun 2024 dan Perum DAMRI karena adanya perubahan skema pengadaan kendaraan yang pada awalnya dilakukan melalui investasi (pengadaan) tapi diubah menjadi skema sewa (leasing) sebagai upaya efisiensi biaya.

2) Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

Indikator kinerja % Total Realisasi belanja modal (*capex*) BUMN Klaster Jasa Infrastruktur tahun 2024 tercapai sebesar Rp39.480,9 miliar atau 53,25% dari total rencana belanja modal (*capex*) sebesar Rp74.142,8 miliar.

Ketidaktercapaian belanja modal (*capex*) tersebut disebabkan oleh adanya BUMN dengan realisasi belanja modal (*capex*) di bawah 30% yaitu Perum Perumnas, PT Brantas Abipraya Persero (Tbk), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

3) Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur

Indikator kinerja % Total Realisasi Nilai Investasi BUMN Klaster Industri Manufaktur pada tahun 2024 masih di bawah target Perjanjian Kinerja tahun 2024. Realisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar 57,8% sementara target yang ditetapkan adalah sebesar 65,0% sehingga capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 88,9% namun mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang terealisasi 25,3%.

Berdasarkan Angka Prognosa 2024, realisasi investasi konsolidasi Defend ID terealisasi sebesar Rp833,0 Miliar atau sebesar 55,0% dari target. Ketidaktercapaian ini antara lain disebabkan karena realisasi investasi dilakukan dengan menyesuaikan arus kas perusahaan. Pada tahun 2024 arus kas PT Len menghadapi keterbatasan dan diprioritaskan untuk pembayaran utang dan kegiatan operasional perusahaan.

Sementara itu, realisasi investasi konsolidasi IDSurvey sebesar Rp467,6 Miliar atau tercapai 63,6% dari target. Ketidaktercapaian realisasi investasi tersebut dikarenakan terjadi penundaan pengadaan sarana produksi karena belum diperolehnya kontrak/pekerjaan melalui tender sehingga menyebabkan pengadaan sarana produksi tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, untuk investasi penyertaan modal mengalami keterlambatan karena realisasi penyertaan modal pada cucu Perusahaan IDSurvey baru terlaksana pada awal tahun 2025.

4) Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Indikator kinerja % Total Capex pada BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun tahun 2024 adalah 70,93% atau 118,21% dari target tahun 2024 yaitu sebesar 60% atau meningkat 8,62% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Adapun rincian realisasi Total Realisasi Capex pada masing-masing BUMN jika dibandingkan dengan

target tahun 2024, yaitu PT ASABRI (Persero) sebesar 30,48%, PT BPUI (Persero) sebesar 74,97%, PT RIU (Persero) sebesar 70,35%, dan PT Taspen (Persero) sebesar 74,97%. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh adanya pergeseran timeline pengadaan pada belanja modal BUMN, utamanya berasal dari belanja modal terkait implementasi PSAK 117 Kontrak Asuransi pada PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero).

5) Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan

Indikator kinerja % Total Capex pada BUMN Klaster Jasa Keuangan tahun 2024 adalah 85,10% atau 120% dari target tahun 2024 yaitu sebesar 60%. Capaian ini didorong oleh fokus Himbara dalam perencanaan Capex yang lebih efisien dan pengadaan yang lebih efektif pada tahun 2024 ini. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nominal realisasi capex Himbara tumbuh 16,87% yoy. Peningkatan nominal capex ini sejalan dengan dengan peningkatan anggaran Himbara dan efektivitas penyerapan anggaran capex.

6) Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media

Indikator kinerja % total realisasi nilai investasi pada tahun 2024 tercapai sebesar Rp31,31 Miliar atau 70,14% dari total target Rp44,47 Miliar dengan Tingkat ketercapaian IKU sebesar 100,58%. Berikut disampaikan rincian atas masing-masing realisasi Capex pada 7 (tujuh) BUMN dilingkungan Keasdepan Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media.

Dalam Miliar Rupiah

BUMN	Target	Realisasi	%
Perum Jasa Tirta I	412,00	148,44	36,03%
Perum Jasa Tirta II	360,75	228,68	63,39%
Perum LKBN Antara	62,57	60,14	96,12%
Perum PNRI	76,90	0,49	0,64%
PT Danareksa (Persero)	2.379,50	1.573,73	66,14%
Perum Peruri	456,00	362,26	79,44%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	40.723,00	28.936,00	71,06%
Total	44.470,72	31.309,75	70,41%

*Realisasi Capex menggunakan angka *unaudited* 2024

- Realisasi Capex pada Perum Jasa Tirta I hanya sebesar Rp148,44 Miliar atau 36,03% dari Target PK 2024 disebabkan karena belum terealisasinya penyertaan PLTS Apung Kodongombo, PLTS Apung Wonogiri serta penyertaan modal pada anak perusahaan.
- Realisasi Capex pada Perum Jasa Tirta II sebesar Rp228,68 Miliar atau 63,39% dari Target PK 2024 disebabkan karena rencana penyertaan modal SPAM Kota Bandung yang tidak dapat direalisasikan.

- c) Realisasi Capex Perum LKBN Antara terealisasi sebesar Rp60,14 Miliar atau 96,12% dari Target PK 2024. Realisasi tersebut sudah lebih besar dari target realisasi Capex >70% namun masih belum tercapai 100% dari target disebabkan karena pembelian server IT yang belum dapat terealisasi karena produk yang akan dibeli masih belum *release*.
- d) Realisasi Capex Perum PNRI terealisasi sebesar Rp 0,49 Miliar atau 0,64% dari target PK 2024 disebabkan rencana relokasi kantor dan pabrik belum dapat dilaksanakan.
- e) Realisasi Capex PT Danareksa (Persero) terealisasi sebesar Rp1.573,73 Miliar atau 66,14% dari Target PK 2024 disebabkan karena belum terealisasinya investasi KPBU IKN melalui Nindya Karya dan Investasi Modal melalui Danareksa Capital.
- f) Realisasi Capex Perum Peruri terealisasi sebesar Rp326,26 Miliar atau 79,44% dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Realisasi tersebut sudah lebih besar dari target realisasi capex >70%, namun masih belum tercapai 100%. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan karena target capex yang diproyeksikan baru dapat direalisasikan pada tahun selanjutnya.
- g) Realisasi Capex PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terealisasi sebesar Rp28,936,00 Miliar atau 71,06% dari Target PK 2024. Realisasi tersebut sudah lebih besar dari target 98ealisasi capex >70%.

7) Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas

Pada tahun 2024 Klaster Emigas Realisasi nilai investasi sebesar Rp185,50 triliun atau sebesar 86,97% dari target RKAP 2024 sebesar Rp149,33 triliun. Dari realisasi investasi sebesar 86,97% tersebut tercapai 124,22% dari target sebesar 70%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, total Realisasi investasi mengalami peningkatan sejalan dengan pembangunan infrastruktur untuk menunjang penyediaan energi oleh BUMN Klaster Emigas. Total Realisasi Investasi Klaster Emigas dalam kurun tahun 2020 – 2024 mengalami fluktuasi menyesuaikan besaran nilai investasi serta prioritas investasi yang sejalan dengan *core business* BUMN.

Jika dilakukan penjabaran pada tiap BUMN Klaster Emigas, realisasi Investasi pada tahun 2024 oleh PT PLN sebesar Rp69,22 triliun atau setara 124,14% dari target sebesar Rp55,76 triliun. Pada tahun 2024 sendiri nilai investasi tersebut dimanfaatkan oleh PT PLN guna melaksanakan Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi, dan gardu induk) dalam menyediakan listrik yang mengedepankan aspek *security*, *affordability* dan *sustainability*, serta *maintenance*, penyambungan pelanggan dan penguatan/pengembangan distribusi, dan IDC.

Sementara itu, realisasi Investasi PT Pertamina sebesar Rp116,30 triliun atau setara 124,29% dari target sebesar Rp93,57 triliun. Pada tahun 2024 kontribusi nilai investasi PT Pertamina terbesar yaitu pada Subholding Upstream sebesar Rp66,12 triliun dan Subholding Refining & Petrochemical sebesar Rp15,47 triliun.

Asdep Emigas terus mendorong PT Pertamina dan PT PLN untuk terus berperan aktif dalam membangun infrastruktur melalui investasi terhadap proyek-proyek strategis yang mendukung program pemerintah. Dalam perencanaan dan pelaksanaan investasi, Asdep Emigas mendorong BUMN untuk memperhtaikan prioritas investasi terhadap Pembangunan nasional sehingga kondisi keuangan dapat terjaga.

8) Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara

Realisasi nilai investasi pada BUMN Klaster Mineral dan Batubara hanya sebesar Rp16,75 Triliun (64% dari target RKAP) atau masih di bawah target realisasi nilai investasi sebesar Rp18,32 Triliun (target CAPEX BUMN pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Mineral dan Batubara disepakati sebesar 70% dari target RKAP). Ketidaktercapaian realisasi investasi disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi investasi sebagai berikut.

a) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

PTKS secara *unaudited* merealisasikan nilai investasi sebesar Rp0,95 Triliun, atau 54% dari target RKAP sebesar Rp2,50 Triliun (target ditetapkan pada PK yaitu sebesar 70% dari target RKAP). Nilai investasi ini diperoleh dari nilai investasi rutin yang terdiri dari pembelian barang modal dan pembangunan aset tetap dengan cara, serta realisasi investasi dalam rangka pembiayaan proyek Perusahaan dan anak Perusahaan.

Ketidaktercapaian ini berkontribusi signifikan oleh ketidaktercapaian investasi proyek yang dilaksanakan oleh Subholding PT Krakatau Sarana Infrastruktur ("KSI") dan PT KBK sebagaimana menindaklanjuti kebijakan manajemen yang menetapkan agar sebagian besar proyek di-*hold* untuk kepentingan efisiensi dan *cash flow management*. Namun demikian, hingga Desember 2024, proyek-proyek di entitas anak yang sudah berjalan yaitu di antaranya pada PT Krakatau Sarana Infrastruktur, yaitu:

- (i) Pengadaan 1 Unit Tugboat Tahap 1;
- (ii) Proyek Pengembangan Kapasitas Tahap III (PPK3);
- (iii) Revitalisasi Dermaga 5;
- (iv) Gudang KIK 2 Tahap 1 (4 @1500 m2);
- (v) Revitalisasi Dermaga 1;
- (vi) Fasilitas Penunjang IWH-D2;

- (vii) Pengembangan Perhotelan;
- (viii) Penambahan Penyertaan Modal ke KSS;
 - (ix) Pembuatan IPAL Terintegrasi Hotel;
 - (x) Pengembangan Unit Komersial;
 - (xi) Perumahan;
 - (xii) Conveyor incline 2 unit (KJS);
 - (xiii) Pematangan Lahan Kawasan II;
 - (xiv) Overhaul Engine (KAL);
 - (xv) Cabin Dump Truck (KJL);
 - (xvi) Pembelian Truck Vacuum (KSS) + motor patrol; dan
 - (xvii) Pengembangan SPAM diluar kota Cilegon.

b) MIND ID Group

MIND ID Group secara *unaudited* merealisasikan nilai investasi mencapai sebesar Rp15,880 Triliun, atau 67,95% dari target RKAP 2024 sebesar Rp23,7 Triliun. Realisasi yang lebih rendah dibandingkan target ini disebabkan oleh tidak terealisasinya sejumlah investasi besar seperti:

- (i) Belum optimalnya serapan dari proyek Pembangunan CHF TLS Angkutan Batubara TE-Kramasan pada PTBA yang disebabkan oleh pembebasan lahan yang terlambat;
- (ii) Pembebasan lahan UBPB Kalbar pada ANTAM yang belum terserap penuh karena proses negosiasi serta kurang optimalnya aktivitas eksplorasi rutin yang disebabkan oleh mundurnya persetujuan RKAB;
- (iii) Belum terealisasinya setoran modal BAI oleh INALUM sebesar Rp600 Miliar dan ANTAM sebesar Rp548 Miliar;
- (iv) Pembebasan lahan UBPB Kalbar pada ANTAM yang belum terserap penuh karena masih dalam proses negosiasi, serta masih kurang optimalnya aktivitas eksplorasi rutin yang disebabkan oleh mundurnya persetujuan RKAB;
- (v) Belum teralisasinya setoran modal BAI oleh INALUM sebesar Rp600 Miliar dan ANTAM sebesar Rp548 Miliar; dan
- (vi) Nilai investasi penambahan kepemilikan saham MIND ID pada PT Vale Indonesia ("PTVI") terealisasi lebih optimalnya dibandingkan dengan anggaran tahun 2024.

Keasdepan Mineral dan Batubara akan terus mendorong pelaksanaan investasi tersebut dan memastikan rencana investasi diatas memberikan kontribusi bagi perusahaan.

9) Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk

Capaian Investasi BUMN Sektor Industri Pangan dan Pupuk mencapai 170% dari target 70%. Ini didukung oleh realisasi investasi pada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang tercapai sebesar Rp9,32 triliun, dengan adanya akselerasi pelaksanaan investasi Pengembangan backlog tahun lalu pada Proyek Pusri 3B dan Revamp Ammonia Kaltim-2 (PKT).

10) Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan

IKU % Total Realisasi CAPEX BUMN Klaster Industri Kesehatan tahun 2024 tercapai dengan capaian sebesar Rp1.514 miliar (prognosa 2024) atau 70,51% dari total rencana CAPEX Biofarma Group sebesar Rp2.147 miliar (117,52% dari target IKU tahun 2024 sebesar 60%). Capaian tersebut utamanya dipengaruhi oleh pembangunan fasilitas gedung 34 untuk fasilitas pengembangan produk skala pilot dan gedung 37 untuk fasilitas produksi vaksin rotavirus.

11) Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan

Realisasi investasi atau Capex Klaster Perkebunan dan Kehutanan di tahun 2024 tercatat sebesar 73% atau 104% dibandingkan dengan target tahun 2024 dan 140% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 52%. Adapun realisasi Capex PTPN III (Persero) tercatat sebesar Rp 5,6 Triliun dan realisasi Capex Perhutani tercatat sebesar Rp 0,5 Triliun.

12) Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung

Indikator kinerja persentase total realisasi nilai investasi pada tahun 2024 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024. Realisasi tersebut mencapai 70% dari total nominal nilai investasi sebesar Rp16,07 triliun, atau setara dengan Rp11,25 triliun.

Investasi di bawah InJourney telah direalisasikan melalui alokasi dana pada anggota holding, dimana realisasi investasi terbesar pada anggota holding adalah pada PT Angkasa Pura I, PT Hotel Indonesia Natour, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Sementara itu, realisasi investasi pada Garuda Indonesia dilakukan melalui penambahan jumlah armada (fleet) serta pelaksanaan kegiatan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat.

Adapun untuk AirNav Indonesia, realisasi investasi difokuskan pada program peremajaan dan peningkatan sistem navigasi penerbangan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat aspek keamanan lalu lintas udara guna mendukung kelancaran transportasi penerbangan secara nasional.

b. Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian
100%	84,38%	71,09%	71,09%

Pelaksanaan proyek strategis nasional merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pelaksanaan proyek strategis nasional bertujuan untuk memaksimalkan percepatan pertumbuhan pada berbagai aspek antara lain pembangunan fisik (Infrastruktur Energi, Pengembangan kawasan, hilirisasi tambang, Jalan Tol, Pelabuhan, Bendungan, Jembatan, Bandara, dll), penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional serta dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2024 sebanyak 37 Proyek Strategis Nasional turut melibatkan BUMN sebagai wujud *agent of development* serta sekaligus sebagai *value creator*. Capaian target progres fisik Proyek Strategis Nasional yang berhasil diselesaikan terealisasi sebesar 71,09% dari target sebesar 100%, atau mengalami penurunan 15,75% dibandingkan realisasi tahun 2023. Adapun beberapa proyek yang belum selesai dan akan dilanjutkan di tahun selanjutnya akan dimonitor perencanaan dan pelaksanaan proyek secara berkala sehingga perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan target yang telah disusun.

Sasaran Strategis 13.	:	Meningkatnya Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN
------------------------------	---	---

Rata-rata Penggunaan Tingkat TKDN

Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian
52,60%	65,75%	74,26%	120%

Target Rata-Rata Penggunaan Tingkat TKDN tahun 2024 terealisasi sebesar 74,26% atau tercapai 141,18% dari target 52,60% serta terealisasi di atas capaian tahun lalu sebesar 65,75%. Ketercapaian Rata-Rata Penggunaan Tingkat TKDN mencerminkan bahwa BUMN memiliki peran strategis dalam memperkuat industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, serta merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Adapun kontribusi terbesar atas capaian Rata-rata Penggunaan Tingkat TKDN adalah Klaster Jasa Infrastruktur dengan capaian tahun 2024 sebesar 98,03. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam membangun infrastruktur dalam negeri dapat memanfaatkan

resource yang ada sehingga mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi, kapabilitas, dan inovasi teknologi dalam negeri.

Wakil Menteri BUMN akan terus mendorong BUMN untuk tetap berkontribusi terhadap pencapaian TKDN untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dengan meningkatkan keunggulan produk dalam negeri sehingga mampu bersaing di dalam negeri dan kancah global.

Berikut ini merupakan rincian kontribusi masing-masing kluster terhadap pencapaian Rata-Rata Penggunaan TKDN Wakil Menteri BUMN.

1) Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik

Indikator Kinerja berupa rata-rata penggunaan TKDN pada BUMN Sektor Jasa Logistik adalah 72,05% atau melebihi sebesar 24,56% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 57,84%, namun mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan capaian sebesar 81,12%. Kontribusi terbesar capaian TKDN berasal dari PT ASDP (Persero) dengan persentase PDN dibandingkan dengan PBJ sebesar 100%, PT KAI (Persero) sebesar 95,01%, dan PT INKA (Persero) sebesar 83,00%. Dalam pencapaian rata-rata penggunaan TKDN tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau tantangan yang dihadapi BUMN Klaster Jasa Logistik yaitu terdapat investasi yang merupakan produk *import* dan belum ada produk penggantinya di dalam negeri, utamanya untuk pengadaan investasi alat produksi (Peralatan Pelabuhan, Komponen Propulsi/Alat Penggerak Kereta) dan pendukung perusahaan (Perlengkapan di bidang IT) serta belum optimalnya pengadaan melalui aplikasi PaDi UMKM akibat masih terbatasnya vendor yang terdaftar.

2) Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

Capaian nilai Indikator kinerja Rata-rata Penggunaan TKDN BUMN Klaster Jasa Infrastruktur tahun 2024 adalah sebesar 84,9%, atau 97,59% dari target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 87%. Dari 10 BUMN Klaster Jasa Infrastruktur, hanya PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan realisasi TKDN di atas target (164,31% dari target 2024). Hal ini dikarenakan terdapat realisasi TKDN yang lebih besar secara signifikan dari target yang besar pada Anak Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk yaitu PT Jasamarga Japek Selatan.

3) Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur

Indikator kinerja rata-rata Penggunaan TKDN pada tahun 2023 terealisasi sebesar 32,7%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 49,1% sehingga capaian pada tahun 2023 adalah sebesar 66,5%. Ketidaktercapaian indikator ini antara lain disebabkan karena rendahnya realisasi penggunaan PDN pada Defend ID yaitu sebesar 30,6% dari target sebesar 48,5%. Hal ini disebabkan oleh beberapa proyek yang diperoleh

Anggota Holding Defend ID belum efektif, sehingga Perusahaan belum dapat melakukan pengadaan dalam negeri. Pada PT PAL rendahnya realisasi persentase PDN dikarenakan belum diterimanya *steel plate* akibat keterlambatan produksi vendor dalam negeri (Krakatau Steel) untuk proyek LD Phillipines, sehingga PT PAL mencari substitusi dari luar negeri. Dalam rangka mencapai target %PDN, PT PAL masih berprogress untuk mencari substitusi *steel plate* tersebut dari vendor dalam negeri lainnya. Selain itu, pada PT Pindad, rendahnya realisasi persentase PDN dikarenakan material yang semula ditargetkan dapat dipenuhi oleh industri lokal masih belum mencukupi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga PT Pindad mengimpor material yang dibutuhkan.

4) Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

IKU Rata-rata penggunaan TKDN BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Tahun 2024 tercapai di atas target dengan capaian sebesar 83,87% atau mencapai 112,99% dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 74,23% dan mengalami penurunan 3,46% dari realisasi tahun 2023. Kontribusi terbesar peningkatan capaian TKDN berasal dari PT ASABRI (Persero) dengan persentase PDN dibandingkan dengan PBJ sebesar 97,68%, PT Taspen (Persero) sebesar 87,51%, PT RIU (Persero) sebesar 82,44%, dan PT BPUI sebesar 69,83%.

5) Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan

IKU Rata-rata penggunaan TKDN BUMN Klaster Jasa Keuangan Tahun 2024 tercapai di atas target dengan capaian sebesar 86% atau mencapai 120% dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 60%. Hal ini didorong oleh komitmen Himbara dalam membelajarkan produk-produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, persentase penggunaan PDN menurun dari 88% menjadi 86% yang didorong oleh peningkatan persentase pengadaan barang dan jasa impor di BRI, BNI, dan BTN. Namun demikian dibandingkan batas minimal sesuai Inpres No. 2 Tahun 2022 sebesar 40%, realisasi Himbara telah melampaui batas minimal.

6) Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media

IKU Rata-rata penggunaan TKDN BUMN Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media Tahun 2024 tercapai dengan capaian sebesar 65,26% atau 109% dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan meningkat 8,68% dari realisasi tahun 2023. Kontribusi terbesar peningkatan capaian TKDN diberikan oleh PJT II dengan tingkat TKDN sebesar 68,89%, Perum PNRI sebesar 100%, PT Danareksa (Persero) sebesar 71,33%, Perum Peruri sebesar 82,91%, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebesar 61,47%.

7) Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas

Pada tahun 2024 BUMN Klaster Emigas dapat mencapai TKDN sebesar 61,55% dari target sebesar 39,62% serta tercapai lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 55,82%. Jika dilihat dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 capaian TKDN berfluktuasi seiring dengan dinamika pelaksanaan proyek (baik dari sisi tahap pembangunan, jenis pekerjaan, hingga kebutuhan teknis) dan kesiapan industri nasional.

Keasdepan Emigas secara aktif mendorong BUMN binaan untuk memperkuat pertumbuhan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap proyek. Selain itu, Keasdepan Emigas juga berperan penting dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat akselerasi program penggunaan produk dalam negeri.

Jika dilakukan penjabaran untuk masing-masing BUMN Klaster Emigas, Capaian TKDN PT PLN pada tahun 2024 sebesar 53,90% atau 145,96% dari target sebesar 36,93%. Adapun perhitungan TKDN dari PT PLN merupakan persentase TKDN dari total nilai proyek yang sedang dilaksanakan pada tahun 2024. Adapun komponen TKDN yang paling tinggi berasal dari proyek transmisi yang terealisasi sebesar 75,92%. Sementara itu, Realisasi TKDN PT Pertamina sebesar 71,20% atau 168,32% dari target sebesar 42,30%. Sama dengan PLN, Pertamina juga melakukan perhitungan presentase TKDN dari total proyek yang dilaksanakan pada tahun 2024. Subholding Upstream Pertamina tercatat sebagai penyumbang komponen TKDN terbesar, dengan capaian sebesar 71,7%.

8) Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara

Capaian realisasi TKDN Keasdepan Bidang Industri Mineral dan Batubara secara keseluruhan sebesar 59,35% dengan target TKDN sebesar 40%. Ketercapaian TKDN ini dikontribusikan oleh MIND ID Group sebesar 63,11% yang dikontribusikan oleh capaian TKDN anggota *holding*, dan realisasi TKDN PT Krakatau Steel sebesar 55,80% dari target TKDN sebesar 40%. Pada PTKS, sebagaimana berdasarkan Sertifikat TKDN yang diterbitkan dari Kementerian Perindustrian yang berlaku hingga tahun 2024, nilai TKDN PTKS yaitu sebesar 55,80%. Namun demikian, sertifikasi ini masih dilakukan berdasarkan nilai TKDN pada Slab PT Krakatau Posco ("KP") sebesar 34%. Adapun menurut tim PTKP, saat ini slab PTKP sudah mencapai nilai TKDN 42%, sehingga KS akan melakukan sertifikasi ulang, dengan nilai TKDN *Hot Rolled Coil* ("HRC") PTKS berpotensi naik.

9) Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk

IKU % Rata-Rata Penggunaan TKDN ditujukan untuk mendorong implementasi kebijakan Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dari dalam negeri, termasuk untuk seluruh Proyek-Proyek CAPEX BUMN.

Pengukuran atas pencapaian target IKU ini dilakukan pada PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk Proyek-Proyek Capexnya, termasuk Proyek Pusri 3B, Revamp Ammonia Kaltim-2, NPK Chemical, Reaktivasi Pabrik H2O2, Proyek Dry Ice, Gudang Urea Ekspor, dan Phonska V, dengan capaian sebesar 65,8% dari target 25,0%.

10) Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan

IKU Rata-rata Penggunaan TKDN BUMN Klaster Industri Kesehatan tahun 2024 tercapai dengan capaian sebesar 41,30% dengan realisasi PDN s.d. TW IV 2024 sebesar Rp786,69 miliar dari realisasi anggaran belanja (PBJ) Rp1.904,64 miliar. Capaian tersebut secara persentase melebihi target dimana pada tahun 2024 rata-rata penggunaan TKDN ditargetkan sebesar Rp941,25 miliar dari Rp2.530,82 miliar (37,19%). Hal tersebut utamanya didorong oleh peningkatan volume pembelian barang pemeliharaan operasional pabrik, peningkatan investasi CAPEX serta peningkatan pembelian barang bahan kemas dan alat perlengkapan kerja. Perhitungan tersebut telah sesuai dengan surat Kementerian BUMN No. S-152/MBU/S/05/2022.

Untuk tahun 2025 langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Industri Kesehatan untuk mempertahankan/meningkatkan capaian tersebut adalah meningkatkan kemitraan dengan produsen lokal, mengembangkan program substitusi impor untuk bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri, meningkatkan investasi dalam negeri untuk pengembangan kapasitas produksi, mengoptimalkan proses pengadaan agar lebih berpihak pada produk dalam negeri, melakukan sertifikasi TKDN untuk produk-produk Biofarma Group.

11) Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa. TKDN merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang bertujuan untuk memberdayakan Industri dalam negeri dan memperkuat struktur Industri. Pada PTPN III, realisasi capaian TKDN di tahun 2024 sebesar 65,82% dari total belanja. Pada Perhutani realisasi capaian TKDN tahun 2024 sebesar 69,42%.

12) Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung

Indikator kinerja mengenai penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung menunjukkan hasil yang sangat positif. Pada tahun 2024, rata-rata penggunaan TKDN tercatat mencapai 60,36%, yang melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 46%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam mendorong penggunaan produk dan layanan dalam negeri, yang berdampak pada penguatan ekonomi domestik serta mendukung pembangunan sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Kontribusi terhadap persentase TKDN ini berasal dari beberapa entitas utama, yaitu Perum LPPNPI yang mencatatkan angka sebesar 44,74%, InJourney yang mencapai 79,51%, serta Garuda Indonesia dengan persentase 56,82%. Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen kuat dari masing-masing institusi dalam mengutamakan produk dan layanan dalam negeri, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat industri lokal.

Dengan tercapainya IKU Penggunaan TKDN ini, diharapkan dapat terus mendorong penggunaan komponen dalam negeri yang lebih besar di klaster pariwisata dan pendukung. Pencapaian ini juga menjadi fondasi untuk memperkuat daya saing industri pariwisata Indonesia di tingkat global, dengan tetap memprioritaskan keberlanjutan dan perkembangan ekonomi domestik melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

TKDN ini dilakukan melalui sinergi dan peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* terkait, kolaborasi dan inovasi, serta perencanaan dan monitoring yang baik guna mendorong penggunaan produk dalam negeri yang lebih optimal untuk mendukung karya bangsa.

Sasaran Strategis 14.

: Meningkatkan Kontribusi BUMN dalam Program Hilirisasi

Jumlah Program Hilirisasi yang Berhasil Dijalankan

Pada akhir tahun 2024 Program Hilirisasi yang berhasil dijalankan BUMN yang berada dibawah lingkup Wakil Menteri BUMN sebanyak 7 program atau tercapai sebesar 100% dari program yang ditargetkan sebanyak 7 Program. Adapun program program hilirisasi tersebut sebagai berikut.

1) Klaster Industri Energi, Minyak, dan Gas

Pada Tahun 2024 BUMN Klaster Emigas sendiri telah melaksanakan 3 program hilirisasi dengan capaian maksimal 120%. Untuk indikator program hilirisasi dilaksanakan sejak tahun 2020 – 2024 dengan program hilirisasi dilaksanakan dengan baik rata-rata capaian

100%. Adapun detail Realisasi Program Hilirisasi BUMN Klaster Emigas pada tahun 2024 sebagai berikut.

PT Pertamina

Proyek hilirisasi yang dijalankan oleh PT Pertamina yaitu proyek Pengembangan *Olefin Complex* PT Trans Pacific Indotama (PT TPPI) dan Implementasi *Bioethanol* melalui Produk *Pertamax Green 95*. Proyek Olefin TPPI merupakan proyek hilirisasi untuk mengkonversi produk samping (*off gas & light naptha*) menjadi produk bernilai tinggi. Adapun *milestone target* Proyek Olefin adalah *FID Preparation* dan *Approval* untuk evaluasi keekonomian proyek, dengan realisasi telah dilakukan *Final Investment Decision* oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT Kilang Pertamina Internasional. Sementara untuk Implementasi *Bioethanol* Melalui Produk *Pertamax Green 95* dilakukan dengan *roll out* ke SPBU Pertamina di seluruh Indonesia, dengan realisasi sebanyak 106 SPBU yang telah diimplementasikan atau 106% dari target 2024 sebesar 100 SPBU.

PT PLN

PT PLN sendiri berperan penting dalam menumbuhkan ekosistem *Electric Vehicle* (EV) dalam negeri sejalan dengan pemenuhan komitmen Pemerintah dalam program NZE 2060. Upaya PT PLN sendiri yaitu memberikan kemudahan bagi para pelanggan dengan membuat SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) guna memudahkan *charging* untuk mobil EV yang dekat dengan posisi yang dibutuhkan dan tersebar di titik-titik strategis. Pada tahun 2024 sendiri ditargetkan dapat terpasang 900 unit *charger* SPKLU dengan realisasi terpasang jauh melebihi target, yaitu sebanyak 1.598 unit *charger* SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sejalan dengan implementasi hilirisasi, Asdep Emigas mendorong BUMN di bawah binaannya untuk terus berperan penting dalam program hilirisasi, yang berdampak pada peningkatan *value added* BUMN, dan mengurangi impor produk.

2) Klaster Industri Mineral dan Batubara

Program Hilirisasi yang ditargetkan pada tahun 2024 pada MIND ID yaitu berupa Proyek *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR) yang kembali masuk dalam daftar Program Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2024. Proyek ini merupakan proyek hilirisasi bauksit menjadi alumina, yang menghubungkan rantai nilai yang terputus antara bauksit di PT Aneka Tambang Tbk dengan aluminium di Pabrik Peleburan milik PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Proyek SGAR dikerjakan oleh PT Borneo Alumina Indonesia yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebesar 60% dan PT Aneka Tambang Tbk sebesar 40%. Proyek ini berlokasi di Mempawah, Kalimantan Barat dengan kapasitas produksi alumina sebesar 1 *million tons per annum* (MTPA).

Pada minggu pertama September 2024, *mechanical completion* SGAR telah diselesaikan sehingga pada 24 September 2024 dapat dilaksanakan *commissioning* (percobaan *input* bauksit pertama) yang diresmikan langsung oleh Presiden RI. Realisasi *milestone* ini menunjukkan ketercapaian proyek sebesar 100% YTD Desember 2024. *Progress* proyek di tahun mendatang akan terus dimonitor untuk memastikan optimalisasi kinerja BUMN dan proyek binaan.

3) **Klaster Industri Kesehatan**

Capaian IKU Jumlah Program Hilirisasi yang Berhasil Dijalankan pada BUMN Klaster Industri Kesehatan tahun 2024 tercapai sebesar 100% yaitu 1 (satu) program dari target IKU 2024 sebesar 1 (satu) program. Program hilirisasi pada tahun 2024 merupakan lanjutan dari program yang telah dijalankan sejak tahun 2022 yaitu kerjasama penggunaan obat-obatan, alat kesehatan, dan barang medis habis pakai yang dipasok oleh Biofarma Group dan masuk dalam Formularium PT Pertamina Bina Medika IHC (PBM IHC). Secara tren, jumlah kerjasama tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 sebanyak 458 SKU, tahun 2023 sebanyak 705 SKU, dan tahun 2024 sebanyak 1.251 SKU (dari target 700 SKU dan dengan total nominal transaksi Rp77,26 M dari target Rp50 M) sehingga target IKU tahun 2024 tercapai sebesar 1 (satu) program. Kementerian BUMN telah dan akan terus mendorong agar kerjasama Holding BUMN Farmasi (Biofarma Group) dan Holding RS BUMN (PBM IHC) dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun.

4) **Klaster Industri Perkebunan dan Kehutanan**

Sampai dengan Desember 2024, program hilirisasi Klaster Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan berhasil tercapai 100% dibandingkan dengan target 2024. Adapun hilirisasi yang dimaksud terwujud dalam realisasi program Pengembangan Pabrik Minyak Goreng II PTPN III (Persero) serta Penjualan GTD Perum Perhutani.

PTPN III (Persero) melakukan Pembangunan Pabrik Minyak Goreng II berkapasitas olahan 750.000 ton CPO/tahun atau 2.500 ton CPO/hari yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara. Untuk Perum Perhutani, capaian penjualan Gondorukem, Terpentin dan Derivat (GTD) pada tahun 2024 mencapai Rp1,51 Triliun atau 108% dibanding target 2024 yaitu Rp 1,39 Triliun.

Sasaran Strategis 15	:	Terciptanya Inklusivitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN
-----------------------------	---	--

Indikator	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian
% <i>Top Talent</i> Muda (<42 Tahun) dalam <i>Nominated Talent</i>	21,75%	30,08%	28,63%	120%
% Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i>	15,24%	22,23%	25,04%	120%

a. % *Top Talent* muda (< 42 Tahun) dalam *Nominated Talent*

Ketersediaan SDM usia milenial (<42 tahun) atau dalam usia produktif menjadi peluang bagi Kementerian BUMN dalam menjaring dan mengembangkan talenta untuk membangun Indonesia melalui kontribusinya di BUMN. Peluang ini tidak boleh disia-siakan demi tercapainya tujuan BUMN sebagai pencipta lapangan kerja dan penyedia talenta-talenta terbaik untuk Indonesia. Adapun indikator % *Top Talent* Muda (≤42 Tahun) dalam *Nominated Talent* pada tahun 2024 terealisasi sebesar 28,63% atau tercapai 120% dari target sebesar 21,75% dan mengalami penurunan 4,82% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 30,08%.

b. % Perempuan dalam *Nominated Talent*

Dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh perempuan serta mewujudkan kesetaraan gender dalam *top talent*, perusahaan dapat menjadi lebih kuat, lebih berkelanjutan, dan dapat membuka peluang masuknya investasi dari para investor. Nantinya, perempuan dengan potensi tersebut akan membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Adapun indikator % Perempuan dalam *Nominated Talent* pada tahun 2024 tercapai sebesar 25,04% atau 120% dari target sebesar 15% dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 22,23%.

3.3 Pemanfaatan Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran untuk Wakil Menteri BUMN awalnya ditetapkan sebesar Rp18.811.307.000,-, yang mencakup kebutuhan operasional dari total 12 (dua belas) Keasdepan. Namun, dalam perjalanannya, anggaran tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan *refocusing*, sejalan dengan arahan efisiensi dan

penyesuaian prioritas program. Sebagai hasil dari proses tersebut, anggaran Wakil Menteri BUMN tahun 2024 disesuaikan menjadi sebesar **Rp13.463.614.000,-**.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp13.384.300.889,- atau 99,41% dari pagu anggaran. Rincian realisasi anggaran dari setiap Keasdepan yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

No	Unit	Alokasi	Revisi Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik	1.923.171.000	487.979.000	1.434.916.980	99,98%
2	Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur	2.586.191.000	1.347.611.000	1.209.399.401	97,64%
3	Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur	1.316.229.000	384.205.000	930.837.560	99,87%
4	Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	1.083.636.000	264.516.000	804.276.781	98,19%
5	Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan	1.221.721.000	368.469.000	846.928.147	99,26%
6	Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	1.271.229.000	252.796.000	1.014.014.518	99,57%
7	Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas	1.595.063.000	339.509.000	1.247.785.613	99,38%
8	Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara	2.045.969.000	636.919.000	1.408.870.412	99,99%
9	Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk	1.471.572.000	582.350.000	885.784.075	99,61%
10	Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan	1.426.475.000	356.184.000	1.061.319.006	99,16%
11	Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan	1.371.229.000	264.155.000	1.106.444.262	99,94

No	Unit	Alokasi	Revisi Anggaran	Realisasi	Capaian
12	Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung	1.498.822.000	63.000.000	1.433.724.134	99,85%
Total		18.811.307.000	5.347.693.000	13.384.300.889	99,44%

3.4 Tugas Khusus

Untuk memperdalam wawasan, fokus terhadap permasalahan dan alternatif penyelesaian masalah di BUMN lingkup Wamen BUMN dan untuk memonitor serta mengevaluasi kinerja BUMN, telah dilaksanakan penugasan khusus kepada Asisten Deputi terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembinaan PT Pertamina Bina Medika IHC

PT Pertamina Bina Medika IHC (PBM IHC) sebagai Holding Rumah Sakit BUMN terbentuk guna meningkatkan kualitas pelayanan, operasional, inovasi teknologi, dan keseluruhan *value chain*. Untuk mendukung terbentuknya ekosistem kesehatan yang terintegrasi, maka pembinaan Holding RS BUMN masuk ke dalam tugas khusus Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk percepatan penyelesaian program-program strategis yang mendorong integrasi layanan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang menyeluruh. Adapun realisasi program PBM IHC pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- Sinergi dan optimalisasi penggunaan obat-obatan yang dipasok oleh Biofarma Group pada rumah sakit yang tergabung dalam Holding RS BUMN;
- Kerja sama antara Biofarma Group dan Holding RS BUMN untuk deteksi dini kanker melalui produksi radiofarmaka di fasilitas cyclotron Bio Farma;
- Peresmian pembangunan *green hospital* RSP Panorama Balikpapan guna memperkuat sektor kesehatan dan mendukung kebutuhan kesehatan masyarakat di Kota Balikpapan; dan
- Penyelesaian pembangunan Bali International Hospital (BIH) guna menekan angka belanja kesehatan nasional ke luar negeri.

3.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Wakil Menteri BUMN selalu berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2024, Wakil Menteri BUMN dinilai cukup efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 106,55 (Kriteria: Sangat Memuaskan), sedangkan anggaran yang digunakan terealisasi sebesar 99,44%.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Wakil Menteri BUMN telah melaksanakan beberapa hal antara lain selektif dalam melaksanakan kegiatan konsinyering dan perjalanan dinas dan mencari alternatif harga terbaik, melakukan rapat-rapat secara virtual sehingga mampu meminimalkan pengeluaran biaya, mengurangi penggunaan kertas dan dokumen tercetak sehingga mampu mengurangi biaya operasional perkantoran. Selain itu, penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Wakil Menteri BUMN juga diperuntukkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, memastikan efektivitas koordinasi dan mengoptimalkan realisasi kinerja BUMN.

BAB IV

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

4.1 Program Strategis

1) Klaster Jasa Logistik

A. *Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)*

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024, menetapkan Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub/BMTH) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan BMTH akan meningkatkan kapasitas Pelabuhan Benoa untuk dapat menarik dan melayani lebih banyak wisatawan sehingga dapat memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat atas kunjungan wisatawan ke wilayah Bali dan sekitarnya.

Pengembangan BMTH mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 dan bertujuan untuk mengembangkan Pelabuhan Benoa sebagai hub pariwisata maritim sekaligus *home port* untuk cruise di Indonesia. Rencana bisnis BMTH berfokus pada pengembangan sektor pariwisata di 6 (enam) lini utama yaitu: lini bisnis cruise; lini bisnis yacht; lini bisnis perikanan; lini bisnis logistic (LNG dan Petikemas); lini bisnis atraksi dan taman wisata; serta lini bisnis UMKM dan ritel.

Nilai proyek Pengembangan BMTH secara keseluruhan yaitu sebesar Rp6,06 Triliun dengan rincian pendanaan yang terdiri atas dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,2 Triliun untuk pekerjaan pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa, dan Modal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebesar Rp4,87 Triliun.

Masterplan Pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH) terdiri atas 6 area pengembangan yaitu (i) Pelabuhan Benoa Eksisting, (ii) Infrastruktur Dasar dan Fasum Penunjang Pariwisata, (iii) Area Pengembangan I, (iv) Area Pengembangan II, (v) Taman Danu Kerthi, dan (vi) Bali Tenten. Berdasarkan Masterplan, Pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH) terdiri atas 9 paket pekerjaan yaitu (i) Pengembangan Gate dan Perluasan Terminal Penumpang Internasional, (ii) Pekerjaan Infrastruktur Dasar dan Fasum Penunjang Pariwisata, (iii) Pekerjaan Reventment & Retaning Wall Dumping I, (iv) Pekerjaan Reventment

& Retaning Wall Dumping II, (v) Dermaga Cruise 160 m, (vi) Pengerukan Alur & Kolam Paket A, (vii) Pengerukan Alur & Kolam Paket B, (viii) Pembangunan Taman Seghara Kerthi, dan (ix) Pembangunan Infrastruktur Dasar Dumping I.

Sampai dengan akhir tahun 2024, progres fisik proyek BTMH terealisasi sebesar 98,88% meningkat dari capaian tahun 2023 sebesar 79,42%. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik berupa Persentase Pengembangan Pelabuhan Tanjung Benoa (bagian BMTH) yaitu 98,88% (dari target sebesar 100%). Pekerjaan yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2024 yaitu Pekerjaan Pengerukan Alur & Kolam yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) khususnya pada pekerjaan Paket A.

Dukungan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan penyelesaian Pengembangan BMTH antara lain:

- a. Penataan Kapal Perikanan:
 - 1) Percepatan relokasi kapal perikanan yang tidak melakukan kegiatan bongkar muat ikan di dermaga atau kolam Pelabuhan Benoa.
 - 2) Percepatan pemindahan kapal-kapal perikanan yang melakukan kegiatan bongkar muat ikan di dermaga atau kolam Pelabuhan Benoa.
- b. Layanan Cruise:
 - 1) Regulasi terkait pelayanan kapal tunda untuk kapal cruise agar kompetitif.
 - 2) Regulasi terkait asas cabotage, pajak, imigrasi, bea cukai, dan lainnya.
 - 3) Percepatan integrasi/konektivitsa program dengan stakeholders lainnya dalam ekosistem layanan *cruise*
- c. Pembangunan dan Perizinan:
 - 1) Dukungan terhadap proses penyesuaian konsesi eksisting oleh KSOP Penyelenggara kepada Pelindo.
 - 2) Dukungan terhadap proses dokumen sertifikasi lahan oleh Kementerian ATR/BPN.

Rencana pengembangan BMTH pada fase selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Short Term (s.d 2024)	Mid Term (2025)	Long Term (2026-2028)
Pembangunan Fasilitas Marina & Entertainment Zone	Penataan Dermaga Cruise Selatan	Pengembangan Terminal Penumpang dan Cruise

Short Term (s.d 2024)	Mid Term (2025)	Long Term (2026-2028)
Kerjasama Mitra Strategis pada Area Pengembangan I	Pembangunan Terminal Penumpang & Cruise Tambahan	Pembangunan Monumen Ikonik dan Fasilitas Ampitheater
Penyiapan fasilitas Oil & Gas pada Area Pengembangan II	Pengoperasian Terminal Curah Cair	Pembangunan Fasilitas Logistic Center
Rencana Penataan Kawasan Port Associated Industry (PAI)	Kerja sama Logistic Center	Pengembangan Fasilitas Terminal Curah Cair BBM & Non BBM
	Kelanjutan Beautifikasi PAI Fase II	Relokasi Kapal Perikanan

B. *Bakauheni Harbour City (BHC)*

Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 (Revisi Permenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021), dengan tujuan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung dan sekitarnya. Kawasan *Bakauheni Harbour City* direncanakan menjadi kawasan pariwisata tepi laut/waterfront city terbesar dan berkelas dunia yang berada di Sumatera. Pengembangan kawasan *Bakauheni Harbour City* akan mengubah kawasan pelabuhan yang tadinya berfungsi sebagai Kota Transit menjadi Kota Tujuan. Perencanaan *Masterplan* Kawasan *Bakauheni Harbour City* mendeskripsikan kawasan BHC terdiri dari 3 distrik pengembangan dengan tema pengembangan yaitu *mixed use development* dengan luas total 159,8 Ha.

Pengembangan BHC di tahun 2024 masih berfokus dalam pengembangan di distrik I, pekerjaan yang dilaksanakan selama tahun 2024 diantaranya adalah



Pada tahun 2025, BHC mempunyai tahap pengembangan berupa infrastruktur dasar, pengelolaan kawasan dan komersialisasi kawasan yang meliputi program pekerjaan: Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Distrik 1 BHC, Penataan Lanskap Distrik 1, Wisma Artis Amphitheater, Pengembangan Sekolah Tahap 1, Pengembangan Area Kolam Retensi dan Ecopark, Pembangunan Jalan Akses Tahap 3 dan Pelaksanaan benchmark ke kawasan wisata sejenis untuk diterapkan di kawasan BHC.

Dalam perkembangannya, PSN BHC dilakukan addendum menjadi Kawasan Terintegrasi Merak-Bakauheni di Provinsi Banten dan Provinsi Lampung yang telah ditetapkan melalui PerMenko Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, addendum dilatarbelakangi oleh isu angkutan lebaran tahun 2024 sehingga dipandang perlu adanya penataan dan pengembangan Pelabuhan Merak-Bakauheni yang berfokus pada 3 (tiga) strategi untuk memenuhi peningkatan pertumbuhan pergerakan kendaraan dan penumpang, yaitu penambahan kapasitas pelabuhan, peningkatan aksesibilitas, serta pengaturan sistem dan tata kelola. Terdapat 10 program pengembangan yang diusulkan menjadi bagian dalam PSN yang juga sejalan dengan kebutuhan pengembangan *Bakauheni Harbour City* yang diharapkan dapat lebih optimal dengan adanya integrasi pengembangan Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni, yaitu:

- 1) Penambahan 2 (dua) dermaga di Pelabuhan Penyeberangan Merak
- 2) Penambahan 2 (dua) dermaga di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni
- 3) Penyiapan rest area tol KM 97
- 4) Relokasi KA Stasiun Merak
- 5) Penyediaan integrasi flyover masuk & keluar Pelabuhan Penyeberangan Merak

- 6) Penyediaan integrasi flyover masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni
- 7) Penyediaan integrasi flyover tol PSN Kawasan Terintegrasi Bakauheni (Bakauheni Harbour City)
- 8) Pelebaran Jalan Nasional Suralaya
- 9) Penyediaan sumber air baku untuk pelabuhan, masyarakat dan kawasan
- 10) Penggunaan dermaga Pelindo di Bojonegara

2) Klaster Jasa Infrastruktur

A. Integrasi BUMN Karya

Menteri BUMN telah menerbitkan Surat Keputusan nomor SK-319/MBU/11/2023 tentang pembentukan Tim Integrasi BUMN Karya dan berdasarkan hasil Rapat Internal Presiden tanggal 4 Januari 2024, pada intinya Presiden RI telah menyetujui integrasi melalui rencana restrukturisasi dan reorganisasi BUMN Karya dari 7 (tujuh) BUMN menjadi 3 (tiga) BUMN dengan mempertahankan jumlah entitas sebanyak 7 (tujuh) entitas dengan skema *holding* dan *subholding*.

Menteri BUMN telah menyampaikan informasi terkait dengan Integrasi BUMN karya kepada Menteri PUPR dan Menteri Keuangan melalui surat nomor S-369/MBU/07/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Integrasi BUMN Karya.

Berdasarkan laporan pekerjaan jasa konsultasi bisnis melalui surat nomor SPMO/GAS.002/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi Bisnis Dalam Rangka Percepatan Perbaikan Kesehatan Keuangan BUMN Sektor Konstruksi dan Jalan Tol yang telah disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan Perbaikan Kesehatan Keuangan BUMN Sektor Konstruksi dan Jalan Tol/"Tim PMO", didapatkan hasil pemetaan spesialisasi BUMN Karya yang diusulkan kedalam 3 (tiga) klaster dengan fokus spesialisasi dan *batch* pembentukan sebagai berikut:

a. PT Utama Karya (Persero) – PT Waskita Karya (Persero) Tbk

PT Utama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan fokus spesialisasi jalan tol. Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur melalui Nota Dinas Nomor ND-325/Wk.MBU.10/09/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Penyampaian Progres Penyusunan Rancangan Kajian Bersama dan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Integrasi PT Utama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, telah menyampaikan *draft* kajian integrasi PT Utama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

- b. PT Adhi Karya (Persero) Tbk – PT Brantas Abipraya (Persero) – PT Nindya Karya (Persero)

PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya dengan fokus spesialisasi pada *rail* dan *High Speed Rail* (HSR) serta air dan bendungan. *Progress* Integrasi ADHI, Brantas dan Nindya masih dalam proses kajian awal prakarsa.

- c. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan fokus spesialisasi pada bandara dan pelabuhan laut. *Progress* integrasi WKA dan PP dilaksanakan setelah penyelesaian restrukturisasi keuangan dan *due diligence* di masing-masing entitas telah selesai.

B. Aksi Korporasi Pendanaan Berbasis Ekuitas (*Equity Financing*) di PT Jasamarga Transjawa Tol

PT Jasamarga Transjawa Tol/"PT JTT" merupakan Anak Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk/"PT Jasa Marga" yang bergerak di bidang industri jalan tol, berperan sebagai subholding 9 Anak Perusahaan Jalan Tol (APJT) yang sampai dengan saat ini mengelola dan mengoperasikan 13 Ruas Jalan Tol Transjawa. Komposisi pemegang saham PT JTT sebelum dilakukan equity financing adalah PT Jasa Marga sebesar 99% dan Koperasi Konsumen Karyawan Jalin Margasejahtera/"KKJM" sebesar 1%.

Aksi korporasi pendanaan berbasis ekuitas (*equity financing*) di PT JTT dilakukan karena adanya kebutuhan investasi pendanaan PT Jasa Marga, dikarenakan pada saat ini PT Jasa Marga sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan 5 ruas jalan tol baru yang hak konsesinya telah dimiliki oleh PT Jasa Marga yaitu Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, Jogja-Bawen, Jogja-Solo, Probolinggo-Banyuwangi, dan Akses Patimban. Di samping pembangunan 5 ruas tersebut, PT Jasa Marga juga sedang menjajaki 2 ruas jalan tol potensial yaitu Ruas Jalan Tol Bogor-Serpong dan Sentul-Karawang.

Dengan demikian, guna memenuhi kebutuhan *capex* tersebut, PT Jasa Marga perlu melakukan *deleveraging* melalui pendanaan berbasis ekuitas (*equity financing*) di PT JTT untuk mendapatkan tambahan pendanaan yang dapat digunakan untuk mengurangi posisi utang eksisting serta memperkuat nilai ekuitas Perusahaan sehingga setelah beroperasinya ruas-ruas jalan tol baru yang saat ini

masih dalam tahap konstruksi, *gearing ratio* PT Jasa Marga dapat terjaga dan kondisi keuangan PT Jasa Marga dapat tetap stabil.

Aksi korporasi pendanaan berbasis ekuitas (*equity financing*) di PT JTT merupakan satu rangkaian transaksi yang terdiri dari: Pengalihan kepemilikan sebagian saham eksisting milik PT Jasa Marga pada PT JTT sebanyak 6.200.042.303 lembar saham atau ekuivalen dengan 30,18%; dan Penerbitan saham baru di PT JTT kepada pihak ketiga sebanyak 1.208.585.244 lembar saham sehingga mendilusi saham PT Jasa Marga di PT JTT sebesar 3,82%.

Dengan dilakukannya serangkaian aksi korporasi pendanaan berbasis ekuitas (*equity financing*) di PT JTT melalui skema **Private Transaction**, kepemilikan saham PT Jasa Marga pada PT JTT mengalami perubahan dari yang semula sebesar 99% atau sebanyak 20.340.489.661 lembar saham menjadi sebesar 65% atau sebanyak 14.140.447.358 lembar saham.

Alur struktur transaksi atas pelaksanaan aksi korporasi pendanaan berbasis ekuitas dimulai dari struktur awal, struktur setelah divestasi saham lama PT Jasa Marga pada PT JTT, dan struktur akhir setelah *rights issue* PT JTT digambarkan sebagai berikut:



Selanjutnya, PT Jasa Marga dengan Konsorsium MPTIS, Warrington, dan MUN telah menandatangani dokumen *Conditional Shares Sale and Purchase Agreement (CSPA)*, *Conditional Share Subscription Agreement (CSSA)*, dan *Shareholder Agreement* pada tanggal 28 Juni 2024, dan menyepakati nilai transaksi pendanaan berbasis ekuitas (*equity financing*) di PT JTT sebesar **Rp15.325.000.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nilai penjualan sebagian saham PT JTT milik PT Jasa Marga adalah sebesar Rp12.825.000.000.000,- sebelum dipotong pajak, yang menyebabkan porsi kepemilikan saham PT Jasa Marga di PT JTT dari semula sebesar 99% menjadi 68,82%; dan
- 2) Nilai penerbitan saham baru di PT JTT kepada pihak ketiga sebesar Rp2.500.000.000.000,-, yang menyebabkan dilusi saham PT Jasa Marga di PT

JTT sebesar 3,82% sehingga porsi saham PT Jasa Marga menjadi sebesar 65%.

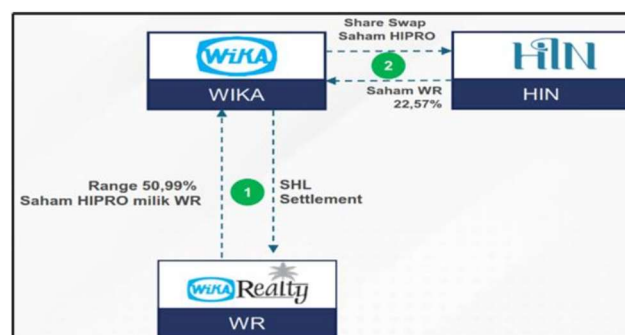
Sehingga, secara keseluruhan aksi korporasi pendanaan berbasis ekuitas (*equity financing*) di PT JTT akan mengakibatkan **perubahan porsi kepemilikan saham PT Jasa Marga di PT JTT sebesar 34% dari yang semula sebesar 99% menjadi sebesar 65%, dengan nilai transaksi total sebesar Rp15,325 triliun.**

Berkenaan dengan transaksi dimaksud, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 18 September 2024 dengan agenda Persetujuan Aksi Korporasi Pendanaan Berbasis Ekuitas (*Equity Financing*) di PT Jasamarga Transjawa Tol (SKU Nomor SKU-111/MBU/09/2024 tanggal 14 September 2024, serta PT Jasa Marga telah melaksanakan *Shareholder Purchase Agreement* (SPA) pada tanggal 27 September 2024.

C. Pelaksanaan Kolaborasi dalam rangka Peningkatan Ekosistem Pariwisata dan Perhotelan Melalui Skema *Debt To Asset* (DTA) Swap dan *Shares Swap*.

- 1) Berdasarkan informasi dari Dewan Komisaris WIKA sesuai suratnya nomor DK.01.01/A.DEKOM.00080/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Kolaborasi dalam rangka Peningkatan Ekosistem Pariwisata dan Perhotelan melalui skema *Debt to Asset Swap* dan *Shares Swap* dan nomor DK.01.01/A.DEKOM.00086/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Penegasan Kembali Atas Permohonan persetujuan Aksi korporasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk diperoleh informasi terkait rencana skema transaksi dan pasca transaksi yang dilakukan WIKA sebagai berikut: Rencana Skema Transaksi.

Penjelasan atas rencana skema transaksi pada gambar di atas adalah sebagai berikut:



a) Transaksi Tahap 1: *Debt to Asset Swap*

Transaksi *Shares Swap* merupakan pengalihan saham HIPro milik WIKA sebesar 50,99% dengan saham WIKA Realty milik HIN sebesar 22,57%, sehingga setelah transaksi ini dilakukan maka HIN memiliki saham HIPro dan WIKA menambah penyertaan saham di WIKA Realty menjadi 95,08%. Perubahan komposisi kepemilikan saham pada HIPro setelah dilakukannya transaksi *Debt to Asset & Shares Swap* adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Existing		Setelah DTA Swap	
	Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
WIKI			1.005.911	50,99%
WIKI Realty	1.972.612	99,99%	966.701	49,00%
Koperasi Tamansari	150	0,01%	150	0,01%
Total	1.972.762	100%	1.972.762	100%

b) Transaksi Tahap 2: *Shares Swap*

Transaksi *Shares Swap* merupakan pengalihan saham HIPro milik WIKA sebesar 50,99% dengan saham WIKI Realty milik HIN sebesar 22,57%, sehingga setelah transaksi ini dilakukan maka HIN memiliki saham HIPro dan WIKA menambah penyertaan saham di WIKI Realty menjadi 95,08%. Perubahan komposisi kepemilikan saham pada HIPro setelah dilakukannya transaksi *Debt to Asset & Shares Swap* adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah DTA Swap		Setelah Shares Swap	
	Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
WIKI	1.005.911	50,99%		
HIN			1.005.911	50,99%
WIKI Realty	966.701	49,00%	966.701	49,00%
Koperasi Tamansari	150	0,01%	150	0,01%
Total	1.972.762	100%	1.972.762	100%

Kepemilikan saham WIKI di WIKI Realty akan meningkat dari sebelumnya sebesar 72,51% menjadi 95,08%, sedangkan HIN telah melepaskan seluruh kepemilikan saham di WIKI Realty namun HIN memiliki kepemilikan saham di HIPro sebesar 50,99% sehingga perubahan komposisi kepemilikan saham pada WIKI Realty setelah dilakukannya transaksi *Shares Swap* adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Shares Swap		Setelah Shares Swap	
	Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
WIKI	53.215.685.492	72,51%	69.782.299.624	95,09%
HIN	16.566.614.132	22,57%		
Koperasi Konsumen Karya Mitra Satya	2.013.658.609	2,74%	2.013.658.609	2,74%
PT Aero Wisata	1.537.411.1113	2,10%	1.537.411.1113	2,10%
Yayasan Wijaya Karya	54.022.524	0,07%	54.022.524	0,07%
Total	1.972.762	100%	1.972.762	100%

- 2) Dampak atas transaksi *Debt to Asset* dan *Shares Swap* adalah sebagai berikut:
- Atas sisa saham WIKA Realty di HIPro sebesar 49,00%, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengalihan Saham Bersyarat antara WIKA, WIKA Realty, HIN, HIPro, dan InJourney dimana sepanjang sisa saham HIPro belum dijual oleh WIKA Realty kepada pihak ketiga.
 - InJourney dan HIN berjanji bahwa sisa saham HIPro akan dibeli oleh DINFRA, InJourney, HIN dan/atau pihak lain yang mungkin dapat ditunjuk oleh HIN dan/atau InJourney, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2024.
 - Berdasarkan Valuasi dari KJPP Toha, Okky, Heru, dan Rekan dengan total valuasi 100% saham HIPro memiliki nilai Rp2.457.239.000.000,-, atau sejumlah Rp1.245.583,- per lembar saham. Dengan jumlah saham setara 49,00% atau sejumlah 966.701 lembar saham HIPro bernilai Rp1.204.106.424.667,-.
 - Penjualan sisa saham HIPro milik WIKA Realty secara *cash transaction* berdasarkan valuasi diatas, berpotensi mendapatkan *fresh money*.
 - Dengan adanya *Debt to Asset* dan *Shares Swap* maka *outstanding* saldo SHL akan turun, dari total pokok Rp6.017.262.404.677,- menjadi Rp4.802.512.404.677,-. Dampaknya akan menurunkan beban bunga dan memperbaiki rasio keuangan WIKA Realty. Selain itu, potensi efisiensi perpajakan sebesar Rp7,14 miliar per tahunnya.
 - Pengembalian SHL WIKA Realty ke HIPro sebesar Rp83 miliar menjadi *Conditional Precedent* yang harus dipenuhi oleh HIN dalam Transaksi Tahap 2.
 - Atas skema transaksi *Debt to Asset* dan *Shares Swap*, maka laporan keuangan HIPro tidak akan terkonsolidasi di WIKA Realty dan berpengaruh terhadap rasio keuangan WIKA Realty sebagaimana pada tabel berikut:

Rasio	Sebelum Transaksi	Sesudah Transaksi
Current Ratio	215,22%	229,95%
Cash Ratio	7,00%	4,75%
DSCR	0,12	0,09
ISCR	0,19	0,09
DER	3,33	2,8

- 3) Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT WIKA melalui suratnya nomor S-497/MBU/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Persetujuan Penyertaan melalui Skema *Debt to Asset Swap* dan *Shares Swap* dalam rangka Pelaksanaan Kolaborasi dalam rangka Peningkatan Ekosistem Pariwisata dan Perhotelan, telah memberikan persetujuan kepada Dewan

Komisaris WIKA untuk memberikan persetujuan atas permohonan Direksi WIKA untuk:

- a) Memiliki penyertaan modal berupa saham pada PT Hotel Indonesia Properti/"HiPro" sebagai bentuk pembayaran PT Wijaya Karya Realty/"WIKA Realty" atas sebagian utang WIKA Realty kepada WIKA dengan saham HiPro (*Debt to Asset Swap*), dengan nilai sebesar-besarnya setara dengan 50,99% (lima puluh koma sembilan puluh sembilan persen) kepemilikan saham WIKA Realty di HiPro; dan
- b) Melakukan pelepasan seluruh saham sebagaimana dimaksud pada butir 1 kepada PT Hotel Indonesia Natour/"HIN" sebesar 50,99% (lima puluh koma sembilan puluh sembilan persen) kepemilikan sahamnya di HiPro sesuai transaksi butir a) di atas, dengan pembayaran berupa seluruh penyertaan modal saham HIN pada WIKA Realty sebesar 22,57% (dua puluh dua koma lima puluh tujuh persen) dengan menggunakan skema tukar menukar saham (*shares swap*);

dengan nilai wajar sesuai penilaian dari Penilai Independen yang merupakan satu rangkaian transaksi dalam aksi korporasi dalam rangka Peningkatan Ekosistem Pariwisata dan Perhotelan serta penyehatan keuangan WIKA Realty dengan memperhatikan kajian yang telah disusun.

D. Perubahan Struktur Permodalan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)

- 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung/"Perpres 93/2021", diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemerintah menugaskan Konsorsium BUMN dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung/"KCJB" yang terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero)/"KAI", WIKA, PT Perkebunan Nusantara VIII/"PTPN VIII" dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk/"Jasa Marga", dimana KAI sebagai Pimpinan Konsorsium BUMN.
 - b) Pendanaan dalam rangka pelaksanaan penugasan tersebut salah satunya dapat bersumber dari pendanaan lainnya yaitu pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada Pimpinan Konsorsium BUMN.

- c) PMN tersebut digunakan untuk memenuhi kekurangan kewajiban penyeteran modal (*base equity*) Perusahaan Patungan dan/atau memenuhi kewajiban Perusahaan Patungan akibat kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*).

Perusahaan Patungan yang dimaksud di atas adalah PSBI yang Pemegang Sahamnya terdiri dari Konsorsium BUMN, yaitu KAI, WIKA, PTPN VIII dan Jasa Marga.

- 2) Berdasarkan Keputusan Komite KCJB sebagaimana surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor B-1986/MENKO/IP.04.00/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, salah satu pokok keputusannya sebagai berikut:

- a) Komite KCJB menyetujui kenaikan biaya (*cost overrun*) Proyek KCJB yang akan disepakati dengan *National Development and Reform Commission* (NDRC) sebagai pihak Sponsor China adalah sebesar USD1.206 juta dan nilai ekuitas porsi Indonesia untuk pendanaan *cost overrun* adalah ekuivalen USD180,9 juta.

- b) Komite KCJB menyepakati untuk memenuhi porsi ekuitas dalam pendanaan *cost overrun*. Pemerintah telah menyetujui dan mencairkan dana sebesar Rp3,2 triliun (PMN TA 2022 sebesar Rp3,2 triliun kepada KAI). Sehubungan dengan nilai *cost overrun* yang disepakati sebesar USD1.206 juta, nilai ekuitas porsi Indonesia untuk pendanaan *cost overrun* adalah ekuivalen USD180,9 juta, sehingga terdapat kelebihan dana PMN TA 2022.

Bahwa atas kelebihan dana PMN TA 2022, tetap akan menjadi PMN di KAI dan digunakan sebagai *buffer* untuk penjaminan KAI dalam pembayaran pinjaman dari China Development Bank (CDB).

- 3) Dalam rangka pendanaan *cost overrun* Proyek KCJB yang berasal dari ekuitas sebagaimana butir 2.b di atas dan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pemegang Saham PSBI nomor TP.01.03/A.DIR.01676/2022 tanggal 20 Oktober 2022, Para Pemegang Saham PSBI telah menyetujui tambahan setoran modal KAI kepada PSBI sebesar Rp2.713.423.000.000,- yang bersumber dari PMN TA 2022 KAI tanpa melalui proses penawaran saham kepada Pemegang Saham PSBI lainnya untuk dicatat terlebih dahulu sebagai Uang Muka Setoran Modal (“UMSM”) di PSBI sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PSBI tanggal 09 Maret 2023 dan tanggal 21 Juni 2023 untuk diteruskan kepada

PT Kereta Cepat Indonesia China (“KCIC”) sebagai setoran modal PSBI di KCIC.

- 4) Bahwa atas tambahan setoran modal PSBI sebesar Rp2.713.423.000.000,-, terdapat selisih lebih setoran atau saldo setoran modal sejumlah USD181.986.787,39 (atau ekuivalen Rp16.280.374.238,50) dimana nilai tambahan setoran modal PSBI dihitung secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham PSBI di KCIC dan menggunakan Nilai Tukar Kontribusi Ekuitas/*Equity Contributio Exchange Rate* (ECER) senilai Rp14.910,-/USD, sehingga peningkatan modal disetor dan ditempatkan PSBI di KCIC yang bersumber dari setoran modal KAI menjadi sebesar Rp2.697.142.625.762,-.
- 5) Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PSBI tanggal 10 Januari 2024, pada intinya mengesahkan dan mengakui perubahan PTPN VIII menjadi PT Perkebunan Nusantara I/“PTPN I” sebagai salah satu Pemegang Saham PSBI, akibat dari telah dilaksanakannya *merger*/penggabungan PTPN VIII ke dalam PTPN I per 1 Desember 2023 berikut dengan segenap hak dan kewajiban sebagai Pemegang Saham PSBI, sehingga struktur kepemilikan saham di PSBI saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan Saham	Jumlah Saham	Modal Disetor (Rp)
1.	KAI	51,37%	8.023.585	8.023.585.000.000
2.	WIKA	39,12%	6.110.596	6.110.596.000.000
3.	Jasa Marga	8,30%	1.297.235	1.297.235.000.000
4.	PTPN I	1,21%	188.625	188.625.000.000
Jumlah Modal Disetor		100%	15.620.041	15.620.041.000.000

- 6) Berdasarkan surat Direksi PSBI nomor DU.IN.02.03.073.2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal Permohonan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, Direksi PSBI mengajukan permohonan persetujuan kepada Para Pemegang Saham untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor pada PSBI yang diikuti dengan penerbitan saham kepada KAI berdasarkan setoran modal KAI setelah dikurangi selisih lebih setoran yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban *cost overrun*, yaitu sebanyak 2.697.142 lembar saham atau senilai Rp2.697.142.625.762,- yang mengakibatkan komposisi kepemilikan saham PSBI berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Kepemilikan Saham Saat Ini		Tambahan Setoran Modal		
		(Rp juta)	%	Nilai PMN TA 2022 (Rp juta)	Total Setoran Modal (Rp juta)	%
1.	KAI	8.023.585	51,37%	2.697.142	10.720.727	58,53%
2.	WIKA	6.110.596	39,12%	-	6.110.596	33,36%
3.	Jasa Marga	1.297.235	8,30%	-	1.297.235	7,08%
4.	PTPN I	188.625	1,21%	-	188.625	1,03%
Total		15.620.041	100,00%	2.697.142	18.317.183	100,00%

- 7) Berkenaan dengan pemenuhan kewajiban *cost overrun* tersebut di atas, apabila dilakukan penawaran secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham PSBI, maka setiap Pemegang Saham memiliki hak untuk mempertahankan kepemilikan modal di PSBI dengan penambahan setoran modal sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham	Tambahan Setoran Modal (Rp juta)
1.	KAI	51,37%	1.385.522
2.	WIKA	39,12%	1.055.122
3.	Jasa Marga	8,30%	223.863
4.	PTPN I	1,21%	32.635
Total		100,00%	2.697.142

- 8) Menteri BUMN melalui suratnya:
- Nomor S-418/MBU/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Persetujuan Perubahan Struktur Permodalan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia telah menyetujui rencana Dewan Komisaris WIKA untuk memberikan persetujuan atas usulan perubahan struktur permodalan WIKA pada PSBI sehubungan dengan WIKA tidak mengambil bagian/tidak melakukan tambahan setoran modal sesuai porsi kepemilikan sahamnya sebesar Rp1.055.122.000.000,- (satu triliun lima puluh lima miliar seratus dua puluh dua juta rupiah) yang mengakibatkan penurunan porsi kepemilikan saham WIKA dari semula 39,12% menjadi 33,36%.
 - Nomor S-439/MBU/09/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Persetujuan Perubahan Struktur Permodalan PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia telah menyetujui rencana Dewan Komisaris PT Jasa Marga untuk memberikan persetujuan atas usulan perubahan struktur permodalan PT Jasa Marga pada PSBI sehubungan dengan PT Jasa Marga tidak mengambil bagian/tidak melakukan tambahan setoran modal sesuai porsi kepemilikan sahamnya sebesar Rp223.862.786.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang mengakibatkan penurunan porsi kepemilikan saham PT Jasa Marga dari semula sebesar 8,30% menjadi 7,08%.

E. Penyertaan Modal Negara Tahun 2024

1) PT Utama Karya (Persero) Tbk

Selama Tahun 2024 terdapat 3 rencana Penambahan Modal Negara pada PT Utama Karya (Persero), yaitu:

a. Penyertaan Modal Negara Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera ("Perpres Penugasan JTTS"), Pemerintah memberikan penugasan kepada PT Utama Karya (Persero) untuk melakukan pengusahaan ruas jalan tol di Sumatera, termasuk penugasan untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Seksi Palembang-Betung) berdasarkan perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014.

Dalam melaksanakan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, sesuai Perpres Penugasan JTTS, Pemerintah dapat memberikan dukungan pendanaan salah satunya melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN). Selain itu, pendanaan penugasan pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera dapat dipenuhi dari pinjaman.

Dalam meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, diperlukan konektivitas antara jalan tol yang dikelola oleh PT Utama Karya (Persero) dengan Badan Usaha Jalan Tol lainnya agar dapat memaksimalkan manfaat ekonomi yang diperoleh. Sehingga dalam rangka penyelesaian Ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung yang dalam perkembangannya terdapat kendala penyelesaian seksi 2 hingga seksi 4 oleh PT Waskita Sriwijaya Tol, maka Pemerintah menugaskan kepada PT Utama Karya (Persero) untuk menyelesaikan pembangunan Seksi Palembang-Betung. Penugasan kepada PT Utama Karya (Persero) akan dilakukan melalui skema pengurangan ruang lingkup pada Ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung yang dimiliki oleh PT Waskita Sriwijaya Tol, kemudian dilanjutkan dengan pemisahan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol untuk Ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Seksi Palembang Betung).

Penambahan PMN kepada PT Utama Karya (Persero) dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Utama Karya (Persero) dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera dan penugasan perusahaan Ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung.

Usulan penambahan PMN kepada PT Utama Karya (Persero) dalam APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.604 miliar digunakan untuk:

- 1) Jalan Tol Ruas Binjai – Langsa sebesar Rp1.350,00 miliar.
- 2) Jalan Tol Ruas Sp. Indralaya – Muara Enim sebesar Rp99,00 miliar.
- 3) Jalan Tol Ruas Kisaran – Indrapura sebesar Rp245,00 miliar.
- 4) Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung – Indrapura – Tebing Tinggi – Parapat sebesar Rp246,00 miliar.
- 5) Jalan Tol Ruas Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu (Seksi Bengkulu – Taba Penanjung) sebesar Rp141,00 miliar.
- 6) Jalan Tol Ruas Sigli – Banda Aceh sebesar Rp738,00 miliar.
- 7) Jalan Tol Ruas Pekanbaru – Padang (Seksi Padang – Sicincin) sebesar Rp2.131,00 miliar.
- 8) Jalan Tol Ruas Pekanbaru – Padang (Seksi Pekanbaru – Pangkalan) sebesar Rp227,00 miliar.
- 9) Jalan Tol Ruas Kayu Agung – Palembang – Betung (Seksi Palembang – Betung) sebesar Rp13.427,00 miliar.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Utama Karya, PT Utama Karya (Persero) mendapatkan tambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp18.604 miliar yang dicairkan pada tanggal 30 April 2024.

b. Penyertaan Modal Negara Tahun 2024 Cadangan Investasi

Dalam meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, diperlukan konektivitas antara jalan tol yang dikelola oleh PT Utama Karya (Persero) dengan Badan Usaha Jalan Tol lainnya agar dapat memaksimalkan manfaat ekonomi yang diperoleh. Sehingga dalam rangka penyelesaian Ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung yang dalam

perkembangannya terdapat kendala penyelesaian seksi 2 hingga seksi 4 oleh PT Waskita Sriwijaya Tol, maka Pemerintah menugaskan kepada PT Utama Karya (Persero) untuk menyelesaikan pembangunan Seksi Palembang-Betung. Penugasan kepada PT Utama Karya (Persero) akan dilakukan melalui skema pengurangan ruang lingkup pada Ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung yang dimiliki oleh PT Waskita Sriwijaya Tol, kemudian dilanjutkan dengan pemisahan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol untuk Ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Seksi Palembang Betung).

Usulan penambahan PMN kepada PT Utama Karya (Persero) pada Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari alokasi Cadangan Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.000 miliar yang akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Ruas Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung (Seksi Palembang – Betung).

Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-1205/MK.06/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Rencana Investasi Pemerintah yang berasal dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi Tahun Anggaran 2024 kepada PT Utama Karya (Persero) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat arahan Presiden RI pada tanggal 31 Oktober 2024 terkait penyertaan modal negara Tahun Anggaran 2024 dan 2025, yang salah satunya tidak menyetujui pengalokasian PMN tunai kepada PT Utama Karya (Persero) yang berasal dari dana cadangan pembiayaan investasi pemerintah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1 triliun.
 - 2) Proses pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah penambahan PMN kepada PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp1 triliun tidak dilanjutkan.
- c. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMN Non Tunai)

Pemberian PMN yang berasal dari BMN melalui Mekanisme Pemindahtanganan BMN kepada PT Utama Karya (Persero) didasari oleh inisiasi Pemerintah Pusat melalui arahan Menteri Keuangan dalam Rapat Pembahasan PMN PT Utama Karya (Persero) tahun 2019 – 2020 dalam rangka menambah kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Utama Karya (Persero). Inisiasi tersebut telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 serta ditetapkan kembali dalam

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Aset yang akan dipindahtangankan menjadi PMN Non tunai PT Utama Karya (Persero) diharapkan dapat dioptimalkan dan dikembangkan sehingga dapat meningkatkan nilai PT Utama Karya (Persero). Nilai aset sebagai penambahan PMN kepada PT Utama Karya (Persero) disusun berdasarkan hasil penilaian Direktorat Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp 1.660.233.895.000,- yang terdiri dari aset berupa tanah sejumlah 38 persil dengan total luas 161.015 m² yang selama ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sampai saat ini proses pemberian PMN Non tunai kepada PT Utama Karya (Persero) sudah melalui proses harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2024 sebagaimana undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.03.01-42 tanggal 6 Januari 2024.

2) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

- a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk/“PP 15 Tahun 2024”, WIKA telah memperoleh PMN Tunai Tahun Anggaran 2024/“PMN TA 2024” sebesar paling banyak Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) yang digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha WIKA dalam rangka penyelesaian Proyek Strategis Nasional (“PSN”) melalui penerbitan saham baru guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada WIKA.
- b. Sesuai dengan Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Tahun Anggaran 2024/“Kajian Bersama Penambahan PMN WIKA TA 2024”, tujuan penggunaan tambahan PMN TA 2024 WIKA adalah sebagai berikut:
 - (1) Memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha WIKA dalam rangka penyelesaian PSN; dan

- (2) Menyediakan likuiditas bagi WIKA dalam penyelesaian PSN yang turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di lokasi PSN dengan adanya *multiplier effect* dari pembangunan PSN.

Adapun rincian daftar PSN penerima dana PMN TA 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama PSN	Perkiraan Kebutuhan Modal Kerja (Rp miliar)	Tahun Selesai	Nilai Proyek (Rp miliar)
1	Pembangunan IKN - Pembangunan Istana Negara, Kalimantan Timur	82,4	2024	543,5
2	Pembangunan IKN - Pembangunan Kantor Presiden, Kalimantan Timur	88,0	2024	632,5
3	Jalan Tol IKN Segmen Kaltim Kariangau Tempadung (KKT) Kariangau - Sp. Tempadung, Kalimantan Timur	136,1	2024	773,5
4	Pembangunan Jalan IKN - Sumbu Timur, Kalimantan Timur	113,9	2024	520,6
5	Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 dan 2, Jawa Barat	830,2	2024	5.157,5
6	Jalan Tol Semarang-Demak, Jawa Tengah	218,8	2026	1.232,9
7	Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur, Jawa Barat	241,7	2024	995,7
8	Bendungan Lau Simeme, Sumatera Utara	64,4	2024	476,8
9	Bendungan Karangnongko, Jawa Timur	43,3	2027	263,1
10	Bendungan Jragung Paket 2, Jawa Tengah	52,4	2024	478,4
11	Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi-3, Banten	325,5	2024	937,8
12	Pelabuhan Patimban Paket 6, Jawa Barat	128,1	2025	713,4
13	National Capital Integrated Coastal Development Jakarta Tahap 6, DKI Jakarta	39,7	2024	147,3
14	Pembangunan Irigasi Rentang Paket 7, Jawa Barat	39,1	2026	298,8
15	Jalan Tol Probowangi Paket 3, Jawa Timur	475,2	2024	996,8
16	Bendungan Pamukkulu, Sulawesi Selatan	19,1	2024	675,6
17	Bendungan Ameroro, Sulawesi Tenggara	45,1	2024	587,5
18	Bendungan Manikin, NTT	54,5	2024	508,7
19	Pembangkit Listrik Tenaga Uap – Palu 3 (2x50MW), Sulawesi Tengah	349,4	2024	2.087,8
20	Pembangunan Smelter Manyar Gresik, Jawa Timur	177,8	2024	1.085,9
21	Pembangunan Desalination Plant Manyar Gresik, Jawa Timur	95,1	2024	734,2
22	Pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Ampel 500 kV, Jawa Tengah	120,4	2024	478,0
23	Engineering Procurement Construction Storage Tank & Piping Refinery Development Master Plant Regional Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur	155,6	2024	687,0
24	Proyek Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Wosusokas Segmen 4, Jawa Tengah	33,4	2025	167,6
25	Proyek Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Wosusokas Segmen 2, Jawa Tengah	36,7	2025	184,4
26	Pengolahan limbah Jakarta Sewerage Area 1-1, DKI Jakarta	27,4	2027	258,7
27	Pengolahan limbah Jakarta Sewerage Area 1-2, DKI Jakarta	58,0	2027	546,6
28	Jalan Tol Japek Selatan Seksi II, DKI Jakarta	319,5	2025	1.621,2
29	Jalan Tol Akses Patimban, Jawa Barat	101,9	2025	620,3
30	Jalan Tol Tempino – Jambi, Jambi	119,4	2024	621,6
31	Pembangunan Bandara Kediri (Runway), Jawa Timur	118,2	2025	1.362,2
32	Pembangunan Fuel Farm Depot Bandara Kediri, Jawa Timur	44,1	2025	269,4
33	Pembangunan LPG Refrigerated Tuban, Pertamina, Jawa Timur	441,1	2025	3.580,9
34	Design & Build Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A, Bali	259,8	2024	428,5
35	Revitalisasi Danau Teloko, Sumatera Selatan	17,5	2025	93,1
36	Pembangunan Konstruksi Fisik Gedung Poliklinik RSUP IGNG Ngoerah, Bali	54,9	2024	122,2
37	Jalan Tol Serang - Panimbang Paket 3B, Banten	123,5	2024	748,4
38	Koridor Utama Pelabuhan Bandara (Batam), Kepulauan Riau	31,9	2024	196,1

No	Nama PSN	Perkiraan Kebutuhan Modal Kerja (Rp miliar)	Tahun Selesai	Nilai Proyek (Rp miliar)
39	Pile Slab Tol Kayu Agung, Sumatera Selatan	70,9	2026	500,0
40	Bendungan Cijurey, Jawa Barat	65,6	2028	724,8
41	Bendungan Jenelata, Sulawesi Selatan	110,0	2027	726,6
Total		6.000,0		

- c. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, telah disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN s.d. Triwulan IV Tahun 2024 oleh Dewan Komisaris dan Direksi WIKA melalui surat nomor MJ.03.00/A.DIR.00004/2025 tanggal 24 Januari 2025, dengan rincian penyerapan atas seluruh 41 (empat puluh satu) proyek sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai PMN berdasarkan Kajian Bersama PMN	Realisasi Penyerapan Dana PMN s.d. TW IV 2024	Sisa Dana PMN s.d. TW IV 2024	Persentase Realisasi Penyerapan Dana PMN
		(a) (Rp)	(b) (Rp)	(c=a-b) (Rp)	(e=b/a) %
1	Pembangunan IKN - Pembangunan Istana Negara, Kalimantan Timur	82.441.155.428	82.395.121.864	46.033.564	99,94%
2	Pembangunan IKN - Pembangunan Kantor Presiden, Kalimantan Timur	88.043.857.713	88.043.857.713	-	100,00%
3	Jalan Tol IKN Segmen Kaltim Kariangau Tempadung (KKT) Kariangau - Sp. Tempadung, Kalimantan Timur	136.136.504.373	110.875.292.400	25.261.211.973	81,44%
4	Pembangunan Jalan IKN - Sumbu Timur, Kalimantan Timur	113.911.372.956	-	113.911.372.956	0,00%
5	Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 dan 2, Jawa Barat	830.246.961.848	768.698.036.856	61.548.924.992	92,59%
6	Jalan Tol Semarang-Demak, Jawa Tengah	218.818.297.751	192.391.898.362	26.426.399.389	87,92%
7	Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur, Jawa Barat	241.715.597.830	134.888.921.352	106.826.676.478	55,80%
8	Bendungan Lau Simeme, Sumatera Utara	64.433.368.426	39.520.427.635	24.912.940.791	61,34%
9	Bendungan Karangnongko, Jawa Timur	43.307.612.911	-	43.307.612.911	0,00%
10	Bendungan Jragung Paket 2, Jawa Tengah	52.447.191.578	-	52.447.191.578	0,00%
11	Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi-3, Banten	325.458.067.205	256.888.989.296	68.569.077.909	78,93%
12	Pelabuhan Patimban Paket 6, Jawa Barat	128.060.861.492	114.584.941.237	13.475.920.255	89,48%
13	<i>National Capital Integrated Coastal Development</i> Jakarta Tahap 6, DKI Jakarta	39.651.975.133	-	39.651.975.133	0,00%
14	Pembangunan Irigasi Rentang Paket 7, Jawa Barat	39.073.268.598	28.088.407.619	10.984.860.979	71,89%

No	Nama Proyek	Nilai PMN berdasarkan Kajian Bersama PMN	Realisasi Penyerapan Dana PMN s.d. TW IV 2024	Sisa Dana PMN s.d. TW IV 2024	Persentase Realisasi Penyerapan Dana PMN
		(a) (Rp)	(b) (Rp)	(c=a-b) (Rp)	(e=b/a) %
15	Jalan Tol Probowangi Paket 3, Jawa Timur	475.219.070.074	132.864.937.345	342.354.132.729	27,96%
16	Bendungan Pamukkulu, Sulawesi Selatan	19.138.567.298	-	19.138.567.298	0,00%
17	Bendungan Ameroro, Sulawesi Tenggara	45.138.866.734	-	45.138.866.734	0,00%
18	Bendungan Manikin, NTT	54.499.707.142	-	54.499.707.142	0,00%
19	Pembangkit Listrik Tenaga Uap – Palu 3 (2x50MW), Sulawesi Tengah	349.421.771.530	301.165.953.006	48.255.818.524	86,19%
20	Pembangunan Smelter Manyar Gresik, Jawa Timur	177.787.489.259	177.786.999.628	489.631	100,00%
21	Pembangunan Desalination Plant Manyar Gresik, Jawa Timur	95.129.245.950	91.459.363.722	3.669.882.228	96,14%
22	Pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Ampel 500 kV, Jawa Tengah	120.393.664.794	80.517.616.372	39.876.048.422	66,88%
23	Engineering Procurement Construction Storage Tank & Piping Refinery Development Master Plant Regional Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur	155.606.192.399	18.602.436.974	137.003.755.425	11,95%
24	Proyek Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Wosusokas Segmen 4, Jawa Tengah	33.381.096.293	31.108.372.174	2.272.724.119	93,19%
25	Proyek Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Wosusokas Segmen 2, Jawa Tengah	36.723.002.542	36.723.002.542	-	100,00%
26	Pengolahan limbah Jakarta Sewerage Area 1-1, DKI Jakarta	27.436.834.840	8.994.674.425	18.442.160.415	32,78%
27	Pengolahan limbah Jakarta Sewerage Area 1-2, DKI Jakarta	57.974.091.680	22.592.221.446	35.381.870.234	38,97%
28	Jalan Tol Japek Selatan Seksi II, DKI Jakarta	319.526.504.052	319.468.201.219	58.302.833	99,98%
29	Jalan Tol Akses Patimban, Jawa Barat	101.908.417.107	-	101.908.417.107	0,00%
30	Jalan Tol Tempino – Jambi, Jambi	119.399.582.370	-	119.399.582.370	0,00%
31	Pembangunan Bandara Kediri (runway), Jawa Timur	188.219.865.757	43.289.240.322	144.930.625.435	23,00%
32	Pembangunan Fuel Farm Depot Bandara Kediri, Jawa Timur	44.081.580.741	-	44.081.580.741	0,00%
33	Pembangunan LPG Refrigerated Tuban, Pertamina, Jawa Timur	441.125.819.055	440.945.109.401	180.709.654	99,96%
34	Design & Build Pengerukan Alur dan	259.760.739.976	132.297.386.491	127.463.353.485	50,93%

No	Nama Proyek	Nilai PMN berdasarkan Kajian Bersama PMN	Realisasi Penyerapan Dana PMN s.d. TW IV 2024	Sisa Dana PMN s.d. TW IV 2024	Persentase Realisasi Penyerapan Dana PMN
		(a) (Rp)	(b) (Rp)	(c=a-b) (Rp)	(e=b/a) %
	Kolam Pelabuhan Benoa Paket A, Bali				
35	Revitalisasi Danau Teloko, Sumatera Selatan	17.527.394.412	-	17.527.394.412	0,00%
36	Pembangunan Konstruksi Fisik Gedung Poliklinik RSUP IGNG Ngoerah, Bali	54.948.173.913	-	54.948.173.913	0,00%
37	Jalan Tol Serang - Panimbang Paket 3B, Banten	123.467.465.753	-	123.467.465.753	0,00%
38	Koridor Utama Pelabuhan Bandara (Batam), Kepulauan Riau	31.909.794.847	-	31.909.794.847	0,00%
39	<i>Pile Slab</i> Tol Kayu Agung, Sumatera Selatan	70.935.430.464	-	70.935.430.464	0,00%
40	Bendungan Cijurey, Jawa Barat	65.601.685.360	-	65.601.685.360	0,00%
41	Bendungan Jenelata, Sulawesi Selatan	109.991.852.416	-	109.991.852.416	0,00%
TOTAL		6.000.000.000.000	3.654.191.409.401	2.345.808.590.599	60,90%

3) Perum Perumnas

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024/ "UU Nomor 19 Tahun 2023" Pasal 35 Ayat (4) huruf h, Pemerintah akan melakukan penambahan PMN diantaranya kepada Perum Perumnas yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) melalui mekanisme pemindahtanganan BMN.

Sesuai dengan Kajian Bersama penambahan PMN yang bersumber dari BMN berupa Tanah dan Bangunan kepada Perum Perumnas Tahun Anggaran 2024, tujuan penambahan PMN bagi Perum Perumnas adalah untuk penyediaan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penambahan *landbank* (stok tanah) serta memperbaiki dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan. Dengan adanya penambahan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha Perumnas dalam berkontribusi mengurangi jumlah *backlog* perumahan dengan bertambahnya proyek-proyek baru dari optimalisasi lahan-lahan *idle* yang ada sejalan dengan kinerja perusahaan yang semakin baik.

Nilai aset berupa tanah dan bangunan milik Kementerian Pekerjaan Umum yang akan dipindahtanggankan sebagai penambahan PMN kepada Perum Perumnas disusun berdasarkan hasil penilaian Direktorat Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar **Rp963.342.701.000,-** (sembilan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) bidang Tanah Bangunan Flat/Rumah Susun, 7 (tujuh) bidang Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan, 14 (empat belas) unit Flat/Rumah Susun Permanen, 3 (tiga) unit Bangunan Gudang Tertutup Permanen dan 2 (dua) unit Pagar Permanen. Aset yang diberikan

direncanakan untuk menyediakan kebutuhan hunian bagi masyarakat berupa Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), serta Apartemen Sederhana Milik (Anami) dengan total penyediaan hunian sekitar ± 9.500 unit dari ± 15 tower rusunami serta ± 6 *twin* blok rusunami *lowrise* yang dibangun pada lokasi lahan yang diberikan.

Sampai dengan tahun 2024, proses pemberian PMPP kepada Perum Perumnas sudah melalui proses Rapat Permbahasan Antar Kementerian (PAK) atas Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 30 April 2024, 13 Agustus 2024, 14 Oktober 2024, dan 9 Desember 2024. Sedangkan untuk Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah telah dilakukan pada tanggal 2 Januari 2025 sebagaimana undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.03.01-4358 tanggal 31 Desember 2024.

F. Restrukturisasi

1) PT Waskita Karya (Persero) Tbk

PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada masa lalu banyak melakukan investasi Jalan Tol (Trans Jawa), yang menyebabkan perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi. Oleh sebab itu, dalam rangka memperbaiki kinerja dan menjamin keberlangsungan kinerja PT Waskita Karya (Persero) Tbk maka diperlukan percepatan restrukturisasi bisnis maupun keuangan melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-87/MBU/04/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Restrukturisasi PT Waskita Karya (Persero) dilakukan dengan 8 *stream* penyehatan Waskita Karya antara lain:

- a) Divestasi Inti
- b) Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman dan Obligasi dan Sukuk
- c) Restrukturisasi Utang Induk
- d) Restrukturisasi Utang Anak Usaha
- e) Penyelesaian Ruas Tol Khusus
- f) Penyertaan Modal Negara (PMN)
- g) Transformasi Bisnis
- h) Penerapan Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Risiko

8 (delapan) *stream* Penyehatan Keuangan s.d. Triwulan IV Tahun 2024 PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

- a) Divestasi Inti

Sampai dengan Triwulan IV 2024 PT Waskita Karya (Persero) Tbk sudah terelisasi divestasi pada 8 BUJT milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk yaitu:

No	BUJT	Tahun Divestasi	Status
1	PT Jasamarga Kualanamu Tol	2021-2022	Selesai
2	PT Jasamarga Semarang Batang	2021	Selesai
3	PT Cinere Serpong Jaya	2021	Selesai
4	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	2021	Selesai
5	PT Cimanggis Cibitung Tollways	2022	Partial (55%)
6	PT Semesta Marga Raya	2022	Selesai
7	PT Pejagan Pemalang Tol Road	2022	Selesai
8	PT Trans Jabar Tol	2024	Partial (25%)

b) Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman dan Obligasi dan Sukuk

Sejalan dengan implementasi MRA 2021, Pemerintah memberikan penjaminan atas kredit modal kerja baru dengan limit sebesar Rp8,0T yang berasal dari Sindikasi Perbankan. Penggunaan dari kredit modal kerja tersebut ditujukan untuk penyelesaian 148 proyek underlying dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan PMK 211 Tahun 2020.

Selain dari Penjaminan atas modal kerja, Pemerintah memberikan penjaminan atas penerbitan Obligasi & penerbitan Sukuk Mudharabah berdasarkan PMK 211 Tahun 2020 dengan tujuan sebagai pembayaran kembali pokok obligasi jatuh tempo, penggantian kas yang digunakan terlebih dahulu untuk melunasi pokok obligasi jatuh tempo dan modal kerja proyek Kayu Agung – Palembang – Betung.

Rincian obligasi & sukuk tersebut di atas adalah:

- (1) Obligasi dengan penjaminan PU III 2021 Seri A & Seri B.
- (2) Obligasi dengan penjaminan PU IV 2022 Seri A & Seri B.
- (3) Sukuk Mudharabah 2022 Seri A & Seri B.

c) Restrukturisasi Utang Induk

(1) *Master Restructuring Agreement* (MRA)

Pada 16 Agustus 2024, telah dilakukan penandatanganan atas perubahan dokumen Restrukturisasi Induk pada 21 kreditur perbankan. Pada tanggal 17 Oktober 2024, semua kreditur perbankan telah menandatangani perubahan dokumen Restrukturisasi Induk, sehingga MRA Perubahan mulai berlaku dan dinyatakan efektif oleh Agen Bersama pada tanggal tersebut. Selanjutnya akan dilakukan implementasi ketentuan restrukturisasi MRA perubahan sesuai dengan *covenant* dan klausul pada akta perjanjian.

(2) Obligasi Non Penjaminan

Pada 21 Maret 2024 telah efektif restrukturisasi pada 3 seri obligasi non-penjaminan. Masih terdapat 1 seri obligasi (PUB III Tahap IV 2019) yang sampai saat ini masih belum mencapai kuorum persetujuan restrukturisasi dalam RUPO.

(3) Penjaminan Pemerintah

(a) KMK Penjaminan

Pada 3 Oktober 2024 telah dilakukan penandatanganan perubahan Perjanjian Kredit Sindikasi 5 kreditur perbankan, serta dinyatakan efektif oleh Agen Fasilitas pada tanggal 17 Oktober 2024.

(b) Obligasi/Sukuk Penjaminan

3 Perjanjian Perwaliamanatan tidak terdampak langsung restrukturisasi, namun akan dilakukan perubahan financial *covenant* dan klausul dalam Perjanjian Perwaliamanatan Penjaminan yang telah disetujui Penjamin.

d) Restrukturisasi Utang Anak Usaha

Sampai dengan Triwulan IV 2024, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah melakukan restrukturisasi pada anak usaha PT Waskita Toll Road yaitu PT Pejagan Pemalang Toll Road, PT Pemalang Batang Toll Road, PT Trans Jabar Tol, PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, dan PT Waskita Bumi Wira.

Kemudian, untuk PT Waskita Beton Precast Tbk, status restrukturisasi adalah sebagai berikut:

- (1) Keputusan RUPSLB 30 Juni 2023 disetujui, sehingga PT Waskita Beton Precast Tbk mendapatkan persetujuan melakukan implementasi seluruh skema dalam perjanjian perdamaian, termasuk konversi utang menjadi saham & OWK
- (2) Melaksanakan aksi korporasi sesuai ketentuan perjanjian perdamaian (Konversi sisa utang Vendor menjadi Ekuitas sebesar-besarnya senilai Rp247 M dan Utang BDKI menjadi OWK).
- (3) Konversi OWK BDKI, masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (atas Gugatan PMH No. 5/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim).
- (4) Pembayaran CFADS tahap ke-3 pada 25 Maret 2024.
- (5) Pembayaran CFADS tahap ke-4 pada 25 September 2024.

e) Penyelesaian Ruas Tol Khusus

(1) Krian – Legundi – Bunder – Manyar

- Telah dilakukan FGD dengan PUPR dan KBUMN pada tanggal 10 Juli 2024 (pembahasan pengembalian HPJT KLBM kepada Pemerintah. Akan tetapi, PUPR meminta agar dicarikan opsi alternatif lainnya).
- PT Waskita Bumi Wira dalam proses pengkajian opsi alternatif lainnya bersama dengan konsultan EY, diantaranya: meningkatkan LHR melalui integrasi tarif tol dan membangun bangkitan (JIPE, tol Krian-Candi, tol Gresik-Lamongan Barat); dan pengembalian VGF atau kompensasi lainnya.

(2) Kayu Agung – Palembang – Betung

- Legal opinion oleh Jamdatun atas pemisahan PPJT tahap 2 ruas tol Paltung sudah *re/lease* pada tanggal 18 April 2024.

- Perpres Penugasan JTTS kepada Utama Karya sudah disahkan melalui Perpres No.42 Tahun 2024 pada 25 Maret 2024.
- PPJT ruas tol Paltung telah terbentuk pada 30 September 2024.
- WST telah mengajukan permohonan pembayaran reimbursement atas perhitungan konstruksi ruas tol Paltung.
- Sedang dilakukan Audit Klaim Nilai Konstruksi Terbangun oleh BPKP pada ruas tol Paltung.

(3) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu

- Dukungan konstruksi ruas tol Becakayu Seksi 2B (paket 1-3) diberikan oleh Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta Jawa Barat.
- *Progress* tender konstruksi ruas tol seksi 2B paket 2 saat ini sudah mencapai proses pembukaan dan evaluasi penawaran file II dengan rencana pengumuman pemenang pada 20 Januari 2025.
- Desain paket 1 direncanakan mendapatkan persetujuan pada Februari 2025, dan paket 3 pada Januari 2025

f) Penyertaan Modal Negara (PMN)

PT Waskita pada Tahun Anggaran 2021 memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7.900 miliar sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Pemerintah nomor 116 tahun 2021 yang digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional/"PEN" oleh Pemerintah dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional/"PSN" di bidang jalan tol. Sampai dengan Triwulan IV 2024 realisasi penggunaan dana PMN Tunai PT Waskita Tahun Anggaran 2021 telah mencapai 100%.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022, PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan mendapatkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Tahun Anggaran 2022 yang akan dilaksanakan melalui Rights Issue dengan metode Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Namun hasil keputusan Komite Privatisasi yang disampaikan melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Nomor: EK.5/126A/M.EKON/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Dana PMN Untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk, telah menyetujui dan memutuskan untuk mengembalikan dana PMN TA 2022 sebesar Rp3 triliun kepada Waskita ke Rekening Kas Umum Negara dan proses rights issue/privatisasi Waskita tidak dapat dilanjutkan.

g) Transformasi Bisnis

PT Waskita Karya (Persero) Tbk melakukan restrukturisasi bisnis melalui *refocusing* bisnis PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk meningkatkan efisiensi, diantaranya dengan RKAP yang berbasiskan proyek baru yang *feasible*.

h) Penerapan Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Terkait laporan pencapaian skor maturitas manajemen risiko per tahun 2023, Perseroan dan Anak Perusahaan telah melakukan proses self-assessment yang selesai pada April 2024. Realisasi skor maturitas Perusahaan per tahun 2023 adalah sebesar 3,49.

Selanjutnya, Perseroan akan melakukan penilaian maturitas risiko tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia ("BPKP") sesuai metode perhitungan yang diatur di dalam Ketentuan Deputi Bidang KMR BUMN Nomor: SK-8/DKU.MBU/12/2023.

2) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Menteri BUMN telah menyetujui usulan restrukturisasi yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka penyehatan Perseroan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal dan kinerja Perseroan dengan metode restrukturisasi, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Lembar Persetujuan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2023 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam Surat Kuasa nomor SKU-134/MBU/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Berdasarkan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk nomor 22 tanggal 13 Oktober 2023 dalam rencana restrukturisasi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dilaksanakan melalui 8 (delapan) *stream* metode penyehatan keuangan sebagai metode restrukturisasi yang dilakukan sebagai berikut:

a) *Stream 1: Reprofiting/Restrukturisasi Keuangan*

Stream Reprofiting/Restrukturisasi Keuangan bertujuan untuk mendapatkan keringanan pembayaran pokok dan/atau bunga dalam rangka mengurangi tekanan jangka pendek-menengah penandatanganan perjanjian restrukturisasi/ *Master Restructuration Agreement* (MRA) dengan seluruh kreditur Perseroan termasuk dokumen jaminan apabila diperlukan.

b) *Stream 2: Perbaikan Tata Kelola dan Manajemen Risiko*

Stream Perbaikan tata kelola dan manajemen risiko bertujuan untuk memperbaiki prosedur dan model operasi untuk memastikan adanya proses *check and balance* dalam setiap aktivitas yang terdiri antara lain:

- (1) Penerapan *Enterprises Resource Planning* (ERP) berbasis *real-time online*
- (2) Perbaikan mekanisme *four eyes* dalam akuisisi proyek dan dalam monitoring progress proyek;
- (3) Pembuatan *dashboard* keuangan dan *Digital Control Tower*;
- (4) Digitalisasi proses-proses penting dalam Perseroan.

c) *Stream 3: Percepatan Penagihan Klaim/Piutang Bermasalah*

Stream percepatan penagihan klaim/piutang bermasalah bertujuan untuk percepatan penagihan atas piutang-piutang bermasalah dengan inisiatif antara lain:

- (1) Pembentukan unit khusus penagihan piutang;
- (2) Menjalankan proses klaim baik melalui negosiasi bilateral, mediasi lembaga yang berwenang maupun litigasi melalui pengadilan dan/atau badan arbitrase domestik maupun internasional.

d) *Stream 4: Asset Recycling*

Stream asset recycling bertujuan untuk melakukan *asset recycling* atau divestasi atas aset-aset *non-core* Perseroan dalam rangka mendapatkan dana tunai untuk penguatan pemodal Perseroan.

e) *Stream 5: Perbaikan Portfolio Orderbook*

Stream perbaikan portfolio orderbook bertujuan untuk memperbaiki *portfolio orderbook* konstruksi dengan fokus pada proyek-proyek yang memiliki pembayaran *monthly progress* dengan tujuan untuk mengurangi defisit kas dan kebutuhan modal kerja.

f) *Stream 6: Penurunan Operating Expense*

Stream penurunan operating expense bertujuan untuk menurunkan *operating expense* minimal sebesar 25% secara jangka panjang jika dibandingkan tanpa inisiatif. Beberapa implementasi penurunan *operating expense* antara lain:

- (1) Penerapan *manning* dalam kepegawaian berbasis ERP;
- (2) Reorganisasi menyesuaikan dengan fokus bisnis Perusahaan;
- (3) *Lean construction*.

g) *Stream 7: Penurunan Saldo Pinjaman Talangan Supplier*

Stream penurunan saldo pinjaman talangan supplier merupakan restrukturisasi dan/atau penurunan pinjaman *Supply Chain Financing* (SCF) yang merupakan dana talangan jangka pendek.

h) *Stream 8: Penguatan Struktur Permodalan*

Stream penguatan struktur permodalan merupakan penguatan struktur permodalan melalui *rights issue* atau penerbitan saham baru melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

G. Proyek Ibu Kota Nusantara

BUMN Jasa Infrastruktur berperan aktif dalam pengerjaan proyek-proyek Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan sarana utama termasuk pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). BUMN Klaster Jasa Konstruksi khususnya BUMN Karya yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya terlibat aktif dalam proyek konstruksi infrastruktur dasar IKN yang mencakup antara lain pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jalan Tol,

Jembatan, dan Hunian Pekerja. Kolaborasi BUMN-Swasta berkontribusi pada tahap awal Pembangunan IKN.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh BUMN Jasa Infrastruktur ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pada tahun 2024, Keasdepan Bidang Jasa Infrastruktur telah melakukan *monitoring* dan evaluasi pada proyek-proyek IKN yang sedang dijalankan oleh BUMN Karya.

1. Poyek Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau - SP. Tempadung Seksi 3B PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

a. *Project Overview*

Proyek Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau - SP. Tempadung Seksi 3B merupakan salah satu paket pekerjaan PSN di Kalimantan Timur yang nantinya akan digunakan untuk menunjang IKN dan salah satu proyek yang akan menerima penyaluran dana PMN Tunai TA 2024 sebesar Rp136,13 miliar dari total 25 proyek KSO dengan total alokasi dana PMN sebesar Rp2.871 miliar dan 9 proyek Non-KSO dengan total Rp2.609 miliar.

Owner	Kementerian PUPR
Penyedia Jasa	WIKA (42,5%) – PTPP (40%) – Jakon (17,5%) KSO
Nilai Kontrak	Rp2.020 miliar, porsi WIKA (42,5%) adalah Rp858 miliar
Jangka Waktu Pelaksanaan	725 hari kalender dengan target penyelesaian 5 September 2024
Keterangan	Tipe proyek Kerja Sama Operasi (KSO) ini adalah integrated.

b. *Progress s.d. 30 Juni 2024*

Rencana	89,61%
Realisasi	89,63%
Deviasi	0,02%
Progress Keuangan Realisasi	78,52% dengan progress Monthly Certificate (MC) per Juni 2024

c. Ruang Lingkup

Panjang Main Road	5.047 km
Panjang Elevated Pile Slab	1.040 km
Box Culvert 2x2	5 lokasi
Box Culvert 3x3	3 lokasi

d. Isu Strategis

- Penyerapan atau realisasi penggunaan dana PMN Tunai TA 2024 per 30 Juni 2024 untuk proyek tersebut sebesar Rp0 atau belum ada sama sekali, hal ini dikarenakan saat ini WIKA masih menunggu hasil review dari BPKP yang diharapkan dapat terbit di bulan Juli 2024 untuk proyek-proyek PMN melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO). Untuk penyerapan dana PMN Tunai TA 2024 yang tidak melalui skema KSO

(Non-KSO), sudah dilakukan penyerapan secara total sampai Juni 2024 atas 41 proyek sebesar Rp686,62 miliar

- Lahan: Terdapat permasalahan yaitu dari total 84 bidang, 58 bidang sudah bebas, sedangkan 26 bidang proses konsinyasi. Tim WIKA telah berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lahan dan melakukan sosialisasi serta pendekatan dengan pemilik lahan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tetap berjalan. Proses konsinyasi dilakukan sepenuhnya oleh tim dari owner, yaitu Kementerian PUPR.
- Desain: Terdapat pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan telah dibayar tetapi tidak berfungsi akibat dari transisi segmen 3B – 5A dan telah ditindaklanjuti dengan dilakukan join inspection pada lokasi tersebut secara berkala dan terus dalam pengawasan manajemen proyek.

2. Proyek Pembangunan Pelindung Tumbukan Kapal (Fender) dan Bangunan Pelengkap Jembatan Pulau Balang oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk

a. Informasi Pekerjaan

Lokasi	Balikpapan, Kalimantan Timur
Pemilik Proyek	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Bina Marga - BBPJK KALTIM – Satuan Kerja IKM 2
Penyedia Jasa	HUTAMA – ADHI – BANGUN Cipta KSO (40% : 35% : 25%)
Cara Pembayaran	Bulanan (<i>Monthly Certificate</i>)
Masa Pelaksanaan	721 (tujuh ratus dua puluh satu) hari kalender
Masa Pemeliharaan	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
Lingkup Pekerjaan	- <i>Fender Dolphin</i> - <i>Armor Blok Beton</i> - <i>Landscape</i> - <i>Aspal</i>

b. Progress s.d. 30 Juni 2024

Realisasi progres pekerjaan s.d. 30 Juni 2024 sebesar 96,91% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Performance	
		Jumlah Harga	Bobot
1	Rencana	Rp265.075.190.976,15	95,93%
2	Realisasi	Rp267.787.005.668,36	96,91%
3	Deviasi	Rp2.711.814.692,21	0,98%

3. Proyek Pembangunan (Duplikasi) Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk

a. Informasi Pekerjaan

Lokasi	Pulau Balang
Pengguna Jasa	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Penyedia Jasa	ADHI-DUTA-JAKON, KSO

Cara Pembayaran	<i>Monthly Certificate</i>
Masa Pelaksanaan	570 (lima ratus tujuh puluh) hari kalender
Masa Pemeliharaan	1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender
Lingkup Pekerjaan	Jembatan Panjang 514 m

b. Progress dan Target Pekerjaan

Realisasi progres pekerjaan s.d 30 Juni 2024 sebesar 84,8% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Persentase
1	Rencana	93,376%
2	Realisasi	84,810%
3	Deviasi	-8,566%

4. Proyek Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur Tahap 2 oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Progress s.d. 10 Desember 2024 adalah sebagai berikut:



Nama Paket	Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur Tahap 2
Pengguna Jasa	Kementerian PUPR
Penyedia Jasa	PT WIKA-BIT, KSO
No. Kontrak	HK 0201/Bb12.11.1/09/2024
Nilai Kontrak	Rp837.434.170.000,-
Tanggal Kontrak	20 Februari 2024
Jangka Waktu	Pelaksanaan 316 hari, Pemeliharaan 365 hari

dengan *schedule* penyelesaian sebagai berikut:

ITEM PEKERJAAN	DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI	
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2
DIVISI 1. UMUM										
DIVISI 2. DRAINASE										
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK										
DIVISI 5. PEKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN										
DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL										
DIVISI 7. STRUKTUR										
DIVISI 8. PREVERENSI JEMBATAN										
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN										
LANDSCAPE										
PERKERASAN TROTOAR DAN PELENGKAP										
MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMPING										

Progres rencana pekerjaan proyek saat ini adalah sebesar 82,58%, realisasi pekerjaan di angka 84,41% sehingga deviasi sebesar 1,82%.

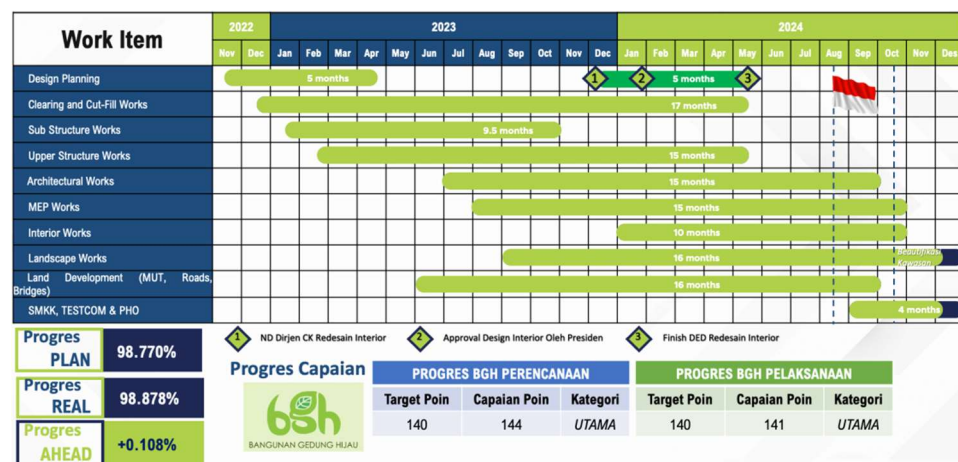
5. Proyek Gedung Istana Presiden oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

a. Informasi Umum

KSO PT PP – WIKA mendapatkan kontrak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai kontrak awal sebesar Rp1.737.097 miliar dengan masa pelaksanaan proyek sejak November 2022 s.d. Desember 2024. Hingga saat ini, realisasi proyek telah mencapai 98,87% dari rencana sebesar 98,77% dengan deviasi positif 0,108%. Proyek ini ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Pemberi Kerja	Kementerian PUPR
Nilai Kontrak (+PPN)	Rp1.737.097 miliar
Masa Pelaksanaan	November 2022 - Desember 2024
Progres Proyek	Rencana 98,77%
	Realisasi 98,87%
	Deviasi +0,108%

b. Progress dan Timeline



6. Proyek Embung MBH oleh PT Brantas Abipraya (Persero)

Nama Proyek	Pembangunan 14 Embung KIPP
Kontrak	Rp418,63 miliar
Pelaksanaan	28 Desember 2022 - 30 Juni 2024
Progress	100% (Rencana & Realisasi 100%)
Porsi BRAP	100% (Non KSO)

Proyek pembangunan 14 Embung KIPP berlokasi di Kecamatan Sepaku, Penajem Utara Kalimantan Timur, dengan lingkup pekerjaan adalah Melaksanakan 14 lokasi embung dengan struktur IPR- sebanyak 250.000 pcs & landscape. Jenis kontrak adalah *unit price* dengan sistem pembayaran *monthly progress*. Embung MBH merupakan salah satu dari 14 embung yang ditargetkan rampung pada tahun 2024. Embung ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya mengendalikan banjir di IKN, menyediakan air baku untuk keperluan non air minum, menurunkan suhu di sekitar KIPP dan menjadi ruang rekreasi publik.

Selain embung MBH, BRAP juga mengerjakan proyek-proyek infrastruktur air lainnya di IKN, seperti:

- a) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sepaku
- b) Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku

7. Proyek Hunian ASN 2 oleh PT Utama Karya (Persero)

PT Utama Karya (Persero) mendapatkan kontrak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai kontrak awal sebesar Rp1.488 miliar. Kontrak tersebut telah dilakukan amandemen terakhir dengan nilai akhir kontrak sebesar Rp1.631 miliar. Sampai saat ini progres sebesar 69,14% dengan target penyelesaian pada 30 April 2025. Terdapat beberapa kendala dalam pengerjaan proyek tersebut, yaitu:

- a) Terdapat Clash Elevasi pekerjaan yang mana pada Persil 3 dan Persil 5. Adanya *active Edge* yang berbeda dengan Top jalan paket WR.
- b) Adanya clash dengan jalan bina marga ROW 24B4 yang mana bersinggungan langsung dengan jalan kawasan persil 3 dan persil 5.
- c) Terdapat jarak antara Gardu PLN Persil 3 dan MUT pada paket WR sebesar 0,3 m.
- d) Adanya Cross jalan yang bersinggungan antara Tower 6 dan Tower 8 sehingga menyebabkan pipa MEP tidak dapat dikerjakan karena belum adanya persetujuan dari Paket WR untuk Elevasi pipa yang di rencanakan antara MUT dan Saluran U-Ditct.

Atas kendala dan permasalahan tersebut, tim proyek telah melakukan berbagai upaya, seperti:

- a. Melakukan revisi *design* terhadap rencana elevasi *active Edge*.
- b. Mengadakan penanganan Secant pile untuk bangian yang bersinggungan dengan badan jalan.
- c. Pihak PP melakukan revisi design terhadap rencana awal dengan penanganan MUT hanya pada sampai Tapping.
- d. Melakukan workshop desain dengan perencana dan PPK untuk menyesuaikan desain yang sesuai dengan keadaan di lapangan.

Terdapat beberapa dukungan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti:

- a. Percepatan persetujuan hasil survei.
- b. Percepatan persetujuan desain.
- c. Legalitas perubahan desain.
- d. Percepatan persetujuan desain.

H. Penugasan Pembangunan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (“Perpres Penugasan JTTS”), pemerintah memberikan penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pengusahaan ruas jalan tol di Sumatera.

Dalam pembangunan dilakukan pengklasifikasian ruas berdasarkan tahapan penyelesaian sebagai salah satu strategi dalam penyelesaian penugasan. Penahapan dibagi dalam 4 (empat) tahap, yaitu :

1. **Tahap I** : Terdiri atas ruas yang telah dilakukan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), beberapa ruas telah beroperasi, dan sisanya dalam tahap konstruksi.
2. **Tahap II** : Terdiri atas ruas *backbone* yang akan menghubungkan Palembang – Pekanbaru dan sebagian telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
3. **Tahap III** : Terdiri atas ruas *backbone* lanjutan yang akan menghubungkan Pekanbaru – Aceh dan sedang dalam persiapan perencanaan.
4. **Tahap IV** : Terdiri atas ruas *feeder*, baik yang telah dilakukan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) maupun yang belum.

No	Ruas
Tahap I	
1	Ruas Jalan Tol Medan – Binjai
2	Ruas Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar
3	Ruas Jalan Tol Palembang – Indralaya
4	Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang
5	Ruas Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung
6	Ruas Jalan Tol Pekanbaru – Dumai
7a	Ruas Jalan Tol Sigli – Banda Aceh (Seksi 2-4)
7b	Ruas Jalan Tol Sigli – Banda Aceh
8	Ruas Jalan Tol Kisaran – Indrapura
9a	Ruas Jalan Tol Kuala Tanjung – Pematang Siantar
10a	Ruas Jalan Tol Simpang Indralaya – Prabumulih
11a	Ruas Jalan Tol Sicincin – Padang
11b	Ruas Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang (STA9+000 – STA 40+000)
11c	Ruas Jalan Tol Bangkinang – Kolo Kampar
12a	Ruas Jalan Tol Taba Penanjung – Bengkulu
13a	Ruas Jalan Tol Binjai – Pangkalan Brandan (Seksi 1)
13b	Ruas Jalan Tol Binjai – Pangkalan Brandan
Tahap II	
14	Ruas Jalan Tol Betung – Tampino – Jambi
15	Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
16a	Junction Pekanbaru – Bypass Pekanbaru
16b	Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
17	Ruas Jalan Tol Pelabuhan Panjang – Lematang
Tahap III	
13c	Ruas Jalan Tol Pangkalan Brandan – Langsa
18	Ruas Jalan Tol Dumai – Simpang Sigambal – Rantau Prapat
19	Ruas Jalan Tol Rantau Prapat – Kisaran
20	Ruas Jalan Tol Langsa – Lhokseumawe
21	Ruas Jalan Tol Lhokseumawe – Sigli

No	Ruas
Tahap IV	
9b	Ruas Jalan Tol Pematang Siantar – Parapat
10b	Ruas Jalan Tol Prabumulih – Muara Enim
11d	Ruas Jalan Tol Payakumbuh – Sicincin
11e	Ruas Jalan Tol Pangkalan – Payakumbuh
11f	Ruas Jalan Tol Koto Kampar – Pangkalan
12b	Ruas Jalan Tol Lubuk Linggau – Taba Penanjung
22	Ruas Jalan Tol Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
23	Ruas Jalan Tol Prapat – Tarutung – Sibolga
24	Ruas Jalan Tol Batu Ampar – M Kuning – Hang Nadim

Nilai investasi untuk seluruh ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang ditugaskan, diluar biaya pengadaan tanah, diperkirakan sebesar ±Rp635.400 Miliar. Rincian kebutuhan pendanaan masing-masing ruas adalah sebagai berikut:



NO	RUAS	PAJANG (KM)	NILAI INVESTASI (Rp M)
I. Ruas Operasi			
1	Medan-Binjai	17	3.214
2	Bakauheni-Terbanggi Besar	141	15.905
3	Palembang-Indralaya	22	3.394
4	TB Besar - Pematang Panggang	189	22.363
5	Pematang Panggang - Kayu Agung (*)	132	20.169
6	Pekanbaru - Dumai	36	6.540
7a	Sigli - Banda Aceh (Seksi 2-4)	12	2.372
13a	Binjai - Pangkalan Brandan (Seksi 1)	31	4.708
11b	Pekanbaru-Bangkalan (STA 9+000 - STA 40+)	17	4.443
12a	Taba Penanjung - Bengkulu		
Sub Total		972	83.188
II. Ruas Konstruksi			
7b	Sigli - Banda Aceh	38	7.015
8	Kisaran - Indrapura	48	8.321
9a	Kuala Tanjung - Pematang Siantar	104	13.773
10a	Sp. Indralaya - Prabumulih	69	13.128
11a	Sicincin - Padang	37	9.848
11b	Pekanbaru-Bangkalan (STA 0+000 - STA 9+0)	9	1.367
11c	Bangkalan - Koto Kampar	25	3.797
13b	Binjai - Pangkalan Brandan	46	9.246
Sub Total		374	44.438
Total Tahap I		972	147.626
III. Ruas Rencana PPJT			
14	Betung - Tempino - Jambi (*)	171	27.007
15	Jambi - Rengat	198	55.871
16a	Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru	31	7.909
16b	Rengat - Junction Pekanbaru	177	48.734
17	Patahan Panjang - Lematang	12	5.189
18	Palembang-Betung	69	15.027
Sub Total		657	159.738
IV. Ruas Backbone Lanjutan			
19	Dumai - Sp. Sigambir - Rantau Prapat	181	53.878
20	Rantau Prapat - Kisaran	112	30.166
21	Langsa - Lhokseumawe	134	30.190
22	Lhokseumawe - Sigli	157	35.141
13c	Pangkalan Brandan - Langsa	74	14.570
Sub Total		657	163.944
V. Ruas Feeder untuk PPJT			
23	Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau	112	23.790
9b	Pematang Siantar - Parapat (*)	50	7.774
10b	Prabumulih - Muara Enim	56	11.169
11d	Payakumbuh - Sicincin	73	29.358
11e	Pangkalan - Payakumbuh	67	23.624
11f	Koto Kampar - Pangkalan	14	5.480
12b	Lubuk Linggau - Taba Penanjung	83	33.672
Sub Total		492	134.867
VI. Ruas Feeder belum PPJT			
24	Prapat - Tarutung - Sibolga	102	24.333
25	Batu Ampar - M Kuning - Hang Nadim	20	4.916
Sub Total		122	29.249
Total		2.860	635.400

Catatan:
(*) Termasuk dukungan konstruksi dari pemerintah

Sumber: Kajian Bersama PMN Tahun 2024 PT HK

Berdasarkan data PT Hutama Karya (Persero), realisasi progres pembangunan JTTS Tahap I dan Sebagian Tahap II sampai dengan Desember 2024 sebesar 86,93% dengan rincian sebagai berikut:

No	Ruas	Realisasi Progres Kontruksi s.d. TW IV 2024 (%)
JTTS Tahap I		
1	Medan – Binjai	100
2	Kisaran – Indrapura	100
3	Pekanbaru – Dumai	100
4	Pekanbaru - Koto Kampar	100
5	Palembang – Indralaya	100
6	Taba Penanjung – Bengkulu	100
7	Terbanggi Besar - Kayu Agung	100
8	Sp. Indralaya - Muara Enim	100
9	Bakauheni - Terbanggi Besar	100
10	Sigli - Banda Aceh	100

No	Ruas	Realisasi Progres Kontruksi s.d. TW IV 2024 (%)
11	Binjai – Langsa	100
12	Kuala Tanjung - Tebing Tinggi – Siantar	98
13	Junction-Bypass Pekanbaru	39
14	Padang – Sicincin	91
JTTS Tahap II		
1	Betung - Tempino – Jambi	14
2	Palembang – Betung	49
TOTAL		86,93

3) Klaster Industri Manufaktur

A. Dukungan Penerbitan MTN PT Len Industri (Persero)

Dalam rangka memenuhi modal kerja untuk mendukung pembiayaan proyek, Direksi PT Len selaku Induk Defend ID mengajukan permohonan penerbitan Medium Term Notes (MTN) sebesar Rp990 miliar dengan alokasi penggunaan sebagai berikut:

No	Entitas	Alokasi MTN	Nilai kontrak proyek
1	PT Len Industri	390 M	4.260 M
2	PT Dirgantara Indonesia (melalui NPA)	100 M	10.654 M
3	PT PAL Indonesia (melalui NPA)	100 M	1.267 M
4	PT Pindad (melalui NPA)	400 M	6.535 M
Total		990 M	22.716 M

MTN digunakan untuk mendanai proyek-proyek Defend ID dengan nilai total kontrak sebesar Rp22,7 triliun, antara lain:

1. PT Len Industri: Refurbishment KRI Bung Tomo dan Refurbishment KRI Pachim
2. PT Dirgantara Indonesia: Helikopter Angkut Serbaguna
3. PT PAL Indonesia: Refurbishment KRI Pachim
4. PT Pindad: Produk Munisi

Dana MTN yang digunakan untuk proyek-proyek di anak perusahaan disalurkan melalui Notional Pooling Account (NPA). NPA adalah skema cash management yang menkonsolidasikan saldo-saldo Rekening Peserta Pooling guna meningkatkan efisiensi pengelolaan dana sehingga, perusahaan beserta anak perusahaannya dapat mengoptimalkan likuiditas untuk memperbaiki struktur keuangan.

Melalui surat Nomor S-565/MBU/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, Menteri BUMN selaku RUPS memberikan persetujuan penerbitan MTN setinggi-tingginya Rp990 miliar yang diperuntukkan membiayai modal kerja proyek-proyek PT Len Industri

(Persero) dan anggota Holding BUMN Industri Pertahanan yang bersumber dari APBN, serta dapat digunakan untuk refinancing MTN PT Pindad.

B. Restrukturisasi Keuangan PT Dirgantara Indonesia

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi PT Dirgantara Indonesia antara lain tingginya utang berbunga masa lalu (sebagian besar bersifat *unsustained*), plafond fasilitas pinjaman eksisting yang terbatas dan sudah habis, kondisi likuiditas yang minim, serta adanya isu covenant yang menghambat perolehan pinjaman baru.

Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-292/MBU/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dibentuk Tim Project Management Office (PMO) Percepatan Penyehatan Keuangan PT Dirgantara Indonesia sehingga implementasi program penyehatan keuangan perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

PT Dirgantara Indonesia telah melaksanakan penandatanganan MRA (*Master Restructuring Agreement*) pada tanggal 2 September 2024 dengan Kreditur BRI dan tanggal 26 September 2024 dengan Kreditur BNI. Jumlah utang *unsustained* yang dilakukan restrukturisasi sebesar USD132,2 juta (BRI) dan USD44,5 juta (BNI)

Dengan disetujuinya restrukturisasi keuangan utang perbankan, diharapkan dapat meringankan beban keuangan Perusahaan dan membantu PT Dirgantara Indonesia untuk meningkatkan kinerja Perusahaan ke depan.

C. Penyelesaian Piutang Negara Eks BPPN melalui konversi PMN Non Tunai TA 2024

Pada tahun 2003 dan 2024 PT Dirgantara Indonesia menandatangani perjanjian pinjaman Dana Talangan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang digunakan untuk mendukung program Restrukturisasi Sumber Daya Manusia sebesar Rp649,2 miliar.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S815/MK.06/2022 tanggal 3 Oktober 2022, bahwa Menteri Keuangan menyetujui usulan optimalisasi penyelesaian piutang negara Eks BPPN untuk dikonversikan menjadi PMN Non Tunai pada Tahun Anggaran 2024.

Pada tanggal 20 Desember 2024, Menteri BUMN telah menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Penambahan PMN ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri untuk selanjutnya dilakukan penerbitan PP.

Melalui tambahan Penyertaan Modal Negara secara Non Tunai pada tahun 2024, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Memperbaiki struktur permodalan perusahaan yang akan memberikan peningkatan kemampuan modal bersih sehingga perusahaan dapat memperbaiki tingkat *leverage*.
2. Memperbaiki *Debt To Equity Ratio* (DER) perusahaan, sehingga menambah kemampuan perusahaan untuk mendapat modal kerja baru.
3. Dengan adanya tambahan pinjaman modal kerja, perusahaan mampu untuk menyelesaikan proyek-proyek baru dan mencapai penjualan yang lebih tinggi.

D. Perbaikan Status Kolektabilitas PT PAL Indonesia

Dalam rangka perbaikan kondisi keuangan PT PAL Indonesia, pada tahun 2024 PT PAL Indonesia fokus dalam melakukan perbaikan Status Kolektabilitas Perusahaan dari status kolektabilitas-2 (dalam perhatian khusus) menjadi Kolektabilitas-1 (Lancar).

Peningkatan status kolektabilitas dari 2 (Dalam Perhatian Khusus) menjadi 1 (Lancar) esensial bagi perusahaan. Hal ini berdampak positif pada kemudahan akses pembiayaan dengan persyaratan lebih baik, penguatan reputasi di mata mitra bisnis dan investor, pengurangan risiko kerugian, serta peningkatan efisiensi operasional. Pencapaian status ini memerlukan pengelolaan keuangan yang baik dan pembayaran kewajiban tepat waktu.

Pada Januari 2024, pihak kreditur, pihak kreditur PT PAL yaitu Bank Mandiri (outstanding sebesar Rp1,27 T), BNI (outstanding Rp1,49 T) dan LPEI (outstanding Rp449,7 miliar) telah menandatangani PK Restrukturisasi kredit sedangkan PPA akan melakukan eksekusi jaminan.

Proses perbaikan status kolektabilitas PT PAL menjadi Kol-1 untuk Bank Mandiri selesai pada bulan Juni 2024 dan untuk BNI selesai pada Desember 2024. Namun, untuk status kolektabilitas pada LPEI masih dalam proses review internal.

E. Debt to Equity Swap PT Sucofindo

PT Sucofindo Advisory Utama (PT SAU) merupakan anak Perusahaan PT Sucofindo (SCI) dengan kepemilikan saham 8,6%. Bergerak dalam bidang jasa konsultasi bisnis, konsultasi teknik, dan pengembangan dan pelatihan pegawai. Tujuan pelaksanaan Debt Equity Swap (DES) dan Capital Injection (CI) pada PT SAU dilakukan untuk:

1. Memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan skala usaha PT SAU menjadi di atas skala menengah.
2. Meningkatkan kemampuan Perusahaan agar dapat mengikuti tender/Lelang dengan nilai diatas Rp2,5 miliar, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 11 tahun 2020

3. Mendukung PT SAU untuk menjalankan fungsi IDSurvey Institute sebagai penyedia layanan pelatihan dan pengembangan SDM IDSurvey

Pelaksanaan DES pada PT SAU melalui konversi tagihan/piutang PT SCI kepada PT SAU sebesar Rp7,5 miliar. Sedangkan rencana pelaksanaan CI pada PT SAU sebesar Rp10 miliar yang dialokasikan untuk Optimalisasi & Pengembangan SDM, Modal Kerja Operasional, Peralatan Penunjang Operasi, dan Digitalisasi Proses Bisnis.

PT Sucofindo EPISI (PT EPISI) juga merupakan anak Perusahaan PT SCI dengan kepemilikan saham 5%. Bergerak dalam bidang *Man Power Supply*, jasa konsultasi *engineering*, dan jasa pengadaan umum.

Pelaksanaan CI pada PT EPISI dilakukan untuk:

1. Meningkatkan likuiditas sebagai modal kerja Perusahaan untuk penyelesaian pekerjaan yang sedang berjalan serta memungkinkan Perusahaan untuk mengambil bagian dalam proyek-proyek bernilai tinggi agar dapat memperkuat keuangan perusahaan
2. Mendukung PT EPISI menjadi IDSurvey sebagai Engineering Services sesuai dengan rencana strategis Holding dan pengembangan portfolio baru yaitu Sustainability Engineering Solution.

Pelaksanaan CI pada PT EPISI sebesar Rp11,6 miliar dialokasikan untuk pengembangan SDM, perizinan usaha, modal kerja operasional, pengembangan Sistem Informasi Operasi.

F. Penyelenggaraan Peta Informasi Geospasial

Pada tanggal 4 Oktober 2024 Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) menyampaikan surat perihal Permohonan Daftar BUMN sebagai Calon Pelaksana Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN) dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD), sehubungan dengan kebutuhan daftar BUMN calon pelaksana KPBUMN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021.

BIG merupakan lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertugas menyelenggarakan penyediaan IGD meliputi jaring kontrol geodesi dan peta dasar sebagaimana amanat Undang-Undang No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Sejak tahun 2013, BIG telah berupaya menyediakan kebutuhan peta dasar skala besar untuk seluruh wilayah Indonesia. Namun mengingat keterbatasan anggaran, maka sampai dengan tahun 2020 baru tersedia peta dasar skala besar 2,57% dari total wilayah Indonesia.

Kebijakan percepatan penyediaan informasi geospasial menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Peta sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kepala BIG telah menetapkan PT BKI sebagai BUMN Pelaksana melalui Keputusan Kepala BIG No 34 Tahun 2022 tentang Penetapan Pemenang Seleksi BUMN Pelaksana Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN dalam Penyelenggaraan IGD..

Dalam tahapan proses pembahasan rancangan Perjanjian KPBUMN antara BIG dengan PT BKI selaku BUMN Pelaksana, terdapat perubahan ruang lingkup yang tercantum dalam rencana KPBUMN. Perubahan pada ruang lingkup akuisisi dan pemetaan dalam pelaksanaan KPBUMN Pelaksana yang semula dilaksanakan hanya dengan menggunakan sumber pembiayaan dari investasi BUMN Pelaksana untuk seluruh Wilayah Indonesia, berubah menjadi hanya untuk wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, sedangkan selain wilayah tersebut akan diselenggarakan oleh BIG menggunakan pembiayaan APBN.

4) Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

A. Dukungan untuk UMKM melalui Program Penjaminan KUR

Peran UMKM di Indonesia sangat signifikan bagi perekonomian terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. UMKM di negara berkembang termasuk di Indonesia umumnya memiliki karakteristik dengan jumlah yang sangat banyak, tersebar di seluruh daerah dan menyerap tenaga kerja atau padat karya. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah mencanangkan upaya peningkatan akses sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui program Kredit Usaha Rakyat.



Kredit Usaha Rakyat, atau disingkat KUR, adalah kredit yang disalurkan oleh Lembaga Penyalur KUR berupa kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- 2) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Adapun salah satu program Pemerintah dalam mendorong program PEN dan program KUR tersebut, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020, dilakukan penambahan penyertaan modal negara kepada PT BPUI yang diteruskan kepada PT Askrindo dan PT Jamkrindo yaitu sebesar Rp6 triliun. PT Askrindo dan PT Jamkrindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan, yang mana salah satu indikator utamanya adalah kinerja volume penjaminan.

Berikut merupakan realisasi Volume Penjaminan KUR PT Askrindo pada tahun 2024:

Keterangan	Kajian PMN	Realisasi s.d. TW IV 2024	%
KUR	Rp162,50 triliun	Rp124,00 triliun	85,52%
<i>Gearing Ratio</i>	18,56 kali	8,13 kali	43,80%

Berikut merupakan realisasi Volume Penjaminan KUR PT Jamkrindo pada tahun 2024:

Keterangan	Kajian PMN	Realisasi s.d. TW IV 2024	%
KUR	Rp162,5 triliun	Rp133,45 triliun	92,03%
<i>Gearing Ratio</i>	17,54 kali	19,31 kali	110,09%

Atas KUR yang disalurkan kepada penerima KUR, tentunya lembaga penyalur KUR mempunyai risiko finansial berupa risiko kredit macet. Untuk memitigasi risiko tersebut, maka dilakukanlah penjaminan KUR yang dilakukan oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Perusahaan Penjamin KUR. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, skema penjaminan KUR dapat digambarkan sebagai berikut:



- 1) Pelaku Usaha mengajukan kredit kepada Bank Pelaksana (Lembaga Penyalur KUR).
- 2) Bank Pelaksana melakukan analisis kelayakan terhadap Pelaku Usaha dan apabila layak, maka dilakukan pemberian kredit.
- 3) Bank Pelaksana mengajukan penjaminan ke PT Askrindo dan PT Jamkrindo.
- 4) PT Askrindo dan PT Jamkrindo memberikan penjaminan kepada Bank Pelaksana.
- 5) Bank Pelaksana membayar Imbal Jasa Premi (IJP) kepada PT Askrindo dan PT Jamkrindo atas Pelaku Usaha penerima KUR yang dijamin.

Selama tahun 2024, Wakil Menteri BUMN memberikan dukungan melalui *monitoring* dan evaluasi atas penggunaan dana PMN Rp6 triliun tersebut dengan surat Wakil Menteri BUMN yang disampaikan kepada Direksi PT BPUI (Persero), PT Askrindo, dan PT Jamkrindo setiap triwulan sebagai berikut:

- 1) Surat Nomor S-13/Wk.R.MBU/04/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penggunaan Dana PMN s.d. Triwulan IV 2023 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang diteruskan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Jaminan Kredit Indonesia;
- 2) Surat Nomor S-19/Wk.R.MBU/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penggunaan Dana PMN s.d. TW I 2024 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang diteruskan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Jaminan Kredit Indonesia;
- 3) Surat Nomor S-52/Wk.R.MBU/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penggunaan Dana PMN s.d. TW II 2024 PT

Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang diteruskan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Jaminan Kredit Indonesia;

- 4) Surat Nomor S-4/Wk.D.MBU/11/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penggunaan Dana PMN s.d. TW III 2024 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang diteruskan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Jaminan Kredit Indonesia.

Pada tahun 2024, Direksi PT BPUI melalui suratnya nomor 055/DIRUT/BPUI/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang pada intinya menyampaikan pengajuan alokasi Cadangan Investasi Pembiayaan Investasi sebesar Rp3 triliun yang ditujukan meningkatkan kapasitas usaha PT BPUI guna mendukung pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilaksanakan oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo. Atas usulan tersebut, Menteri BUMN menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan nomor S-178/MBU/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dan Non Tunai pada BUMN dalam APBN Tahun Anggaran 2025 dan Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN Tahun Anggaran 2024, yang pada intinya mengusulkan tambahan PMN termasuk alokasi cadangan investasi TA 2024 dan memerlukan adanya dukungan Pemerintah dalam bentuk tambahan PMN untuk memastikan penugasan BUMN dapat diselesaikan tepat waktu, tepat kualitas, efisien dan juga mendukung peningkatan kapasitas usaha BUMN.

B. Dukungan Penyelamatan Pemegang Polis PT Jiwasraya (Persero)

Program penyelamatan pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero)/"PT Jiwasraya" didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian, yang merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab Pemerintah selaku Pengendali/Pemegang Saham PT Jiwasraya yang mengalami permasalahan *insolvency* sejak tahun 2018.



Sejalan dengan hal tersebut, Direksi PT Jiwasraya telah melakukan penyusunan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah diajukan kepada OJK pada terakhir pada tanggal 4 April 2019.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, RPK mengalami beberapa penyesuaian sehingga perlu ditambahkan aktivitas yang telah dilakukan sesuai dengan kondisi terkini serta penyesuaian atas beberapa perbedaan dan hal yang belum diatur secara rinci di dalam RPK. Melalui Surat OJK Nomor S-186/NB.23/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Permintaan Revisi Rencana Penyehatan Keuangan, Jiwasraya telah membuat dokumen evaluasi RPK tersebut ke dalam Rencana Tindak PT Jiwasraya yang telah mendapatkan persetujuan OJK melalui Surat OJK Nomor S-196/PD.12/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Tanggapan atas Rencana Tindak PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan Rencana Penyehatan Keuangan Perubahan (RPK-P) yang telah mendapatkan tanggapan dukungan dan tidak keberatan dari Menteri BUMN melalui surat Menteri BUMN Nomor S-277/MBU/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan Perubahan (RPK-P) PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Selain itu, Menteri BUMN melalui Surat Nomor S-187/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Penugasan Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), telah memberikan penugasan kepada PT BPUI untuk membantu dan melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam Program Penyelamatan dan Penyehatan (Restrukturisasi) PT Jiwasraya, yang salah satunya mendirikan anak perusahaan IFG Life yang akan menerima/mengelola eks kewajiban/Polis PT Jiwasraya hasil restrukturisasi.

Adapun progres atas program pemegang polis PT Jiwasraya yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi, dilakukan oleh PT Jiwasraya yaitu dengan memberikan penawaran restrukturisasi polis (perubahan manfaat) kepada para pemegang polis sehingga polis yang nantinya akan dialihkan kepada IFG Life merupakan polis hasil restrukturisasi. Adapun hasil restrukturisasi polis sampai dengan tanggal 22 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

Distribusi	Polis	Liabilitas (Rp M)
Korporasi	5.688	19.340
Ritel	291.038	8.262
<i>Bancassurance</i>	17.341	10.486
Total	314.067	38.093

Sampai dengan 22 Januari 2025, terdapat 314.067 polis restrukturisasi dengan liabilitas ±Rp38,09 T yang telah dialihkan dari PT Jiwasraya ke IFG Life.

2) *Bail-in*

PT BPUI telah melakukan pendirian IFG Life dengan dana awal sebesar Rp150 miliar dan selanjutnya PT BPUI sesuai dengan Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara Kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2021 memerlukan penambahan dana untuk injeksi modal kepada IFG Life dalam rangka menerima pengalihan portofolio adalah sebesar Rp26,7 triliun. Adapun sumber pemenuhan dana tersebut berasal dari dana PMN sebesar Rp20 triliun dan *fundraising* yang dilakukan PT BPUI sebesar Rp6,7 triliun dengan realisasi sebagai berikut:

- a) Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.06/2021 tanggal 8 Agustus 2021, serta Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, telah diberikan alokasi anggaran penambahan Penyertaan Modal Negara pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) sebesar Rp20 Triliun. Selanjutnya pencairan dana PMN sebesar Rp20 triliun kepada PT BPUI telah dilakukan pada 22 Oktober 2021 dan telah diteruskan kepada IFG Life pada 24 November 2021 sebagaimana persetujuan Menteri BUMN nomor S-850/MBU/11/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Kepada PT Asuransi Jiwa IFG.
- b) Pencairan dana *fundraising* sebesar Rp6,7 Triliun yang berasal dari *leveraging* dividen perusahaan anak berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (“Himbara”) kepada PT BPUI telah dilakukan pada 25 Februari 2022 dan Kementerian BUMN telah memberikan persetujuan penambahan modal dari BPUI kepada IFG Life dari dana *fundraising* tersebut pada tanggal 25 April 2022 dan telah mendapat persetujuan dari OJK pada tanggal 22 Mei 2022 dan juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN nomor S-262/MBU/04/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Kepada PT Asuransi Jiwa IFG sebesar Rp6,7 Triliun.

Berdasarkan data hasil perhitungan Bahana Sekuritas sebagai Lead Consultant bersama Milliman, KJPP Suwendo Rinaldy dan Rekan, Ali Budiarto, Nugroho & Reksodiputro Counsellors at Law, serta Ernst & Young (Konsultan Perhitungan Pendanaan) dengan pendampingan dari BPKP, masih terdapat liabilitas polis yang belum dialihkan s.d. tanggal 31 Desember 2022 dengan nilai buku sebesar ±Rp6,8 triliun. Dalam perhitungan tersebut, diproyeksikan nilai liabilitas polis pada 31 Desember 2023 sebesar ±Rp7,7 triliun, sehingga dibutuhkan total pendanaan sebesar ±Rp8,01 triliun untuk menjaga target RBC sebesar 135%.

Sebagai tindak lanjut penyelesaian Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Jiwasraya kepada IFG Life, telah dilaksanakan Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 September 2022 tentang Program Penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala BPKP dan pejabat lainnya. Pada pokoknya, Presiden RI telah memberikan arahan agar mempercepat proses transfer Polis PT Jiwasraya kepada IFG Life. Selanjutnya telah dilaksanakan Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2023 tentang Tindak Lanjut Rapat Internal tentang Dividen dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023 dengan salah satu agendanya membahas pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka penyelesaian pengalihan liabilitas (polis) Jiwasraya. Dalam rapat tersebut terdapat arahan Presiden untuk menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan terkait Jiwasraya dan Pemerintah akan mengeluarkan kembali anggaran untuk menyelesaikan permasalahan PT Jiwasraya, karena prosesnya telah “setengah jalan”. Menindaklanjuti arahan tersebut, dilakukan pemenuhan kebutuhan dana untuk penyelesaian pengalihan sisa polis PT Jiwasraya kepada IFG Life dengan rincian sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, surat Menteri Keuangan nomor S-977/MK.06/2023 tanggal 26 November 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, telah

diberikan alokasi anggaran penambahan Penyertaan Modal Negara pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) sebesar Rp3 Triliun. Selanjutnya, pencairan dana PMN sebesar Rp3 triliun kepada PT BPUI telah dilakukan dan diteruskan kepada IFG Life pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana surat Wakil Menteri BUMN Selaku Kuasa Pemegang Saham PT BPUI nomor S-646/MBU/Wk.R/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG.

- b) Pencairan dana *fundraising* sebesar Rp1,45 Triliun yang berasal dari pinjaman perbankan dari Himbara kepada PT BPUI telah dilakukan pada tanggal 7 November 2023, dimana Menteri BUMN telah memberikan dukungan pelunasan pinjaman perbankan tersebut menggunakan dividen anak perusahaan PT BPUI melalui surat nomor S-548/MBU/11/2023 tanggal 7 November 2023 perihal Tanggapan atas Rencana Pelunasan Pinjaman Perbankan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), serta persetujuan Menteri BUMN penyertaan modal PT BPUI kepada IFG Life melalui surat nomor S-547/MBU/11/2023 tanggal 7 November 2023 perihal Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG.
 - c) Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2024, telah dilakukan penambahan modal sebesar Rp3,556 triliun yang berasal dari PMN Tahun Anggaran 2024 yang terlaksana pada 3 April 2024, sesuai surat Menteri BUMN nomor S-204/MBU/04/2024 tanggal 3 April 2024 hal Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG.
- 3) Transfer dilakukan oleh PT Jiwasraya kepada IFG Life, yaitu dengan mengalihkan polis hasil restrukturisasi Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG dan/atau polis lain yang telah memenuhi persyaratan untuk dialihkan kepada IFG Life termasuk dengan seluruh aset dan kewajiban kecuali portofolio yang menolak restrukturisasi.
- Direksi PT Jiwasraya melalui surat nomor 01039/S/U/CSP/1021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tentang Persetujuan Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis)

yang diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya Kepada PT Asuransi Jiwa IFG dan Direksi PT BPUI melalui surat nomor 136/DIRUT/BPUI/XI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Untuk Menerima Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polls) Yang Diikuti Dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kepada PT Asuransi Jiwa IFG Sebagai Anak Perusahaan dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), telah mengajukan persetujuan kepada Menteri BUMN selaku RUPS masing-masing untuk mengalihkan dan menerima liabilitas polis PT Jiwasraya ke IFG Life.

Selanjutnya Menteri BUMN melalui Surat Nomor S-851/MBU/11/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Persetujuan Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang Diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG, dan surat nomor S-945/MBU/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Persetujuan atas Rencana PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Selaku Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa IFG untuk Memberikan Persetujuan kepada PT Asuransi Jiwa IFG dalam rangka Menerima Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang Diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG/"IFG Life", telah menyetujui proses transfer sebagai berikut:

- a) PT Jiwasraya melakukan pengalihan dengan nilai buku atas Polis yang siap dialihkan kepada IFG Life secara bertahap sebanyak 230.322 (dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh dua) Polis dengan nilai buku per 30 Juni 2021 sebesar Rp33.018.125.953.769,- (tiga puluh tiga triliun delapan belas miliar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai laporannya nomor R-392/2.0752/AU.1/08/1014-1/1/IX/2021 tanggal 29 September 2021;
- b) PT Jiwasraya untuk melakukan pengalihan dengan nilai buku atas aset dan kewajiban PT Jiwasraya kepada IFG Life dengan nilai buku per 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai laporannya nomor: R-392/2.0752/AU.1/08/1014- 1/1/IX/2021 tanggal 29 September 2021

secara bertahap, sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan yang mengikuti pengalihan Polis yang siap dialihkan.

Sejalan dengan rencana Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Jiwasraya kepada IFG Life tersebut, OJK telah memberikan persetujuan izin pengalihan polis (liabilitas) dari PT Jiwasraya kepada IFG Life melalui surat nomor:

- a) S-387/NB.2/2021 tanggal 10 Desember 2021 hal Pengalihan Portofolio Aset dan Liabilitas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kepada PT Asuransi Jiwa IFG, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PT Jiwasraya akan mengalihkan portofolio pertanggungan kepada IFG Life pada Tahap I yaitu atas polis yang telah setuju restrukturisasi s.d. 30 Juni 2021 dan polis unit link dengan nilai buku per 30 Juni 2021 sebesar ±Rp33,02 triliun dengan total polis sebanyak 230.322 polis.
- b) S-243/NB.2/2022 tanggal 3 November 2022 hal Pengalihan Portofolio Pertanggungan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG yang pada pokoknya menyampaikan bahwa OJK menyetujui pengalihan polis PT Jiwasraya kepada IFG Life pada Tahap II dengan nilai buku per 31 Agustus 2022 sebesar Rp1,17 triliun dengan total polis sebanyak 351 polis yang telah setuju restrukturisasi.
- c) S-3/PD.1/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dengan nilai liabilitas sebesar Rp27,36 miliar.
- d) S-40/PD.1/2023 tanggal 7 Desember 2023 dengan nilai liabilitas sebesar Rp2,75 triliun.
- e) S.46/PD.1/2023 tanggal 27 Desember 2023 untuk sisa liabilitas yang belum dialihkan dari PT Jiwasraya kepada IFG Life.

Selain hal tersebut di atas, dalam rangka penyelesaian pengalihan portofolio pertanggungan (polis) yang diikuti dengan pengalihan aset dan kewajiban PT Jiwasraya kepada IFG Life, Menteri BUMN selaku RUPS PT Jiwasraya dan PT BPUI telah memberikan persetujuan melalui:

- a) Persetujuan pengalihan sesuai surat Menteri BUMN Nomor S-557/MBU/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 hal Persetujuan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG;
- b) Persetujuan penerimaan pengalihan sesuai surat Menteri BUMN Nomor S-558/MBU/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 Persetujuan atas Rencana PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa IFG dalam Memberikan Persetujuan kepada

PT Asuransi Jiwa IFG untuk Menerima Pengalihan Aset dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

yang pada pokoknya menyetujui untuk PT Jiwasraya melakukan pengalihan kepada IFG Life sebagai berikut:

- a) Aktiva Tetap yaitu tanah dan bangunan sebanyak 10 (sepuluh) aset dengan nilai buku per 30 Juni 2024 (*audited*) sebesar Rp54.165.610.998,21 (lima puluh empat miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma dua satu rupiah) dan Aktiva Properti Investasi berupa tanah dan bangunan sebanyak 32 (tiga puluh dua) aset dengan nilai buku per 30 Juni 2024 (*audited*) sebesar Rp308.288.726,00 (tiga ratus delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), karena kondisi tertentu lainnya.
- b) Berupa aset finansial, dengan nilai buku per 30 Juni 2024 (*audited*) sebesar Rp231.978.200.438,46 (dua ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu empat ratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam rupiah) sebagaimana rekapitulasi pada Lampiran II surat ini, dan potensi tambahan kas yang diperoleh dalam hal permohonan keringanan perpajakan disetujui oleh Kantor Pajak serta sisa biaya operasional.
- c) Berupa kewajiban dengan nilai buku per 30 Juni 2024 (*audited*) sebesar Rp39.692.322.168,49 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh delapan koma empat puluh sembilan rupiah).

Adapun capaian atas proses Pengalihan Polis yang Diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Jiwasraya kepada IFG Life sampai dengan *unaudited* 22 Januari 2025, sebagai berikut:

- a) Rekapitulasi Pengalihan Aset dari Jiwasraya ke IFG Life:

Aset	Nilai (Rp M)
Aset Finansial	
• Saham	1.236
• Obligasi (SBN)	1.594
• Reksa Dana Unit Link	203
• Reksa Dana	1.152
• MTN dan KIK EBA	14
• Penyertaan dan Investasi Sukuk	655
• Piutang Reasuransi	41

Aset	Nilai (Rp M)
• Kas dan Setara Kas	258
Total Aset Finansial	5.153
Aset Non Finansial	
• Tanah dan Bangunan	5.438
• Aset tak Berwujud	3
• Aset tetap non Tanah dan Bangunan	43
Total Aset Non Finansial	5.484
Total	10.637

Sumber: Data Jiwasraya (diolah)

- b) Rekapitulasi Pengalihan Polis dari Jiwasraya ke IFG Life:

Distribusi	Polis	Liabilitas (Rp M)
Korporasi	5.688	19.340
Ritel	291.038	8.262
<i>Bancassurance</i>	17.341	10.486
Total	314.067	38.093

Sumber: Data Jiwasraya (diolah)

- c) Sampai dengan 22 Januari 2025, terdapat 314.067 polis restrukturisasi dengan liabilitas ±Rp38,09 T yang telah dialihkan dari PT Jiwasraya ke IFG Life.
- d) Selain mengalihkan liabilitas dan aset, dalam rangka persiapan pembubaran, PT Jiwasraya juga telah mengalihkan pengelolaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) kepada BPUI sebagaimana Keputusan RUPS tentang pengalihan PUMK Jiwasraya ke BPUI melalui surat Menteri BUMN No. S-627/MBU/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 hal Persetujuan Pengalihan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Sejak tahun 2024 sampai dengan Januari 2025, telah dilakukan proses pembubaran PT Jiwasraya sebagai tahapan terakhir dari program penyelamatan pemegang polis PT Jiwasraya yang telah dimulai sejak tahun 2018. Adapun proses pembubaran dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) RUPS Persetujuan Pembubaran PT Jiwasraya secara prinsip melalui surat Menteri BUMN Nomor S400/MBU/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 perihal Persetujuan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya.

- b) Permohonan persetujuan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (“RPP”) tentang Pembubaran PT Jiwasraya dari Menteri BUMN kepada Presiden RI melalui surat Nomor S-401/MBU/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 perihal Permohonan Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya.
- c) Permohonan tanggapan atas rencana pembubaran PT Jiwasraya dari Menteri BUMN kepada Menteri Keuangan melalui suratnya Nomor SR399/MBU/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 perihal Rencana Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
- d) Penyampaian pendapat Menteri Keuangan tentang pembubaran PT Jiwasraya melalui surat Nomor S-804/MK.06/2024 tanggal 3 September 2024 hal Penyampaian Pendapat tentang Pembubaran PT Jiwasraya, yang pada prinsipnya sependapat bahwa terhadap PT Jiwasraya dapat dilakukan pembubaran, dengan pertimbangan bahwa PT Jiwasraya memiliki kondisi keuangan yang tidak baik, kelanjutan bisnis yang tidak layak untuk dipertahankan, dan tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta memperhatikan implementasi program penyelamatan pemegang polis PT Jiwasraya melalui skema restrukturisasi, bail-in, dan transfer.
- e) Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (Sanksi PKU) untuk seluruh kegiatan usaha di PT Jiwasraya sesuai surat Deputy Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Nomor S-96/PD.1/2024 tanggal 11 September 2024 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk Seluruh Kegiatan Usaha kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, kepada PT Jiwasraya dikenakan Sanksi PKU untuk seluruh kegiatan usaha, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tersebut (11 September 2024).
- f) Persetujuan Izin Prakarsa penyusunan RPP tentang Pembubaran PT Jiwasraya oleh Presiden RI melalui surat Menteri Sekretaris Negara

Nomor B-496/M/D-1/HK.02.02/09/2024 tanggal 30 September 2024 hal Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya.

- g) Persetujuan Pembentukan Panitia Antar Kementerian ("PAK") Penyusun RPP tentang Pembubaran PT Jiwasraya oleh Menteri BUMN melalui surat Nomor SK-212/MBU/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 perihal Pembentukan Panitia Antar Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya.
- h) Persetujuan Tim Likuidasi PT Jiwasraya oleh Menteri BUMN melalui surat nomor S-647/MBU/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Persetujuan Penunjukkan Calon Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
- i) Pencabutan izin usaha PT Jiwasraya oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-9/D.05/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
- j) Persetujuan usulan calon Tim Likuidasi PT Jiwasraya oleh Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus melalui surat nomor S-34/PD.12/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Tanggapan atas Penyampaian Calon Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
- k) RUPS Efektif Pembubaran PT Jiwasraya melalui Keputusan RUPS sesuai surat Menteri BUMN nomor S30/MBU/01/2025 tanggal 22 Januari 2025 hal Rapat Umum Pemegang Saham Efektif Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya.
- l) Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran PT Jiwasraya oleh Menteri BUMN kepada Menteri Hukum melalui suratnya nomor S-26/MBU/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya.
- m) Terhadap hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran PT Jiwasraya telah dinyatakan selesai sesuai surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum nomor

PPE.PP.03.01-378 tanggal 24 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya.

Dalam rangka koordinasi rencana pembubaran PT Jiwasraya lintas Kementerian dan/atau Lembaga, telah dilaksanakan rapat pembahasan bersama, sebagai berikut:

- a) Rapat PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14.00 s.d. 15.30 WIB, bertempat di Pullman Jakarta, berdasarkan Surat Undangan Plh. Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN nomor UND-88/DHK.MBU/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024;
- b) *Focus Group Discussion* tentang PT Jiwasraya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 pukul 09.00 s.d. 11.30 WIB bertempat di Borobudur Jakarta, berdasarkan Surat Undangan Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun nomor UND-163/Wk.MBU.08/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024.
- c) Rapat PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 13.30 s.d. 14.30 WIB bertempat di Park Hyatt Jakarta, berdasarkan Surat Undangan Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN nomor UND-47/DHK.MBU.A/12/2024 tanggal 4 Desember 2024.





Adapun hasil Rapat PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya pada 4 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- (i) Masa berlaku Pembatasan Kegiatan Usaha PT Jiwasraya akan berakhir sampai dengan tanggal 11 Desember 2024. Selanjutnya OJK akan melakukan proses koordinasi dan administratif dalam jangka waktu beberapa hari untuk menerbitkan penetapan pencabutan izin usaha kepada PT Jiwasraya.
 - (ii) Agar dilakukan identifikasi dan mitigasi atas potensi-potensi risiko gugatan dari para pihak terkait yang dapat berdampak kepada Pemerintah, antara lain dari pemegang polis yang menolak restrukturisasi dan peserta DPPK PT Jiwasraya.
 - (iii) PT Jiwasraya diharapkan untuk dapat segera melengkapi Kajian Pembubaran PT Jiwasraya sesuai dengan saran dan masukan yang diberikan dalam Rapat PAK ke-2 ini.
- d) *Focus Group Discussion* tentang PT Jiwasraya pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 13.30 s.d. 14.30 WIB bertempat di Park Hyatt Jakarta, berdasarkan Surat Undangan Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun nomor UND-185/Wk.MBU.08/12/2024 tanggal 2 Desember 2024.
- e) Rapat PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2025 pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB bertempat di Hotel JS Luwansa Jakarta, berdasarkan Surat Undangan Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN nomor UND-1/DHK.MBU.A/01/2025 tanggal 9 Januari 2025.



Adapun hasil Rapat PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya pada 9 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

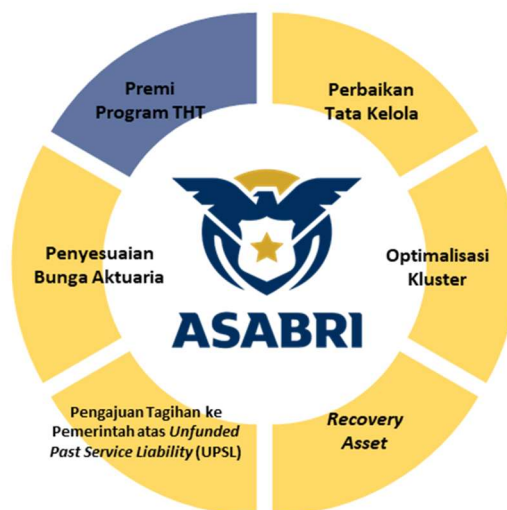
- (i) Agar dapat dilakukan penjelasan secara detail untuk penyelesaian DPPK Jiwasraya;
- (ii) Pendalaman Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Jiwasraya.

C. Dukungan Perbaikan Kinerja PT ASABRI (Persero)

Pada tahun 2021, PT ASABRI (Persero)/"PT ASABRI" menyusun Rencana Penyehatan Keuangan PT ASABRI (Persero)/"RPK" yang berisikan lima strategi yang telah dijalankan secara bertahap. RPK tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT ASABRI pada Rapat Koordinasi Terbatas/"Rakortas" Tingkat Menteri pada tanggal 26 Maret 2021 dengan pokok bahasan "Menerima Paparan Direktur Utama PT ASABRI terkait Penyelesaian Permasalahan ASABRI", yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan dihadiri oleh: Menteri Pertahanan (diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan dan Irjen Kementerian Pertahanan); Menteri Keuangan; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Sesmenko Polhukam; Deputi Bidkooor Kumham Kementerian Polhukam; dan Direktur PT ASABRI.



Selanjutnya, Direktur Utama PT ASABRI mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan B/AP.01/1404-AS/II/2021 tanggal 2 Juli 2021 dan surat kepada Menteri BUMN Nomor B/AP.01/1663-AS/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Permohonan Dukungan atas Strategi Penyehatan Keuangan PT ASABRI (Persero). Atas surat tersebut, Menteri BUMN menyampaikan dukungan atas RPK melalui surat kepada Menteri Keuangan Nomor S-745/MBU/09/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Dukungan atas Strategi Penyehatan Keuangan PT ASABRI (Persero). Berlandaskan pada RPK tersebut, penyehatan keuangan PT ASABRI telah dilaksanakan hingga pada tahun 2024 ini.



Adapun rincian perkembangan dari penyehatan keuangan PT ASABRI selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara/"PMN" TA 2025 PT ASABRI
PT ASABRI telah menyampaikan usulan kajian PMN kepada Menteri BUMN sebagaimana pada surat Direksi Nomor S-3072/H M.01.01/UTM.B/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Penyampaian Usulan Kajian Penyertaan Modal

Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025, dengan usulan tambahan PMN sebesar Rp3.610.362.909.210 pada Desember 2025. Kebutuhan PMN tersebut dihitung berdasarkan gap yang terjadi antara penerimaan premi dan pembayaran klaim THT sejak tahun 2025-2034. Adapun usulan kajian PMN TA 2025 PT ASABRI tersebut telah disampaikan Menteri BUMN melalui suratnya kepada Menteri Keuangan nomor S-178/MBU/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dan Non Tunai pada BUMN dalam APBN Tahun Anggaran 2025 dan Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN Tahun Anggaran 2024. BPKP telah melakukan reviu atas usulan PMN pada PT ASABRI Tahun 2025 dengan laporan nomor PE.12.03/SP-736/D4/03/2024 tanggal 5 Juli 2024, yang pada intinya BPKP menyampaikan bahwa jumlah usulan tambahan PMN PT ASABRI (Persero) Tahun 2025 belum disusun dengan asumsi yang wajar sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a) Usulan sebesar 3,85 Triliun didapatkan dari penjumlahan proyeksi kebutuhan selama 10 tahun.
- b) Batas tingkat solvabilitas minimum yang dijadikan acuan adalah sebesar 120%.
- c) Proyeksi gaji karyawan yang dijadikan acuan adalah sebesar dua kali dari inflasi setiap tahunnya.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a) Aspek keuangan penerima tambahan PMN dapat mencakup antara lain kinerja keuangan historis 5 (lima) tahun terakhir dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahun ke depan pada posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas (SK1/DKU.MBU/04/2024)
- b) Tingkat solvabilitas minimum sebesar 100% sesuai PMK Nomor 66/PMK.02/2021.
- c) Persentase kenaikan gaji karyawan sebesar satu setengah kali dari inflasi setiap tahunnya sesuai dengan formula perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023.

Adapun kondisi tersebut di atas menyebabkan usulan kebutuhan PMN yang diajukan PT ASABRI berpotensi meningkat sebanyak Rp1,151 Triliun menjadi Rp3,855 Triliun dari seharusnya Rp2,704 Triliun yang sesuai ketentuan yang berlaku. Atas hasil reviu BPKP tersebut, PT ASABRI telah menyampaikan kembali usulan kajian PMN kepada Menteri BUMN sebagaimana surat Direksi Nomor S-2502/HM.01.01/UTM.C/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal

Penyampaian Usulan Kajian Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025.

2) Penetapan Bunga Aktuaria tahun 2024

Metode dan asumsi perhitungan LMPMD Program THT Tahun 2024 telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui surat nomor S-512/MK.02/2024 tanggal 11 Juni 2024 hal Persetujuan Metode dan Asumsi dalam Perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program THT Tahun 2024, diantaranya tingkat bunga aktuaria sebesar 7,5% dan metode perhitungan LMPMD dengan metode GPV.

3) Pengakuan Piutang Premi *Unfunded Past Service Liabilities* (UPSL) oleh Kementerian Keuangan

Pengakuan UPSL PT ASABRI sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-310/MK.02/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Pengakuan dan Penetapan UPSL Program Tabungan Hari Tua yang dikelola PT ASABRI (Persero) Tahun 2023 sebesar Rp5.171.631.486.375 yang berasal dari perhitungan selisih antara tingkat bunga aktuaria pada tahun 2023 dari sebesar 9,50% menjadi sebesar 7,50%. Dalam RJPP Tahun 2025-2029, proyeksi penerimaan UPSL terjadi pada 2026-2027 masing-masing sebesar Rp 2,59 triliun, PT ASABRI berupaya untuk melakukan penagihan kepada Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-2877/AT.01/ UTM.C/XI/2024 tanggal 12 November 2024 hal Simulasi Proyeksi Kinerja Keuangan PT ASABRI (Persero) atas Beberapa Skenario Pelaksanaan Pembayaran UPSL Rp5,17 triliun.

4) Perbaikan Program THT

Direksi PT ASABRI telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan nomor S-1214/AT.01.02/UTM.D/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal Penyampaian Usulan Penyesuaian Premi Program Tabungan Hari Tua (THT) PT ASABRI (Persero) dan surat kepada Menteri BUMN nomor S-855/AT.01.02/UTM.D/IV/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Permohonan Dukungan Usulan Penyesuaian Premi Program Tabungan Hari Tua (THT) PT ASABRI (Persero), yang pada pokoknya menyampaikan usulan penyesuaian besaran iuran atau premi menjadi sebesar 5,00% dari Gaji Pokok, Tunjangan Istri/suami, dan Tunjangan Anak, dan pembayaran premi tunggal atas biaya pemakaman sebesar Rp1,86 triliun. Terhadap kajian tersebut, telah dilakukan review oleh Aktuaris Independen Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Riana dan Rekan (Padma Radya Aktuaria) dan telah disampaikan melalui surat Direksi PT ASABRI nomor S-2980/AT.02.01/UTM.D/XI/2024 tanggal 21 November 2024 perihal Penyampaian Hasil Review oleh Aktuaris Independen Terkait

Usulan Penyesuaian Premi Program Tabungan Hari Tua PT ASABRI (Persero), dengan hasil sebagai berikut:

- a) Premi Tunggal untuk Biaya Pemakaman Peserta Pensiunan
Dengan menggunakan asumsi tingkat bunga pengembangan THT ASABRI, premi tunggal sebesar Rp1,865 triliun cukup untuk dapat menutup perkiraan klaim di masa mendatang atas biaya pemakaman peserta pensiun, istri/suami, dan anak, atas peserta pensiunan yang masih hidup per tanggal 31 Desember 2023, sampai dengan tidak ada lagi peserta pensiunan yang masih hidup.
- b) Iuran 0,287% dari Penghasilan untuk Biaya Pemakaman Peserta Aktif saat ini
Dengan menggunakan asumsi tingkat bunga pengembangan THT ASABRI, iuran sebesar 0,287% dari Penghasilan (Gaji Pokok + Tunjangan Istri/Suami + Tunjangan Anak) cukup untuk membayar klaim manfaat biaya pemakaman atas peserta aktif di 31 Desember 2023, terdiri dari biaya pemakaman peserta aktif setelah usia pensiun, biaya pemakaman istri/suami dan anak dari peserta aktif), sampai dengan tidak ada lagi peserta pensiunan yang hidup.
- c) Iuran 0,213% dari Penghasilan untuk Biaya Operasional
Tanpa adanya penambahan dari selisih antara tingkat pengembangan aktual dan yang dikembalikan kepada peserta untuk biaya operasional, iuran sebesar 0,213% dari Penghasilan (Gaji Pokok + Tunjangan Istri/Suami + Tunjangan Anak) tidak dapat mencukupi untuk menutup biaya operasional penyelenggaraan program THT untuk peserta yang saat ini masih aktif pada 31 Desember 2023.

5) Klaster Jasa Keuangan

A. *Post Integration Program Holding Ultra Mikro*

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan motor penggerak utama perekonomian Indonesia yang pada tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar ~99% dari jumlah unit usaha di Indonesia, ~97% dari penyerapan total tenaga kerja, dan ~61% pembentuk PDB (Produk Domestik Bruto). Statistik tersebut mengindikasikan bahwa penguatan sektor UMKM berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat ~62 Juta pengusaha UMKM dimana sebanyak ~51 Juta termasuk dalam kategori Ultra Mikro ("UMi") dan diestimasikan

sebanyak ~45 Juta masih membutuhkan pendanaan tambahan yang mana sekitar 40% dari target pelaku usaha UMi ini tidak memiliki akses finansial yang cukup.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan dan memperluas akses finansial kepada pengusaha di segmen UMi sehingga lebih lanjut dapat mengoptimalkan potensi mereka untuk berkontribusi lebih besar kepada perekonomian nasional. Sejalan dengan aspirasi Pemerintah Indonesia untuk pengembangan UMKM termasuk segmen UMi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (“RPJMN”) 2020-2024, demikian juga aspirasi Kementerian BUMN RI untuk meningkatkan kinerja dan nilai BUMN melalui refocusing sesuai dengan core value dengan menjalankan restrukturisasi korporasi (holding, merger, akuisisi, dll) sebagaimana tertera pada dokumen Rencana Strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2020-2024, dan untuk mewujudkan rencana strategis BRI untuk tumbuh berkelanjutan di mana segmen UMi menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru perseroan seperti dirumuskan pada RBB 2020-2022, RBB 2021-2023 dan RJPP 2021-2025, maka dibentuklah Holding Ultra Mikro (“Holding UMi”) yang terdiri dari 3 (tiga) entitas : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (sebagai induk holding), PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Pembentukan Holding UMi secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan kepada usaha UMi, memberikan solusi finansial yang lebih lengkap dan terintegrasi bagi segmen UMi, mendukung pemerintah mencapai target inklusi keuangan, hingga peningkatan profitabilitas ketiga entitas sebagai dampak dari sinergi yang manfaatnya selanjutnya diteruskan kepada nasabah. Pembentukan Holding UMi dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan Saham Pemerintah pada PT Pegadaian (Persero) (“Pegadaian”) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (“PNM”) ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) melalui inbreng Saham Pemerintah pada kedua entitas tersebut ke BRI.

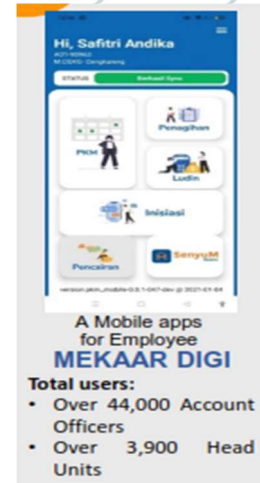
Setelah Holding UMi secara legal sudah terbentuk, Holding UMi telah memasuki tahap Post Integration. Untuk memastikan Post Integration Plan terlaksana dengan baik, mekanisme governance dan monitoring dilaksanakan baik melalui *Executive Committee* maupun *Operating Committee*, sedangkan untuk mekanisme eksekusi dibentuk IMO (*Implementation Management Office*) yang melibatkan ketiga entitas. Berbagai inisiatif strategis terkait *post integration* telah berjalan sesuai *timeline (on track)*. Lebih lanjut, pencapaian KPI Holding secara *overall* telah memenuhi target yang ditetapkan.

Sinergi Holding Ultra Mikro diimplementasikan melalui inisiatif strategis bersama, untuk memperkuat ketangguhan UMKM dan mengakselerasi Literasi serta Inklusi Keuangan dengan *journey* yang lebih lengkap bagi nasabah Ultra Mikro dalam menjangkau layanan keuangan BRI Group. Adapun inisiatif strategis tersebut antara lain:

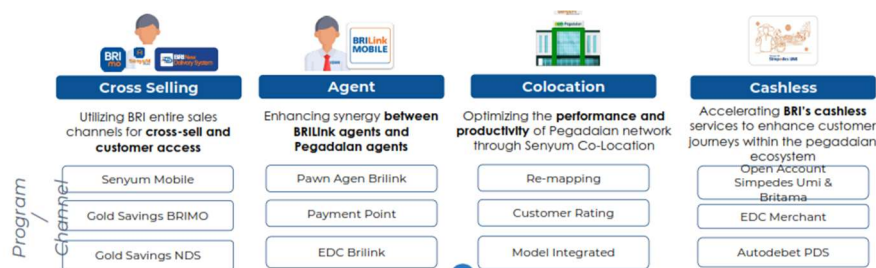
1. Penguatan Ekosistem Digital untuk UMKM Ultra Mikro: Salah satu pencapaian terbesar adalah pengembangan *platform digital* yang mendukung UMKM dalam mengakses layanan keuangan secara lebih efisien dan aman. Lebih dari 7 juta akun Simpedes UMKM berhasil dibuka, membuka jalan bagi *disbursement* tunai yang lebih mudah dan terhubung secara digital dengan sistem keuangan modern.
2. Program Pemberdayaan UMKM: Holding Ultra Mikro berhasil meluncurkan dan memperluas program pemberdayaan bagi pelaku UMKM, seperti pelatihan literasi keuangan dan peningkatan kapasitas bisnis. Lebih dari 1,9 juta produk *referral* tercatat melalui *platform Senyum Mobile*, yang berfungsi sebagai alat *cross-selling* antar produk dan layanan untuk pelanggan UMKM.
3. Peningkatan Pembiayaan UMKM: *Outstanding* kredit yang disalurkan melalui Holding Ultra Mikro pada tahun 2024 telah tumbuh secara signifikan sebesar 6,2% YoY, dari Rp590,7 triliun pada TW III 2023 menjadi Rp627,6 triliun pada TW III tahun 2024. Ini menunjukkan dampak positif dari upaya holding Ultra Mikro dalam memperluas akses pembiayaan untuk UMKM.



4. Transformasi Digital di PNM: PNM berhasil mempercepat transformasi digital dengan meluncurkan aplikasi digital Mekaar Digi yang memberikan kemudahan bagi account officer untuk mengelola dan memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM ultra mikro. Selain itu, sistem *cashless disbursement* yang terintegrasi dengan *Application Programming Interface* (API) di Pegadaian dan PNM semakin memperkuat akses layanan keuangan tanpa menggunakan uang tunai, meningkatkan kenyamanan dan keamanan transaksi.



5. Sinergi Antara BRI dan Pegadaian: Pada tahun 2024, Holding Ultra Mikro semakin mengoptimalkan sinergi antara BRI dan Pegadaian yang memberikan dampak signifikan dalam peningkatan pembiayaan dan transaksi *cashless*. Pada TW III 24, pembiayaan gadai meningkat menjadi Rp 1,28 triliun, dengan tabungan emas mencapai 248 kg. Sinergi antara Pegadaian dan BRI melalui saluran distribusi seperti *Senyum Mobile* dan *Gold Savings BRIMO* semakin memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan akses pelanggan. Kolaborasi ini juga dioptimalkan melalui *Senyum Co-Location*, yang meningkatkan produktivitas agen Pegadaian dan BRILink, serta integrasi model layanan untuk mempermudah transaksi. Selain itu, peningkatan layanan *cashless* BRI, seperti pembukaan rekening Simpedes UMi dan Britama, serta transaksi melalui EDC Merchant dan Autodebet PDS, mendorong kontribusi BRI dalam transaksi *cashless* Pegadaian, yang meningkat dari 19,32% pada TW III 2023 menjadi 62,76% pada TW III 2024. Sinergi ini berkontribusi lebih dari Rp 2 triliun, memperkuat kinerja keuangan dan memperluas jangkauan layanan di ekosistem Pegadaian dan BRI.



Meskipun telah mencapai banyak kemajuan, Holding Ultra Mikro menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan literasi digital di kalangan beberapa pelaku UMKM dan persaingan yang semakin ketat dengan platform pinjaman digital. Namun, dengan terus berfokus pada pemberdayaan melalui edukasi

keuangan dan pengembangan teknologi, Holding Ultra Mikro optimis dapat mengatasi tantangan ini.

Melihat kesuksesan di tahun 2024, Holding Ultra Mikro berencana untuk meluncurkan layanan baru, termasuk layanan bullion (emas) yang akan diluncurkan pada tahun 2025. Selain itu, program pemberdayaan yang lebih luas dan kemitraan strategis dengan pemain industri lain akan terus diperkuat untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan siap bersaing di pasar global.

B. Post Merger Bank Syariah BUMN

Ekonomi Islam Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan data dari *The State of Global Islamic Economy Report* (SGIER), peringkat ekonomi Islam Indonesia meningkat dari peringkat 10 pada tahun 2018/2019 menjadi peringkat 5 pada tahun 2019/2020 dan peringkat 4 pada tahun 2020/2021 (DinarStandard, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam Indonesia tidak hanya semakin besar, tapi juga menunjukkan peranan inovasi di bidang ekonomi Islam mulai dari sektor makanan, pariwisata, serta *fashion*. Dalam upaya mengembangkan keuangan syariah yang merupakan salah satu fokus pengembangan ekonomi syariah, dicanangkan *project* merger bank syariah.

Meskipun potensi dari ekonomi syariah sangat besar, dari sisi total aset, *market share* perbankan syariah masih berkisar pada angka 6% pada tahun 2020. Hal ini semakin memperkuat kebutuhan terkait merger bank syariah anak perusahaan BUMN.

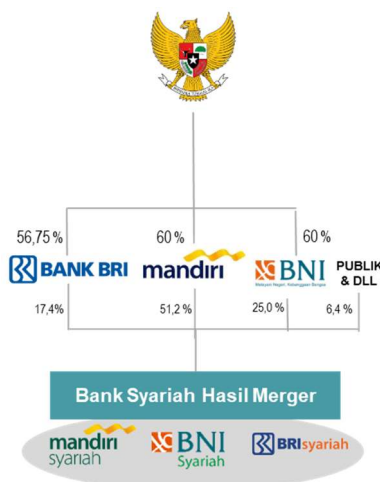


Tujuan utama dari merger bank syariah anak perusahaan BUMN adalah sebagai berikut:

- Membentuk Bank Syariah terbesar di Indonesia yang memiliki daya saing secara global;
- Memiliki kemampuan untuk menjangkau nasabah korporasi yang berskala besar, dengan didukung produk-produk syariah baru;
- Memiliki produk konsumen yang beragam, didukung oleh kapabilitas teknologi terbaik;
- Jaringan layanan yang lebih luas;

- e. Permodalan yang lebih kuat, dengan target akan mencapai BUKU 4 sebelum tahun 2025.

Kepemilikan bank syariah hasil merger



Adapun *milestone* merger Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:



Pada tahun 2021 dilaksanakan tahap penting dalam merger BSI, yaitu pelaksanaan *effective legal merger* dan pelaksanaan *customer day 1* pada sehingga per 1 November 2021, nasabah dilayani dengan standar 1 layanan BSI.



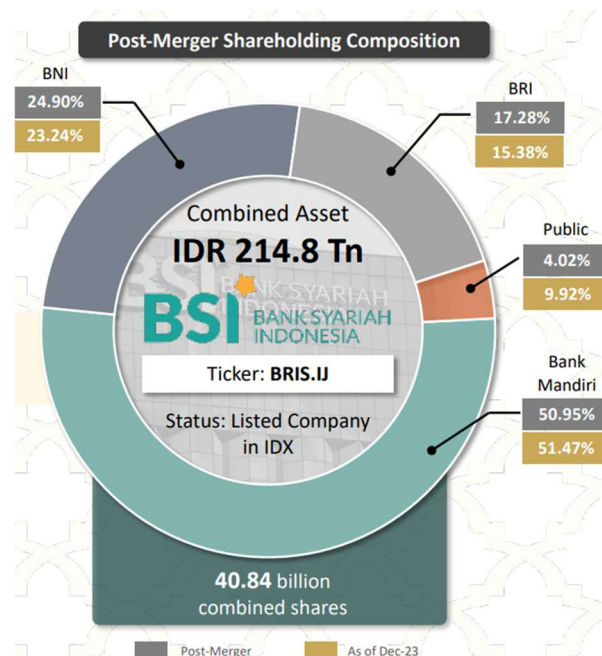
Selanjutnya, pada tanggal 19 - 23 Desember 2022, BSI melaksanakan *rights issue* dimana BSI mencatat pemesanan saham baru *oversubscribed* 1,4 kali. Hal tersebut mencerminkan tingginya antusiasme dan kepercayaan investor terhadap prospek bank syariah terbesar di Indonesia. Pada *rights issue* tersebut BSI mengeluarkan sebanyak 4.999.952.795 saham baru Seri B senilai Rp5 Triliun, sehingga total modal BSI menjadi sebesar Rp34 Triliun. Jumlah pendanaan yang dihasilkan melalui *rights issue* mencapai Rp5,3 Triliun atau 106% di atas target

Rp5 Triliun. Selain itu, rasio kecukupan modal (CAR) naik dari 17,31% sebelum *rights issue* menjadi 20,33%. Jumlah saham publik (*free float*) juga bertambah dari 5,35% menjadi 8,33% atau berhasil memenuhi batas minimum regulator 7,5%.

Pelaksanaan *rights issue* BSI menimbulkan adanya perubahan pada komposisi kepemilikan saham di BSI. Bank Mandiri selaku pemilik saham pengendali telah melaksanakan seluruh haknya dan menambah kepemilikan sahamnya dari yang semula mempunyai kepemilikan 20.905.219.379 lembar saham atau 50,95% menjadi 23.740.608.436 lembar saham atau 51,47% setelah *rights issue*. Sedangkan BNI hanya mengeksekusi sebagian saham baru yang diterbitkan BSI, yaitu 500 juta saham dari porsi yang menjadi haknya sebanyak 1,24 miliar saham baru. Komposisi kepemilikan saham BNI di BSI dari yang semula 24,90% menjadi 23,24%. Berbeda dengan Bank Mandiri dan BNI, BRI memilih untuk tidak mengeksekusi haknya sehingga terjadi dilusi pada komposisi kepemilikan saham BRI di BSI yang semula 17,28% menjadi 15,38% pasca *rights issue* BSI.

Aksi korporasi ini selain berhasil meningkatkan *free float* melebihi ketentuan minimum yang berlaku dari yang semula 4,02% menjadi 9,92%. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap kinerja fundamental BSI. Kedepannya, BSI akan terus tumbuh dari sisi inovasi produk dan digitalisasi layanan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

Kepemilikan *post merger* BSI dan *rights issue* BSI



Pada tanggal 9 November 2024, BSI resmi meluncurkan SuperApp BYOND by BSI dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan dan keuangan syariah di era digital. BYOND by BSI merupakan

SuperApp layanan finansial, sosial, dan spiritual komprehensif yang mudah dan nyaman diakses, dengan keamanan yang lebih maksimal. BYOND hadir dengan teknologi yang lebih baik menggunakan *user interface* (UI) dan *user experience* (UE) yang lebih canggih dan *fresh*. Sejak terbit di *App Store* dan *Play Store* pada 26 Oktober 2024, BYOND by BSI selama 14 hari sudah digunakan oleh lebih dari 100 ribu pengguna. Pertumbuhan hariannya kurang lebih mencapai 10 ribu pengguna setiap hari dan sudah melayani hingga 1 juta transaksi dengan nilai transaksi mencapai Rp 1 triliun.

Harga saham BRIS pada akhir perdagangan 2024 tercatat di harga Rp2.730 atau naik 56,9% dalam setahun terakhir (*year to date/YTD*) atau sejak diperdagangkan pada hari perdana perdagangan 2024 di level Rp1.740. Pencapaian ini menempatkan BRIS sebagai emiten dengan return tertinggi di antara seluruh emiten perbankan di pasar modal Indonesia sepanjang 2024. BRIS juga mencatatkan *price- to-book value* (PBV) sebesar 2,90 dan *price-to-earning* (P/E) ratio 19,05. Valuasi ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap strategi bisnis dan pertumbuhan berkelanjutan yang dijalankan oleh BRIS. Dengan kapitalisasi pasar senilai Rp125,93 triliun, BRIS masuk ke dalam jajaran 5 besar emiten bank dari sisi kapitalisasi pasar (*market capitalization/ market cap*).

C. Program Penyaluran KUR

KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Dalam pelaksanaan penyaluran program KUR, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk aktif terlibat dengan berperan dalam penyaluran KUR. Penyaluran KUR oleh Himbara berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus memperluas akses pembiayaan formal bagi UMKM, program KUR bertransformasi menjadi pintu masuk UMKM dalam ekosistem keuangan formal. Sepanjang tahun 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, KUR telah disalurkan oleh Himbara dan BSI sebesar Rp251,62

triliun kepada 4,56 juta debitur, atau tercapai sebesar 97,15% dari *plafond* KUR yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp259 triliun.

Melalui program KUR, sektor UMKM semakin mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pendanaan yang dibutuhkan untuk modal kerja dan investasi, yang memungkinkan mereka untuk berkembang, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Dengan adanya transformasi KUR, diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat memperoleh manfaat dari sistem keuangan formal, sekaligus mendorong inklusi keuangan yang lebih luas di Indonesia. Pemerintah dan perbankan terus berkolaborasi untuk memastikan bahwa program ini berjalan efektif dan dapat diakses oleh lebih banyak pelaku usaha, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal.



D. Konsolidasi dan Rebranding ATM Himbara

Proyek Konsolidasi ATM Himbara telah berjalan selama 2 tahun sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2021 lalu dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2024. Pada tahun 2023 telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor SK-173/MBU/06/2023 pada tanggal 27 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Sinergi Shared BUMN Perbankan. Sebagai *milestone* pencapaian proyek ini, Kementerian BUMN bersama bank-bank Himbara dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) sebagai bagian dari holding BUMN Danareksa menggelar *Soft Launching* Integrasi dan Wajah Baru ATM Link pada tanggal 26 September 2023.



Menyasar infrastruktur pembayaran yang memfasilitasi perkembangan teknologi adalah langkah strategis untuk memposisikan Indonesia sebagai *digital nation* yang siap menghadapi berbagai tren inovasi digital. Meski begitu, kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai masih cukup tinggi setiap tahunnya. Hal ini mempertegas signifikansi keberadaan jaringan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan CRM (Mesin Setor Tarik) dalam mendukung kelancaran transaksi keuangan.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Kementerian BUMN mendorong bank-bank Himbara, yang terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, dan PT BTN (Persero) Tbk untuk melakukan inovasi dan mengintegrasikan secara bertahap seluruh mesin ATM dan CRM di bawah pengelolaan Jalin. Hal ini bertujuan untuk menyatukan empat layanan bank menjadi satu layanan terpadu. Dengan demikian, manfaat perluasan jaringan ATM Link ke depan dapat mendukung penyebaran ATM Link secara merata dari seluruh provinsi sampai ke tingkat kabupaten atau kota.

Dalam acara *Soft Launching Integrasi dan Wajah Baru ATM Link*, Kementerian BUMN, Himbara, dan Jalin memperkenalkan tampilan baru (*rebranding*) ATM Link dengan tujuan memperkuat posisi merek sehingga ATM Link memberikan kesan

yang lebih *fresh* dan berbeda kepada masyarakat Indonesia. Dengan semangat wajah baru ATM Link yang mengusung inklusifitas, inovasi yang terintegrasi, dan semangat kolaborasi & bersatu, juga mencerminkan sebuah komitmen untuk meningkatkan pengalaman berinteraksi, kemudahan akses, kenyamanan bertransaksi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Komitmen bersama Tim Konsolidasi ATM Himbara dirancang dan diimplementasikan untuk memastikan bahwa seluruh nasabah Himbara dapat *value added* yang lebih baik sehingga menjadikan ATM Link sebagai jaringan terbesar yang tersebar di seluruh Indonesia. Ke depan, dengan adanya integrasi dan pembaruan tampilan ATM Link ini, para nasabah dapat memiliki pengalaman yang sama saat bertransaksi di jaringan Link manapun tanpa adanya perubahan fitur dan tarif layanan.

Pada tahun 2024, Tim Konsolidasi ATM telah mengintegrasikan sebanyak 4.487 ATM atau mencapai 103,26% dari target sebanyak 4.345 ATM dengan rincian BNI sebanyak 1.250 ATM dari target 1.200 ATM, BRI sebanyak 1.500 ATM dari target 1.500 ATM, Bank Mandiri sebanyak 1.200 dari target 1.200 ATM dan BTN sebanyak 537 ATM dari target 445 ATM. Tim Konsolidasi ATM Himbara akan tetap berkomitmen untuk melanjutkan integrasi ATM di tahun 2025.

E. Pengembangan Bisnis LinkAja

LinkAja merupakan penyedia jasa pembayaran berbasis server yang merupakan produk andalan dari PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) dan telah terdaftar di Bank Indonesia. Sejak tahun 2019 kemudian direklasifikasi pada tanggal 01 Juli 2021, Finarya secara resmi telah mendapatkan lisensi atau izin dari Bank Indonesia sebagai Perusahaan Penerbit Uang Elektronik dan Penyelenggara Transfer Dana (Kategori I). Finarya merupakan gabungan dari 10 anak usaha afiliasi BUMN. Kini, Finarya juga terbuka untuk bersinergi dengan pihak swasta yang memiliki visi dan misi serupa. Pada Oktober 2020, Grab LA Pte. Ltd. resmi menjadi pemegang saham Finarya. Kemudian pada Maret 2021, PT Dompot Karya Anak Bangsa juga resmi terdaftar sebagai pemegang saham Finarya. LinkAja memiliki tiga model bisnis utama sebagai berikut:



Sebagai rangkaian pengembangan bisnis LinkAja, pada Februari 2024, dilaksanakan *signing MoU disbursement program* dan *loyalty points exchange* di Kementerian BUMN.



Signing MOU Disbursement:

- PT Pertamina (Persero)
- PT Pertamina Lubricants
- PT Pertamina Patra Niaga
- PT Jasamarga Tollroad Operator
- PT TASPEN (Persero)
- PT PELNI (Persero)
- PT Pupuk Indonesia (Persero)
- PT Rajawali Indonesia Persero
- Perum Perhutani

Signing MoU Loyalty Points Exchange:

- PT Telekomunikasi Selular
- PT Pertamina Patra Niaga
- PT Garuda Indonesia (Persero)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero)
- PT Bank Mandiri (Persero)
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
- PT Bank Tabungan Negara (Persero)

Disbursement Program merupakan program penyaluran dana *non-payroll* di BUMN Group melalui LinkAja, untuk meningkatkan jumlah *user* dan transaksi di LinkAja, sedangkan *Loyalty Points Exchange* merupakan program integrasi dan konversi *loyalty points* di berbagai aplikasi di BUMN Grup.

Sepanjang tahun 2024, tambahan *disbursement service* secara reguler dijalankan pada 28 partner dengan 14,7 ribu pengguna, partner dimaksud adalah Pertamina Lubricant, Dana Pensiun Antam, Telkom Metra, Pertamina Retail, PLN UPT Madiun, PTPN III, Perhutani, Pupuk Indonesia, Digiserve, PPN, ISH, Bukit Asam, Collega, PMC, MCI, PST, PTPN IV, IKN, ADMEDIKA, PELNI, MDM, MMI, Bank Mandiri Taspen, Telkom Akses, Pertamina Holding, PTPN I, Telkom Sigma, dan IDFOOD. Sehingga *disbursement service* sampai dengan Desember 2024 telah dijalankan pada 22 perusahaan dengan total 215 ribu pengguna. Sedangkan untuk program *loyalty points exchange*, sampai dengan Desember 2024 program tersebut telah diimplementasikan bersama Telkomsel.

Di samping kedua program tersebut, LinkAja juga telah menandatangani Convertible Notes dengan Mitsui pada Februari 2024 untuk membuka potensi pengembangan bisnis LinkAja. Selain itu, proyek strategis dalam ekosistem *shareholder*, misalnya dengan telkomsel, Himbara, Pertamina, dan Jasamarga, juga terus dijalankan.

F. Program Mekaar

PT Permodalan Nasional Madani (Persero)/"PT PNM" didirikan pada 1 Juni 1999 sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM). Pasca terbentuknya holding ultra mikro, PT PNM menjadi bagian dari holding bersama Pegadaian dengan BRI sebagai induk.



Salah satu program unggulan dari PT PNM adalah PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Mekaar merupakan program pembinaan khusus yang dilaksanakan oleh PT PNM untuk perempuan pelaku usaha ultra mikro prasejahtera yang *unfeasible* dan *unbankable*. Nasabah Mekaar pada dasarnya memiliki motivasi dan keterampilan untuk menjalankan usaha namun memiliki keterbatasan akses pembiayaan modal kerja. Keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan. Oleh karena itu, PNM melalui program Mekaar hadir sebagai wujud nyata keberpihakan Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

PT PNM menerapkan sistem pembiayaan berbasis kelompok tanggung renteng tanpa agunan yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.



Melalui program Mekaar, nasabah menerima manfaat modal finansial melalui pembiayaan tanpa agunan yang diberikan, modal intelektual melalui pelatihan *softskill* dan *hardskill*, serta modal sosial melalui pembinaan jejaring usaha, sinergi bisnis, dan kepedulian sosial.

Mekaar memberikan peminjaman modal serta penanaman nilai penting bagi setiap nasabah untuk jujur dalam melakukan usahanya, disiplin dalam kehadiran di setiap pertemuan dengan kelompok dan juga mengangsur pinjaman serta kerja keras untuk terus mengembangkan usahanya. Program Mekaar dimulai sebagai *pilot project* pada tahun 2015. Sampai dengan tahun 2024, program Mekaar telah menjangkau 14,40 juta nasabah di 36 provinsi, 451 kabupaten/kota, dan 6.165 kecamatan. Selama tahun 2024, telah tersalurkan pembiayaan kepada nasabah Mekaar mencapai Rp 68,2 Triliun dengan pencairan 99,8% secara *cashless*. Hal ini menunjukkan komitmen pemberdaan dan inklusi keuangan melalui Mekaar. Selain itu, sebagai hasil dari sinergi holding ultra mikro terdapat 1,84 juta nasabah telah naik kelas menjadi nasabah Pegadaian dan BRI, 19,07 juta pembukaan rekening simpanan nasabah Mekaar, dan 437,57 ribu nasabah Mekaar menjadi agen BRILink.

G. Kegiatan Usaha Bullion

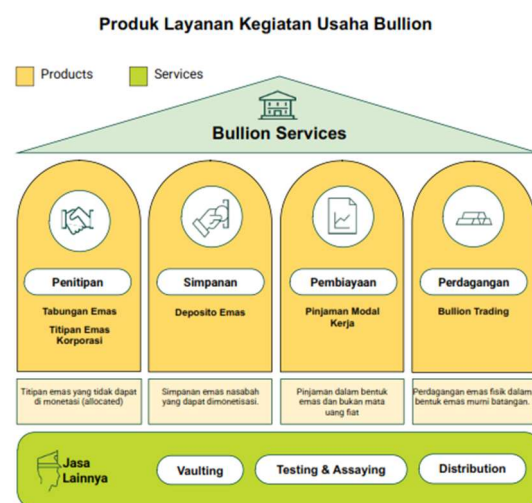
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia. Pada tahun 2022, Indonesia berada di posisi ke-12 sebagai negara penghasil emas terbanyak dengan produksi 70 metrik ton per tahun serta posisi ke-6 sebagai negara dengan pemilik cadangan emas terbanyak di dunia dengan 2.600 metrik ton.

Potensi pengelolaan emas di Indonesia masih dapat dioptimalkan terutama emas sebagai instrumen investasi sekaligus menjawab *demand* masyarakat. Pembentukan kegiatan usaha bullion akan menjadi sentra transaksi emas dengan memberikan kesempatan luas bagi publik untuk terjun dalam investasi emas. Selain itu, kegiatan usaha bullion juga akan meningkatkan efisiensi terutama dalam memotong biaya pemurnian emas serta pencetakan emas dalam bentuk batangan. Indonesia selama ini mengirimkan emas ke luar negeri dalam bentuk granula untuk dicetak yang kemudian diimpor kembali dalam bentuk emas cadangan. Jika kegiatan usaha bullion sudah siap dilaksanakan di Indonesia, maka akan adanya efisiensi untuk mendorong industri perhiasan terutama dengan efisiensi biaya karena peleburan dan pemurnian emas akan dilakukan di dalam negeri.

Saat ini, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion. Adapun pada tanggal 18 Oktober 2024 dimana isi dalam peraturan tersebut yaitu:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Kegiatan Usaha
3. Bab III Persyaratan LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bullion
4. Bab IV Persetujuan Izin Kegiatan Usaha Bullion
5. Bab V Pentahapan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bullion
6. Bab VI Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risiko
7. Bab VII Prinsip Kehati-hatian
8. Bab VIII Penerapan APU PPT PPSPM Strategi Anti Fraud, dan Perlindungan Konsumen
9. BAB IX Pelaporan
10. Bab X Ketentuan Peralihan
11. Bab XI Ketentuan Penutup

Setelah penerbitan POJK Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion, PT Pegadaian mendapatkan perizinan menyelenggarakan kegiatan usaha bullion dari OJK yang tertuang dalam Surat OJK Nomor: S-325/PL.-02/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion PT Pegadaian. Surat persetujuan tersebut berisikan bahwa OJK menyetujui penyelenggaraan kegiatan usaha bullion pada PT Pegadaian, mulai dari Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi, dan Perdagangan Emas.



H. BNI Go Global (Serving Diaspora)

Setiap Bank Anggota Himbara harus membangun *distinct core-competence* dan spesialisasi bisnis. Melalui dorongan Kementerian BUMN, BNI beraspirasi untuk membentuk DNA sebagai wholesale bank terkemuka dan berfokus pada bisnis trade & transaction, international banking, dan membangun platform SME inovatif. Strategi BNI tidak lepas dari kontribusi dan arti penting UMKM dalam perekonomian Indonesia, untuk itu, BNI mempunyai fokus strategi dalam mendukung UMKM di Indonesia:

a. UMKM Ekspor dan Diaspora

BNI mendorong pelaku UMKM untuk Go Ekspor

b. Digital Value Chain

BNI fokus untuk meningkatkan bisnis mitra BNI melalui value chain berbasis digital.

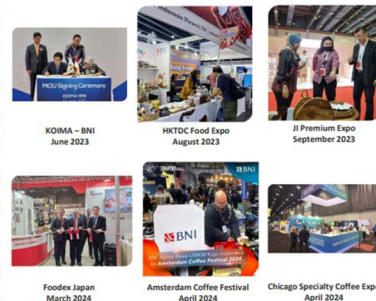
c. Ekosistem Unggulan

BNI fokus untuk pengembangan ekosistem unggulan berbasis digital

1. Business Matching

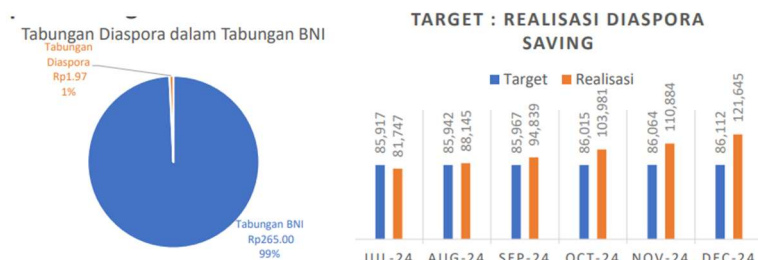
Kantor Pusat BNI berkolaborasi dengan BNI Kantor Cabang Luar Negeri telah mengorganisir 58 *business matching* dan pameran sejak tahun 2022 s.d 2024.

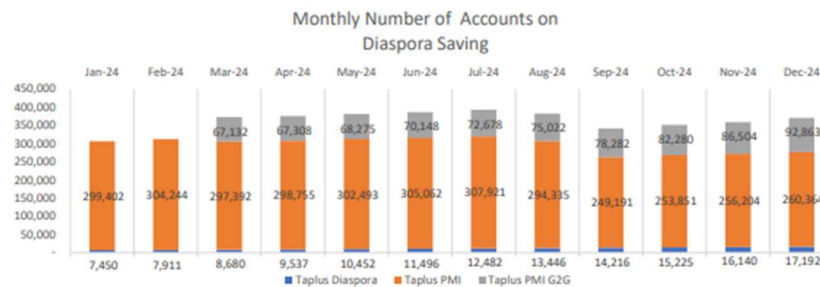
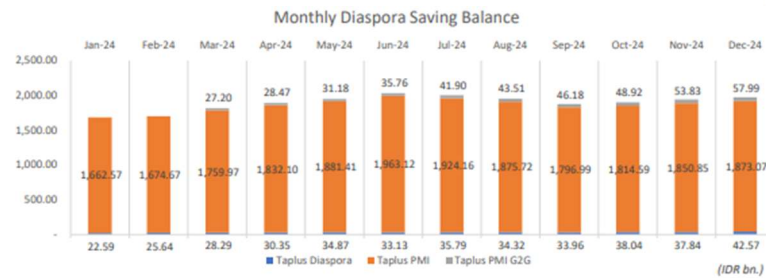
KLN	Event Type	Bizmatch	Supplier	Buyer
Seoul	Online	5	167	96
	Event	6	9	8
New York	Online	8	15	52
	Event	1	20	4
Hong Kong	Online	3	37	42
	Event	8	86	76
Amsterdam	Online	6	12	15
	Event	1	17	1
London	Online	1	24	9
	Event	2	2	184
Tokyo	Online	1	2	77
	Event	5	29	15
Singapore	Online	2	10	6
	Event	1	1	1
All	Online	1	5	2
	Event			10
Grand Total		58	436	588



2. Diaspora Saving

Pada bulan Desember 2024, posisi tabungan diaspora BNI mencapai Rp256 triliun. Tabungan diaspora berkontribusi sebesar 1% (Rp1,97 triliun) terhadap keseluruhan tabungan BNI.





3. Diaspora Loan

Per Desember 2024, terdapat 38 debitur diaspora loan dengan total fasilitas kredit yang diberikan sebesar USD3,7 juta, dan *outstanding loan* USD1,2 juta.

Outstanding Diaspora Loan

		USD	
KLN	Maksimum	Outs. Des 2024	Debitur
HKG	705.466	271.020	7
TKY	264.637	150.432	8
LDN	1.422.150	111.929	10
NYA	935.000	591.376	5
SEO	145.335	16.962	6
SNG	253.864	122.356	2
Total	3.726.542	1.264.076	38

4. BNI Xpora

Xpora yang merupakan akronim dari “Ekspor” dan “Diaspora” adalah sebuah tools dari *one stop shopping solution* BNI untuk UMKM yang ingin mengembangkan bisnisnya menjadi *Go Productive*, *Go Digital*, & *Go Global*, sampai dengan Desember 2022, terdapat 7 *physical hub* di Jakarta, Solo, Denpasar, Surabaya, Medan, & Makassar, dengan digital platform pada [Xpora.bni.co.id](https://xpora.bni.co.id).

a) Go Productive

Solusi yang diberikan oleh BNI untuk meningkatkan kapabilitas UKM UMKM melalui program edukasi, pendampingan, dan konsultasi bisnis yang cepat dan berkualitas.

b) Go Digital

Solusi terintegrasi yang diberikan oleh BNI untuk UKM UMKM agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan usaha melalui solusi berbasis digital dan kerja sama dengan para partner terpercaya.

c) Go Global

Solusi yang diberikan BNI untuk UKM UMKM agar dapat mengakses informasi dan peluang pasar yang lebih luas melalui program optimalisasi Kantor Cabang Luar Negeri BNI, B2B matchmaking, dan pameran produk ke skala internasional.



Xpora merupakan orkestrator ekosistem UMKM yang mempertemukan penjual, pembeli (termasuk Diaspora) dan *enabler* ekspor.

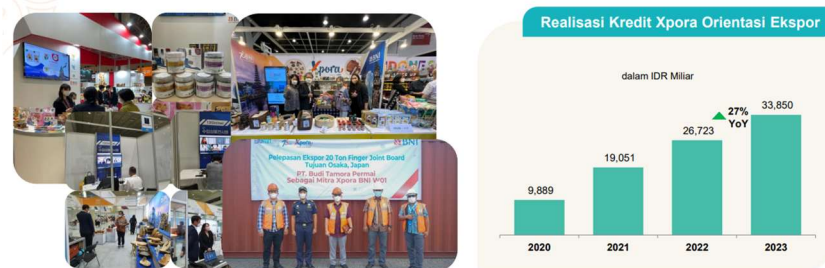


Xpora mengoptimalkan peran KCLN BNI dan Diaspora Indonesia:

- Menciptakan akses untuk eksportir Indonesia ke pembeli luar negeri (*business matchmaking*).
- Menawarkan solusi keuangan ke Diaspora untuk *scale up*.
- Berkolaborasi dengan institusi/ asosiasi untuk mempromosikan produk Indonesia (*spice up the world*).

- d) Memberikan edukasi mengenai market luar negeri, potensi ekspor dan prosedur ekspor di masing-masing wilayah.

Adapun realisasi kredit Xpora orientasi ekspor tumbuh 27% yoy, dari sebelumnya Rp26,7 T pada 2022 menjadi Rp33,6 T pada tahun 2023.



I. Program KPR Bersubsidi BTN

BTN sebagai salah satu BUMN yang fokus terhadap pembiayaan perumahan turut mendukung dan berkomitmen dalam untuk mensukseskan program pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia sejak 1976 sampai dengan saat ini. Pada tahun 2015 BTN diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo dalam mendukung Program Sejuta Rumah sebagai salah satu implementasi dari Nawa Cita ke-5 yaitu menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat.

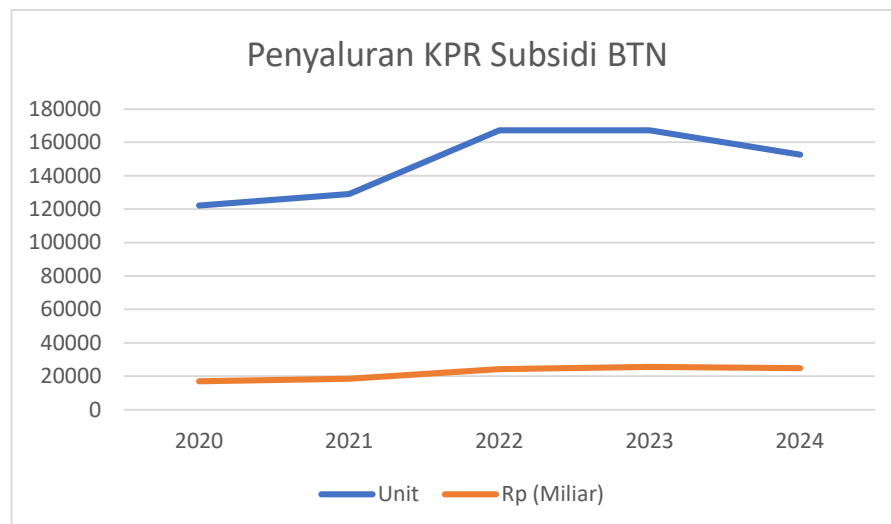
Saat ini BTN merupakan Bank terbesar dalam penyaluran KPR di Indonesia dengan jumlah penyaluran lebih dari 5,2 juta unit rumah sejak tahun 1976 dengan total portofolio *market share* sebesar 85%. Bank BTN telah bekerja sama dengan lebih dari 7.000 mitra developer dan lebih dari 3.000 mitra notaris dalam mendukung program perumahan. Dengan kemampuan Bank BTN yang berperan dalam *supply* dan *demand* ekosistem perumahan, selain memberikan pembiayaan terhadap perumahan, BTN juga mampu berperan aktif dalam aktivitas konstruksi perumahan dengan memberikan pembiayaan konstruksi bagi developer.



BTN berperan sebagai *Enabler & Integrator* dalam ekosistem perumahan, yang menghubungkan berbagai pihak terkait di sektor perumahan. BTN memfasilitasi permintaan rumah melalui subsidi untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dan mekanisme pasar untuk kelas menengah ke atas, bekerja sama dengan pengembang perumahan dan lembaga pembiayaan. BTN juga berkolaborasi dengan industri terkait seperti semen, baja, serta sektor pendidikan dan kesehatan, mendukung kebijakan pemerintah, dan bekerja sama dengan lembaga seperti BP TAPERA dan BP Jamsostek untuk memastikan penyediaan pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.



Adapun realisasi KPR Subsidi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penyaluran KPR Subsidi BTN per 31 Desember 2024 sebesar 152.550 unit dengan total plafond kredit sebesar Rp 24,91 Triliun.



Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024
Unit	122.220	129.056	167.224	167.346	152.550
Rp (Miliar)	17.063	18.409	24.332	25.639	24.912

6) Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media

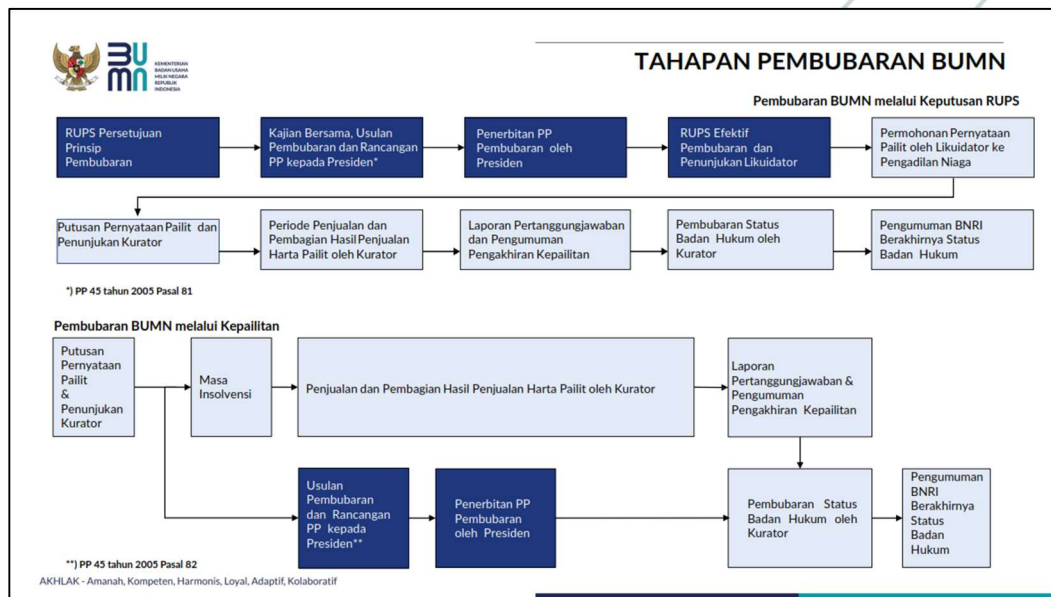
A. Pembubaran BUMN

Pembubaran BUMN merupakan langkah strategis yang dilakukan sesuai dengan Arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Internal Pembentukan Holding Danareksa – PPA pada tanggal 8 maret 2021 dan Rapat Koordinasi Kementerian BUMN pada tanggal 14 Oktober 2021. Presiden menyampaikan bahwa BUMN yang mengalami kinerja operasional dan keuangan yang buruk untuk segera dilakukan penutupan. Selanjutnya, PPA selaku pemegang Surat Kuasa Khusus dari Menteri BUMN melakukan kajian terkait rencana pembubaran 7 BUMN (PT Industri Sangan Nusantara (Persero) / “PT ISN”, PT Industri Gelas (Persero) / “PT IGLAS”, PT Kertas Kraft Aceh (Persero) / “PT KKA”, PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) / “PT MNA”, PT Istaka Karya (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) / “PT PANN”). Ke-7 (tujuh) BUMN tersebut akan dibubarkan, karena berdasarkan kriteria dan kajian yang telah dilakukan oleh PPA, dari aspek prospek usaha, kemampuan perusahaan, kinerja keuangan, persepsi pasar, dan keunggulan komparatif, BUMN tersebut tidak bisa lagi dipertahankan.

Dalam proses pembubaran BUMN, tahapan pembubarannya untuk ke-7 BUMN tidak semuanya sama. Terdapat 6 kategorisasi BUMN dapat dibubarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 142 ayat (1), yang menyatakan:

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi karena:
 - a. **berdasarkan keputusan RUPS;**
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. **karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau**
 - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini merupakan tahapan pembubaran BUMN:



Hingga pada akhir tahun 2023, telah terbit 6 PP Pembubaran, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Gelas.

Untuk *progress* Pembubaran PT PANN (Persero), pada tanggal 28 November 2023 telah dilaksanakan rapat harmonisasi pembubaran. Selanjutnya, Kementerian Sekretariat Negara melalui Surat Nomor B-105/M/D-1/HK02.02/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 hal Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional menyampaikan bahwa perlu adanya perbaikan uraian pada Kajian Bersama Pembubaran serta pembahasan bersama dengan BLU PPK Kemayoran perihal perjanjian kesepakatan penyelesaian atas kepemilikan lahan PT PANN di Komplek Kemayoran. Adapun *output* dari tindak lanjut atas hal tersebut yakni Berita Acara Kesepakatan Bersama antara BLU PPK Kemayoran dengan PT PANN (Persero) tanggal 18 April 2024, diikuti dengan penyampaian kembali

permohonan penetapan Presiden atas RPP tentang Pembubaran PT PANN oleh Menteri BUMN kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Surat Nomor S-339/MBU/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 beserta Kajian Bersama yang telah disesuaikan.

PP Pembubaran PT PANN dengan Nomor 45 Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional, adapun tindak lanjut setelah PP Pembubaran terbit adalah pelaksanaan RUPSLB atau RUPS Definitif Pembubaran PT PANN yang menjadi program kerja Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media pada tahun 2025.

B. Peluncuran Aplikasi SPBE Prioritas

Menunjuk pada Arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi pada 12 Juni 2023 tentang **birokrasi yang berdampak**, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, tetapi birokrasi harus lincah dan cepat. Dengan demikian dibutuhkan digitalisasi berbasis arsitektur untuk menjadi pilar bagi program reformasi birokrasi tematik yang berdampak luas bagi masyarakat. Kondisi saat ini, Pemerintah Republik Indonesia sedang melakukan penyusunan rancangan Perpres Penugasan Perum Peruri sebagai Penyelenggara Aplikasi SPBE sebagaimana Surat Menteri PanRB Nomor: B/424/M.KT.03/2023 yang mencakup perancangan solusi tepat guna, perencanaan, pendanaan, Pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, pengakhiran, keamanan, dan pengelolaan infrastruktur pendukung. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan pengesahan Peraturan Presiden tentang Percepatan Transformasi Digital untuk Mencapai Keterpaduaan Layanan Digital Nasional dan Penugasan kepada Perum Peruri sebagai Penyelenggara Aplikasi SPBE.

Dalam rangka mewujudkan Penugasan Khusus Perum Peruri sebagai Penyelenggara Aplikasi SPBE agar dapat terimplementasi sesuai dengan tata Kelola Perusahaan yang baik dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, maka diperlukan perencanaan dan dukungan optimal baik dari Pemerintah, Kementerian, Lembaga serta seluruh *stakeholder* yang terlibat.

Untuk memastikan pemenuhan penugasan Perum Peruri sebagai penyelenggara SPBE, maka dibuatlah milestone pelaksanaan penugasan SPBE, yang secara umum tersaji sebagai berikut:

1. Mempersiapkan segala kebutuhan dalam memastikan pelaksanaan penugasan SPBE terlaksana (infrastruktur, sistem, SDM, organisasi, finansial, dan aspek lainnya yang dibutuhkan);
2. Menyediakan Layanan Digital Nasional (*GovTech*) yang inklusif berbasis *citizen centric*, berbasis *outcome*;
3. Memastikan layanan yang berkualitas dan terpercaya serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam penyelenggaraan SPBE;
4. Sinkronisasi *roadmap* dan pengelolaan teknologi informasi perusahaan dengan kebutuhan bisnis;
5. *Monitoring*, evaluasi, serta memastikan pelaksanaan penugasan SPBE terlaksana sesuai dengan *output* yang diharapkan

Hingga akhir tahun 2023, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional tanggal 18 Desember 2023. Dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut, diharapkan ini akan mewujudkan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional Pemerintahan Indonesia melalui penugasan kepada Peruri untuk penyelenggaraan Aplikasi Prioritas di-9 K/L antara lain sebagai berikut:



Adapun inti dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tersebut adalah agar Peruri dapat mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas di 9 K/L, Pendalaman kebutuhan pengguna SPBE, dan Perancangan Solusi Tepat Guna (STG) yang direncanakan agar penyusunan perjanjian

kerjasama STG pertama kali dilakukan dengan Kemenpan-RB sebagai *pilot project* untuk perjanjian kerjasama di K/L lainnya.

Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023, ayat 4 dan ayat 5 pasal 2, disampaikan bahwa Aplikasi SPBE Prioritas diintegrasikan dan diluncurkan secara terpadu untuk pertama kalinya paling lambat pada **Triwulan III Tahun 2024**. Dimana terhadap 9 Aplikasi Prioritas tersebut telah dilaksanakan SPBE Summit dan Peluncuran Govtech Indonesia pada tanggal 27 Mei 2024 termasuk penandatanganan komitmen 9 layanan SPBE Prioritas pada K/L Kemdikbud, Kemenkes, Kepolisian RI, Kemensos, Kemenpan RB, Kemdagri, Kemenkeu, Bappenas, dan Kemkominfo.

Pada Tanggal 30 September 2024, telah dilakukan Rilis Terbatas Tahap Pertama produk INA DIGITAL sebagai langkah awal dalam integrasi layanan digital pemerintah. Rilis ini bertujuan untuk memperoleh masukan guna pengembangan lebih lanjut dalam menyediakan layanan yang lebih efisien dan praktis bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam tahap ini, terdapat tiga produk utama yang diperkenalkan, yaitu:

- INApas: Layanan identitas digital terpadu yang memungkinkan akses mudah ke berbagai layanan digital pemerintah.
- INAku: Portal pelayanan publik yang menyediakan akses ke berbagai layanan digital pemerintah dengan lebih praktis.
- INAgov: Portal administrasi pemerintahan yang memberikan kemudahan bagi ASN dalam mengakses layanan administrasi pemerintahan.

Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama INA Digital menggelar Rilis Terbatas Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas sebagai Pengembangan lanjutan dari Rilis Terbatas Tahap Pertama. Dimana pengembangan lanjutan ini dilakukan untuk memastikan perbaikan dan penyempurnaan, dengan memperhatikan masukan yang diperoleh dari peluncuran terbatas Tahap I.

C. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)

Dilatarbelakangi dengan adanya 33 (tiga puluh tiga) perusahaan China yang merelokasi pabrik ke beberapa negara Asia Tenggara, namun tidak ada satupun yang pindah untuk berinvestasi di Indonesia sehingga perlu dilakukan pengembangan Kawasan Industri yang menarik dan ramah investasi, Presiden RI tanggal 30 Juni 2020 melakukan Kunjungan Kerja Presiden RI di Lokasi Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (lahan milik PTPN) pada

tanggal 30 Juni 2020, dengan amanat bahwa pembangunan kawasan di Batang ini akan menampung relokasi investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, serta mengembangkan industri padat karya, beorientasi ekspor, dan lebih kompetitif.

KITB dibangun dengan mengusung konsep pembangunan kawasan yang ramah lingkungan, modern, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan. KITB memiliki luas lahan sebesar 4.300 Ha dengan tahap pengembangan terdiri atas 3 Klaster, yaitu Klaster I seluas 3.100 Ha (Fase 1 seluas 450 Ha dan Fase 2 seluas 2.650 Ha), Klaster II seluas 800 Ha, dan Klaster III seluas 400 Ha (sumber dana: APBN dan non-APBN). Status lahan HPL milik PTPN dengan skema kerjasama pemanfaatan lahan antara PT KITB (sebagai pengelola Kawasan) dan PTPN (sebagai pemilik lahan). Pengelolaan dilakukan oleh PT KITB (Konsorsium BUMN dan Perusda Batang dengan kepemilikan mayoritas Pemegang Saham oleh PT KIW (Ex BUMN/Anper Danareksa) pasca PMN TA 2021 Rp977M (yang diterima PT KIW sebagaimana PP 88 Tahun 2021, yang kemudian diteruskan kepada PT KITB untuk mendukung pengembangan dan pembangunan KIT Batang pada Fase 1).

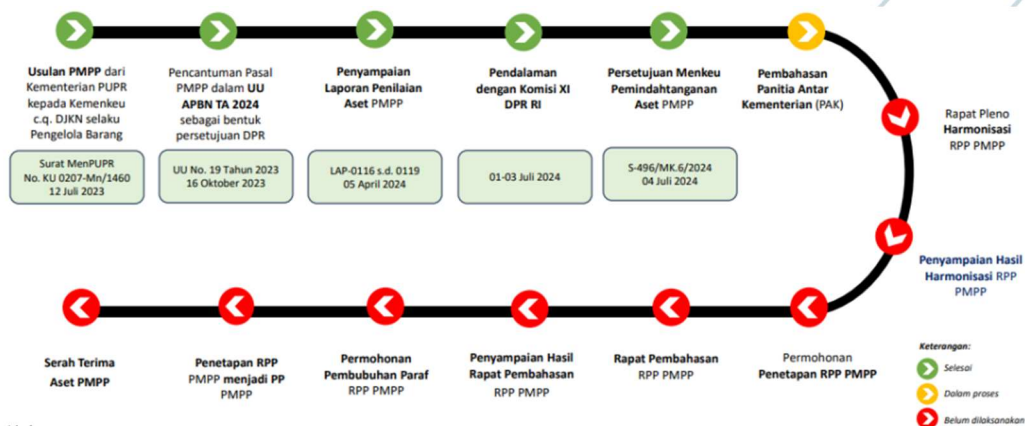
Progres fisik pengembangan Fase 1 (450Ha) secara keseluruhan mencapai 99,99%, dengan penyerapan dana PMN TA 2021 sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 secara keseluruhan sebesar Rp809,57 Miliar atau 82,86%. Dana PMN yang belum terserap sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp167,43 Miliar atau 17,14% (dimana saat ini masih terdapat *finishing* pekerjaan infrastruktur kawasan).

Dalam proses pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, terdapat aset yang dibangun oleh Kementerian PUPR (sekarang Kementerian Pekerjaan Umum) yang akan dijadikan Penyertaan Modal Non Tunai kepada PT Danareksa (Persero) dengan nilai wajar (hasil penilaian Kemenkeu) sebesar Rp3.020.544.838.000, dengan aset meliputi:



Terhadap rencana skema inbreng Aset BMN PUPR kepada PT Danareksa (Persero) yang akan diteruskan ke KITB akan berdampak pada komposisi kepemilikan PT KITB pasca terjadinya PMN Non Tunai. Dengan adanya penerusan PMN Non Tunai dari Pemerintah ke Danareksa, maka kepemilikan pemerintah pada PT Danareksa (Persero) akan meningkat, untuk selanjutnya Ketika Danareksa meneruskan aset BMN dari Inbreng akan berdampak pada kepemilikan saham PT Danareksa pada KITB. KITB yang sebelumnya merupakan anak Perusahaan PT Kawasan Industri Wijayakusuma akan menjadi anak Perusahaan PT Danareksa (Persero) dengan komposisi kepemilikan saham PT Danareksa (Persero) pada PT KITB sebesar 75,84%.

Berikut disampaikan *progress* dan *timeline* pelaksanaan penyertaan modal negara non tunai (PMPP) berupa BMN yang dibangun KemenPUPR di KITB:



Notes:

- Sudah dilakukan PAK I tanggal 19 Juli 2024
- Selanjutnya PAK II tanggal 2 September 2024
- Pembahasan Lanjutan – Draft Kajian Bersama (dengan DJKN dan KPUPR) tanggal 23 September 2024
- PAK III tanggal 22 Oktober 2024
- PAK IV tanggal 7 November 2024
- PAK V tanggal 9 Desember 2024
- Rapat Lanjutan tanggal 12 Desember 2024 - Pembahasan Persetujuan Pemindahtanganan BMN dari Kementerian PUPR kepada PT Danareksa (Persero)

Sampai dengan saat ini, telah dilaksanakan Rapat Pleno Harmonisasi RPP PMPP terakhir pada tanggal 2 Januari 2025, untuk selanjutnya akan dimohonkan penetapan kepada Presiden.

D. Repurposing BUMN untuk Ketahanan Pangan dan Energi Nasional

Selaras dengan Asta Cita yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional di dalam draft awal RPJMN Tahun 2025-2029, dimana dalam pidato presiden dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR-DPR-DPR RI menekankan tiga hal yaitu, Swasembada Pangan, Swasembada Energi dan Penyalursn Subsidi Tepat, Hilirisasi Komoditas, dan Pemberantasan Korupsi. BUMN Pangan saat ini (ID Food, Bulog, dan PTPN) telah banyak berperan baik dalam proses penciptaan produk ataupun layanan dalam rantai nilai industri pangan di Indonesia, namun sebagai akseleran penguatan ketahanan pangan kedepan dibutuhkan BUMN Pangan yang *agile* sebagai akseleran penguatan ketahanan pangan Indonesia yang utamanya, Berada dalam kondisi sehat secara keuangan (tidak terdapat isu terkait likuiditas atau solvabilitas); Tidak terdapat isu hukum atau dalam proses litigasi dan; Tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga (kreditur) yang berpotensi memunculkan adanya tuntutan hukum, baik perbankan, supplier, SDM, dll.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah ditetapkan pembentukan BUMN subsektor perikanan, pangan, dan perkebunan dengan melakukan *repurpose* BUMN Konsultan Karya (Yodya Karya, Virama Karya, dan Indra Karya) dengan tetap mempertahankan bisnis jasa konsultan konstruksi. Berikut merupakan arah *repurposing* BUMN Konsultan Karya:

 YODYA KARYA	Pangan PT Agroindustri Nasional Pangan (Persero) bertransformasi menjadi perusahaan yang bergerak di bidang bisnis pertanian, <i>integrated farming</i>, dan kegiatan optimalisasi lahan penunjang pertanian
 VIRAMA	Perikanan PT Agroindustri Nasional Jaladri (Persero) bertransformasi menjadi perusahaan yang bergerak di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan <i>cold storage</i>.
 INDRA KARYA	Perkebunan & Energi PT Agroindustri Nasional Palma (Persero) bertransformasi menjadi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan produk turunan termasuk minyak kelapa sawit ataupun bahan baku biofuel lainnya.

Proses pembentukan BUMN Sektor Ketahanan pangan berpotensi memberikan manfaat yang substansial bagi Indonesia, antara lain:

a. Bagi Pemerintah:

- Membantu mengurangi ketergantungan pada bahan pangan termasuk beras, ikan dan sapi. Hal ini sangat penting untuk stabilitas pasokan pangan dalam negeri
- Dampak dari kurangnya ketergantungan bahan pangan yang berasal dari impor serta peningkatan devisa dari ekspor pangan dan energi selama kebutuhan dalam negeri tercukupi memberi dampak positif bagi keuangan negara terutama pada peningkatan neraca perdagangan
- Pemerataan Infrastruktur yang lebih baik dengan terbentuknya simpulsimpul ekonomi untuk pembudidayaan dan distribusi ikan, sapi dan juga produksi beras akan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

b. Bagi Masyarakat

- Ketahanan pangan memastikan akses masyarakat terhadap makanan yang cukup, bergizi, dan aman, sehingga meningkatkan kesejahteraan serta mencegah masalah gizi buruk

- Menciptakan ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
- Menjaga stabilitas sosial dan politik, serta mengurangi risiko konflik akibat kelangkaan. Dalam situasi darurat seperti bencana alam, pandemi, atau krisis ekonomi, ketahanan pangan memastikan masyarakat memiliki stok pangan yang cukup

c. Bagi Ekosistem Industri

- Menjadikan industri konsultan karya lebih terdiversifikasi, memberikan peluang yang setara bagi seluruh pelaku di sektor ini.
- New market untuk CM & QA infrastruktur pangan akan terbuka, menciptakan ruang bagi konsultan karya yang selama ini fokus pada sektor infrastruktur umum.
- Kehadiran BUMN berfokus pada ketahanan pangan akan membentuk ekosistem ketahanan pangan yang mendorong perkembangan teknologi, industri, dan sektor.

Adapun dalam pelaksanaan repurposing BUMN Konsultan Karya akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap 1 : Perluasan Usaha yaitu dengan (Penerbitan Perubahan Peraturan Presiden untuk perubahan nama Perusahaan dan perubahan anggaran dasar) dan Tahap 2 : Transformasi Struktur Perusahaan.

Saat ini, PP Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang pengalihan bentuk Perusahaan Negara Yodya, Virama, dan Indra telah terbit. Berikut disampaikan dokumen dan progress pelaksanaan *repurposing* BUMN Konsultan Karya sampai dengan terbit PP:

- Penyampaian Surat Menteri BUMN Nomor : S-578/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024 kepada Direksi PT Danareksa (Persero) perihal Pencabutan Surat Kuasa Khusus PT Indra Karya (Persero), PT Virama Karya (Persero) dan PT Yodya Karya (Persero)
- Penyampaian Surat Menteri BUMN Nomor : S-579/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024 kepada Direksi PT Brantas Abipraya (Persero), Direksi PT Yodya Karya, Virama Karya dan Yodya Karya perihal Rencana Perubahan Bisnis PT Indra Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero) dan PT Virama Karya (Persero)
- Penyampaian Surat Menteri BUMN Nomor : SR-580/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024 kepada Mensetneg, Menteri Keuangan, dan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum perihal Rencana Perubahan Bisnis PT Indra Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), dan PT Virama Karya (Persero)

- Penyampaian Surat Menteri BUMN Nomor : S-596/MBU/11/2024, tanggal 20 November 2024 kepada Presiden RI perihal Permohonan Izin Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (RPP)
- Penyampaian Surat Menteri BUMN Nomor : S-597/MBU/11/2024 tanggal 20 November 2024 kepada Presiden RI perihal Permohonan Izin Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Virama Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (RPP)
- Penyampaian Surat Menteri BUMN Nomor : S-598/MBU/11/2024 tanggal 20 November 2024 kepada Presiden RI perihal Permohonan Izin Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (RPP)
- Menteri PUPR telah menyampaikan surat Nomor BK 0201-Mn/1147 tanggal 29 November 2024 hal Tanggapan atas Rencana Perubahan Bisnis PT Indra Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero) dan PT Virama Karya (Persero), yang pada intinya menyampaikan persetujuan rencana transformasi BUMN non pangan untuk menjadi BUMN Pangan dalam mendukung program prioritas Presiden RI.
- Terhadap Surat Permohonan Izin Prakarsa tersebut, Menteri Sekretaris Negara juga telah menyetujui Izin Prakarsa untuk PT Yodya Karya, PT Virama Karya dan Indra Karya melalui suratnya Nomor B-633/M/D-1/HK.02.02/12/2024; B-632/M/D-1/HK.02.02/12/2024; dan B-631/M/D-1/HK.02.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada intinya menyetujui proses penyusunan RPP dimana penyusunan tersebut harus diselesaikan pada tahun 2024.
- Penyampaian Surat Menteri BUMN Nomor S-661, S-662, dan S-663/MBU/DHK/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 Hal Permintaan Usulan Nama Pejabat/Pegawai dalam Keanggotaan PAK Penyusunan RPP tentang Perubahan PP Pendirian PT Virama Karya, PT Indra Karya, dan PT Yodya Karya

- Pembentukan PAK sesuai SK Menteri BUMN Nomor : SK-292, SK-293, dan SK-294 tanggal 6 Desember 2024 untuk PAK Indra, Yodya dan Virama Karya.
- Pelaksanaan PAK tanggal 12 dan 16 Desember 2024
- Pelaksanaan Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Virama Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 20 Desember 2024.
- Penyampaian Hasil Harmonisasi RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Virama Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dari Menteri Hukum tanggal 23 Desember 2024
- Penyampaian Surat Menteri BUMN nomor S-664, S-665, dan S-666/MBU/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 hal Permohonan Penetapan Presiden atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah atas PP Pendirian Virama, Yodya dan Indra Karya.
- Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menkeu Nomor: B-694/M/D-1/HK.02.02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Permintaan Paraf pada Naskah RPP tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Virama Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor : S-24/MK.06/2025 tanggal 13 Januari 2025 hal Penyampaian Paraf pada Naskah RPP Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah PT Virama Karya, Yodya Karya, dan Indra Karya (Persero)

- Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Virama Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 16 Januari 2025
- Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 16 Januari 2025
- Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 16 Januari 2025.

7) **Klaster Industri Energi, Minyak dan Gas**

A. Proyek Jambaran Tiung Biru

Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran – Tiung Biru merupakan Proyek Strategis Nasional dengan maksud mampu menghasilkan gas terbesar di Indonesia. Proyek ini berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan merupakan proyek Hulu Migas yang dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero). Proyek ini menghasilkan produksi gas dan kondensat yang berasal dari Unitisasi Jambaran Tiung Biru yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan gas pembangkit listrik PT PLN dan menjamin ketersediaan pasokan gas (*natural gas*) jangka panjang (20 tahun) di Pulau Jawa dengan volume yang cukup besar (s/d 192 MMSCFD) sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang regional dan nasional, terutama terhadap masyarakat dan industri dalam negeri. Produksi *raw gas* rata-rata yang dihasilkan yaitu sebesar 315 MMSCFD dengan impurities H₂S CO₂, serta sales gas sebesar 172 MMSCFD dengan potensi pertambahan sales gas sebesar 20 MMSCFD. Proyek ini telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada 8 Februari 2023. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan progres penyelesaian aspek teknis sisa pekerjaan dan kontraktual. Proyek ini diharapkan akan mampu memberikan ketersediaan gas yang sangat besar di Pulau Jawa dan meningkatkan perekonomian masyarakat secara regional maupun nasional.

B. Proyek Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)

Proyek Kilang Minyak Tuban atau *Grass Root Refinery* (GRR) Tuban merupakan program yang dikelola oleh PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PT PRPP) sebagai perusahaan *Joint Venture* antara PT Pertamina (Persero)

melalui PT Kilang Pertamina Indonesia (PT KPI) dan Rosneft Singapore Pte Ltd untuk mengembangkan *Grass Root Refinery* Tuban dan *petrochemical complex* yang terintegrasi dengan kapasitas pengolahan *crude* sebesar 300 KBPD dan *Olefin Cracker* kapasitas 1000 KTPA dengan output produk minimum setara spesifikasi Euro IV.

Seiring dengan semakin bertumbuhnya ekonomi nasional, kebutuhan atas Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik juga semakin meningkat dan produksi dari kilang-kilang yang dimiliki saat ini, tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Proyek ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompleksitas dan fleksibilitas kilang untuk menghasilkan lebih banyak *high valuable product*, sehingga dapat meningkatkan produksi BBM dalam negeri dan Menurunkan impor produk BBM dan Petrokimia sebagai upaya pencapaian ketahanan energi termasuk untuk memperkuat industri petrokimia Indonesia.

Hingga akhir 2024, beberapa kegiatan yang telah diselesaikan antara lain *Front End Engineering Design* (FEED), *Land Clearing* tahap 4, *Land Acquisition*, *Site Development* lahan relokasi warga, pengadaan *Financial Advisor*, *Pra Qualification Engineering*, *Procurement and Construction* (PQ EPC) dan pengadaan tanah seluas 221,17 Ha untuk relokasi Jalan Kabupaten & SUTT. Sedangkan kegiatan yang masih berprogres antara lain proses perhitungan keekonomian oleh *Financial Advisor*, *EPC Site Development* (pra-EPC), *bidding* kontraktor EPC dan *Final Investment Decision* (FID). Proyek yang berlokasi di Tuban, Provinsi Jawa Timur ini memiliki *Capex* sebesar USD23,46 miliar dan ditargetkan akan *on stream* pada akhir 2030 mendatang. Diharapkan dengan selesainya proyek ini dapat menjadi jawaban atas isu pemenuhan energi nasional.

C. Proyek RDMP RU II Dumai

Proyek RDMP RU II Dumai terletak di Provinsi Riau dengan *Capex* sebesar USD877,16 juta dan lingkup proyek sebagai berikut:

1. *Inside Battery Limit* (ISBL)
 - a) *New Unit*: Pembangunan *Crude Distillation Unit* (CDU) kapasitas 150 ribu BOPD, *Vacuum Distillation Unit* (VDU) kapasitas 68 ribu BPD, *Naphta Hydrotreating* (NHT) *Unit* kapasitas 47 ribu BPD, *Diesel Hydrotreating* (DHT) *Unit* kapasitas 136 ribu BPD, *Isomerization Unit* kapasitas 22 ribu BPD, *Platforming* kapasitas 26 ribu BPD, *Vacuum Residual Hydrodesulfurization* (VRHDS) kapasitas 36 ribu BPD, *Residue Fluid Catalytic Cracking* (RFCC) kapasitas 38 ribu BPD, *Polypropylene* (PP) *Plant* kapasitas 74 KTPA dan *Gasoline Hydrodesulfurization* (GSH)

kapasitas 22 ribu BPD, *Alkylation* unit kapasitas 6 ribu BPD, *Hydrogen Plant* kapasitas 175 ribu Nm³/h.

- b) *Revamping Unit*: CDU I dari 127 ribu BOPD menjadi 150 ribu BOPD, HCU *Train I* dari 32 ribu BPD menjadi 33 ribu BPD, HCU *Train II* dari 32 ribu BPD menjadi 40 ribu BPD.

2. *Outside Battery Limit* (OSBL) yaitu *Offsite* dan *Utilities Facilities*, antara lain *instrument air*, *plant air*, *cooling water*, *DM water*, *steam*, *power*, *fuel gas*.

Hingga akhir 2024, progres RDMP RU II Dumai yaitu *Final Bankable Feasibility Study* (BFS) *Report* oleh konsultan telah selesai pada 26 Juli 2024, telah dilakukan pemaparan *Joint Steering Committee* pada 11 Desember 2024 dan disepakati berdasarkan hasil BFS bahwa *project* tidak *feasible*. *Joint Study Agreement* berakhir pada 31 Desember 2024. Namun, manajemen saat ini melakukan proses usulan penyesuaian ruang lingkup RDMP RU II Dumai menjadi lingkup *New Diesel Hydrotreating* (DHT) melalui penyesuaian peraturan penugasan dan sedang *on progress* kajian terkait perubahan lingkup tersebut.

D. Proyek RDMP RU III Plaju

Proyek RDMP RU III Plaju terletak di Provinsi Sumatera Selatan dengan *Capex* sebesar USD332,56 juta dan lingkup proyek pada tahun 2024 merupakan usulan *rescoping Gasoline Selective Hydrotreating* (GSH) sebagai berikut:

1. EPC Lingkup *New GSH*: merupakan satu *New GSH* dengan kapasitas 13 ribu BPD untuk mengolah *untreated gasoline* menjadi *gasoline* setara Euro IV (*Low Sulfur* hingga 50 ppm-wt) yang terdiri dari *Feed Preparation System*, *Reactor System*, dan *Fractionation System*.
2. EPC Lingkup *New Hydrogen Manufacturing Unit* (HMU): untuk memproduksi hidrogen dari natural gas yang digunakan sebagai *feed* pada unit *New GSH*.
3. EPC Lingkup *Utilities Facilities*: mencakup satu unit *flare* di *offsite* sebagai *emergency unit* jika terdapat insiden *flaring* ataupun *Pressure Safety Valve* (PSV) *release*. *Flare package* yang akan dibangun mengakomodasi 205.727 kg/h *flare gas*. Juga penambahan *Cooling Water Pump* yang merupakan satu unit utilitas tambahan dengan flowrate 446,94 m³/h vs design 536,328 m³/h.

Hingga akhir 2024, progres RDMP RU III Plaju yaitu *on progress* Re-BEDP dalam rangka optimasi konfigurasi & *Capex*, saat ini manajemen dalam proses usulan penyesuaian lingkup RDMP RU III Plaju menjadi Lingkup Pembangunan *New GSH* melalui penyesuaian Kepmen Penugasan.

E. Proyek RDMP RU IV Cilacap

Proyek RDMP RU II Dumai terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan *Capex* sebesar USD939,93 juta dan lingkup proyek pada tahun 2024 merupakan usulan *rescoping* DHT sebagai berikut:

1. Tahap 1

- a. Unit *New DHT*: kapasitas 1 x 50 ribu BPD, *HMU* dengan kapasitas 1 x 19.000 Nm³/hr, *New Sour Water Treatment Unit* (*New SWS*) dengan kapasitas 1 x 18,1 m³/hr, *New Amine Regeneration Unit* (*ARU*) dengan kapasitas 1 x 93,5 Ton/hr.
- b. EPC Lingkup *Utilities*: *Waste Water Treatment Plant* (*WWTP*), *electricity supply* (pasokan listrik), *fresh water*, *nitrogen system*, *steam generation unit*, *demineralized water system*, *cooling water system*, *instrument air package*, *fuel gas system*.

2. Tahap 2

- a. *Revamp AH Unibon 2nd Stage* menjadi kapasitas 23 ribu bpd untuk meningkatkan kualitas produk *diesel/gasoil* dari kandungan sulfur lebih dari 2500 ppm menjadi 10 ppm. Unit AH Unibon sebelumnya telah berhenti beroperasi sejak tahun 2001.
- b. *New Sulfur Recovery Unit* (*SRU*) kapasitas sebesar 38 TPD untuk mengurangi emisi sulfur dalam gas yang akan mengolah sour gas yang dihasilkan dari *ARU* dan *SWS* pada Tahap 1 melalui proses *Claus Reaction*.
- c. Fasilitas Penghunung (*Tie-in*): fasilitas penghubung antara unit baru dan unit eksisting di kilang RU IV.
- d. *Utilities* dan Fasilitas Pendukung dari fasilitas *New DHT* Tahap 1.

Hingga akhir 2024, progres RDMP RU IV Cilacap yaitu *on progress* proses pencarian *strategic partner*, optimasi konfigurasi dan *Capex*, *bidding* EPC dan pengajuan FID, serta telah selesai untuk *early work* penghijauan dan *phase 3* lingkup pemagaran. Saat ini manajemen dalam proses usulan penyesuaian lingkup RDMP RU IV Cilacap melalui penyesuaian Kepmen Penugasan.

F. Proyek RDMP RU V Balikpapan

Proyek RDMP RU II Dumai terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan *Capex* sebesar USD7,46 miliar dan lingkup proyek sesuai dengan penugasan sebagai berikut:

1. Penambahan kapasitas kilang dari semula sebesar 260.000 BOPD menjadi sebesar 360.000 BOPD.

2. Peningkatan jenis dan jumlah produk kilang minyak berupa bahan bakar minyak jenis bensin dengan produksi dari semula sebesar 40.000 BPD menjadi 133.000 BPD.
3. Peningkatan jenis dan jumlah produk kilang minyak berupa bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan produksi dari semula sebesar 93.000 BPD menjadi 172.000 BPD.

Sedangkan lingkup proyek RDMP RU V Balikpapan dengan pelaksana PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) meliputi pembangunan:

1. ISBL yaitu *Revamp* dan *New Unit*.
2. OSBL yaitu *offsite* dan *utilities facilities*.
3. *Single Point Mooring* (SPM) dan tangka baru Lawe-Lawe.
4. Fasilitas pendukung lainnya, antara lain *workshop*, laboratorium dan *warehouse*.

Hingga akhir 2024, progres RDMP RU V Balikpapan yaitu *on progress* EPC ISBL-OSBL sebesar 97,96%, EPC Lawe-Lawe telah selesai 100%, serta *project financing* (scope PT KPB) telah selesai dan saat ini *in progress drawdown*.

G. Proyek RDMP Balongan dan Petrochemical Complex Jabar

Proyek RDMP RU II Dumai terletak di Provinsi Jawa Barat dengan *Capex* sebesar USD467,18 miliar dan lingkup proyek sebagai berikut:

1. *Revamping Crude Distillation Unit* (CDU) dari kapasitas 125 ribu BOPD menjadi 150 ribu BOPD ("Fase I").
2. Penambahan unit (*New Atmospheric Residue Hydro Demetallization* (ARHDM), DHT, *Naphtha Desulfurizer*, *Alkylation*, *Hydrogen Plant Unit* (HPU), *Sulfur Recovery Unit* (SRU)) dan *revamping unit secondary process* (ARDHM *existing*) serta pembangunan *Polypropylene Plant* ("Fase II").
3. Saat ini lingkup fase II diusulkan *rescoping* menjadi pembangunan *unit Treating New Gasoline Sulfur Hydrotreater* (*New GSH*) dengan kapasitas 53 ribu BPD dalam rangka meningkatkan kualitas produk BBM minimum setara standar Euri IV. Selain itu, *New Polypropylene Plant* menjadi proyek yang akan direncanakan oleh PT Polytama. Sehingga lingkup Fase III/ Petrochemical Complex Jabar yaitu pembangunan kilang minyak baru (*New CDU*, *New RFCC*, *New DHT*) dengan kapasitas 250 ribu BOPD yang terintegrasi dengan kompleks petrokimia (*Integrated Refinery and Petrochemical Complex/IRPC*).

Hingga akhir 2024, progres RDMP RU VI Balongan sebagai berikut:

1. Fase I: telah selesai 100% dengan *Operational Acceptance* (OA) pada 5 April 2024, dan *Final Acceptance* (FA) pada 30 Juni 2024.

2. Fase II: saat ini manajemen dalam proses usulan penyesuaian lingkup RDMP RU IV Cilacap melalui penyesuaian Kepmen Penugasan.
3. Fase III/*Petrochemical Complex* Jabar: *on progress* revisit kajian paralel pencarian *partner* dan penyelesaian pengadaan lahan tahap 1 dan pengajuan revisi SK penetapan lokasi tahap 2.

H. Proyek Kontruksi Tangki Penyimpanan BBM

PT Pertamina (Persero) ditugaskan untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian tangki penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pembangunan Tangki atau storage BBM ini di wilayah Indonesia Timur dilaksanakan dalam upaya perwujudan ketahanan energi dan akses yang lebih baik bagi masyarakat sekitar. PT Pertamina (Persero) melalui proyek ini berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat sebagai bentuk penguatan atas rantai distribusi dan pemerataan energi di seluruh pelosok negeri. PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) telah berhasil membangun dan mengoperasikan 13 tangki dari 14 tangki yang ditugaskan oleh Pemerintah, dengan kapasitas penyimpanan yang beragam, yaitu antara 500 Kilo Liter (KL) hingga 20.000 KL. Nilai *Capex* untuk 14 tangka sebesar USD76,75 juta.

Pada tahun 2024, PT Pertamina berupaya untuk membangun 1 tangki BBM yang tersisa di Maumere, namun dalam perjalanannya PT Pertamina merubah *scope* Tangki BBM menjadi *Fuel Terminal* (FT) Meumere dengan lebih ekspansif. *Re-FID* pengembangan FT Maumere telah disetujui pada 19 September 2024. Saat ini dalam proses pengadaan kontraktor EPC. Dan sudah ada Surat dari Menteri ESDM ke Kemenko Perekonomian perihal usulan *take-out* Maumere dari PSN dengan tujuan agar lebih fokus ke pengembangan FT Maumere, dan PSN Tangki BBM selesai dengan 13 tangki.

I. Proyek Konstruksi Tanki Penyimpanan LPG

Sama halnya dengan pembangunan Tanki BBM, pembangunan tangki LPG yang juga berlokasi di Indonesia Timur ini juga dilaksanakan sebagai upaya dalam peningkatan ketahanan energi nasional. Selain juga sebagai penguatan distribusi atas LPG di wilayah Timur Indonesia, pembangunan tangki ini juga dilakukan sebagai dukungan atas program pemerintah agar masyarakat dapat segera beralik dari penggunaan minyak tanah menjadi LPG. PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, dalam hal ini ditugaskan untuk membangun 4 infrastruktur LPG di wilayah Timur Indonesia meliputi terminal LPG dan Jetty (dermaga) di Tenau Kupang – Nusa Tenggara Timur, Bima – Nusa Tenggara Barat, Wayame - Maluku, dan Jayapura – Papua dengan kapasitas yang berbeda-beda. Terminal LPG ini dibangun di dalam area terminal BBM yang telah ada (*existing*) dengan

fasilitas utama yang akan dibangun pada masing-masing lokasi tangki, berupa; tangki spherical sebagai fasilitas penyimpanan utama, fasilitas pengisian LPG ke mobil tangki, serta dermaga untuk penerimaan LPG dari kapal tanker.

Nilai *Capex* pembangunan tangki penyimpanan LPG sebesar USD85,53. Sampai dengan akhir tahun 2024, 3 dari 4 tangki sudah beroperasi dengan progres sebagai berikut:

1. Jayapura 2 x 1.000 MT (*EPC Done* dan sudah beroperasi)
2. Wayame 2 x 1.000 MT (*EPC Done* dan sudah beroperasi)
3. Bima 1 x 1.000 MT (*EPC Done* dan sudah beroperasi)
4. Kupang 2 x 500 MT (progres fisik 92,06%), saat ini proses konstruksi masih berjalan dengan adanya kendala finansial kontraktor.

J. Proyek Pembangunan Jaringan Gas APBN

Jaringan Gas Kota dibangun sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum dalam penyediaan energi yang murah dan terjangkau bagi masyarakat. Pembangunan jaringan gas ini dilakukan oleh PT Pertamina Persero dengan bersinergi dan berafiliasi bersama Anak Perusahaan Pertamina Grup dalam pengembangannya, yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Lokasi pembangunan tersebar, dengan lokasi prioritas a.l DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan, Palembang. Jaringan gas kota ini juga dibangun dengan terlebih dahulu dipenuhinya syarat utama berupa lokasi yang dekat dengan sumber gas/infrastruktur pipa gas, terpenuhinya spesifikasi gas bumi, adanya potensi pasar pengguna, terdapatnya komitmen Pemerintah Daerah, dan terpenuhinya kaidah keselamatan dan keteknikan. Jaringan gas kota dibangun di beberapa titik di Indonesia dengan memprioritaskan sasaran penerima yaitu rumah sederhana, rusun sederhana, dan daerah-daerah yang jauh lebih membutuhkan penghematan.

Jaringan Gas APBN telah selesai dibangun pada tahun 2022 dengan total 703.308 Sambungan Rumah Tangga (SRT). Saat ini PT PGN melakukan ekspansi dengan jaringan gas mandiri (dengan modal PT PGN) sejalan dengan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan gas bumi yang bertujuan sebagai diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih.

K. Proyek Green Refinery RU III Plaju

Proyek *Green Refinery* RU III Plaju terletak di Provinsi Sumatera Selatan dengan *Capex* sebesar USD0,75 miliar dengan lingkup proyek sebagai berikut:

1. Lingkup OSBL yaitu unit proses *Non-Licensed*, yaitu unit proses umum yang tidak melibatkan teknologi proses khusus dalam mengolah bahan baku

menjadi produk, yaitu *Supporting Plant, Utilities, Off Site Facilities, Tank Farm & New Jetty, General Infrastructure & Building, Waste Treatment*.

2. Lingkup ISBL yaitu unit proses *Licensed* yaitu unit proses yang membutuhkan provider teknologi proses untuk dapat mengolah bahan baku menjadi produk, sebagai berikut:
 - a. Palm Oil Treatment kapasitas 20.000 BOPD untuk melakukan treatment CPO menjadi *Refined Bleached Palm Oil* (RBPO).
 - b. *Hydrogen Plant* kapasitas ± 50.000 Nm³/hr dengan *feedstock Natural Gas*.
 - c. Unit berlisensi *UOP-Ecofining* unit untuk mengolah RBPO menjadi produk (HVO/SAF).

Hingga akhir 2024, progres *Green Refinery* RU III Plaju yaitu *on progress* pencarian *strategic partner* sebagai *offtaker, feed supplier*, dan pendanaan. Izin AMDAL telah diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri LHK RI Nomor 794 tahun 2024, dan saat ini juga *on progress* identifikasi kendala *sourcing feedstock* dan *market*.

L. Proyek Green Diesel Bio Refinery Revamping RU IV Cilacap

Proyek *Green Diesel Bio Refinery Revamping* RU IV Cilacap atau *Green Refinery* yang akan dibangun berkapasitas 6.000 BOPD dan mengacu pada unit berlisensi di studi awal ini untuk kebutuhan data *Inside Battery Limit* (ISBL). Kebutuhan *Outside Battery Limit* (OSBL), memaksimalkan sinergi dengan kilang eksisting Cilacap dalam hal utilitis dan *auxiliary system* untuk meminimalisasi Capex proyek. Lingkup proyek *Green Refinery* RU IV Cilacap dengan pelaksana PT KPI meliputi *Revamp Unit* TDHT eksisting untuk memproduksi *Hydrogenated Vegetable Oil* (HVO) dari *Refined Bleached Deodorized Palm Oil* (RBDPO) dan *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) J2.4 dari *Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil* (RBDPKO) berkapasitas 2500 BOPD (Fase 1) serta Pembangunan *Green Refinery* Cilacap (*new unit*) untuk memproduksi HVO dan SAF dari *Used Cooking Oil* (UCO) berkapasitas 6000 BOPD (Fase 2).

Hingga akhir 2024, progres *Green Refinery* RU IV Cilacap yaitu fase 1 telah selesai. Sedangkan untuk fase 2, BEPD telah selesai pada April 2024, dan saat ini *on progress* persiapan FEED.

M. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, Pemerintah memiliki Pilar Pemerataan Pembangunan melalui Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Salah infrastruktur yang diperlukan dalam pemerataan Pembangunan sendiri adalah infrastruktu ketenagalistrikan. Selain itu, dengan dibangunnya infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai sebagaiupaya mewujudkan

kedaulatan energi dalam negeri. Untuk mempercepat Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dimana di dalamnya terdapat PSN kepada PT PLN guna melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Untuk merealisasikan PSN tersebut, Pemerintah memberikan penugasan kepada PT PLN guna melaksanakan Program 35.000 MW meliputi Pembangunan pembangkit, transmisi dan gardu induk. Sampai dengan tahun 2024 sendiri sudah dilakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan realisasi Pembangkit yang telah COD/SLO sebesar 31.482,5 MW. Untuk proyek transmisi yang telah COD/SLO pada tahun 2024 sebesar 2.205,48 kms dan gardu induk yang telah RLB/SLO sebesar 3.560 MVA. Dengan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai dan mendukung penyediaan tenaga listrik mampu mendorong pencapaian Rasio Elektrifikasi Nasional pada Tahun 2024 mencapai 99.83%.

8) Klaster Industri Mineral dan Batubara

A. Program Pembangunan Smelter Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel PT Aneka Tambang Tbk (Proyek P3FH)

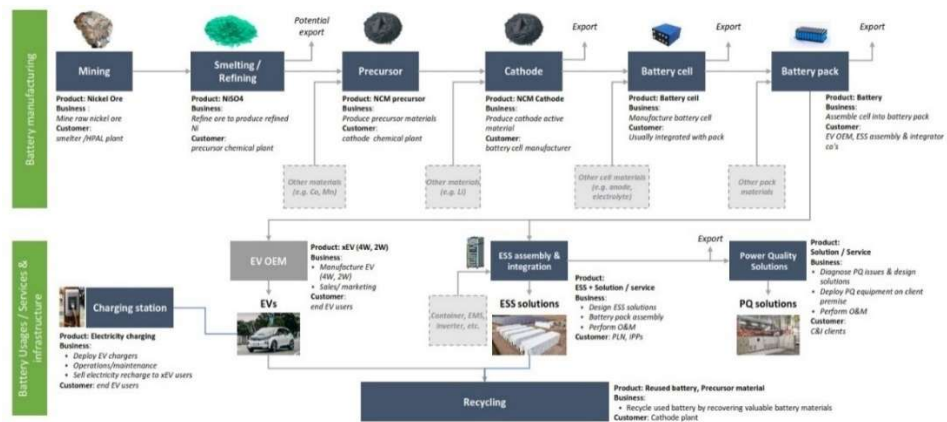
Proyek Pembangunan Feronikel Halmahera merupakan program strategis nasional untuk mendukung hilirisasi industri nikel yang dilaksanakan oleh PT ANTAM Tbk. Pabrik Feronikel Halmahera memiliki kapasitas sebesar 13.500 TNi/annum dengan biaya investasi Rp 4 Triliun. *Progress* pembangunan *smelter* FeNi Halmahera telah mencapai sebesar 98,18% sejak awal tahun 2020, namun mengalami penundaan penyelesaian sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan suplai listrik untuk *commissioning* dan operasional *smelter*. Sampai dengan 31 Desember 2022 telah dilakukan kerjasama dengan PLN dimana telah dilakukan pemindahan 2 (dua) unit *power plant* milik PLN ke wilayah operasional pabrik FeNi Halmahera. Proyek FeNi Halmahera per Q4 2024 telah selesai dan saat ini dilakukan *stand-by off* mengingat harga feronikel dunia saat ini lebih murah dari biaya produksi yang diperkirakan. Saat ini sedang dilakukan perhitungan untuk mencari alternatif sumber tenaga listrik dengan biaya lebih rendah guna mencapai nilai keekonomian yang optimal.

B. Program Pembangunan Smelter dalam rangka Pengembangan EV Battery Nasional PT Aneka Tambang dan PT Industri Baterai Indonesia

Proyek Pengembangan Ekosistem EV Battery Nasional merupakan proyek yang dilaksanakan oleh konsorium BUMN yakni: MIND ID, ANTAM, Pertamina Power

Indonesia, dan PLN dalam rangka pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Ilustrasi Pengembangan EV Battery



Inisiatif pelaksanaan proyek EV Battery sejalan dengan Keputusan Menteri BUMN No. SK-28/MBU/01/2020 tentang Pembentukan Tim percepatan Pengembangan EV Battery BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan SK-80/MBU/03/2022. Pada Februari 2021, Pertamina, PLN, MIND ID dan ANTAM bersama-sama mendirikan perusahaan patungan yang diberi nama PT Industri Baterai Indonesia (PT IBI) dengan kepemilikan saham masing-masing 25%. PT IBI atau *Indonesia Battery Corporation* (IBC) akan menjadi JV yang berinvestasi pada setiap *value chain* EV Battery bersama dengan calon partner baik pada tahapan *Mining, Smelting, Refinery, Precursor*, Katoda, sampai dengan *Battery Cell*.

Pada Tahun 2023, ANTAM dan HKCBL telah menyelesaikan transaksi dimana keduanya terlibat langsung dalam (i) transaksi jual beli saham anak perusahaan ANTAM yaitu PT Sumberdaya Arindo ("SDA") berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (CSPA) tanggal 16 Januari 2023, yang selesai pada tanggal 28 Desember 2023; dan (ii) transaksi jual beli saham entitas anak ANTAM yaitu PT Feni Haltim ("FHT") berdasarkan CSPA tanggal 4 Mei 2023 yang telah selesai pada tanggal 28 Desember 2023. Adapun pasca closing transaksi PT SDA dan PT FHT pada 2023, saat ini sedang dalam tahap pengembangan Blok Sangaji, FHT dalam tahap persiapan konstruksi dan persetujuan *investment plan*, dan HPAL sedang dalam tahap pemenuhan *Conditions Precedent* (CP). Pada tanggal 16 Oktober 2024 telah dilakukan penandatanganan *interim agreement* PT IBC dengan CBL International Development Pte.Ltd untuk Pembangunan pabrik baterai cell dengan kapasitas 15 GWh di Karawang, Jawa Barat. Total nilai investasi pada proyek tersebut bernilai USD 1,18 miliar.

Inisiatif Strategis Membangun Ekosistem Industri EV Battery di Indonesia



C. MIND ID Group: COD Copper Smelter (Realisasi YTD Desember 2024 sebesar 100%)

Proyek Smelter Tembaga dan Anode Slime & Precious Metal Refinery Termasuk dalam program strategis nasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2024. Proyek ini merupakan proyek hilirisasi tembaga yang bertujuan untuk mengolah konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga dan lumpur anoda. Kapasitas pengolahan proyek smelter tembaga adalah 3 juta ton konsentrat tembaga/annum yang dapat menghasilkan 600 ribu ton katoda tembaga. Di samping itu, proyek ini juga menghasilkan 6 ribu ton *anode slime* yang selanjutnya dapat diolah dan menghasilkan produk turunan seperti: emas, perak, platinum, palladium, selenium, timbal, asam sulfat, dan *gypsum*.

Pada 23 September 2024, pembangunan smelter tembaga telah terselesaikan secara *commercial operation date* (COD) dan diresmikan oleh Presiden RI didampingi oleh Menteri BUMN. Namun demikian, setelah dilakukan produksi terdapat bagian pabrik yang mengalami kebakaran, yaitu *Common Gas Cleaning Plant* (CGCP) dan *Sulfuric Acid Plant* (SAP). Dengan terjadinya *force majeure*, PT Freeport Indonesia perlu melakukan perbaikan yang memakan waktu sekitar 6 bulan dan baru dapat berproduksi optimal pada Desember 2025.

9) Klaster Industri Pangan dan Pupuk

A. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Dalam mendukung program Pemerintah untuk mencapai Ketahanan Pangan Nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai Holding BUMN Pupuk memiliki peran guna mendukung tercapainya program tersebut. Wujud dukungan tersebut antara lain dalam penyediaan pupuk bersubsidi bagi Petani yang meliputi pupuk Urea, NPK dan Organik yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun

2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dalam Permentan tersebut terdapat beberapa perubahan antara lain perubahan jenis pupuk yang di subsidi menjadi 3 jenis yaitu pupuk Urea, NPK dan Organik dengan 9 (Sembilan) jumlah tanaman komoditi yang di subsidi hanya komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe, Kopi Rakyat, tebu dan kakao.

Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV. Penetapan HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2024 mengacu Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, dengan rincian Urea sebesar Rp2.250/kg, NPK sebesar Rp2.300/kg, dan NPK Formula Khusus sebesar Rp3.300/kg.

Penyaluran pupuk bersubsidi s.d Triwulan IV 2024 (Unaudited), terealisasi sebesar 7.343.257 ton atau 100,7% dari kontrak dengan Kementerian Pertanian sebesar 7.294.384 ton. Detail realisasi penyaluran pupuk bersubsidi itu terdiri dari Pupuk urea terealisasi 3.709.990 ton, Pupuk NPK terealisasi 3.586.179 ton, dan Pupuk Organik terealisasi 47.087 ton. Stok Pupuk Bersubsidi pada akhir tahun 2024 untuk pupuk Urea PSO sebesar 355.812 ton atau 213% dari ketentuan stok minimum dan pupuk NPK PSO sebesar 330.768 ton atau 226% dari ketentuan stok minimum.

B. Restrukturisasi PT Rekayasa Industri

Secara keseluruhan Program Percepatan Restrukturisasi PT Rekayasa Industri, khususnya aspek keuangan, telah menunjukkan hasil positif dengan pemulihan posisi ekuitas, komposisi aset dan utang yang lebih sehat dan struktur permodalan lebih kuat. Hal ini menjadi titik awal kebangkitan PT Rekayasa Industri menjadi perusahaan EPC Nasional yang kuat dan kompetitif. Berikut disampaikan capaian atas inisiatif-inisiatif percepatan Restrukturisasi Rekind

- a. Persetujuan Buku RPP pada 2 Januari 2024 oleh Menteri BUMN melalui SK-1/MBU/01/2024.
- b. Persetujuan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) nomor 308/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pus yang disahkan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2024. Atas Perjanjian Perdamaian tersebut, Rekind membukukan keuntungan (gain) atas restrukturisasi utang kreditur dan vendor (subkon) sebesar Rp 2,99 triliun

- c. Memperoleh persetujuan Extension Of Time Proyek JTB dari Pemilik Proyek pada 26 September 2024 dengan maksimum Liquidated Damages (LD) USD 3,59 Juta sehingga Rekind dapat membukukan reversal provisi LD Proyek JTB sebesar Rp1,19 triliun dicatat pada tahun buku 2022.
- d. Rekind dan PLN telah menandatangani Amandemen-08 Proyek PLTU Lombok tanggal 22 November 2024, dimana posisi PLN: COD#1 Mei 2024 dan COD#2 Agustus 2024 sedangkan posisi Rekind: COD #1 November 2024 dan COD #2 Februari 2025. Atas perbedaan ini akan dimediasi oleh BPKP.
- e. Pemberian Pinjaman Perpetual dari Pupuk Indonesia Rp 1,85 triliun untuk melunasi Shareholder Loan sebesar Rp 1 triliun dan Pinjaman Bank Mandiri Rp851 miliar pada tanggal 22 Agustus 2024.
- f. Penyetoran Capital Injection PI ke Rekind Rp 500 miliar pada tanggal 24 Desember 2024 yang akan digunakan sebagai modal kerja dalam mengerjakan proyek- proyek yang akan datang.
- g. Realisasi Inbreng Saham PIU senilai Rp 1.032 triliun pada tanggal 24 Desember 2024 untuk penambahan modal disetor.
- h. Realisasi Inbreng Aset Tetap berupa Lahan dan Kantor Kalibata senilai Rp 534 M pada tanggal 24 Desember 2024 untuk penambahan modal disetor.
- i. Pemberian Perpetual Loan Tahap 2 sebesar Rp 500 M tanggal 30 Desember 2024 untuk digunakan untuk pembelian Surat Berharga Negara.
- j. Memperoleh kontrak Man Power Supply Proyek Pusri IIIB kepada Rekind sebagai Project Management Consultant.
- k. Peningkatan Modal Dasar Rekind dari semula Rp 1,8 triliun menjadi Rp 5,4 triliun melalui akta notaris Lumassia S.H No. 07 tanggal 18 Desember 2024.
- l. Posisi ekuitas Rekind per 31 Desember 2024 telah mencapai positif Rp 980 miliar (Un-Audited) dari semula negatif Rp 6,99 triliun posisi per 31 Desember 2023.
- m. Dengan kondisi ekuitas positif tersebut maka Rekind dapat segera mengurus SBUJK untuk mengerjakan proyek- proyek EPC.

10) Klaster Industri Perkebunan dan Kehutanan

A. Pembangunan Pabrik Minyak Goreng II

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa Program Hilirisasi Industri Kelapa Sawit pada PTPN III (Persero) merupakan salah satu Program Strategis Nasional sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. PTPN III (Persero) / Holding PTPN melalui salah satu anak usahanya yaitu PT Industri Nabati Lestari (PT INL) membangun Pabrik Minyak Goreng II berkapasitas olahan 750.000 ton CPO/tahun atau 2.500 ton CPO/hari yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di Indonesia dan pasar dunia.

Progres pembangunan Pabrik Minyak Goreng Unit (PMG) II sampai dengan bulan Desember 2024 sebagai berikut:

- Pembangunan dilaksanakan oleh: a) Contractor EPCC: KSO PT Enviromate Technology International (ETI), PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT); b) Lisensor teknologi: Lipico Technologies Pte. Ltd.; c) Konsultan MK: PT Mipcon Konsultan Utama.
- Telah dilaksanakan performance test & commsissioning untuk refinery & fractionation plant pada 3 s.d 21 Desember 2024 dengan hasil success/passed.
- Berita acara komisioning ISBL (Plant Acceptance Certificate) telah ditandatangani oleh PT INL dan Lipico pada 23 Desember 2024.
- Telah dilaksanakan pengiriman produk Olein IV 58 dari PMG II sebanyak 10.400 MT ke buyer Adesa Ventures Company Limited di Yangon, Myanmar pada 13 Desember 2024.

B. Pelaksanaan Post Merger Integration (PMI)

Pelaksanaan *Post Merger Integration* (PMI) PTPN Grup dimulai setelah terlaksananya Integrasi PTPN Grup. Tahap PMI terbagi atas beberapa fase: a) Fase 1 (3 Bulan); b) Fase 2 (6 Bulan); c) Fase 3 (12 Bulan); d) Fase 4 (24 Bulan). Beberapa program penting PMI:

1. Pengajuan persetujuan penggunaan nilai buku (PMMK 56/2021)
2. Relaksasi BPHTB
3. Penerbitan Penugasan Pemerintah (Kepmentan)
4. Perubahan struktur permodalan (PP administratif)

Progres sampai dengan November 2024 dan pending items:

1. PTPN telah mendapat Dukungan Tarif BPHTB 0% dari Kementerian Dalam Negeri sesuai surat No. 900.1.13.1/1276/SJ pada 13/03/2024.
2. Untuk pengambilalihan saham PT SGN, proses tersebut akan ditunda dan dilaksanakan pada tahun 2025 sesuai Surat Nomor DTSS/N.1/1958/2024 tanggal 16 Desember 2024 dikarenakan akan dilakukan penilaian wajar terlebih dahulu atas aset PTPN I, PT BCN dan PT IGG yang dialihkan ke PT SGN.

- ## 11) Klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung

PT Hotel Indonesia Natour/"HIN" ditunjuk sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola/"BUPP" Kawasan Ekonomi Khusus/"KEK" Sanur yang bergerak di bidang kesehatan dan pariwisata. Guna mendukung pengembangan KEK Sanur, sejak tahun 2023 HIN melakukan revitalisasi hotel Grand Inna Bali Beach dan *convention center* menjadi Bali Beach Hotel, hotel The Meru, dan The Meru Convention. Hal ini bertujuan untuk menunjang wisatawan yang akan berkunjung maupun berobat di KEK Sanur.

Proses revitalisasi hotel dan *convention center* membutuhkan biaya investasi sekitar Rp1,8 Triliun dan telah mampu menyerap tenaga kerja hingga hampir 3 ribu orang. Bali Beach Hotel, The Meru, dan The Meru Convention Center sendiri telah beroperasi sejak bulan Maret 2024 dengan jumlah kamar Bali Beach Hotel sebanyak 273 kamar dan The Meru sebanyak 184 kamar. Adapun The Meru Convention memiliki luas 3.750 meter persegi dan mampu menampung 5.000 orang. Sejak beroperasi hingga akhir tahun 2024, Bali Beach Convention telah menyelenggarakan beberapa event antara lain Global Dialogue on Sustainable Ocean Development, ASEAN Mining Conference 2024 hingga pada akhir tahun 2024 terselenggara New Year's Eve Celebration.

Program *Indonesia Quality Tourism Fund* (IQTF) dirancang sebagai strategi pendanaan untuk mendorong sektor pariwisata Indonesia menjadi lebih kompetitif secara global. Dana abadi senilai Rp2 triliun, yang akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan acara berskala internasional yang ramah lingkungan. Program ini bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan,

memperpanjang durasi tinggal mereka, serta mempromosikan citra positif Indonesia. IQTF juga diproyeksikan menjadi solusi strategis untuk menarik promotor global dan mencegah kebocoran devisa akibat masyarakat yang lebih memilih hiburan di luar negeri.

Dalam implementasinya, IQTF akan memprioritaskan pendanaan untuk acara besar di lima destinasi super prioritas: Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Pada tahun pertama pelaksanaan, dana abadi ini direncanakan membiayai 10-15 acara dengan alokasi Rp200-Ro500 miliar. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menempatkan IQTF sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat keberlanjutan sektor pariwisata serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.

KPI terkait pembentukan Dana Kepariwisataan telah mencapai progres sebesar 90%, dengan seluruh proses teknis dan administrasi selesai dilaksanakan. Saat ini, implementasi IQTF hanya menunggu penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) oleh Presiden Terpilih Republik Indonesia. Capaian ini juga menunjukkan keberhasilan Asisten Deputy Bidang Pariwisata dan Pendukung dalam mempersiapkan fondasi kuat untuk transformasi sektor pariwisata Indonesia.

4.2 Proyek Strategis Lainnya

a) Klaster Industri Energi, Minyak dan Gas

1) Partnership PBM IHC dengan INA & Swire

PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC) merupakan Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) dan juga merupakan Holding Rumah Sakit (RS) BUMN. Pada tahun 2024, IHC secara resmi melakukan aksi korporasi kerjasama dengan partner strategisnya guna transformasi perusahaan menjadi lebih profesional. IHC merupakan Holding RS BUMN yang mengelola 37 RS dan 66 Klinik Kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perjanjian kemitraan strategis telah ditandatangani oleh IHC bersama Indonesia Investment Authority (INA) dan Swire Pacific Limited (Swire) pada 21 Desember 2023, kemudian IHC menggelar *Closing Ceremony* untuk menandai penyelesaian transaksi dengan *strategic partner* yakni INA dan Swire pada

15 Agustus 2024. Kemitraan ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia melalui perbaikan fundamental di berbagai aspek, termasuk transformasi organisasi,

digitalisasi, dan sumber daya manusia. Tidak hanya berfokus pada penguatan internal, IHC juga terus berupaya membangun ekosistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, di antaranya dengan menghadirkan rumah sakit baru yaitu Bali International Hospital.

2) PLTGU Jawa-1

Dalam mendukung transisi energi, Keasdepan Emigas mendorong PT Pertamina untuk mengembangkan energi bersih melalui Subholding Power & New Renewable Energy (SH PNRE), salah satunya melalui Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 dengan kapasitas 1760 MW yang siap beroperasi secara penuh setelah melewati serangkaian tes seperti *plant reliability run & net dependable capacity test* tepat pada 29 Maret 2024. PLTGU Jawa-1 dikelola oleh PT Jawa Satu Power (JSP) yang dimiliki oleh konsorsium antara SH PNRE dengan kepemilikan 40 persen, Marubeni 40 persen, dan Sojitz 20 persen. Dengan semua keunikan instalasinya, PLTGU Jawa-1 bisa menjadi salah satu pilar transisi energi yang menjadi kebanggaan Pertamina maupun Indonesia.

PLTGU Jawa-1 merupakan pembangkit Listrik yang mengintegrasikan *floating storage and regasification unit* (FSRU) yang terdiri dari 2 unit pembangkit dengan masing-masing kapasitas 880 MW. Unit 2 telah beroperasi komersial. Proyek ini menghubungkan ketersediaan pasokan gas di Papua dengan kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Bali. Proyek ini memiliki sejumlah keunggulan, antara lain lebih efisien karena menggunakan generasi terbaru teknologi *single shaft combined cycle gas turbine*, sehingga harga jual listrik pun menjadi kompetitif. Dari sisi operasional, pembangkit ini memiliki teknologi *black start capability* sehingga dapat melakukan *self start up* sendiri pada saat *grid* tidak tersedia *imported power* untuk keperluan *start up* pembangkit. Dengan menggunakan sumber bahan bakar liquefied natural gas (LNG), maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara maupun BBM. Hal ini sejalan dengan upaya penurunan emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan. Ditambah lagi, pembangkit ini menggunakan teknologi *closed loop cooling tower system* yang meningkatkan kehandalan dalam mengurangi volume penggunaan air laut dalam hal mendukung operasional pembangkit.

3) Proyek PLTS IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan strategi Pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata untuk mengurangi kesenjangan di wilayah Indonesia. IKN memiliki visi untuk menjadi kota hijau dan

berkelanjutan yang menggunakan listrik sepenuhnya dari energi baru terbarukan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan IKN membutuhkan investasi yang masif. Dengan kebutuhan pendanaan yang besar dan keterbatasan fiskal, maka negara perlu melibatkan badan usaha milik negara maupun swasta untuk berinvestasi. Untuk memberikan *investor confidence* melalui kepastian *return on investment* atas Pembangunan IKN, pemerintah memastikan bahwa IKN terbangun sesuai visi dan misi yang telah disusun.

Untuk memberikan kepastian pembangunan IKN, Pemerintah menerbitkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara. Dalam aturan tersebut, kebutuhan energi di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) akan dipastikan terpenuhi dari sumber energi terbarukan dan gas alam. PT PLN sebagai Perusahaan yang bergerak dalam penyediaan tenaga Listrik berkomitmen untuk *supply green energy* ke IKN.

Sebagai tahap awal PT PLN berkomitmen dalam melistriki Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, PT PLN melaksanakan pembangunan pembangkit Listrik energi terbarukan tenaga surya dengan progres PLTS IKN Tahap 1 telah SLO pada 3 Juni 2024 dengan kapasitas 13,50 MW dan PLTS IKN Tahap 2 telah SLO pada 18 Desember 2024 dengan kapasitas 54,08 MW.

b) Klaster Industri Mineral dan Batubara

1) MIND ID Group: Akuisisi Vale (Realisasi YTD Desember 2024 sebesar 100%)

MIND ID telah menyelesaikan akuisisi saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk sebesar 14%, sehingga saat ini porsi kepemilikan saham MIND ID pada PT Vale Indonesia Tbk menjadi sebesar 34%. Adapun kepemilikan MIND ID sebesar 34% telah menjadikan MIND ID sebagai pemegang saham terbesar PT Vale Indonesia Tbk. '*Framework Agreement*' ("*Definitive Agreement*") telah ditandatangani pada 26 Februari 2024 lalu, sehingga progress proyek telah mencapai 100%. Telah dilakukan penandatanganan Divestasi saham ini merupakan bagian dari kewajiban perpanjangan izin operasi selama 10 Tahun yang diperoleh PT Vale Indonesia Tbk hingga 28 Desember 2035. Dengan dilakukannya divestasi saham tersebut, maka porsi kepemilikan Indonesia pada PT Vale Indonesia Tbk menjadi 54% (MIND ID sebesar 34% dan Publik sebesar 20%). Penerbitan IUPK tersebut diperoleh PT Vale Indonesia Tbk pada 3 Mei 2024.

Dalam pemberian perpanjangan IUPK, PT Vale Indonesia Tbk memiliki kewajiban melakukan hilirisasi komoditas nikel agar menambahkan nilai tambah komoditas nikel di Indonesia.

2) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk: Signing JVA untuk pengoperasian kembali fasilitas Iron & Steel Making – Blast Furnace (Realisasi YTD Desember 2024 sebesar 60%)

Salah satu inisiatif usaha restrukturisasi PT Krakatau Steel Tbk (Persero) (PTKS) adalah dengan pengoperasian kembali fasilitas Iron & Steel Making – Blast Furnance (ISM BF) yang dilakukan dengan menggandeng partner strategis asal Tiongkok, Baowu Group Zhongnan (BGZ) yang merupakan Produsen Baja terkemuka di global. Target *commencement* atau groundbreaking reaktivasi fasilitas ISM BF diharapkan akan terlaksana pada Kuartal IV 2024, namun hingga Desember 2024 realisasi proyek hanya sebesar 60%.

Hingga Desember 2024, PT Krakatau Steel Tbk sedang meninjau kembali rencana kerja sama, termasuk tantangan kerja sama antara PTKS dan BGZ dikarenakan atas keseluruhan 6 *concerns* yang diminta oleh BGZ dapat dipenuhi oleh PTKS kecuali terkait *Lenders Support Letter* berupa pelepasan jaminan aset ISM-BF agar kondisi pabrik ISM BF yang berada dalam kondisi *clean and clear*. Sedangkan, poin ini merupakan yang paling penting dari kesepakatan dengan BGZ.

Atas dasar surat resmi PT KS kepada BGZ (tertanggal 28 Oktober 2024), serta tidak adanya respon positif dari BGZ sampai saat ini, PT KS telah memulai inisiatif mencari mitra kerjasama melalui surat penawaran kepada beberapa calon mitra. Saat ini, PTKS telah memperoleh 3 calon mitra yang berminat, yaitu: PT Dexin Steel Indonesia, Jindal Steel & Power, dan Liberty Steel melalui penandatanganan MoU pada 28 November 2024. Ketiga calon mitra sedang dalam tahap diskusi teknis dan komersial untuk penyusunan detail proposal, dengan target penyampaian proposal pada Januari 2025.

c) Klaster Industri Kesehatan

1) Realisasi PMN 2020 di PT Bio Farma (Persero)

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RI) Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) RI ke dalam modal saham perseroan (persero) PT Bio Farma (Persero), penyertaan dana PMN ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan layanan kesehatan serta kemandirian industri farmasi nasional. Hal ini diperlukan khususnya untuk menghadapi pandemi Covid-19 serta untuk meningkatkan kesiapan industri farmasi maupun rumah sakit BUMN dalam menghadapi kondisi pandemi di masa mendatang. Adapun realisasi dana PMN per Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai PMN (Rp Miliar)	Tahun Penggunaan	Realisasi		
				Keuangan s.d. TW IV 2024 (Rp Miliar)	Keuangan s.d. TW IV 2024 (% thdp Nilai PMN)	Fisik s.d. TW IV 2024 (%)
1	Pengembangan Fasilitas <i>Pilot Scale</i> di Bio Farma	468,80	Tahun 2021 - 2023	449,90	95,97	91,38
	Pengembangan Ekosistem <i>Digital Healthcare</i> di Bio Farma	76,70		59,59	77,69	81,57
2	Pengembangan usaha di Kimia Farma	254,64	Tahun 2021 - 2024	10,96	4,30	1,09
3	Pengembangan usaha di Indofarma	199,86	Tahun 2021 - 2024	11,43	5,72	7,40
4	Pengembangan usaha di PBM IHC	1.000,00	Masih Dalam Kajian	0,00	0,00	0,00
Total		2.000,00		531,88	26,59	45,36

Sampai dengan tahun 2024, realisasi keuangan atas penggunaan PMN 2020 sebesar Rp531,88 miliar, yang terdiri dari Bio Farma sebesar Rp509,49 miliar, Kimia Farma sebesar Rp10,96 miliar, dan Indofarma sebesar Rp11,43 miliar.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi, menunjukkan bahwa penggunaan dana PMN belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh pengembangan usaha di Kimia Farma dan Indofarma yang sudah tidak feasible sehubungan dengan kondisi perusahaan saat ini. Selain itu, dana PMN yang akan digunakan oleh PBM IHC untuk penanganan Covid-19, sudah tidak relevan karena telah berakhirnya masa pandemi Covid-19. Selain itu, *strategic partner* yang masuk ke PBM IHC, tidak menghendaki adanya dana APBN.

Pada tanggal 14 Mei 2024, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-55/KN/2024 menyampaikan bahwa sesuai dengan rekomendasi BPK, dana PMN 2020 sebesar Rp387,62 miliar untuk dikembalikan kepada Negara. Adapun sisa dana PMN 2020 sebesar Rp1,08 triliun yang belum digunakan, rencananya akan dilakukan perubahan penggunaan. Atas hal tersebut, saat ini Kementerian BUMN bersama dengan Biofarma Group sedang menyusun kajian untuk pengembalian dana PMN 2020 kepada Negara dan perubahan penggunaan dana PMN 2020.

2) Restrukturisasi Keuangan dan Reorientasi Bisnis Biofarma Group

Biofarma Group menghadapi tantangan yang signifikan, seperti potensi penurunan pendapatan akibat dinamika pasar global, likuiditas yang rendah dengan rasio COGS terhadap *sales* di atas 100 persen, piutang tak tertagih dan utang yang tinggi. Terdapat anggota holding yang menghadapi risiko keberlanjutan bisnis dan penghentian operasional. Selain itu, model parenting masih terkendala peran terbatas Bio Farma sebagai induk, kinerja anak usaha yang belum optimal, portofolio produk yang kurang kompetitif dan *overlapping*, serta utilitas fasilitas produksi yang rendah yang masih harus dibenahi. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan stabilitas keuangan Biofarma Group.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian BUMN berinisiatif untuk mendorong upaya penyehatan Biofarma Group melalui restrukturisasi keuangan dan reorientasi bisnis dengan dibentuknya *Project Management Officer* (PMO) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-20/MBU/01/2024 dan Nomor SK-19/MBU/01/2024. Kajian restrukturisasi keuangan & reorientasi bisnis telah disampaikan kepada Menteri BUMN pada tanggal 19 Oktober 2024 untuk selanjutnya dapat disahkan.

3) **Pembangunan Fasilitas Cyclotron**

Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh kasus kanker mendorong Kementerian BUMN bersama dengan Biofarma Group mewujudkan kemandirian teknologi kesehatan di Indonesia melalui pembangunan fasilitas Cyclotron. Biofarma Group telah secara resmi meluncurkan fasilitas tersebut untuk produksi radiofarmaka FDG (Fluorodeoxyglucose) sebagai alat pendeteksi kanker di Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat pada tanggal 9 September 2024. Radiofarmaka diharapkan menjadi bagian penting dari ekosistem kesehatan masa depan melalui konsep *theranostic*, yang mengintegrasikan aspek diagnosis dan terapi dalam satu langkah. Dengan konsep ini, pasien kanker tidak hanya dapat dideteksi dini, tetapi juga segera mendapatkan penanganan dengan metode terapi yang tepat.

Fasilitas radiofarmaka Biofarma Group dilengkapi dengan akselerator partikel cyclotron termutakhir untuk produksi Radioisotope F-18 dengan kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit vertikal dan swasta di seluruh Indonesia. Telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Bio Farma dengan 10 Rumah Sakit, diantaranya RS Hasan Sadikin, RSCM, RSUP Dr. Kariadi, DPT Pertamina Bina Medika IHC, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk & EMC Group, Tzu Chi Hospital, RS Mitra Plumbon Cirebon, RS Indriati Solo Baru, RS Murni Teguh Medan, dan PT Medikaloka Hermina Corporate.

4) **Penyelesaian Pembangunan Bali International Hospital (BIH)**

Dalam rangka mewujudkan ketahanan kesehatan nasional, Kementerian BUMN berinisiatif mendorong PT Pertamina Bina Medika IHC (PBM IHC) untuk melaksanakan pembangunan Bali International Hospital (BIH) sebagai salah satu bagian dari ekosistem Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur. Pembangunan BIH diharapkan dapat mengurangi devisa ke luar negeri untuk berobat dan meningkatkan pelayanan medis kepada masyarakat. BIH direncanakan beroperasi pada April 2025 dan pada tahap awal akan membuka layanan MCU, Hemodialisa, dan layanan CoE di bidang kardiologi dengan 117

tempat tidur, 10-12 poliklinik, dan 4 ruang rawat inap. Progres pembangunan konstruksi gedung BIH sampai dengan Desember 2024 telah mencapai 95%, dengan realisasi *human resources* mencapai 87%, realisasi *medical equipment* mencapai 96%, dan *partnership* mencapai 81%.

BIH saat ini telah menjalin *partnership* dengan berbagai pihak untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Kerja sama tersebut dilakukan dengan ICON untuk bidang *oncology*, Innoquest untuk *laboratory*, Hong Kong Asia Medical untuk bidang *cardiology*, dan SingHealth untuk peningkatan kapasitas *knowledge and training*.

5) **Unlock Value PT Pertamina Bina Medika IHC**

Untuk mendukung pengembangan usaha dan transformasi perusahaan serta langkah PBM IHC untuk memulai tahapan persiapan *IPO readiness*, PT Pertamina Bina Medika IHC (PBM IHC) melakukan kerja sama dengan *partner* strategis yaitu Swire Pacific Ltd (melalui PT Swire Investment Indonesia) & Indonesia Investment Authority (INA).

Kementerian BUMN turut mendukung PBM IHC untuk memenuhi *condition precedent* (CP) fase 1 yang terdiri dari 461 item dan dilanjutkan dengan *first drawdown* pada Juli 2024. Selanjutnya, saat ini sedang dalam proses pemenuhan CP 2 dan penerimaan *second drawdown* akan dipenuhi pada 2025. Dalam jangka panjang, bersama dengan mitra strategis, PBM IHC akan memulai tahapan persiapan *IPO readiness*.

6) **Pembangunan RSP Panorama Balikpapan**

PT Pertamina Bina Medika IHC (PBM IHC) telah meresmikan RS Pertamina Panorama Balikpapan serta Klinik Pratama Pertamina IHC Balikpapan pada November 2024. Hal tersebut merupakan bukti nyata komitmen Kementerian BUMN dan PBM IHC dalam menghadirkan layanan kesehatan berkualitas sekaligus mendukung konsep pembangunan ramah lingkungan melalui pengembangan fasilitas berbasis *green hospital*.

RSP Panorama Balikpapan memiliki kapasitas 100 tempat tidur dan 14 poliklinik yang didukung fasilitas IGD 24 jam, layanan laboratorium, rehabilitasi medik, *Central Sterile Supply Department* (CSSD), rekam medik, serta manajemen sarana prasarana dan pelayanan penunjang lainnya.

d) Klaster Industri Perkebunan dan Kehutanan

1) Implementasi Penugasan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023

Sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai, PTPN merupakan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan dan memiliki peran sangat penting dalam mendorong rencana strategis pemerintah, khususnya untuk mencapai ketahanan pangan pada komoditas gula. Spesifik terhadap industri gula, Pemerintah telah memberikan perhatian khusus untuk merevitalisasi bisnis gula BUMN melalui penugasan kepada PTPN dalam rangka percepatan swasembada gula nasional sesuai dengan Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel). Adapun berikut adalah target yang perlu dicapai oleh PTPN:

Penetapan Road Map PTPN



Sesuai dengan pasal 17 pada Perpres no 40 tahun 2023, PTPN Group ditugaskan untuk melakukan percepatan swasembada gula konsumsi pada tahun 2028 dengan target capaian sebagai berikut:



Untuk dapat berkontribusi terhadap aspirasi pemerintah dalam mencapai swasembada gula, PTPN perlu melakukan transformasi bisnis gula dan menjadi produsen gula kelas dunia. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan standardisasi dan peningkatan kinerja operasional kebun tebu dan pabrik gula melalui implementasi inisiatif strategis. Inisiatif strategis telah dibagi menjadi enam kategori utama, yaitu: 1) inisiatif quick wins, 2) insiatif Long-term, 3) inisiatif Advanced / capital intensive, dan 4) inisiatif model bisnis dan operasi, yang juga didukung oleh 5) inisiatif sosial ekonomi dan 6) enablers.

Untuk dapat memastikan implementasi inisiatif tersebut, PTPN telah membentuk single entity, dalam hal ini SugarCo yang dibentuk melalui pemisahan tidak murni (spin-off) sebagian bisnis gula off-farm sebanyak 36 pabrik gula (PG) milik PTPN kepada PT SGN pada tanggal 17 Agustus 2021 yang berperan untuk mengoptimalkan pengelolaan operasional bisnis gula.

Hingga saat ini, PTPN telah menyusun roadmap terkait dengan luasan lahan Swasembada Gula Nasional

2) Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan program strategis nasional dan telah berjalan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2017. Rendahnya realisasi PSR disebabkan beberapa faktor antara lain persyaratan legalitas kebun sawit rakyat yang tidak terpenuhi, kendala kondisi ekonomi pekebun yang khawatir kehilangan pendapatan pada masa TBM, kelembagaan pekebun yang sudah tidak aktif, serta kurangnya dukungan dari stakeholder terkait percepatan realisasi PSR. Manfaat dari PSR yaitu meningkatkan PDB Nasional serta potensi penambahan penerimaan pajak, meningkatkan pendapatan petani menjadi 6 juta/bulan, dan meningkatkan produktivitas TBS sesuai standar PPKS.

Untuk mendukung salah satu prioritas nasional yaitu “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”, BUMN dalam hal ini PTPN mendukung PSR sebesar ~60 ribu Ha yang melibatkan ±120 ribu petani plasma. Peran PTPN dalam pelaksanaan PSR yaitu:

- *Avalist* produksi (produktivitas standar PPKS)
- Menjamin bibit bersertifikat
- Pendampingan administrasi
- Pendampingan teknis dan *knowledge transfer*
- Menjamin harga sesuai Disbun

Dalam pelaksanaannya, PTPN memiliki 4 (empat) program yaitu:

- BUMN Untuk Sawit Rakyat
- Kemitraan Swadaya
- Pemberdayaan Koperasi Unit Desa (KUD)
- Bibit Siap Salur Bersertifikat

Progres Pelaksanaan PSR sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Penerbitan Rekomtek secara konsolidasi seluas 13.494 Ha (108,60%) terhadap RKAP 2024
- Pencairan Dana BPDPKS secara konsolidasi seluas 12.883 Ha (103,68%) terhadap RKAP 2024
- Potensi luas lahan plasma yang dapat dikelola oleh PalmCo secara konsolidasi adalah 152.899 Ha.

- Komposisi antara Kemitraan dengan Offtaker secara konsolidasi yaitu 35% : 65%

3) Pengembangan Agroforestry Tebu Mandiri

Progress realisasi PKS Tebu Kemitraan seluas 5.757,62 Ha, dengan Realisasi panen tebu giling tahun 2024 sebesar 123.021,4 Ton. Proses kerjasama juga dilakukan dengan BUMN dan swasta lainnya untuk pengembangan tebu. Status proyek on the track dengan rencana tindak lanjut Proses Finalisasi PKS dengan mitra kerjasama PC dan RC, Penyelesaian tanaman PC tahun 2024 oleh mitra kerjasama dan Pemeliharaan tanaman tebu oleh mitra dan mandiri Perhutani.

4) Perhutani Sosial Platform Kemitraan Sosial

Proyek ini berfokus pada pengembangan aplikasi "Socio Forest" yang telah menggantikan sistem berbasis web, dan kini tersedia di Google Playstore. Aplikasi ini mencakup berbagai fitur untuk mendukung petani hutan, seperti profil petani, pengawalan proses budidaya, dan transaksi jual beli. Hingga kini, telah terdata 6.979 petani hutan dengan areal garapan seluas 3.806 ha. Aplikasi ini telah diresmikan oleh Wamen BUMN, Wamen KLHK dan Gubernur Jawa Timur, serta didukung oleh sinergi BUMN (Perhutani, PTPN, Bulog, ID Food dan Pupuk Indonesia) dan PT Finnet Indonesia untuk pengembangan transaksi cashless. Proyek ini berjalan sesuai rencana dengan rencana tindak lanjut selanjutnya adalah pengembangan fitur dan kerjasama logistik dengan SiCepat.

5) Empowering Anak Perusahaan Melalui Spin Off Bisnis

Telah dilakukan pengalihan pegawai terkait spin-off ke PT Palawi Resorsis dan PT Inhutani I, serta penandatanganan perjanjian kerjasama spin-off tahap III untuk wisata dan spin off industri kayu. Sosialisasi, koordinasi implementasi dan telah dilakukan penandatanganan Addendum PKS spin off Industri Kayu terkait Perubahan skema awal dari Kerjasama menjadi Full Alih. Status proyek Completed.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Wakil Menteri BUMN Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan lingkup Wakil Menteri BUMN dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun dalam rangka mengukur pencapaian kinerja unit kerja Wakil Menteri BUMN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2024.
2. Pengukuran kinerja Wakil Menteri BUMN Tahun 2024 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN. BUMN di bawah lingkup Wakil Menteri BUMN terdiri dari 6 (enam) Klaster yaitu Klaster Industri Minyak, Gas, dan Energi, Klaster Industri Mineral dan Batubara, Klaster Industri Pangan dan Pupuk, Klaster Industri Kesehatan, Klaster Industri Manufaktur, Klaster Industri Perkebunan dan Kehutanan, Klaster Jasa Logistik, Klaster Jasa Keuangan, Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media, Klaster Jasa Asuransi dan Pensiun, Klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung, dan Klaster Jasa Infrastruktur.
3. Hasil pengukuran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Wakil Menteri BUMN Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan secara umum dapat dikategorikan **Sangat Memuaskan** (skor Nilai Kinerja Organisasi: 106,55. Dari 15 (lima belas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 16 (enam belas) IKU yang mencapai target dan 4 (empat) IKU yang tidak mencapai target.
4. Anggaran Tahun 2024 Wakil Menteri BUMN pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp^{xxx} dari total 12 Keasdepan namun dalam perjalanannya dilakukan beberapa kali perubahan dan *refocusing* anggaran sehingga menjadi sebesar Rp^{xxx}. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp^{xxx} atau xx% dari pagu anggaran akhir. Rincian realisasi anggaran yang dimaksud antara lain sebagai berikut.
5. Dengan disusunnya LKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan maupun seluruh pihak terkait dengan tugas dan fungsi Wakil Menteri BUMN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya agar lebih mampu memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

5.2 Saran dan Perbaikan

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja tahun 2025, beberapa hal yang perlu dilakukan maupun dipertahankan, antara lain sebagai berikut:

1. Melanjutkan program yang telah dilaksanakan di tahun 2024 dan memastikan pelaksanaannya memberikan kontribusi manfaat yang berkelanjutan di BUMN maupun bagi negara.
2. Melakukan *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja BUMN dan program-program yang berkaitan dengan pemerintah maupun rencana restrukturisasi perusahaan secara berkala sehingga target kinerja BUMN maupun rencana kerja yang sudah dicanangkan dapat tercapai sebagaimana target yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Wakil Menteri BUMN pada tahun 2025.
4. Menggalakkan BUMN sebagai perusahaan yang mampu menghadapi tantangan di era industri 4.0 dengan semangat AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS WAKIL MENTERI BUMN

Perjanjian Kinerja Tahun 2024



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Wirjoatmodjo
Jabatan : Wakil Menteri BUMN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Erick Thohir
Jabatan : Menteri BUMN

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri BUMN



Erick Thohir
NIP MT0004

Jakarta, 31 Desember 2023
Pihak Pertama
Wakil Menteri BUMN



Kartika Wirjoatmodjo
NIP WAMEN-K



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Organisasi : WAKIL MENTERI BUMN

Tahun Anggaran : 2024

No	Prioritas/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
Prioritas 1: Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia				
1	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham	1) Net Profit	Rp Triliun	240,90
		2) EBITDA Margin	Persen	22,36
		3) Return on Equity	Persen	7,03
2	Meningkatnya Peran BUMN dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	1) Jumlah Nasabah Aktif Melkasa	Jumlah (juta)	15,34
3	Meningkatnya Daya Saing BUMN	1) Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Jumlah	23
4	Penguatan Struktur Model BUMN	1) Penyelesaian Target IPO/Tambahan Nilai Penawaran BUMN/Anak Usaha di Pasar Modal	Jumlah	1
5	Terwujudnya Pecan BUMN yang Optimal dalam Penerapan Emisi Karbon	1) Pelaksanaan Inisiatif Program Transisi Energi Menuju Net Zero Emission	Persen	100
Prioritas 2: Inovasi Model Bisnis				
6	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN	1) Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi oleh BUMN	Persen	100
7	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Wakil Menteri BUMN	1) Persentase Realisasi Anggaran	Persen	97
		2) Nilai Self-Assesment SAKIP	Persen	82,14
8	Terwujudnya Restrukturisasi BUMN yang Resilien	1) Jumlah Program Restrukturisasi Kluster BUMN	Jumlah	8
9	Terwujudnya BUMN yang unggul di tingkat domestik	1) Penyusunan Roadmap Integrasi BUMN Karya	Persen	60
10	Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	1) Penguatan manajemen risiko BUMN	Persen	100
Prioritas 3: Kepemimpinan Teknologi				
11	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN	1) Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN	Persen	100
Prioritas 4: Peningkatan Investasi				
12	Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional	1) % Total Realisasi Capex	Persen	61
		2) Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional	Persen	100
13	Meningkatnya Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN	1) Rata-rata Penggunaan TKDN	Persen	52



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
14	Meningkatkan Kontribusi BUMN dalam Program Hilirisasi	1) Jumlah Program Hilirisasi yang Berhasil Djalankan	Jumlah	7
Prioritas 5: Pengembangan Talenta				
15	Terciptanya Inklasifitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN	1) % Top talent muda (< 42 tahun) dalam Nominated Talent	Persen	19
		2) % Perempuan dalam Nominated Talent	Persen	16

Program

		Anggaran
1. EI.4407	Pengembangan BUMN Sektor Industri Energi, Minyak dan Gas	Rp 1.595.063.000
2. EI.4408	Pengembangan BUMN Sektor Industri Mineral dan Batubara	Rp 2.045.969.000
3. EI.4409	Pengembangan BUMN Sektor Industri Kesehatan	Rp 1.426.475.000
4. EI.4410	Pengembangan BUMN Sektor Industri Manufaktur	Rp 1.316.229.000
5. EI.4412	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Keuangan	Rp 1.221.721.000
6. EI.4413	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	Rp 2.586.191.000
7. EI.4414	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Rp 1.083.636.000
8. EI.4415	Pengembangan BUMN Sektor Industri Perkebunan dan Kehutanan	Rp 1.371.229.000
9. EI.4416	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Pariwisata dan Pendukung	Rp 1.498.822.000
10. EI.4828	Pengembangan BUMN Sektor Industri Pangan dan Pupuk	Rp 1.471.572.000
11. EI.6601	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	Rp 1.271.229.000
12. EI.6602	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Logistik	Rp 1.923.171.000
Total Anggaran		Rp 18.811.307.000

Pihak Kedua
Menteri BUMN



Erick Thohir
NIP MT0004

Jakarta, 31 Desember 2023

Pihak Pertama
Wakil Menteri BUMN



Kartika Wirjoatmodjo
NIP WAMEN-K

Rencana Aksi Tahun 2024



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TARGET TRAJECTORY PERJANJIAN KINERJA WAKIL MENTERI BUMN

No	Prioritas/Sasaran Strategis/IKU	Target 2024	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Prioritas 1: Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia							
1	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham						
	1 Net Profit	240,90	52,67	106,22	171,32	240,90	Mendorong pencapaian <i>net profit</i> dengan mengoptimalkan <i>revenue stream</i> , meningkatkan efisiensi biaya serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Perusahaan secara periodik
	2 EBITDA Margin	22,36	21,69	21,90	22,23	22,36	Mendorong pencapaian EBITDA <i>margin</i> dengan mengoptimalkan <i>revenue stream</i> , meningkatkan efisiensi biaya serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Perusahaan secara periodik
	3 Return on Equity	7,00	1,69	3,33	5,23	7,00	Mendorong pencapaian ROE dengan mengoptimalkan <i>revenue stream</i> , meningkatkan efisiensi biaya serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Perusahaan secara periodik
2	Meningkatnya Peran BUMN dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan						





KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TARGET TRAJECTORY PERJANJIAN KINERJA WAKIL MENTERI BUMN

No	Prioritas/Sasaran Strategis/IKU	Target 2024	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	15,34	15,04	15,08	15,25	15,34	Mendorong penyaluran kredit kepada nasabah PNM Mekaar dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta didukung dengan implementasi manajemen risiko yang matang
3	Meningkatnya Daya Saing BUMN						
1	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	23	n.a	n.a	n.a	23	Mendorong pengembangan usaha BUMN di pasar internasional melalui ekspor hasil produksinya
4	Penguatan Struktur Modal BUMN						
1	Penyelesaian Target IPO/Tambahan Nilai Penawaran BUMN/Anak Usaha di Pasar Modal	1	n.a	n.a	n.a	1	Melaksanakan project unlock value sesuai target indicative timeline yang ditentukan melalui IPO/ Tambahan Nilai Penawaran BUMN/Anak Usaha BUMN di Pasar Modal
5	Terwujudnya Peran BUMN yang Optimal dalam Penurunan Emisi Karbon						
1	Pelaksanaan Inisiatif Program Transisi Energi Menuju Net Zero Emission	100	n.a	n.a	n.a	100	Mendorong BUMN untuk melakukan program transisi energi dalam rangka mendukung program netral karbon di Tahun 2060





KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TARGET TRAJECTORY PERJANJIAN KINERJA WAKIL MENTERI BUMN

No	Prioritas/Sasaran Strategis/IKU	Target 2024	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Prioritas 2: Inovasi Model Bisnis							
6	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN						
	1 Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi oleh BUMN	100	n.a	n.a	n.a	100	Mendorong penerapan model bisnis terintegrasi dan meningkatkan sinergi BUMN
7	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Wakil Menteri BUMN						
	1 Persentase Realisasi Anggaran	97	14	36	63	97	Monitoring dan evaluasi capaian persentase realisasi anggaran
	2 Nilai Self-Assesment SAKIP	82,14	n.a	n.a	n.a	82,14	Mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja unit Wakil Menteri BUMN yang baik dan andal
8	Terwujudnya Restrukturisasi BUMN yang Resilien						
	1 Jumlah Program Restrukturisasi Klaster BUMN	8	n.a	n.a	n.a	8	1. Mendorong penyelesaian program restrukturisasi BUMN 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif dengan BUMN
9	Terwujudnya BUMN yang unggul di tingkat domestik						





KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TARGET TRAJECTORY PERJANJIAN KINERJA WAKIL MENTERI BUMN

No	Prioritas/Sasaran Strategis/IKU	Target 2024	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
	1 Penyusunan Roadmap Integrasi BUMN Karya	60	n.a	n.a	n.a	60	Mendorong penyelesaian penyusunan roadmap integrasi BUMN Karya sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha BUMN
10	Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko						
	1 Penguatan manajemen risiko BUMN	100	n.a	n.a	n.a	100	Mendorong penguatan manajemen risiko BUMN dalam rangka pengelolaan bisnis yang lebih efektif
Prioritas 3: Kepemimpinan Teknologi							
11	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN						
	1 Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN	100	n.a	n.a	n.a	100	Mendorong percepatan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program digitalisasi BUMN
Prioritas 4: Peningkatan Investasi							
12	Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional						





KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TARGET TRAJECTORY PERJANJIAN KINERJA WAKIL MENTERI BUMN

No	Prioritas/Sasaran Strategis/IKU	Target 2024	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	% Total Realisasi Capex	61	12	23	39	61	Mendorong percepatan realisasi belanja modal melalui: 1. Monitoring program belanja modal perusahaan secara berkala 2. Memberikan dukungan koordinasi kebijakan dengan stakeholders terkait
2	Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional	100	n.a	n.a	n.a	100	Mendorong pencapaian target proyek dan program strategis nasional, melalui: 1. Monitoring proyek dan program strategis nasional secara berkala 2. Memberikan dukungan koordinasi kebijakan dengan stakeholders terkait
13	Meningkatnya Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN						
1	Rata-rata Penggunaan TKDN	52	n.a	n.a	n.a	52	Monitoring dan evaluasi realisasi penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) BUMN dalam pengadaan barang dan jasa
14	Meningkatkan Kontribusi BUMN dalam Program Hilirisasi						





KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TARGET TRAJECTORY PERJANJIAN KINERJA WAKIL MENTERI BUMN

No	Prioritas/Sasaran Strategis/IKU	Target 2024	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
	1 Jumlah Program Hilirisasi yang Berhasil Dijalankan	7	n.a	n.a	n.a	7	1. Mendorong percepatan program hilirisasi yang dijalankan oleh BUMN 2. Memastikan program hilirisasi dimaksud meningkatkan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan.
Prioritas 5: Pengembangan Talenta							
15	Terciptanya Inklusifitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN						
	1 % Top talent muda (≤ 42 tahun) dalam Nominated Talent	19	n.a	n.a	n.a	19	Meningkatkan persentase pekerja milenial dalam populasi <i>Nominated Talent</i>
	2 % Perempuan dalam Nominated Talent	16	n.a	n.a	n.a	16	Meningkatkan persentase pekerja perempuan dalam populasi <i>Nominated Talent</i>





KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

Jakarta, 31 Desember 2023
Wakil Menteri BUMN

Kartika Wirjoatmodjo
NIP WAMEN-K



Foto Kegiatan Selama Tahun 2024



Penandatanganan *Interim Agreement and The Deed of Establishment for The Battery Cell Manufacturing Joint Venture Company* antara PT Industri Baterai Indonesia dan CBL International Development Pte. Ltd.



Pendampingan Kunjungan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan percepatan Proyek Copper Smelter PT Freeport Indonesia



Peresmian *Commissioning* Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) oleh Presiden Republik Indonesia



Signing Ceremony Gold Bar Sales and Purchase Agreement
PT Freeport Indonesia dan PT Aneka Tambang Tbk



Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Timah Tbk Tahun 2024



Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bukit Asam Tbk Tahun 2024



Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2024



MOU PT PLN (Persero) dengan Huawei dan SDIC Power di Indonesia-China Business Forum 2025 di Cina untuk meningkatkan kemandirian energi nasional



Peluncuran *Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office* atau Rumah Perancangan Aksi Transisi Energi Nasional (PATEN)



Groundbreaking Pembangunan Pusat Ekosistem Transisi Energi di IKN



Peresmian *Hydrogen Refueling Station (HRS)* di Senayan



Signing Ceromony - Pertamina dan Siemens Energy siap Wujudkan Transisi Energi Berkelanjutan



Signing Ceromony - Pertamina dan Airbus Jajaki Kerja Sama Pengembangan Sustainable Aviation Fuel di Indonesia



Peresmian PLTS 1,51 MWp RDMP RU VI Balongan



Kunjungan Kerja Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, dan KBUMN dalam rangka Kick Off Program MANIS – Menuju Swasembada Gula Nasional PTPN Grup



Launching Program Digital Agritech PTPN Grup



Pelaksanaan Event International MotoGP 2024 Pertamina Mandalika
International Circuit



Pelaksanaan Event International Aquabike Jetski World Championsip
2024 Grand Prix of Lake Toba



Pelaksanaan Event International F1H20 Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 Balige – Lake Toba



Pelaksanaan Event International Perayaan Waisak 2568 BE di Candi Borobudur Jawa Tengah



Peresmian Bali Beach Convention dan Groundbreaking Alster Lake Clinic di KEK Sanur



PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya (4 Desember 2024)

Kertas Kerja Indikator Capaian Kinerja

1. Net Profit

No	BUMN	Target Net Profit 2024				Realisasi Net Profit 2024				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Asdep Bidang Jasa Logistik									
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	0,57	1,03	1,75	2,80	0,50	0,61	2,40	3,56	127,25%
2	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	0,17	0,41	0,55	0,61	0,12	0,36	0,48	0,58	95,93%
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	0,04	0,08	0,13	0,15	0,05	0,11	0,14	0,19	126,32%
4	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	0,14	0,42	0,57	0,61	0,39	1,10	1,76	2,03	333,06%
5	PT Pos Indonesia (Persero)	0,08	0,20	0,26	0,33	0,14	0,23	0,48	0,76	227,80%
7	PT Industri Kereta Api (Persero)	- 0,06	- 0,09	0,08	0,11	-0,02	-0,1	0,09	0,05	44,83%
8	Perum DAMRI	0,02	0,00	0,02	0,02	-0,004	0,005	0,00	0,00	25,13%
	TOTAL Asdep Bidang Logistik	0,96	2,05	3,36	4,62	1,17	2,31	5,36	7,17	155,15%
	Asdep Bidang Jasa Infrastruktur									
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	0,05	0,09	0,15	0,22	0,08	0,15	0,19	0,24	110,01%
2	PT Utama Karya (Persero)	-0,18	-0,15	-0,30	0,25	0,27	0,40	0,84	2,40	962,27%
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	0,01	0,02	0,03	0,07	0,01	0,01	0,07	0,30	418,31%
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	0,06	0,13	0,19	0,25	0,04	0,05	0,07	0,13	51,53%
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-1,21	-2,28	-2,16	-2,64	-1,06	-2,60	-3,61	-3,01	114,10%
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-1,08	-2,03	-2,67	-3,38	-1,19	-3,06	0,69	-1,99	58,85%
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	0,63	1,21	1,88	2,41	0,59	2,35	3,30	4,39	182,42%
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	0,38	0,64	1,52	2,67	0,47	0,50	0,72	0,86	32,12%
9	Perum Perumnas	-0,06	-0,06	-0,02	0,01	-0,05	-0,07	-0,07	0,63	4299,85%
	TOTAL Asdep Bidang Infrastruktur	-1,39	-2,44	-1,39	-0,14	-0,84	-2,28	2,19	3,94	900,00%
	Asdep Bidang Industri Manufaktur									
1	PT Len Industri (Persero)	0,07	0,21	0,42	0,69	-0,02	-0,06	0,01	0,74	106,80%
2	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	0,17	0,33	0,58	0,83	0,18	0,38	0,63	0,91	108,93%

No	BUMN	Target Net Profit 2024				Realisasi Net Profit 2024				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
	TOTAL Asdep Bidang Industri Manufaktur	0,24	0,54	1,00	1,53	0,16	0,32	0,64	1,65	107,96%
	Asdep Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun									
1	PT Taspen (Persero)	0,02	0,27	0,15	0,32	0,52	1,11	1,62	1,26	396,70%
2	PT Asabri (Persero)	-0,10	-0,25	-0,37	0,05	-0,01	-0,15	0,19	0,59	1124,00%
3	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	0,00	0,01	0,04	0,07	0,00	0,09	0,03	0,08	123,29%
4	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	0,77	1,61	2,74	3,32	0,38	1,16	0,84	1,01	30,60%
	TOTAL Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun	0,69	1,64	2,56	3,75	0,90	2,21	2,30	2,94	78,39%
	Asdep Bidang Jasa Keuangan									
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13,36	26,71	40,06	53,42	15,98	29,90	45,36	61,27	114,69%
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8,68	18,20	28,64	39,82	12,70	29,27	42,02	51,58	129,52%
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4,38	8,84	13,77	18,92	5,33	10,76	16,43	21,64	114,40%
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	0,67	1,27	1,96	2,89	0,86	1,50	2,08	3,03	104,92%
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan	27,08	55,02	84,43	115,04	34,87	71,43	105,90	137,52	119,53%
	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media									
1	Perum Jasa Tirta I	0,05	0,05	0,04	0,07	0,03	0,05	0,04	0,07	94,59%
2	Perum Jasa Tirta II	0,02	0,04	0,07	0,13	0,04	0,08	0,22	0,19	146,15%
3	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02	181,82%
4	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	-0,01	-0,03	0,00	-0,02	-0,01	-0,04	-0,06	-0,12	800,00%
5	PT Danareksa (Persero)	0,27	0,54	0,92	1,25	-0,06	0,49	0,50	1,31	104,63%
6	Perum Peruri	-0,12	-0,06	0,22	0,40	-0,10	-0,04	-0,08	0,17	42,29%
7	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	5,36	9,46	17,21	25,39	7,82	11,76	17,68	23,34	91,91%
	TOTAL Asdep Bidang Telekomunikasi dan Media	5,57	10,02	18,48	27,24	7,71	12,31	18,32	24,98	91,67%
	Asdep Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas									
1	PERTAMINA	11,13	22,27	33,40	44,53	11,13	20,98	41,57	45,50	102,18%

No	BUMN	Target Net Profit 2024				Realisasi Net Profit 2024				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
2	PLN	3,95	7,91	11,86	15,81	4,77	5,00	25,14	15,84	100,19%
	TOTAL Asdep Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas	15,09	30,17	45,26	60,34	15,90	25,98	66,71	61,34	101,66%
	Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara									
1	PT Krakatau Steel Tbk	0,04	0,08	0,16	0,27	-0,36	-0,98	-2,83	-2,40	-878,65%
2	MIND ID	2,63	5,26	10,52	17,53	9,67	18,63	30,43	37,95	216,53%
	TOTAL Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara	2,67	5,34	10,68	17,80	9,30	17,65	27,61	35,55	199,72%
	Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk									
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	0,61	1,22	2,44	4,06	2,53	3,90	6,96	8,62	212,00%
2	PT RNI (Persero)	-0,02	0,04	0,08	0,13	-0,07	-0,28	-0,40	0,09	73,25%
3	Perum Bulog	-0,07	0,14	0,27	0,46	0,12	0,81	-0,11	0,06	13,82%
	TOTAL Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk	0,52	1,39	2,79	4,65	2,58	4,43	6,45	8,77	188,78%
	Asdep Bidang Industri Kesehatan									
	PT Bio Farma (Persero)	0,009	0,02	0,04	0,06	0,092	0,182	-0,302	-1,156	1945,90%
	TOTAL Asdep Bidang Industri Kesehatan	0,009	0,018	0,036	0,059	0,092	0,182	-0,302	-1,156	8054,10%
	Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung									
1	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	0,07	0,13	0,27	0,44	0,14	0,39	0,53	0,54	121,89%
2	PT Aviassi Pariwisata Indonesia	0,32	0,63	1,27	2,11	0,31	0,62	1,11	2,29	108,43%
3	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	0,02	0,03	0,06	0,10	-1,38	-1,55	-1,96	0,29	283,36%
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung	0,40	0,80	1,59	2,66	-0,92	-0,54	-0,32	3,12	117,41%
	Asdep Industri Perkebunan dan Kehutanan									
1	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	0,71	1,41	2,12	2,83	0,06	0,45	1,90	3,26	115,36%
2	Perum Perhutani	0,13	0,26	0,39	0,52	0,15	0,22	0,30	0,30	57,69%
	TOTAL Asdep Industri Perkebunan dan Kehutanan	0,84	1,67	2,51	3,35	0,21	0,67	2,20	3,56	106,37%

No	BUMN	Target Net Profit 2024				Realisasi Net Profit 2024				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Total	52,67	106,22	171,32	240,90	71,14	134,67	237,05	289,37	120,12%

2. EBITDA Margin

No	BUMN	Target EBITDA 2024				Target Revenue 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Asdep Bidang Logistik								
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	2,13	4,08	6,04	8,51	6,20	12,44	18,91	25,84
2	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	0,28	0,68	0,99	1,10	0,94	2,20	3,39	4,62
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	0,13	0,27	0,40	0,53	1,21	2,47	3,90	5,26
4	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	0,92	2,12	3,34	4,67	5,42	11,83	18,63	25,97
5	PT Pos Indonesia (Persero)	0,29	0,69	0,91	1,15	1,21	1,70	0,92	1,02
7	PT Industri Kereta Api (Persero)	0,03	0,08	0,35	0,45	0,52	0,97	1,97	2,67
8	Perum DAMRI	0,05	0,07	0,13	0,17	0,33	0,66	1,00	1,31
	TOTAL Asdep Bidang Logistik	3,82	7,99	12,15	16,58	15,83	32,26	48,73	66,70
	Asdep Bidang Infrastruktur								
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	0,14	0,30	0,48	0,68	2,25	4,80	7,15	9,80
2	PT Hutama Karya (Persero)	1,26	1,88	2,88	4,23	6,44	14,43	20,35	26,54
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	0,21	0,55	0,95	1,48	2,19	5,50	9,51	17,00
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	0,07	1,58	2,48	3,12	5,02	10,22	15,54	21,18
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-0,16	-0,09	1,15	2,21	3,00	6,02	9,23	13,25
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	0,07	0,28	0,61	1,35	4,50	9,35	15,19	23,81
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2,83	5,88	8,99	12,11	4,24	8,86	13,41	18,29
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1,68	3,17	5,58	8,35	9,26	18,34	29,79	41,67
9	Perum Perumnas	0,04	0,14	0,28	0,43	0,41	1,00	1,71	2,51
	TOTAL Asdep Bidang Infrastruktur	6,16	13,70	23,40	33,96	37,32	78,51	121,90	174,04

Realisasi EBITDA 2024				Realisasi Revenue 2024			
TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
2,24	4,12	8,20	10,46	7,71	15,19	23,50	32,05
0,28	0,66	0,98	1,18	1,19	2,55	3,79	5,28
0,16	0,34	0,50	0,66	1,32	2,75	4,28	6,09
1,50	3,45	5,49	6,87	7,26	16,58	24,79	33,41
0,23	0,53	0,77	1,25	1,34	2,73	4,12	5,44
0,08	0,16	0,48	0,63	0,75	1,31	2,45	3,38
0,04	0,11	0,16	0,26	0,34	0,76	1,16	1,54
4,53	9,36	16,58	21,31	19,91	41,87	64,08	87,18
0,16	0,30	0,42	0,58	2,68	2,47	3,93	5,36
0,95	1,71	2,86	4,83	6,16	12,44	20,29	31,07
0,29	0,64	0,99	1,58	2,64	5,68	9,16	13,29
0,54	1,52	2,43		4,61	8,79	14,00	19,94
0,02	0,01	0,05	0,48	2,18	4,47	6,78	10,61
-0,37	-1,60	0,41	0,16	3,53	7,50	12,55	19,92
2,75	6,13	9,29	12,10	6,04	9,11	13,85	18,74
1,74	2,92	4,34	5,70	8,37	16,41	4,33	36,10
0,03	0,11	0,20	0,38	0,27	0,66	0,92	1,23
6,12	11,74	20,97	25,80	36,47	67,53	107,79	156,24

No	BUMN	Target EBITDA 2024				Target Revenue 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Asdep Bidang Industri Manufaktur								
1	PT Len Industri (Persero)	0,26	0,78	1,57	2,61	3,99	9,84	17,28	26,59
2	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	0,26	0,53	0,92	1,32	1,62	2,59	4,53	6,47
TOTAL Asdep Bidang Industri Manufaktur		0,52	1,31	2,49	3,93	5,60	12,42	21,81	33,06
	Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun								
1	PT Taspen (Persero)	0,13	0,50	0,49	0,79	4,68	9,72	14,81	19,89
2	PT Asabri (Persero)	-0,07	-0,19	-0,28	0,16	0,62	1,24	1,87	3,03
3	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	0,04	0,08	0,16	0,23	1,53	3,02	4,67	6,15
4	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	0,94	2,15	3,64	5,17	2,89	6,00	9,45	13,03
TOTAL Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		1,03	2,53	4,01	6,34	9,72	19,98	30,80	42,10
	Asdep Bidang Jasa Keuangan (BANK = PPOP)								
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	23,09	46,19	69,28	92,38	43,29	86,59	129,88	173,17
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15,76	33,09	51,17	70,41	28,72	59,16	92,05	126,98
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6,98	14,44	22,57	31,33	20,38	42,13	65,10	88,63
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,38	2,79	4,50	7,04	7,17	14,54	22,18	30,00
TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan		47,22	96,51	147,52	201,17	99,56	202,41	309,21	418,77
	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media								
1	Perum Jasa Tirta I	0,06	0,07	0,06	0,11	0,15	0,30	0,43	0,62
2	Perum Jasa Tirta II	0,05	0,07	0,11	0,23	0,20	0,44	0,67	0,93
3	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	0,01	0,02	0,03	0,03	0,06	0,13	0,25	0,39
4	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,10	0,12
5	PT Danareksa (Persero)	0,61	1,21	1,82	2,43	2,70	5,40	8,10	10,80
6	Perum Peruri	-0,03	0,11	0,52	0,81	0,40	1,06	2,26	3,69
7	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	15,38	32,02	50,42	66,19	27,94	58,96	91,92	125,13
TOTAL Asdep Bidang Telekomunikasi dan Media		16,07	33,51	52,97	69,80	31,48	66,35	103,73	141,68
	Asdep Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas								
1	PERTAMINA	45,29	90,59	135,88	176,53	295,70	591,41	887,11	1182,81

Realisasi EBITDA 2024				Realisasi Revenue 2024			
TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
0,33	0,77	1,33	2,72	3,09	7,96	13,39	27,72
0,27	0,57	0,94	1,38	1,36	2,83	4,53	6,58
0,60	1,34	2,27	4,10	4,45	10,79	17,91	34,30
0,64	1,37	2,02	1,79	4,78	9,64	14,45	19,41
0,02	-0,10	-0,10	0,71	0,63	1,18	1,84	2,57
0,02	0,12	0,07	0,20	1,52	3,64	5,04	5,33
0,61	1,55	1,29	0,49	2,27	5,19	6,81	8,32
1,29	2,94	3,28	3,17	9,20	19,66	28,14	35,63
31	57,04	87,51	113,06	67,10	125,40	189,67	262,90
21	43,54	66,81	70,63	34	69,63	106,76	107,03
8,18	16,44	25,29	34,82	21,32	43,10	65,67	90,51
2	1,09	4,18	5,97	9	16,98	25,32	34,36
61,95	118,12	183,78	224,48	128,94	255,11	387,42	494,80
0,04	0,08	0,08	0,13	0,12	0,26	0,40	0,70
0,08	0,17	0,28	0,27	0,22	0,54	0,78	1,07
0,01	0,02	0,03	0,04	0,11	0,22	0,35	0,49
0,00	-0,01	-0,02	-0,07	0,03	0,05	0,07	0,10
0,26	1,21	1,66	3,29	1,97	5,11	7,78	12,11
-0,04	0,11	0,31	0,61	0,50	1,22	2,04	3,77
19,42	33,31	56,63	75,34	37,43	75,29	112,22	151,14
19,78	34,89	58,97	79,60	40,37	82,69	123,63	169,38
42,39	71,78	135,53	182,87	288,14	587,54	894,59	1237,16

No	BUMN	Target EBITDA 2024				Target Revenue 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
2	PLN	21,13	42,27	63,40	91,67	131,19	262,38	393,57	536,83
TOTAL Asdep Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas		66,43	132,85	199,28	268,20	426,89	853,79	1.280,68	1.719,64
	Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara								
1	PT Krakatau Steel Tbk	0,24	0,48	0,97	1,62	3,18	6,35	12,70	21,17
2	MIND ID	4,63	9,26	18,52	30,87	19,77	39,53	79,06	131,77
TOTAL Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara		4,87	9,74	19,49	32,48	22,94	45,88	91,77	152,95
	Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk								
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	2,88	5,90	10,21	14,39	21,45	42,89	64,34	85,78
2	PT RNI (Persero)	0,19	0,34	0,58	0,96	4,89	9,78	14,67	19,56
3	Perum Bulog	0,40	0,70	1,20	1,99	13,09	26,19	39,28	52,38
TOTAL Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk		3,47	6,93	11,99	17,34	39,43	78,86	118,29	157,72
	Asdep Bidang Industri Kesehatan								
	PT Bio Farma (Persero)	0,24	0,48	0,97	1,61	2,12	4,23	8,47	14,11
TOTAL Asdep Bidang Industri Kesehatan		0,24	0,48	0,97	1,61	2,12	4,23	8,47	14,11
	Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung								
1	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	0,14	0,27	0,55	0,91	0,49	0,98	1,95	3,25
2	PT Aviata Pariwisata Indonesia	1,53	3,06	6,12	10,21	4,06	8,12	16,24	27,07
3	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1,54	3,08	6,16	10,26	5,91	11,83	23,65	39,42
TOTAL Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung		3,21	6,41	12,83	21,38	10,46	20,93	41,84	69,74
	Asdep Industri Perkebunan dan Kehutanan								
1	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2,52	5,04	7,56	10,08	15,42	30,84	46,25	61,67
2	Perum Perhutani	0,19	0,39	0,58	0,77	1,42	2,84	4,26	5,68
TOTAL Asdep Industri Perkebunan dan Kehutanan		2,71	5,43	8,14	10,85	16,84	33,68	50,51	67,35
Total		155,75	317,40	495,22	683,65	718,20	1.449,30	2.227,72	3.057,85

Realisasi EBITDA 2024				Realisasi Revenue 2024			
TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
23,69	42,94	88,50	101,50	129,44	262,06	402,56	356,17
66,08	114,72	224,03	284,37	417,58	849,60	1.297,15	1.593,33
0,02	0,01	-0,13	-0,28	3,76	7,29	9,95	15,46
12,34	24,76	39,86	50,52	25,29	58,38	99,82	145,06
12,36	24,77	39,73	50,24	29,05	65,67	109,77	160,52
2,90	6,24	10,96	13,56	17,24	37,09	58,86	81,56
0,11	0,06	0,23	0,63	3,44	5,48	10,41	18,36
0,62	1,43	0,61	0,54	21,24	35,55	45,20	57,96
3,62	7,73	11,80	14,73	41,93	78,12	114,46	157,88
0,45	0,85	0,66	-0,19	3,81	7,62	11,62	15,71
0,45	0,85	0,66	-0,19	3,81	7,62	11,62	15,71
0,29	1,01	1,01	1,12	0,85	0,69	1,01	3,67
2,30	7,52	7,52	11,28	6,30	4,79	7,52	30,50
2,67	6,03	6,03	15,19	11,30	7,22	6,03	55,00
5,26	14,56	14,56	27,59	18,45	12,70	14,56	89,17
1,8	4,7	8,3	12,4	10,3	21,9	38,7	54,5
0,217	0,343	0,489	0,49	1	2,1	3,44	4,6
2,02	5,04	8,79	12,89	11,30	24,00	42,14	59,10
184,05	346,06	585,41	748,10	763,94	1.515,36	2.296,71	3.053,25

Perhitungan EBITDA Margin

EBITDA Margin	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
TW I	21,69%	24,09%	111,09%
TW II	21,90%	22,84%	104,28%
TW III	22,23%	25,49%	114,66%
TW IV	22,36%	24,50%	109,59%

3. Return on Equity

No	BUMN	Target Net Profit 2024				Target Equity 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Asdep Bidang Logistik								
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	0,57	1,03	1,75	2,80	48,64	48,98	49,01	49,36
2	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	0,17	0,41	0,55	0,61	7,89	8,02	8,23	8,28
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	0,04	0,08	0,13	0,15	7,11	7,15	7,20	7,22
4	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	0,14	0,42	0,57	0,61	30,92	31,19	31,32	33,35
5	PT Pos Indonesia (Persero)	0,08	0,20	0,26	0,33	7,91	8,03	8,09	8,16
7	PT Industri Kereta Api (Persero)	-0,06	-0,09	0,08	0,11	0,21	0,17	1,34	1,37
	Perum Damri	0,02	0,00	0,02	0,02	0,85	0,83	0,84	0,84
TOTAL Asdep Bidang Logistik		0,96	2,05	3,36	4,62	103,53	104,37	106,04	108,59
	Asdep Bidang Infrastruktur								
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	0,05	0,09	0,15	0,22	2,30	2,35	2,41	2,45
2	PT Utama Karya (Persero)	-0,18	-0,15	-0,30	0,25	115,09	114,98	133,40	134,03
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	0,01	0,02	0,03	0,07	9,19	9,20	9,21	9,26
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	0,06	0,13	0,19	0,25	14,52	14,65	14,83	15,08
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-1,21	-2,28	-2,16	-2,64	8,57	11,60	11,29	10,68
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-1,08	-2,03	-2,67	-3,38	15,46	14,54	13,93	13,25
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	0,63	1,21	1,88	2,41	36,75	55,67	56,07	59,81

Realisasi Net Profit 2024				Realisasi Equity 2024			
TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
0,50	0,61	2,4	3,56	47,01	45,65	48,94	50,36
0,12	0,36	0,5	0,58	8,50	8,74	8,83	9,32
0,05	0,11	0,1	0,19	6,87	6,93	6,97	8,54
0,39	1,10	1,76	2,03	32,16	31,98	32,63	34,91
0,14	0,23	0,5	0,76	8,27	8,37	8,75	8,87
-0,02	-0,10	0,1	0,05	0,16	0,081	0,27305	1,20
-0,004	0,005	0,00465	0,00	1,26	1,27	1,27	1,44
1,17	2,31	5,36	7,17	104,23	103,02	107,66	114,64
0,08	0,15	0,19	0,24	1,86	2,51	2,54	2,61
0,23	0,40	0,84	2,40	116,89	135,63	136,07	137,62
0,01	0,01	0,07	0,30	9,24	9,25	9,31	9,76
0,04	0,05	0,07	0,13	15,31	15,25	15,20	15,28
-1,06	-2,60	-3,61	-3,01	10,63	9,08	8,09	8,68
-1,19	-3,06	0,70	-1,99	8,38	12,60	16,26	12,86
0,59	2,35	3,30	4,39	39,54	41,66	56,06	57,36

No	BUMN	Target Net Profit 2024				Target Equity 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	0,38	0,64	1,52	2,67	48,22	46,43	47,31	48,46
9	Perum Perumnas	-0,06	-0,06	-0,02	0,01	1,27	1,28	1,33	2,60
TOTAL Asdep Bidang Infrastruktur		-1,39	-2,44	-1,39	-0,14	251,37	270,69	289,79	295,63
	Asdep Bidang Industri Manufaktur								
1	PT Len Industri (Persero)	0,07	0,21	0,42	0,69	11,51	12,94	13,66	14,38
2	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	0,17	0,33	0,58	0,83	5,34	6,01	6,34	6,67
TOTAL Asdep Bidang Industri Manufaktur		0,24	0,54	1,00	1,53	16,84	18,95	20,00	21,05
	Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun								
1	PT Taspen (Persero)	0,02	0,27	0,15	0,32	11,52	12,49	12,96	13,34
2	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	0,00	0,01	0,03	0,07	2,72	2,77	2,81	3,86
3	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	0,77	1,61	2,74	3,32	45,97	50,20	51,29	51,64
TOTAL Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		0,79	1,89	2,93	3,70	60,21	65,45	67,07	68,84
	Asdep Bidang Jasa Keuangan								
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13,36	26,71	40,06	53,42	250,24	252,82	255,40	266,96
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8,68	18,20	28,64	39,82	192,90	203,39	214,62	226,54
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4,38	8,84	13,77	18,92	121,79	125,88	130,98	138,38
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	0,67	1,27	1,96	2,89	24,63	25,10	25,66	26,48
TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan		27,08	55,02	84,43	115,04	589,56	607,19	626,67	658,36
	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media								
1	Perum Jasa Tirta I	0,05	0,05	0,04	0,07	0,82	0,82	0,81	0,97
2	Perum Jasa Tirta II	0,02	0,04	0,07	0,13	1,23	1,24	1,27	1,53
3	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	0,00	0,01	0,02	0,01	0,20	0,21	0,21	0,34
4	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	-0,01	-0,03	0,00	-0,02	0,10	0,08	0,07	0,05
5	PT Danareksa (Persero)	0,27	0,54	0,92	1,25	8,95	17,89	26,84	41,60
6	Perum Peruri	-0,12	-0,06	0,22	0,40	3,17	3,22	3,48	4,24
7	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	5,36	9,46	17,21	25,39	132,62	118,92	126,85	157,39

Realisasi Net Profit 2024				Realisasi Equity 2024			
TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
0,47	0,50	0,72	0,86	48,31	47,75	43,36	48,25
-0,05	-0,07	-0,07	0,06	1,38	1,36	1,36	1,44
-0,88	-2,28	2,20	3,37	251,54	275,08	288,25	293,87
-0,02	-0,06	0,01	0,74	16,02	16,00	15,87	16,12
0,18	0,38	0,63	0,91	6,92	7,11	7,21	7,51
0,16	0,32	0,64	1,65	22,93	23,12	23,08	23,63
0,52	1,11	1,62	1,26	12,98	11,68	14,63	11,19
0,00	0,09	0,03	0,08	2,63	2,69	2,70	2,62
0,38	1,16	0,84	1,01	42,37	42,60	42,90	41,77
0,91	2,36	2,49	2,36	57,98	56,98	60,23	55,58
15,98	29,90	45,36	61,27	289,90	311,73	329,47	323,81
12,70	29,27	42,02	51,58	268,79	282,33	272,12	257,57
5,33	10,76	16,43	21,64	149,37	154,39	162,17	167,23
0,86	1,50	2,08	3,03	30,57	31,03	32,04	32,63
34,87	71,43	105,90	137,52	738,62	779,49	795,81	781,24
0,03	0,05	0,04	0,07	1,02	1,04	1,03	1,06
0,04	0,08	0,22	0,19	1,55	1,6	1,77	1,68
0,00	0,01	0,01	0,02	0,27	0,27	0,28	0,28
-0,01	-0,04	-0,06	-0,12	0,04	0,02	0,00	0,27
-0,06	0,49	0,50	1,31	40,31	41,81	41,83	42,05
-0,10	-0,04	-0,08	0,17	4,09	4,16	4,23	4,32
7,82	11,76	17,68	23,34	164,41	147,27	154,35	161,99

No	BUMN	Target Net Profit 2024				Target Equity 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
TOTAL Asdep Bidang Telekomunikasi dan Media		5,57	10,02	18,48	27,24	147,07	142,38	159,54	206,12
	Asdep Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas								
1	PERTAMINA	11,13	22,27	33,40	44,53	571,15	588,50	605,85	654,83
2	PLN	3,95	7,91	11,86	15,81	996,65	1001,80	1006,95	1024,63
TOTAL Asdep Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas		15,09	30,17	45,26	60,34	1567,80	1590,30	1612,80	1679,46
	Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara								
1	PT Krakatau Steel Tbk	0,04	0,08	0,16	0,27	8,93	8,93	8,93	8,93
2	MIND ID	2,63	5,26	10,52	17,53	138,58	138,58	138,58	138,58
TOTAL Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara		2,67	5,34	10,68	17,80	147,51	147,51	147,51	147,51
	Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk								
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	0,61	1,22	2,44	4,06	79,41	88,24	92,88	93,82
2	PT RNI (Persero)	-0,02	0,04	0,08	0,13	14,32	15,12	15,75	15,91
3	Perum Bulog	-0,07	0,14	0,27	0,46	8,91	9,40	9,80	9,90
TOTAL Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk		0,52	1,39	2,79	4,65	102,65	112,76	118,44	119,63
	Asdep Bidang Industri Kesehatan								
	PT Bio Farma (Persero)	0,01	0,02	0,04	0,06	19,90	19,90	19,90	19,90
TOTAL Asdep Bidang Industri Kesehatan		0,01	0,02	0,04	0,06	19,90	19,90	19,90	19,90
	Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung								
1	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	0,07	0,13	0,27	0,44	6,81	6,81	6,81	6,81
2	PT Aviast Pariwisata Indonesia	0,32	0,63	1,27	2,11	45,64	45,64	45,64	45,64
3	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	0,02	0,03	0,06	0,10	-10,66	-10,66	-10,66	-10,66
TOTAL Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung		0,40	0,80	1,59	2,66	41,79	41,79	41,79	41,79
	Asdep Industri Perkebunan dan Kehutanan								
1	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	0,71	1,41	2,12	2,83	72,88	72,88	72,88	72,88
2	Perum Perhutani	0,13	0,26	0,39	0,52	0,13	0,13	0,13	0,13

Realisasi Net Profit 2024				Realisasi Equity 2024			
TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
7,71	12,31	18,32	24,98	211,70	196,17	203,48	211,65
11,13	20,98	41,57	45,50	661,89	671,58	659,78	698,18
4,77	5,00	25,14	15,84	1016,45	1017,52	1032,35	1020,58
15,90	25,98	66,71	61,34	1678,34	1689,10	1692,13	1718,76
-0,36	-0,98	-2,83	-2,40	7,23	6,77	4,90	7,36
9,67	16,22	30,43	37,95	142,31	139,54	144,06	157,40
9,30	15,24	27,61	35,55	149,54	146,31	148,96	164,76
2,53	3,90	6,96	8,62	94,51	95,88	97,68	99,04
-0,07	-0,28	-0,40	0,09	16,50	16,05	15,48	16,43
0,12	0,81	-0,11	0,06	9,80	10,49	9,57	9,75
2,58	4,43	6,45	8,77	120,82	122,43	122,72	125,22
0,09	0,18	-0,30	-1,16	18,26	16,52	16,11	14,77
0,09	0,18	-0,30	-1,16	18,26	16,52	16,11	14,77
0,14	0,39	0,53	0,54	6,24	5,96	7,95	6,71
0,31	0,62	1,11	2,29	41,67	1,89	3,21	35,74
-1,38	-1,55	-1,96	0,29	-21,81	-6,85	9,19	-6,87
-0,92	-0,54	-0,32	3,12	26,10	-1,31	-0,77	35,58
0,06	0,45	1,90	3,26	71,72	73,66	72,68	73,69
0,22	0,22	0,30	0,30	12,62	12,47	12,48	12,39

No	BUMN	Target Net Profit 2024				Target Equity 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	TOTAL Asdep Industri Perkebunan dan Kehutanan	0,84	1,67	2,51	3,35	73,01	73,01	73,01	73,01
	Total	52,77	106,46	171,68	240,85	3.121,23	3.194,29	3.282,54	3.439,88

Realisasi Net Profit 2024				Realisasi Equity 2024			
TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
0,28	0,67	2,20	3,56	84,34	86,13	85,16	86,08
71,18	132,42	237,25	288,22	3.464,41	3.493,04	3.542,81	3.625,77

Perhitungan ROE

ROE	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
TW I	1,69%	2,05%	121,54%
TW II	3,33%	3,79%	113,74%
TW III	5,23%	6,70%	128,04%
TW IV	7,00%	7,95%	113,53%

4. Jumlah Nasabah Aktif Mekaar

No	Nama Program	Target Ketercapaian 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
	Asdep Bidang Jasa Keuangan				
1	Nasabah PNM Mekaar	15.046.864	15.081.852	15.254.556	15.345.896

Realisasi Ketercapaian 2024				Capaian
TW I	TW II	TW III	TW IV	
15.156.903	14.917.941	14.563.585	14.398.997	93,83%

5. Jumlah Negara Tujuan Ekspor

No	BUMN	Target Jumlah Negara Tujuan Ekspor 2024				Negara Tujuan Ekspor
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Asdep Bidang Logistik					
1	PT Industri Kereta Api (Persero)				2	New Zealand, Thailand
	TOTAL Asdep Bidang Logistik	-	-	-	2	
	Asdep Bidang Infrastruktur					

Realisasi Jumlah Negara Tujuan Ekspor 2024				Negara Tujuan Ekspor
TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	1	1	1	New Zealand
1	1,00	1,00	1,00	

1	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	8	8	9	9	Australia, Taiwan, Phillipine, Maldives, Srilanka, Fiji, Bangladesh, Timor Leste, USA	9	7	10	10	10	Australia, Bangladesh, Benin, Taiwan, Fiji, Fillipina, Maldives, Timor Leste, Malaysia, Hongkong	10
TOTAL Asdep Bidang Infrastruktur		8	8	9	9			7	10,00	10,00	10,00		
	Asdep Bidang Industri Manufaktur												
1	PT Len Industri (Persero)	6,00	12,00	14,00	16,00	Bangladesh, Brunei Darussalam, Canada, France, Malaysia, Pakistan, Philippines, Republic of Korea, Singapore, Spain, Brazil, Timor-Leste, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America.	12	13,00	15,00	17,00	19,00	Amerika Serikat, Australia, Belgium, Brazil, Brunei, Canada, China, France, German, Republic of Korea, Malaysia, Nepal, Philippines, Singapore, Spain, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom	14
TOTAL Asdep Bidang Industri Manufaktur		6,00	12,00	14,00	16,00			13,00	15,00	17,00	19,00		
	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media												
1	Perum Peruri				1	Sri Lanka		5,00	5	5	5	Peruri : Sri Lanka Barata : Mexico, USA, Mauritania, China	5
TOTAL Asdep Bidang Telekomunikasi dan Media		0,00	0,00	0,00	1,00			5,00	5,00	5,00	5,00		
Total Ekspor		14,00	20,00	23,00	28,00		23	26,00	31,00	33,00	30,00		30,00

6. Penyelesaian Target IPO/Tambahan Nilai Penawaran BUMN/Anak Usaha di Pasar Modal

No	Nama BUMN/ Anak BUMN	Target Ketercapaian 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
	Asdep Bidang Infrastruktur				
1	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	v			
		1	0	0	0
Total		1,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
-	1	-	-	Right Issue pd Bulan April 2024 (TW II). Periode rights issue berlangsung pada tgl 22 s.d. 26 April 2024
-	1	-	-	
-	1,00	-	-	

7. Pelaksanaan Inisiatif Program Transisi Energi menuju *Net Zero Emission*

Nama BUMN/ Anak BUMN	IKU	Target Ketercapaian 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
ASDEP EMIGAS		-	-	-	100,00%	
PERTAMINA	Pengembangan Bioethanol oleh Pertamina	-	-	-	100,00%	
	Tambahan Kapasitas Terpasang EBT oleh Pertamina				30,11	MW

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
-	-	-	182,06%	
n.a (22%) Keterangan: 1. Kajian teknis LAPI ITB telah selesai dilakukan dengan hasil <i>feasible</i> untuk dijalankan dengan kapasitas 30,000 kl/year (concern : <i>feedstock</i> , lingkungan, Lokasi) dan sudah diinformasikan ke Holding (Project Director I) 2. Kajian Fiskal dengan LPEM UI masih <i>on going</i> finalisasi <i>dashboard</i> untuk sensitivitas meliputi variabel campuran etanol, <i>demand</i> , dan kurs.	n.a (50%) Keterangan: 1. Kajian teknis LAPI ITB telah selesai dilakukan dengan hasil <i>feasible</i> untuk dijalankan dengan kapasitas 30,000 kl/year (concern : <i>feedstock</i> , lingkungan, Lokasi) dan sudah diinformasikan ke Holding (Project Director I) 2. Kajian Fiskal dengan LPEM UI masih <i>on going</i> finalisasi <i>dashboard</i> untuk sensitivitas meliputi variabel campuran etanol, <i>demand</i> , dan kurs.	n.a (100%) Kajian Roadmap dan Kajian Teknis telah selesai pada September 2024	n.a (100%) Kajian Roadmap dan Kajian Teknis telah selesai pada September 2024	
n.a (1,00 MW)	n.a (1,00 MW)	n.a (1,00 MW)	194,61% (58,6 MW)	

Nama BUMN/ Anak BUMN	IKU	Target Ketercapaian 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
PLN	Tambahan Kapasitas Terpasang EBT oleh PLN	-	-	-	142,08	MW
	Penyelesaian Roadmap Energy Transition (Green RUPTL)				100,00%	
ASDEP MINERBA		-	-	-	100,00%	
KRAKATAU STEEL	Penurunan Emisi Carbon di PTKS melalui Implementasi Efisiensi Energi dengan Penggunaan Solar Cell, penggantian Lampu Konvensional ke LED, Pemanfaatan Atap Transparan, serta Penggunaan Kompresor BFC	-	-	-	100,00%	
MIND ID	Penurunan Emisi Carbon di Grup MIND ID melalui re-baselining Road Map Dekarbonisasi, Nature Based Solution, serta Implementasi Efisiensi Energi	-	-	-	100,00%	
ASDEP IPP		-	-	-	0,90%	

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
n.a (11,56 MW)	n.a (152,25 MW)	n.a (169,12 MW)	333,62% (474 MW)	
n.a (30%)	n.a (60%)	n.a (80%)	100,00%	
-	-	-	100,00%	
n.a.	n.a.	n.a.	100% Ditandai dengan ketercapaian penurunan emisi karbon sebesar 4,62% dari Business as Usual (BAU) melalui program dekarbonisasi yang dilaksanakan	
n.a.	n.a.	n.a.	100% Ditandai dengan ketercapaian penurunan emisi karbon sebesar 4,53% dari Business as Usual (BAU) melalui program dekarbonisasi yang dilaksanakan	
n.a.	n.a.	-	100,00%	

Nama BUMN/ Anak BUMN	IKU	Target Ketercapaian 2024				Keterangan	Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Inisiatif Penurunan Emisi Karbon PI Group (dengan pelaksanaan REC di PKC dan PKG, serta Efisiensi Energi di seluruh PI Group)	-	-	-	100,00%		Telah dicapai penurunan emisi karbon untuk CO2 sebesar 35.409 ton atau 163% dari target Triwulan I 2024 sebesar 21.725 ton	Penurunan emisi karbon atas pelaksanaan REC di PKC dan PKG masing-masing mencapai 9.396 dan 11.275 ton CO2 atau 115,5% dan 100% dari target s.d. Juni 2024, serta Efisiensi Energi di seluruh PI Group mencapai 18.185 ton CO2 atau 156,5% dari target s.d. Juni 2024	Penurunan emisi karbon atas pelaksanaan REC di PKC dan PKG masing-masing mencapai 14.094 dan 16.913 ton CO2 atau 115,5% dan 100% dari target s.d. September 2024, serta Efisiensi Energi di seluruh PI Group mencapai 24.708 ton CO2 atau 135% dari target s.d. September 2024	Penurunan emisi karbon atas pelaksanaan REC di PKC dan PKG masing-masing mencapai 18.792 dan 22.550 ton CO2 atau 115,5% dan 100% dari RKAP 2024, serta Efisiensi Energi di seluruh PI Group mencapai 61.496 ton CO2 atau 238% dari RKAP 2024	
Total Capaian										146,89%	

8. Implementasi Model Bisnis dan Terintegrasi oleh BUMN

No	BUMN	Target Ketercapaian 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Asdep Bidang Logistik					
1	Implementasi Sinergi dan Integrasi Logistik Indonesia (Lead PT POS)				100%	
		0	0	0	100%	
	Asdep Bidang Industri Manufaktur					
1	PT Len Industri (Persero) - Implementasi bid management dan penyusunan RPerpres produk hukum lain mengenai penguatan Indhan				100%	
2	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) - Implementasi dashboard GRC terintegrasi antar anggota holding				100%	

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
45,29%	68,12%	73,62%	82,16%	Secara umum, progres PMO Sinergi dan Integrasi Logistik Ekosistem BUMN di tahun 2024 mencapai 82% dengan masing-masing capaian yaitu: a. Progres Sinergi Produk mencapai 85% 1) Sudah terdapat 42 rute piloting dengan cakupan hampir di seluruh wilayah Indonesia; 2) Tarif Competitiveness sebesar 3-11% terhadap tarif pada market eksisting; 3) SLA Competitiveness mencapai 30-41% lebih cepat dibandingkan dengan waktu pengiriman kompetitor. b. Progres Sinergi Pasar mencapai 80% 1) Pelaksanaan kontrak dengan cargo owner menghasilkan efisiensi tarif & SLA. Terdapat tiga kontrak di tahun 2024 yaitu Bulog untuk pengiriman beras warehouse to warehouse, Perhutani atas pengiriman ekspor produk nonkayu, serta PIHC dalam kerjasama warehouse. 2) Proof of Concept (POC) & Piloting (Biofarma & PTPN) 3) Pelaksanaan joint study terhadap rencana pengembangan ekosistem logistikstrategis di Kawasan Industri Terpadu Batang dan Terminal Teluk Lamong. c. Progres Sinergi Platform mencapai 82% Sedang dilakukan integrasi database lanjutan dengan BUMN LSP lainnya, seperti KADEX KAI dan My Cargo PELNI, dan lain-lain
				82%
	24%	74%	97%	Defend ID telah mengimplementasikan program optimasi model tata Kelola holding yang terintegrasi melalui Implementasi Bid Management. Pada tahun 2024, Defend ID telah mengesahkan pedoman strategis Bid Management dan telah diimplementasikan pada beberapa anggota holding Defend ID, namun pada PT Len – Induk, masih terdapat target efisiensi biaya yang belum tercapai dan pada PT Pindad proses ratifikasi pedoman Bid Management belum selesai dilaksanakan sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 94,4%. Selain itu, Defend ID juga telah melakukan penyusunan usulan RPerPres dengan pembahasan terakhir melibatkan KKIP, Asdep Manufaktur, Asdep PUU, dan Tim Wakil Menteri BUMN membahas terkait penguatan Industri Pertahanan sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 100%.
	60%	100%	100%	IDSurvey telah mengimplementasikan program peningkatan tata kelola Perusahaan yang terintegrasi melalui Implementasi Dashboard GRC. Dashboard GRC merupakan system aplikasi yang mengintegrasikan kinerja tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan IDSurvey, dengan modul yang tersedia berupa modul manajemen risiko, modul governance, dan modul compliance. Pada tahun 2024, Dashboard GRC telah selesai dibangun dan telah disosialisasikan kepada seluruh anggota holding IDSurvey sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 100%.

No	BUMN	Target Ketercapaian 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
		0,00	0,00	0,00	100%	
	Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun					
1	Pengembangan bisnis anorganik IFG Life				100%	
		0	0	0	100%	
	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media					
1	Integrasi Penerapan ERP Danareksa pada Anggota Holding				100%	
		0	0	0	100%	
	Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara					
1	PT Krakatau Steel: Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko				100%	
2	MIND ID: Penyusunan Pedoman dan Prosedur Terkait Dengan Project Risk Management Terintegrasi				100%	
		0	0	0	100%	
	Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk					
1	PT Pupuk Indonesia:Perbaikan Kebijakan/Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada Q2 2024 dengan target (i) Finalisasi usulan terkait Perbaikan Skema Penyaluran Pupuk Subsidi - 50% dan (ii) Keputusan (Presiden) terkait dengan Perbaikan Penyaluran Pupuk Subsidi dalam Ratas Presiden - 50%.				100%	
2	Perum BULOG dan PT Rajawali Nusantara Indonesia:Perbaikan Proses Bisnis dalam Penyelenggaraan CPP dengan Usulan Revisi Perpres 125/2022 pada Q2 2024 dengan target (i) Finalisasi usulan naskah akademik terkait Revisi Perpres 125/2022 tentang Penyelenggaraan CPP - 50% dan (ii)				100%	

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
			99%	
	100%	100%	100%	Pengembangan bisnis IFG Life yaitu terkait kepemilikan saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia oleh PT Asuransi Jiwa IFG telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN melalui S-209/MBU/04/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Persetujuan Pelepasan Penyertaan Modal Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Milik PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yaitu pelepasan saham PT BPUI (Persero) terhadap PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia sebesar 10% kepada PT Asuransi Jiwa IFG.
			100%	
25%	50%	75%	100%	Progress TW I 25% Progress TW II 50% Progress TW III 75%
			100%	
17,50%	31%	50,40%	90,00%	
25%	25%	25%	100%	
			95%	
50%	100%	100%	100%	
50%	100%	100%	100%	

No	BUMN	Target Ketercapaian 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Keputusan (Presiden) terkait dengan Revisi Perpres 125/2022 tentang Penyelenggaraan CPP - Izin Prakarsa/Surat Keputusan - 50%.					
		0,00	0,00	0,00	100%	
	Asdep Bidang Industri Kesehatan					
1	PT Bio Farma: Penataan Produk & Segmentasi Bisnis Holding Farmasi				100%	
		0	0	0	100%	
	Asdep Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan					
1	Perluasan Lahan Tebu dalam rangka Swasembada Gula Nasional				100%	
2	Perhutani: Peningkatan Kinerja rata-rata Finansial Anak Perusahaan				100%	
		0	0	0	100%	
	Asdep Bidang Jasa Pariwisata					
1	PT Aviata Pariwisata Indonesia: Model bisnis terintegrasi antara RS/Klinik dan hotel di KEK Sanur	0%			100%	

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
			100%	
Kajian Reorientasi Bisnis Bio Farma Group masih dalam proses penyusunan	Kajian Reorientasi Bisnis Bio Farma Group masih dalam proses penyusunan	Kajian Reorientasi Bisnis Bio Farma Group sudah disampaikan ke Menteri BUMN dan dalam proses penetapan	Kajian Reorientasi Bisnis Bio Farma Group sudah disampaikan ke Menteri BUMN dan dalam proses penetapan	
0	0	0	100%	
		Progres s.d. TW III: 172 rb Ha	Progres s.d. TW IV: 185 rb Ha	Dari target 181 Ha, realisasi s.d. TW IV seluas 185 Ha atau 102% dari target
65.12%	53.61%	55.69%	56.84%	
			102%	
0%	0%	0%	90%	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. KEK Sanur berencana menjadi pusat layanan kesehatan dan pariwisata terpadu kelas dunia. Untuk mendukung pencapaian tersebut, perlu adanya sistem yang terintegrasi antara rumah sakit/klinik dan hotel. PT Hotel Indonesia Natour/HIN sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Sanur, tengah membangun sistem terintegrasi yang mempermudah pengunjung untuk mendapatkan layanan kesehatan, akomodasi, dan transportasi dalam satu platform. Platform ini mencakup fitur untuk memesan layanan medis dari rumah sakit atau klinik secara real-time, pemesanan hotel yang terhubung dengan rumah sakit, serta integrasi dengan maskapai penerbangan. Selain itu, ada pula layanan eksklusif seperti pengawalan di bandara dan penjemputan pribadi.

No	BUMN	Target Ketercapaian 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
2	PT Aviast Pariwisata Indonesia: Model bisnis pendanaan terintegrasi untuk pengembangan bisnis hotel	0%			100%	
		2	0	0	100%	
Total		0,00	0,00	0,00	100%	

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman seamless bagi pengunjung dan memberikan kenyamanan bagi pasien yang membutuhkan layanan kesehatan serta akomodasi. Saat ini, sistem platform sudah selesai dan hanya tinggal tahap integrasi dengan hotel, dengan pencapaian sebesar 90%.
0%	50%	50%	100%	Sejalan dengan perkembangan holding hotel BUMN, PT Hotel Indonesia Natour (HIN) telah merencanakan pembentukan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) melalui InJourney Hospitality Fund (IHF), yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan untuk pengembangan sektor pariwisata dan perhotelan. Pembentukan DINFRA diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan alternatif bagi holding hotel BUMN dalam menghadapi tantangan pembiayaan pasca-COVID-19, yang meliputi terbatasnya sumber pembiayaan serta alokasi APBN yang berkurang. Dana ini akan digunakan untuk investasi berkelanjutan dalam pengembangan hotel-hotel BUMN. Proses penunjukan manajer investasi, yaitu PT Bahana TCW Investment Management, telah dilakukan, dan saat ini sedang berada dalam tahap registrasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Skema pembiayaan ini terdiri dari dua jenis, yakni Equity Like dan Debt Like, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan investasi. Indikator kinerja untuk pencapaian ini adalah terselesaikannya kajian pembentukan InJourney Hospitality Fund, yang telah berhasil diselesaikan dengan pencapaian 100%.
				95%
1,00	4,00	5,00	97,03%	

9. Persentase Realisasi Anggaran

Unit Kerja	Pagu Total	Blokir	optimalisasi	Pagu Net	Pemotongan/ Refocusing	Sisa Pagu	Realisasi	% Penyerapan
Asdep Bidang Logistik	1.923.171.000	521.858.000	99.978.000	1.501.291.000	- 66.099.000	1.435.192.000	1.434.916.980	99,98%
Asdep Bidang Infrastruktur	2.586.191.000	996.378.000	- 242.345.000	1.347.468.000	-108.888.000	1.238.580.000	1.209.399.401	97,64%
Asdep Bidang Industri Manufaktur	1.316.229.000	272.387.000	- 111.818.000	932.024.000	-	932.024.000	930.837.560	99,87%
Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun	1.083.636.000	242.014.000	- 112.502.000	729.120.000	90.000.000	819.120.000	804.276.781	98,19%
Asdep Bidang Jasa Keuangan	1.221.721.000	245.365.000	-	976.356.000	- 123.104.000	853.252.000	846.928.147	99,26%
Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	1.271.229.000	257.357.000	100.050.000	1.113.922.000	- 95.489.000	1.018.433.000	1.014.014.518	99,57%
Asdep Bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas	1.595.063.000	313.971.000	100.123.000	1.381.215.000	- 125.661.000	1.255.554.000	1.247.785.613	99,38%
Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara	2.045.969.000	538.968.000	- 97.951.000	1.409.050.000	-	1.409.050.000	1.408.870.412	99,99%
Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk	1.471.572.000	438.612.000	-	1.032.960.000	- 143.738.000	889.222.000	885.784.075	99,61%
Asdep Bidang Industri Kesehatan	1.426.475.000	260.806.000	-	1.165.669.000	- 95.378.000	1.070.291.000	1.061.319.006	99,16%

Unit Kerja	Pagu Total	Blokir	optimalisasi	Pagu Net	Pemotongan/ Refocusing	Sisa Pagu	Realisasi	% Penyerapan
Asdep Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan	1.371.229.000	264.155.000	- 98.911.000	1.008.163.000	98.911.000	1.107.074.000	1.106.444.262	99,94%
Asdep Bidang Jasa Pariwisata	1.498.822.000	-	-	1.498.822.000	- 63.000.000	1.435.822.000	1.433.724.134	99,85%
TOTAL	18.811.307.000	4.351.871.000	- 363.376.000	14.096.060.000	- 632.446.000	13.463.614.000	13.384.300.889	99,41%

10. Nilai Self-Assesment SAKIP

Tidak terdapat keterangan lebih lanjut terkait IKU ini. Penjelasan dapat dilihat pada Bab III.

11. Jumlah Program Restrukturisasi Klaster BUMN

BUMN	Satuan	Target Ketercapaian 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
ASDEP MINERBA	Jumlah Program	-	-	-	1
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk					
Penyesuaian kembali jadwal penyelesaian hutang PTKS (revisi/adendum MRA)	Waktu	-	-	-	Jun-24
ASDEP IPP	Jumlah Program	2	2	2	2
PT Pupuk Indonesia					
Restrukturisasi Keuangan Rekind (Tersusunnya Proposal Perdamaian/Prodan dalam proses Restrukturisasi) - Q1 2024	%	-	-	-	100%
PT Rajawali Nusantara Indonesia					
Restrukturisasi Keuangan ID FOOD (Persetujuan Rencana Penyelesaian Perusahaan) - Q1 2024	%	-	-	-	100%
ASDEP INKES	Jumlah Program	-	-	-	1
PT Bio Farma (Persero)					

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	1	1	1	
n.a.	n.a. (progress 55%)	n.a. (progress 68%)	95%	Ketidaktercapaian program sebesar 100% disebabkan karena belum terpenuhinya kesepakatan, sebagaimana masih terdapat 2 bank lender yang masih dalam tahap negosiasi sehingga penyelesaian target Penyesuaian kembali jadwal penyelesaian hutang PTKS (revisi/adendum MRA) yang seharusnya selesai 100% pada Juni 2024, menjadi hanya sebesar 95% hingga Desember 2024
2	2	2	2	
100% (terrealisasi dengan Homologasi pada 29 Januari 2024)	100%	100%	100%	
100% (terrealisasi dengan persetujuan Menteri BUMN pada 4 Maret 2024)	100%	100%	100%	
0	0	0	1	

BUMN	Satuan	Target Ketercapaian 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Restrukturisasi Keuangan Bio Farma Group	%	-	-	-	100%
ASDEP JPP	Jumlah Program	-	-		3
Penataan Industri Airline BUMN ke dalam Holding Pariwisata	%	-	-	-	100%
Penataan Portfolio Bisnis Bidang Usaha Penunjang Bandara	%	-	-	-	100%

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
Kajian Program Restrukturisasi Keuangan Bio Farma Group masih dalam proses penyusunan	Kajian Program Restrukturisasi Keuangan Bio Farma Group masih dalam proses penyusunan	Kajian Program Restrukturisasi Keuangan Bio Farma Group sudah melalui pembahasan dengan KBUMN dan dalam proses finalisasi	Kajian Program Restrukturisasi Keuangan Bio Farma Group sudah telah disampaikan kepada Menteri BUMN dan dalam proses penetapan	
0	2	2	2	
10%	25%	25%	90%	Hingga saat ini, pencapaian program ini telah mencapai 90%, dengan kajian terkait penggabungan Garuda Indonesia ke InJourney sudah dibahas secara mendalam. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antara perusahaan-perusahaan BUMN di sektor pariwisata, yang akan berkontribusi pada penguatan posisi Indonesia di pasar global. Pencapaian ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam penataan industri airline BUMN, meskipun terdapat perubahan arahan kebijakan. Penggabungan Garuda Indonesia ke InJourney tetap dianggap sebagai langkah strategis yang dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional, serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian nasional.
10%	70%	70%	100%	a. PT Integrasi Aviiasi Solusi Proses penataan subholding bandara dan layanan pendukung lainnya di bawah Holding Pariwisata dan Pendukung telah mencapai kemajuan yang signifikan. Pada 15 Desember 2023, telah diterbitkan surat persetujuan Menteri Nomor S-645/MBU/12/2023 yang menyetujui pembentukan Sub-Holding InJourney Aviation Services (IAS), yang mencakup perubahan nama Angkasa Pura Kargo menjadi IAS. Selain itu, pada 5 September 2024, Menteri BUMN juga menerbitkan Keputusan Nomor S-431/MBU/09/2024 mengenai penataan subholding bandara dan subholding airport services. Pembentukan berbagai entitas seperti IASH, IASGH, IASS, IASP, dan Angkasa Pura Support menjadikan IAS sebagai pemain global utama dalam industri jasa pendukung layanan penerbangan dan kargo, berpotensi menjadi top 5 global player pada tahun 2028. Pencapaian untuk inisiatif ini telah mencapai 100%. b. Integrasi Bandara Tahap II InJourney, sebagai induk holding pariwisata, telah

BUMN	Satuan	Target Ketercapaian 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
				melaksanakan penataan anak perusahaan melalui pembentukan subholding bandara, yang mencakup penggabungan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Rencana tersebut telah disetujui dengan terbitnya Surat Menteri BUMN Nomor: S-431/MBU/09/2024. Dengan penataan ini, PT Angkasa Pura Indonesia (Apindo) berhasil menjadi operator bandara terbesar kelima di dunia, yang berkontribusi pada peningkatan konektivitas domestik dan internasional, serta mengakselerasi dampak positif terhadap pertumbuhan PDB Indonesia. Penataan subholding bandara ini juga mendorong peningkatan investasi dalam sektor penerbangan dan pariwisata, menciptakan peluang kerja baru, serta memperkuat ekosistem logistik dan pariwisata. Pencapaian untuk kegiatan ini telah mencapai 100%.

BUMN	Satuan	Target Ketercapaian 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Optimalisasi Layanan Navigasi Penerbangan di Bandara Prioritas	%	-	-	-	100%
ASDEP MANUFAKTUR	Jumlah Program	-	-		1

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
82%	90,20%	90,20%	100%	Bandar udara Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai merupakan salah satu simpul jaringan transportasi sekaligus pintu gerbang kegiatan ekonomi nasional, sehingga bisa dianggap sebagai bandara prioritas di Indonesia. Pengembangan Bandara Soekarno Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai ditujukan untuk mendukung penguatan konektivitas nasional dengan dengan melakukan perbaikan dan penataan bandara. Pada tahun 2024, penyelesaian pembuatan kajian optimalisasi layanan navigasi Bandara Soekarno-Hatta, kajian metroplex di ruang udara Jakarta dan kajian SID/STAR di Bandara Ngurah Rai dianggap perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi layanan navigasi penerbangan di bandara prioritas. Target optimalisasi layanan navigasi penerbangan di bandara prioritas pada tahun 2024 telah terealisasi 100%, di mana hal ini dipengaruhi oleh 2 (dua) aspek sebagai berikut: a. Keterselesaian kajian optimalisasi layanan navigasi Bandara Soekarno-Hatta Kajian optimalisasi layanan navigasi Bandara Soekarno-Hatta hingga Desember 2024 telah selesai dan persetujuan konsep dan design operasi segregated mode telah selesai disusun, dan saat ini sedang dalam proses verifikasi Safety Risk Assessment (SRA) oleh Direktorat Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan terkait kesiapan ATC system di Bandara CGK. Seiring dengan hal tersebut, Perum LPPNPI dan PT Angkasa Pura Indonesia telah mengoptimalkan penggunaan realisasi penggunaan Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta hingga Desember 2024 tercapai sebesar 21,84% atau telah meningkat 374,78% dibandingkan penggunaan pada Januari 2024 yang sebesar 4,60%. Dengan capaian penggunaan Runway 3 tersebut akan berakibat pada optimalisasi pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas penerbangan, sehingga dapat meningkatkan on time performace penerbangan. b. Keterselesaian kajian metroplex di ruang udara Jakarta dan kajian SID/STAR di Bandara Ngurah Rai Pada bulan Juni tahun 2023, Perum LPPNPI dan Boeing Company menandatangani MoU kerja sama peningkatan keselamatan dan efisiensi penerbangan di Indonesia. Program partnership yang pertama adalah Jakarta Airspace Study (Metroplex) yang bertujuan untuk meninjau dan mendesain ulang prosedur penerbangan di ruang udara area Jakarta yang terdiri dari multi bandara seperti Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, dan Bandara Pondok Cabe, guna meningkatkan pengoperasian penerbangan yang aman, efektif dan efisien, serta penyesuaian prosedur pada wilayah udara Denpasar. Sampai dengan Desember 2024, kajian Metroplex dan Evaluasi SID/STAR tersebut telah selesai 100%, dan kajian tersebut telah dilakukan validasi oleh Direktorat Navigasi Perhubungan.
0	0	1	1	

BUMN	Satuan	Target Ketercapaian 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Restrukturisasi Keuangan Defend ID (penandatanganan MRA PT DI dan penandatanganan PK PT PAL)	%	-	-	-	100%

TOTAL	8
-------	---

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
		100%	100%	Program restrukturisasi Defend ID telah selesai berprogress sesuai dengan milestone tahun 2024. Program restrukturisasi pada BUMN sektor industri Manufaktur saat ini sedang berjalan pada Anak Perusahaan PT Len, yaitu PT DI dan PT PAL. Atas restrukturisasi keuangan PT DI telah dilakukan penandatanganan MRA pada tanggal 2 September 2024 dan 26 September 2024. Selanjutnya restrukturisasi keuangan PT PAL telah selesai dilaksanakan dan status kredit PT PAL telah meningkat menjadi Kolektibilitas-1 (Bank Mandiri) sedangkan BNI dan LPEI masih dalam proses review.

2,00	2,00	3,00	7,00
------	------	------	------

87,50%

12. Penyusunan Roadmap Integrasi BUMN Karya

No	Nama Program Restrukturisasi/Holding	Target Ketercapaian 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
	Asdep Bidang Infrastruktur				
1	Penyusunan Roadmap Integrasi BUMN Karya				60%
		0	0	0	60%
	Total	0,00	0,00	0,00	60%

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
			60%	Target Realisasi 60% pada TW IV sesuai Trajectory
0	0	0	1	
0,00	0,00	0,00	1,00	

13. Penguatan Manajemen Risiko BUMN

No	BUMN	Target Ketercapaian 2024	
		Organ Pengelola Risiko	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko
1	Asdep Bidang Logistik		
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	90%	100%
2	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	90%	100%
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	90%	100%

Realisasi Ketercapaian 2024	
Organ Pengelola Risiko	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko
	100%
97,87%	100%
100%	100%

No	BUMN	Target Ketercapaian 2024	
		Organ Pengelola Risiko	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko
4	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	90%	100%
5	PT Pos Indonesia (Persero)	100%	100%
7	PT Industri Kereta Api (Persero)	100%	100%
8	Perum DAMRI		
2	Asdep Bidang Infrastruktur		
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	94%	100%
2	PT Utama Karya (Persero)	91%	100%
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	60%	100%
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	74%	100%
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	90%	100%
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	55%	100%
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	85%	100%
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	44%	100%
9	Perum Perumnas	81%	100%
	Asdep Bidang Industri Manufaktur		
1	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	92%	100%
2	PT Len Industri (Persero)	93%	100%
	Asdep Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun		
1	PT Taspen (Persero)	90%	100%
2	PT Asabri (Persero)	90%	100%
3	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	90%	100%
4	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	100%	100%
5	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	90%	100%
	Asdep Bidang Jasa Keuangan		
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	90%	100%
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	90%	100%
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	90%	100%
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	90%	100%

Realisasi Ketercapaian 2024	
Organ Pengelola Risiko	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko
90%	100%
	100%
100%	100%
100%	94%
98%	99%
94%	100%
91%	100%
62%	100%
85%	100%
95%	100%
100%	100%
99%	100%
96%	100%
90%	93%
90%	99%
92%	100%
75%	90%
83%	95%
100%	100,00%
100,00%	100,00%
75,00%	100,00%
97%	100,00%
96,49%	100,00%
93%	100%
100%	100%
100%	100%
95%	100%
100%	100%
99%	100%

No	BUMN	Target Ketercapaian 2024	
		Organ Pengelola Risiko	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko
	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media		
1	Perum Jasa Tirta I	90%	100%
2	Perum Jasa Tirta II	90%	100%
3	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	90%	100%
4	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	90%	100%
5	PT Danareksa (Persero)	90%	100%
6	Perum Peruri	90%	100%
7	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	90%	100%
	Asdep Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas		
1	PERTAMINA	100%	100%
2	PLN	100%	100%
	Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara		
1	PT Krakatau Steel Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko		100%
2	MIND ID Penyusunan Pedoman dan Prosedur Terkait Dengan Project Risk Management Terintegrasi		100%
	Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk		
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	100%	100%
2	PT RNI (Persero)	90%	100%
3	Perum Bulog	90%	100%
	Asdep Bidang Industri Kesehatan		
	PT Bio Farma (Persero)	90%	100%
	Asdep Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung		
1	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia		100%
2	PT Aviassi Pariwisata Indonesia		100%
3	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk		100%

Realisasi Ketercapaian 2024	
Organ Pengelola Risiko	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko
110,00%	80%
106,83%	100%
110%	80%
25%	85%
100%	110%
92,91%	100%
110%	100%
94%	94%
100,00%	100%
100,00%	100%
100%	100%
92%	90%
97%	100%
95%	95%
100%	100%
83%	100%
96%	50%
93%	83%
97%	100%
97%	100%
100,00%	100,00%
100,00%	100,00%
100,00%	100,00%
100%	100%

No	BUMN	Target Ketercapaian 2024		Realisasi Ketercapaian 2024	
		Organ Pengelola Risiko	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	Organ Pengelola Risiko	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko
	Asdep Industri Perkebunan dan Kehutanan				
1	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)			51%	100,0%
2	Perum Perhutani			100%	100%
				76%	100%
		88%	100%	93%	97%

14. Implementasi Program Digitalisasi oleh BUMN

No	BUMN	Target Ketercapaian 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Asdep Bidang Logistik					
1	Platform Integrasi Logistik (Lead PT POS)				100%	
		0	0	0	100%	
	Asdep Bidang Infrastruktur					
1	Minimal INDI 4.0 Level Maturity				100%	
		0	0	0	100%	
	Asdep Bidang Industri Manufaktur					
1	PT Len Industri (Persero) - Otomatisasi proses produksi dan integrasi ERP Tahap-2 sesuai masterplan IT Defend ID				100%	
2	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) - Integrated Procurement System (IPS) IDSurvey				100%	

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan	
TW I	TW II	TW III	TW IV		
6	50,00%	62,50%	72,90%	81,66%	Sedang dilakukan onboarding data/integrasi database lanjutan dengan BUMN LSP lainnya
				81,66%	
6	100%	100%	100%	100,00%	
				100,00%	
1	18%	38,2%	71,19	96,27%	Holding Defend ID telah mengimplementasikan otomatisasi proses produksi dan integrasi ERP. Pada tahun 2024, PT Len-Induk telah 100% mengimplementasikan integrasi ERP, PT Dahana telah 100% menjalankan Go Live Sistem Informasi Persediaan & Integrasi dengan SAP, PT Dirgantara Indonesia telah 81% menjalankan implementasi CATS untuk process continuity final assembly line N219 dikarenakan proses procurement belum sepenuhnya selesai terpenuhi. PT Pindad telah 100% menjalankan otomatisasi divisi senjata, dan PT PAL telah 100% mengimplementasikan Manufacturing Execution System (MES) sehingga capaian indicator ini adalah sebesar 96,27%.
1	50%	100%	100%	100,00%	Holding IDSurvey telah mengimplementasikan program digitalisasi melalui Pembangunan integrated procurement system (IPS) IDSurvey. IPS IDSurvey dibangun untuk penguatan integrasi pengadaan ketiga entitas IDSurvey agar dapat berkolaborasi dengan lebih baik guna operasionalisasi pengadaan yang lebih efektif dan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar terhadap pertumbuhan perusahaan. Aplikasi IPS IDSurvey telah efektif beroperasi pada 26 Juni 2024, sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 100%.

No	BUMN	Target Ketercapaian 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
		0,00	0,00	0,00	100%	
	Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun					
1	Implementasi ERP				100%	
		0	0	0	1	
	Asdep Bidang Jasa Keuangan					
1						
		0	0	0	0	
	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media					
1	National Broadband Roll-Out Throughout Indonesia				100%	
		0	0	0	100%	
	Asdep Bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas					
1	PT Pertamina: Digitalisasi SPBU				100%	1.716 Jumlah SPBU yang terdigitalisasi
2	PT Pertamina: Implementasi MyPertamina untuk mendukung program subsidi tepat BBM & LPG				100%	6 juta transaksi dan 17 juta user downloader
		0	0	0	100%	
	Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara					
1	PT Krakatau Steel: Implementasi SAP KBI/CRM				100%	Juni 2024
2	MIND ID: Sertifikasi ISO 20000-1 Information Technology Service Management (ITSM)				100%	Desember 2024

	Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
				98,14%	
	25%	50%	75%	100,00%	
				100,00%	
	0	0	0	0,00%	
1				97,37%	
				97,37%	
	764 SPBU (n.a 44,52%)	1.006 SPBU (n.a 58,62%)	2.353 SPBU (n.a 137,12%)	8.035 SPBU (468,24%)	
	n.a (63,41%) Transaksi sebesar 1,38 juta atau 23%)	n.a (94%) Transaksi sebesar 4,8 juta atau 80% dari target, downloader sebesar 18,3 juta atau 108% dari target)	n.a. (129,5%) Transaksi sebesar 8,1 juta (135% dari target), downloader sebesar 21,1 juta 124% dari target.	172,64% Transaksi sebesar 12 juta (200% dari target), downloader sebesar 24,7 juta 145,29% dari target.	
				271,18%	
	n.a.	n.a. (progress 100%)	n.a. (progress 100%)	100,00%	
	n.a.	n.a. (Progress 25%)	n.a. (Progress 25%)	100,00%	

No	BUMN	Target Ketercapaian 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Implementation di MIND ID					
		0	0	0	100%	
	Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk					
1	PT Pupuk Indonesia: Implementasi Integrasi Supply Chain untuk Penyaluran Pupuk Subsidi (Visibilitas Produk Stok s.d. Titik Pelepasan ke Konsumen/Lini IV untuk Produk Subsidi) - Q4 2024				100%	
2	PT RNI: Implementasi Pengembangan aplikasi Dashboard Informasi & Monitoring Penyelenggaraan CPP - Q4 2024				100%	

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
			100,00%	
75% - Pada PT Pupuk Indonesia (Persero), implementasi Integrasi Supply Chain untuk Penyaluran Pupuk yang diukur dengan tingkat visibilitas stok sampai dengan titik pelepasan ke konsumen (Lini IV untuk produk subsidi) terealisasi 75% secara nasional.	84% - Pada PT Pupuk Indonesia (Persero), implementasi Integrasi Supply Chain untuk Penyaluran Pupuk yang diukur dengan tingkat visibilitas stok sampai dengan titik pelepasan ke konsumen (Lini IV untuk produk subsidi) terealisasi 84% secara nasional.	100% - Pada PT Pupuk Indonesia (Persero), implementasi Integrasi Supply Chain untuk Penyaluran Pupuk yang diukur dengan tingkat visibilitas stok sampai dengan titik pelepasan ke konsumen (Lini IV untuk produk subsidi) terealisasi 100% secara nasional.	100% - Pada PT Pupuk Indonesia (Persero), implementasi Integrasi Supply Chain untuk Penyaluran Pupuk yang diukur dengan tingkat visibilitas stok sampai dengan titik pelepasan ke konsumen (Lini IV untuk produk subsidi) terealisasi 100% secara nasional.	
29% - Implementasi pengembangan dashboard informasi & monitoring penyelenggaraan CPP pada PT Rajawali Nusantara Indonesia	68% - Implementasi pengembangan dashboard informasi & monitoring penyelenggaraan CPP pada PT Rajawali Nusantara Indonesia	78% - Implementasi pengembangan dashboard informasi & monitoring penyelenggaraan CPP pada PT Rajawali Nusantara Indonesia	100% - Implementasi pengembangan dashboard informasi & monitoring penyelenggaraan CPP pada PT Rajawali Nusantara Indonesia	

No	BUMN	Target Ketercapaian 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
3	Perum Bulog: Implementasi Pengembangan Dashboard Informasi Komoditas Pangan & Penyelenggaraan CPP - Q4 2024				100%	

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
n CPP pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) terealisasi 29%, melalui penyusunan desain sistem dengan proses bisnis dan kebutuhan data/informasi untuk penyelenggaraan CPP.	n CPP pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) terealisasi 68%, melalui penyusunan sistem menyesuaikan skema CPP yang baru dan CPP Minyak goreng melalui Nusindo sudah ditampilkan pada dashboard CPP (https://cppdash-v2.idfood.co.id/).	(Persero) terealisasi 78%, melalui penyusunan alur sistem menyesuaikan skema CPP yang baru dan CPP Minyak goreng melalui Nusindo sudah ditampilkan pada dashboard (https://cppdash-v2.idfood.co.id/).	(Persero) terealisasi 100%, melalui penyusunan alur sistem menyesuaikan skema CPP yang baru dan CPP Minyak goreng melalui Nusindo sudah ditampilkan pada dashboard (https://cppdash-v2.idfood.co.id/).	
55% - Implementasi pengembangan dashboard informasi komoditas pangan & penyelenggaraan CPP pada Perum BULOG	55% - Implementasi pengembangan dashboard informasi komoditas pangan & penyelenggaraan CPP pada Perum BULOG	55% - Implementasi pengembangan dashboard informasi komoditas pangan & penyelenggaraan CPP pada Perum BULOG terealisasi 55%.	100% - Implementasi pengembangan dashboard informasi komoditas pangan & penyelenggaraan CPP pada Perum BULOG terealisasi 55%, dengan progres rollout dan implementasi Dashboard Harga	

No	BUMN	Target Ketercapaian 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
		0,00	0,00	0,00	100%	
	Asdep Bidang Industri Kesehatan					
1	PT Bio Farma: Penyelesaian Joint Procurement System dan Implementasi Modul Manufacturing pada ERP Bio Farma 50% - Joint Procurement System 50% - Modul Manufacturing pada ERP				100%	
		0,00	0,00	0,00	100%	
	Asdep Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan					
1	PTPN III: Pemanfaatan digitalisasi dan teknologi untuk kegiatan <i>on farm</i> di 98 unit kebun (Implementasi Automation Weather Station (AWS))				100%	
2	Perhutani: Pemanfaatan teknologi citra satelit di KPH untuk perencanaan Sumber Daya Hutan				100%	
		0	0	0	100%	
	Asdep Bidang Jasa Pariwisata					
1	Implementasi Tourism Collaborative Platform tahap 3 pada PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero)				100%	

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
terrealisasi 55%.	terrealisasi 55%.		Komoditas dan Distribusi Pangan.	
			100,00%	
97,75% - Joint Procurement System, penyelesaian setelah dilakukan workshop 20% - Modul Manufacturing pada ERP, pengerjaan masih dalam proses	100% - Joint Procurement System 30% - Modul Manufacturing pada ERP, pengerjaan masih dalam proses	100% - Joint Procurement System 39% - Modul Manufacturing pada ERP, pengerjaan masih dalam proses	100% - Joint Procurement System 62% - Modul Manufacturing pada ERP, pengerjaan masih dalam proses	
0,00	0,00	0,00	90,75%	
75% (74 unit sudah terpasang)	81% (79 unit sudah terpasang)	91% (89 unit sudah terpasang)	133,7% (131 unit sudah terpasang)	
0,00	3 KPH	3 KPH	11 KPH	
			116,85%	
10	20	60	110,00%	Injourney telah sukses melanjutkan pengembangan Tourism Collaborative Platform (TCP) hingga tahap 3, yang menjadi salah satu inisiatif unggulan dalam transformasi digital sektor pariwisata. Fitur Booking System untuk transaksi pembelian melalui platform ini telah selesai dikembangkan dan mulai dioperasikan secara

No	BUMN	Target Ketercapaian 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
2	Perum LPPNPI: Pengembangan Aplikasi A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) pada Perum LPPNPI				100%	
		0	0	0	100%	
		0,00	0,00	0,00	1,00	
Total		0,00	0,00	0,00	1,00	15

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
				efektif pada tahun 2024. TCP dirancang untuk menghubungkan seluruh ekosistem pariwisata di Indonesia, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, dengan tujuan memberikan pengalaman wisata yang lebih personal, terintegrasi, dan imersif bagi wisatawan. Dengan platform ini, pelaku pariwisata dapat mengakses data inventori yang terintegrasi, memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang lebih responsif dan relevan bagi kebutuhan wisatawan
27	49	65	100,00%	AirNav Indonesia berhasil menyelesaikan pengembangan dan implementasi penuh Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi operasional penerbangan. Proses ini mencakup uji coba aplikasi hingga integrasi ke dalam IMANS Ecosystem Cloud, yang berjalan tanpa hambatan sepanjang tahun. A-CDM memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan di bandara, seperti maskapai penerbangan, otoritas bandara, dan penyedia layanan navigasi udara, sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Penyusunan dokumentasi sistem yang menjadi tahap akhir pengembangan juga berhasil diselesaikan pada Desember 2024, menjadikan A-CDM siap diimplementasikan secara menyeluruh di lingkungan operasional AirNav.
			105,00%	
2,00	4,00	7,00		
Total				127,54%

15. % Total Realisasi Capex

No	BUMN	Target % Realisasi Capex 2024				% Realisasi Capex 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Asdep Bidang Logistik	15%	25%	40%	65%	18,86%	27,76%	38,01%	73,98%
2	Asdep Bidang Infrastruktur	15%	30%	45%	60%	12,38%	20,27%	54,64%	53,52%
3	Asdep Bidang Industri Manufaktur	10%	35%	45%	65%	1,27%	17,4%	25,77%	57,80%
4	Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun	15%	25%	45%	60%	1,98%	11,24%	31,13%	70,93%
5	Asdep Bidang Jasa Keuangan	15%	30%	45%	60%	9,70%	23,8%	44%	85,10%
6	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	10%	25%	45%	70%	12,17%	28%	47%	70,41%

7	Asdep Bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas	10%	20%	40%	70%	13,35%	30,50%	49,54%	86,96%
8	Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara	10%	20%	40%	70%	4,16%	76%	38%	64,00%
9	Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk	10%	20%	40%	70%	20,28%	50%	85%	170,00%
10	Asdep Bidang Industri Kesehatan	10%	30%	45%	60%	13,04%	18,94%	39,94%	70,51%
11	Asdep Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan	10%	20%	40%	70%	6,20%	21,43%	32,90%	73,04%
12	Asdep Bidang Jasa Pariwisata	10%	20%	40%	70%	22,55%	46,79%	52%	70,00%
	Average	12%	23%	39%	61%	11,33%	26,65%	44,78%	78,85%

16. Pencapaian Target Proyek dan Program Strategis Nasional

No	Nama PSN	Target % Penyelesaian PSN 2024				Keterangan	% Realisasi Penyelesaian PSN 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Asdep Bidang Logistik										
1	Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)				100%		82,75%	94,51%	97,78%	98,88%	
2	Kawasan Terintegrasi Bakauheni (Distrik 1)				100%	53,73%	36,51%	38,09%	44,25%	52,4%	
					100%					76%	
	Asdep Bidang Infrastruktur										
1	Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun (design and Build) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo, SEKSI I PAKET 1.2 Klaten - Purwomartani (STA 22+300 s.d STA 42+375) (Scope Penyedia Jasa Adhi Karya (Persero), Tbk diluar Design)				100,00%	100,00%	39,37%	47,30%	56,02%	78,16%	
2	Pek. Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Nyia Kulon Progo Seksi 2 paket 2.2 : Purwomartani - Monjali STA 42+375 - STA 51+800				100,00%	100,00%	19,04%	31,37%	36,21%	44,64%	
3	Layanan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Paket 1 (Seksi 1 & Seksi 6)				100,00%	100,00%	12,48%	55,58%	67,06%	75,40%	
4	Tol Yogyakarta Bawen				100,00%	1,55%	16,67%	20,20%	21,96%	25,51%	
5	Kuala Tanjung - Parapat				100,00%	67,43%	94,00%	95,00%	95,62%	98,34%	
6	Pekanbaru - Padang (Seksi Sicincin - Padang)				100,00%	100,00%	58,76%	67,00%	78,90%	90,66%	

No	Nama PSN	Target % Penyelesaian PSN 2024				Keterangan	% Realisasi Penyelesaian PSN 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
7	Betung - Jambi				100,00%	33,09%	77,00%	86,00%	100,00%	14,17%	
8	Rengat - Pekanbaru (seksi Lingkar Pekanbaru)				100,00%	64,93%	11,00%	20,00%	28,04%	38,78%	
9	Kayu Agung - Palembang - Betung*				100,00%	8,45%	59,00%	59,00%	59,00%	49,21%	
10	Tol Serang-Panimbang Seksi 1 dan 2	85,80 %	90,86 %	95,42%	100,00%	100,00%	N/a	100,00%	87,00%	91,21%	Porsi WIKA 23%
11	Jalan Tol Bocimi Seksi 2	98,85 %	98,85 %	98,85%	100,00%	98,85%	N/a	100,00%	100,00%	100,00%	
12	Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2	95,29 %	95,29 %	95,29%	100,00%	95,29%	N/a	99,41%	100,00%	100,00%	
13	Jalan Tol KAPB Paket 2 Seksi 2 PMN	62,39 %	67,39 %	75,39%	100,00%	100,00%	72,01%	63,96%	63,96%	61,26%	Cut off dengan WST dialihkan BUJT ke HK, saat ini proses konstruksi lanjutan
14	Tol KAPB (2) Paket II Seksi 3 PMN	95,39 %	95,39 %	95,39%	100,00%	95,39%	0,00%	91,39%	93,62%	91,59%	Cut off dengan WST dialihkan BUJT ke HK, saat ini proses konstruksi lanjutan
15	Tol KAPB (2) Paket IV Seksi 3 PMN	8,63 %	17,63 %	29,63%	100,00%	100,00%	4,06%	5,47%	5,47%	5,11%	Cut off dengan WST dialihkan BUJT ke HK, saat ini proses konstruksi lanjutan
16	Tol KAPB Paket IV Seksi 3B PMN	97,02 %	97,02 %	97,02%	100,00%	97,02%	91,08%	92,01%	94,46%	92,01%	Cut off dengan WST dialihkan BUJT ke HK, saat ini proses konstruksi lanjutan
17	KAPB Paket IV Seksi 2A PMN	69,98 %	74,98 %	82,98%	100,00%	100,00%	70,90%	71,87%	71,87%	68,89%	Cut off dengan WST dialihkan BUJT ke HK, saat ini proses konstruksi lanjutan
19	Jakarta-Cikampek II Selatan	34,89 %	37,56 %	43,24%	100,00%	46,55%	33,77%	36,74%	42,81%	60,68%	
20	Probolinggo - Banyuwangi	35,72 %	46,17 %	54,38%	100,00%	60,23%	34,38%	44,03%	55,27%	60,51%	
21	Jogja Bawen				100,00%	30,76%	16,67%	20,20%	21,96%	25,51%	
22	Jogja Solo				100,00%	35,02%	29,39%	32,96%	35,56%	40,67%	
23	Akses Patimban	0,75 %	5,25 %	14,00%	100,00%	36,50%	-	0,00%	25,27%	34,07%	Porsi WIKA 53%
24	Tol Semarang - Demak 1B				100,00%	35,36%	7,71%	27,54%	24,16%	53,34%	
							39,33%	55,09%	59,31%	60,86%	
					100%						
	Asdep Bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas						86,37%	95,69%	96,79%	98%	
1	PT Pertamina: Pembangunan Teminal LPG Kupang Indonesia Timur				100%	Q2 2024: Selesai Konstruksi	83%	85,77%	90,34%	92,06%	
2	PT Pertamina: Pengembangan Kilang RDMP RU V Balikpapan - ISBL OSBL				100%	100% (Revamp unit onstream Q4 2024)	89,72%	97,40%	100,00%	100,00%	
3	PLN: Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan				100%	99,6% Rasio Elektrifikasi Nasional	99,80%	99,81%	100,02%	100,03%	
		0	0	0	100%					97%	

No	Nama PSN	Target % Penyelesaian PSN 2024				Keterangan	% Realisasi Penyelesaian PSN 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara										
1	PT Krakatau Steel: Commencement proyek pengoperasian kembali fasilitas Iron & Steel Making - Blast Furnace				100%	Desember 2024	24%	60%	60%	60%	
2	MIND ID: Commercial Operation Date (COD) Proyek Copper Smelter				100%	Desember 2024	0%	50%	75%	100%	
3	MIND ID: Penyelesaian Akuisisi Saham Vale dan Pengembangan Bisnisnya						110%	100%	100%	100%	
		0	0	0	100%					87%	
	Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk										
1	PT Pupuk Indonesia: Proyek Kawasan Industri Pupuk - Fakfak Papua Barat (Penyusunan FS Kawasan pada Q4 2024)				100%		Proses untuk Studi Lahan (penyelidikan tanah lanjutan dan rekomendasi (cavity,dll) oleh BRIN)		Penunjukan TASK Cikaldana sebagai konsultan untuk Feasibility Study (FS) dilakukan pada Agustus 2024, dengan tanggal efektif pada 13 September 2024 dan durasi selama 60 hari, sehingga diharapkan selesai pada minggu pertama November 2024. Laporan pendahuluan terkait Feasibility Study kawasan telah disampaikan pada 18 September 2024. Penyusunan	Penyusunan Feasibility Study (FS) Kawasan Industri Pupuk Fakfak mencapai progres 95%. Hal ini ditunjukkan dari penyelesaian laporan studi cavity oleh BRIN pada 23 Juli 2024 dengan hasil studi bahwa terdapat cavity pada Opsi Lokasi Fior-1 (area 40,22 ha) dengan volume sebesar ±120.946 m3 sehingga memerlukan biaya penanganan melalui chemical grouting untuk mencegah potensi terjadinya sinkhole. Untuk mengurangi biaya dalam penanganan cavity, maka saat ini juga tengah dilakukan survei kondisi tanah di sebelah Utara mendekati laut untuk alternatif lokasi sebagai Opsi Lokasi Fior-2. Hasil preliminary menunjukkan bahwa risiko cavity pada Opsi Lokasi Fior-2 tidak signifikan berbeda dengan Opsi Lokasi Fior-1. Lebih lanjut, Laporan pendahuluan terkait Feasibility Study Kawasan telah disampaikan pada 18 September 2024. Penyusunan exercise kelayakan untuk Pabrik Ammonia-Urea di opsi lokasi Fior-1 telah selesai. Penyusunan FS Kawasan Industri dalam proses finalisasi oleh konsultan TASK Cikaldana.	

No	Nama PSN	Target % Penyelesaian PSN 2024				Keterangan	% Realisasi Penyelesaian PSN 2024				Keterangan
		TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
									exercise kelayakan untuk Pabrik Ammonia-Urea di opsi lokasi Fior-1 telah selesai, sementara untuk opsi lokasi Fior-2 masih menunggu hasil studi teknis lahan dan ditargetkan selesai pada Januari 2025.		
		0,00	0,00	0,00	100%					95%	
	Asdep Bidang Industri Kesehatan										
1	-										
		0	0	0	0						
	Asdep Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan										
1	PT Perkebunan Nusantara III (Persero): Proyek Pembangunan Pabrik Minyak Goreng II				100%	Desember 2024	92%	94.06%	93.09%	100%	
		0	0	0	1					100%	
	Asdep Bidang Jasa Pariwisata										
1	PT Aviati Pariwisata Indonesia: Optimalisasi Aset dan Kolaborasi Ekosistem				100%		100%	100%	100%	100%	Penyelesaian revitalisasi Hotel GIBB dan Convention Center di KEK Sanur telah terlaksana dan telah beroperasi sebagai The Meru Sanur pada Februari 2024
2	PT Aviati Pariwisata Indonesia: Pembentukan Dana Kepariwisataaan (Tourism Fund)				100%		20%	75%	75%	90%	Rancangan Peraturan Presiden tentang Indonesia Quality Tourism Fund sudah disusun, namun masih terdapat kendala pengesahan perpres oleh Presiden terpilih
		0	0	0	100%					95%	
		48%	55%	61%	100%		50,34%	63,38%	66,87%	71,09%	

17. Rata-rata Penggunaan TKDN

Realisasi % Rata-rata Penggunaan TKDN

No	BUMN	% Penggunaan PDN
Asdep Bidang Logistik		
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	21,00%
2	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	69,86%
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	47,86%
4	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	83,42%
5	PT Pos Indonesia (Persero)	70,00%
6	PT Industri Kereta Api (Persero)	37,14%
7	Perum DAMRI	30,75%
TOTAL Asdep Bidang Logistik		57,84%
Asdep Bidang Infrastruktur		
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	77%
2	PT Hutama Karya (Persero)	91%
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	88%
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	71%
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	100%
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	84%
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	99%
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	94%
9	Perum Perumnas	100%
TOTAL Asdep Bidang Infrastruktur		86,93%
Asdep Bidang Industri Manufaktur		
1	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	63%
2	PT Len Industri (Persero)	48%
TOTAL Asdep Bidang Industri Manufaktur		49,14%
Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		
1	PT Taspen (Persero)	77,22%
2	PT Asabri (Persero)	87,59%
3	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	50,67%

TW I	TW II	TW III	TW IV
56,57%	49,73%	25,35%	43,02%
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7,23%	82,24%	78,93%	77,45%
98,62%	79,25%	93,92%	95,01%
100,00%	100,00%	76,78%	78,10%
56,90%	93,23%	94,79%	63,71%
34,80%	81,87%	40,00%	11,19%
76,25%	79,23%	77,87%	78,84%
100,00%	100,00%	#DIV/0!	100,00%
90,94%	93,44%	94,35%	99,64%
83,78%	100,00%	95,98%	100,00%
99,01%	100,00%	#DIV/0!	100,00%
100,00%	75,21%	99,61%	99,47%
89,76%	612,94%	482,81%	99,64%
99,77%	99,63%	99,51%	99,17%
92,36%	92,28%	92,59%	93,01%
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
94,14%	97,78%	98,26%	98,03%
59,13%	58,35%	59,27%	30,63%
54,81%	9,07%	25,15%	64,39%
54,92%	9,93%	26,84%	32,66%
82,82%	84,04%	85,17%	87,51%
99,21%	99,91%	95,37%	97,68%
80,81%	71,97%	90,48%	82,44%

4	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	72,44%
TOTAL Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		74,23%
Asdep Bidang Jasa Keuangan		
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	60,00%
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	64,00%
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	60,00%
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	60,00%
TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan		60,00%
Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media		
1	Perum Jasa Tirta I	60,46%
2	Perum Jasa Tirta II	68,65%
3	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	88,89%
4	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	88,89%
5	PT Danareksa (Persero)	57,68%
6	Perum Peruri	72,09%
7	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	59,26%
TOTAL Asdep Bidang Telekomunikasi dan Media		60,55%
Asdep Bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas		
1	PERTAMINA	42,30%
2	PLN	36,93%
TOTAL Asdep Emigas		39,62%
Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara		
1	PT Krakatau Steel	40,00%
2	MIND ID	40,00%
TOTAL Asdep Minerba		40,00%
Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk		
1	PT Pupuk Indonesia	40,00%
2	PT RNI	n.a.
3	Perum Bulog	n.a.
TOTAL Asdep IPP		40,00%

94,85%	67,84%	67,01%	69,83%
84,90%	81,07%	81,82%	83,87%
100,00%	97,43%	95,56%	95,90%
76,89%	78,47%	71,72%	71,81%
95,93%	97,47%	96,58%	97,20%
78,35%	64,33%	61,76%	55,53%
91,62%	89,64%	86,43%	86,29%
74,29%	70%	70%	44,49%
97,83%	78%	78%	68,89%
56,25%	62%	62%	58,91%
#VALUE!	100%	100%	100,00%
78,89%	57%	57%	71,33%
92,13%	91%	91%	82,91%
59,63%	57%	57%	61,47%
64,92%	63,03%	63,43%	65,26%
47,00%	73,40%	73,00%	71,20%
46,74%	50,69%	47,12%	53,90%
46,87%	46,87%	46,87%	46,87%
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	55,58%
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	63,11%
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	59,35%
73,48%	71,73%	69,22%	65,82%
n.a.	n.a.	#VALUE!	#DIV/0!
n.a.	n.a.	#VALUE!	#DIV/0!
73,48%	71,73%	#VALUE!	65,82%

	Asdep Bidang Industri Kesehatan	
1	PT Bio Farma	37,19%
Total Asdep ITF		37,19%
	Asdep Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan	
1	PTPN III	40,00%
2	Perhutani	40,00%
Total Asdep IPK		40,00%
	Asdep Bidang Jasa Pariwisata	
1	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	15,00%
2	PT Aviastar Pariwisata Indonesia	67,00%
3	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	55,00%
Total Asdep JPP		45,67%
Total		52,60%

38,13%	35,95%	46,41%	41,30%
38,13%	35,95%	46,41%	41,30%
		#DIV/0!	65,82%
		#DIV/0!	69,42%
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	67,62%
n.a.	48,40%	#DIV/0!	44,74%
86,97%	92,21%	79,47%	79,51%
2,83%	60,13%	67,70%	56,82%
44,90%	66,91%	#DIV/0!	60,36%
68,97%	73,97%	80,30%	83,23%

18. Jumlah Program Hilirisasi yang Berhasil Dijalankan

Nama BUMN/ Anak BUMN	Target Ketercapaian 2024				Keterangan
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
ASDEP EMIGAS	-	-		3	
PERTAMINA	-	-	-		
Proyek Pengembangan Olefin Complex PT TPPI	-	-	-	1	100% (FID Preparation + Approval Q4 2024)

Realisasi Ketercapaian 2024				Keterangan
TW I	TW II	TW III	TW IV	
0	0	0	3	
n.a (80%)	n.a (85%)	n.a (90%)	100%	Target dihitung tahunan

Implementasi Bioethanol Melalui Produk Pertamina Green 95	-	-	-	1	100 SPBU yang terimplementasi produk Pertamina Green 95
PLN	-	-	-		
Jumlah Terpasang SPKLU				1	900 Total Unit Charger
ASDEP MINERBA	-	-		1	1
MIND ID	-	-		1	1
Mechanical Completion proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) PT Indonesia Asahan Aluminium				1	Oktober 2024
ASDEP ITF	-	-	-	1	1
Jumlah item Obat dan BMHP yang dipasok dari BUMN Farmasi ke IHC	-	-	-	1	600 Jumlah Produk
ASDEP KEBUN HUTAN	-	-	-	2	2
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	-	-			
Pembangunan Pabrik Minyak Goreng II				1	Desember 2024
Perum Perhutani					
Penjualan GTD	-	-		1	Rp0,05 Miliar

Jumlah program hilirisasi yang berhasil dijalankan				7
--	--	--	--	---

n.a (52%) 52 SPBU	n.a (90%) 90 SPBU	n.a (99%) 99 SPBU	106% 106 SPBU	Target dihitung tahunan
n.a (58 Unit Charger)	n.a (474 Unit Charger)	n.a (728 Unit Charger)	177,56% 1598 unit	Target dihitung tahunan
			1	
25%	25%	100,00%	100%	
-	-	-	1	
456 Produk	457 Produk	519 Produk	1251 Produk	
			2	
92%	94.06%	93,09%	100%	
n/a				
80%	79,40%	89.09%	122%	Rp 1,51 Triliun

59,91%	63,65%	91,58%	7
--------	--------	--------	---

19. % Top Talent Muda (<42 tahun) dalam Nominated Talent

No	BUMN	Target 2024	Realisasi 2024			
			Realisasi s.d TW I	Realisasi s.d TW II	Realisasi s.d TW III	Realisasi s.d TW IV
1	Asdep Bidang Logistik	14%	13,00%	21,00%	24,00%	23,91%
2	Asdep Bidang Infrastruktur	28%	38,68%	43,15%	38,44%	41,51%
3	Asdep Bidang Industri Manufaktur	37%	29,10%	34,89%	38,49%	39,51%

No	BUMN	Target 2024	Realisasi 2024			
			Realisasi s.d TW I	Realisasi s.d TW II	Realisasi s.d TW III	Realisasi s.d TW IV
4	Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun	20%	31,00%	37,00%	41,00%	40,65%
5	Asdep Bidang Jasa Keuangan	15%	20,00%	19,00%	20,00%	23,00%
6	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	10%	19,00%	19,00%	19,00%	22,31%
7	Asdep Bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas	17,55%	17,77%	27,48%	28,36%	29,63%
8	Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara	15%	n.a	25,50%	25,50%	31,00%
9	Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk	16%	n.a	n.a	n.a	21,14%
10	Asdep Bidang Industri Kesehatan	25%	35,44%	16,00%	16,00%	16,00%
11	Asdep Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan	21%	n.a	20,28%	20,28%	20,28%
12	Asdep Bidang Jasa Pariwisata	29%	20,00%	36,67%	23,19%	34,67%
	Average	21,75%	24,89%	27,27%	26,75%	28,63%

20. % Perempuan dalam Nominated Talent

No	BUMN	Target 2024	Realisasi 2024			
			Realisasi s.d TW I	Realisasi s.d TW II	Realisasi s.d TW III	Realisasi s.d TW IV
1	Asdep Bidang Logistik	15%	19,00%	21,00%	22,00%	20,59%
2	Asdep Bidang Infrastruktur	22%	15,32%	14,61%	20,66%	17,74%
3	Asdep Bidang Industri Manufaktur	21%	18%	21%	22,46%	23,30%
4	Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun	20%	30%	36%	38%	37,89%
5	Asdep Bidang Jasa Keuangan	20%	27%	25%	28,0%	29,00%
6	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	14%	26%	27%	27%	26,92%
7	Asdep Bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas	21,00%	9,62%	26,67%	26,45%	26,65%
8	Asdep Bidang Industri Mineral dan Batubara	10%	n.a	28,50%	28,5%	23%
9	Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk	19%	n.a	n.a	n.a	22,07%
10	Asdep Bidang Industri Kesehatan	20%	29%	37%	37%	37%
11	Asdep Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan	18%	n.a	20,28%	20,28%	20,28%

No	BUMN	Target 2024	Realisasi 2024			
			Realisasi s.d TW I	Realisasi s.d TW II	Realisasi s.d TW III	Realisasi s.d TW IV
12	Asdep Bidang Jasa Pariwisata	13%	5,67%	14,67%	14,67%	16%
	Average	15,24%	20%	23%	26%	25,04%